

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
1.5 Maksud dan Tujuan	6
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3. Aspek Pelayanan Umum	58
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	92
2.5. Pencapaian Target Indikator 15 (Lima Belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM)	108
BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah	1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan	11
3.3 Kerangka Pendanaan	15
BAB 4 ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS.....	1
4.1 Permasalahan Pembangunan	1
4.2 Isu-Isu Strategis	7
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	1
5.1 Visi	1
5.2 Misi	2
5.3 Tujuan dan Sasaran	7
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1



6.1 Strategi Pembangunan Daerah	1
6.2 Arah Kebijakan.....	10
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	1
7.1 Kebijakan Umum.....	1
7.2 Program Prioritas	6
BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	1
BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	1
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	1
10.1 Program Transisi.....	1
10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	1
10.3 Penutup.....	3



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

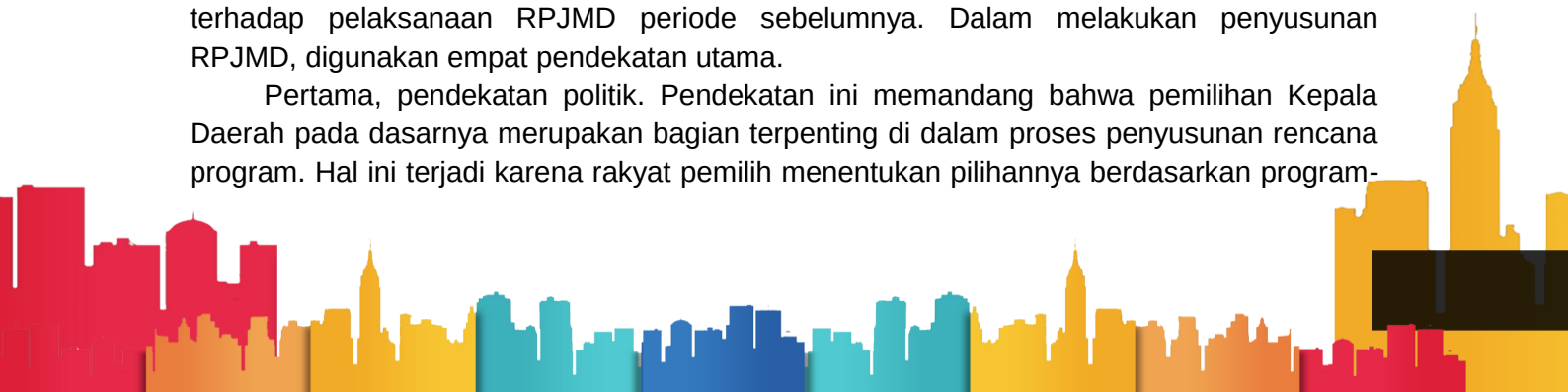
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kota Mojokerto juga harus diakomodir dalam RPJMD Kota Mojokerto. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-



program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas PERANGKAT DAERAH, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kota Mojokerto. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Mojokerto ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:
 - 1) Landasan idiil Pancasila
 - 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan operasional sebagai berikut :
 - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



- 4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 23) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



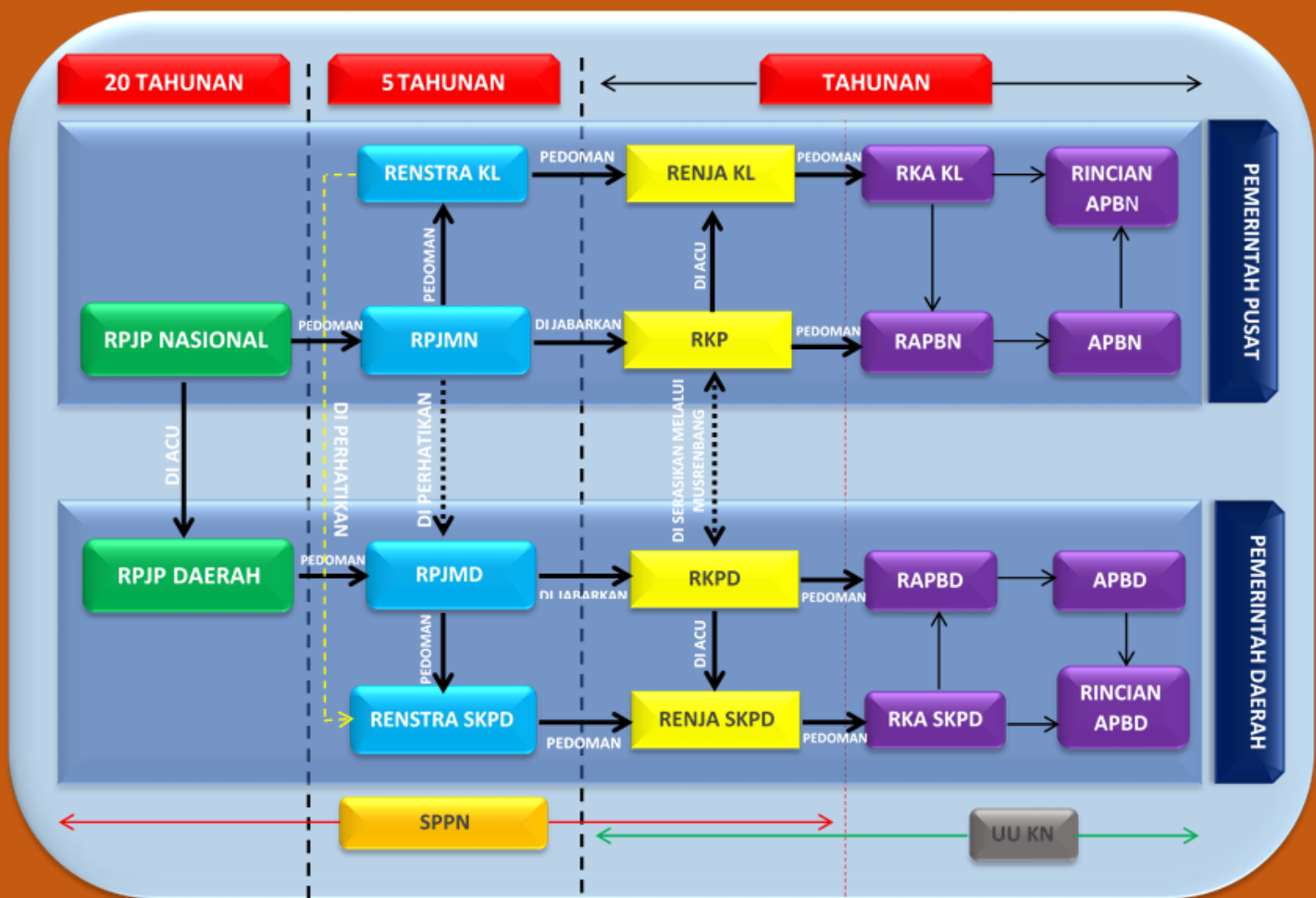
- 27) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
- 32) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025.
- 33) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Mojokerto. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:





Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2011 - 2015
- 3.3. Kerangka Pendanaan

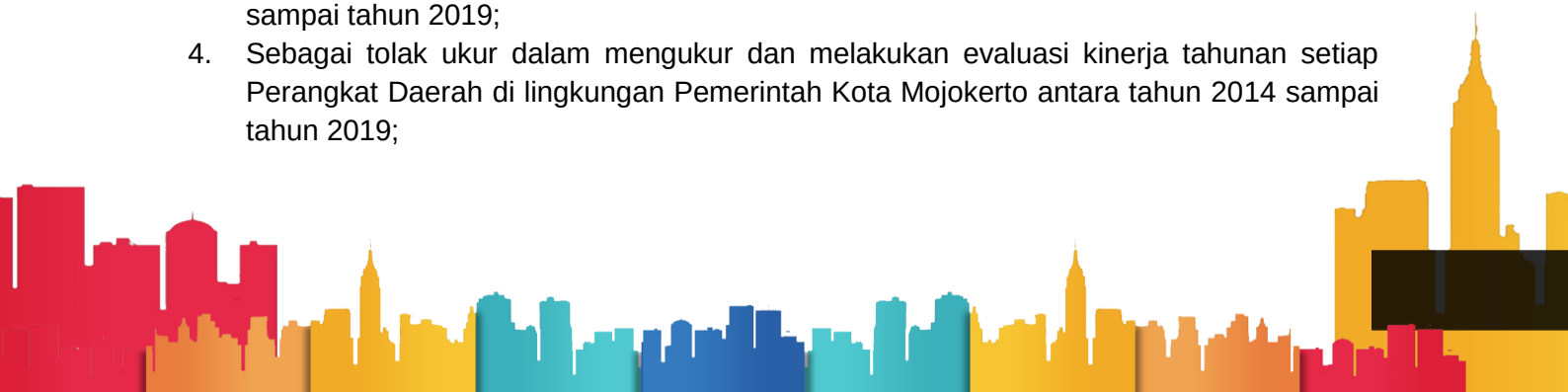
BAB IV	ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
	4.1 Analisis Tahapan RPJP Berjalan
	4.2 Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi
	4.3 Platform Bupati Terpilih
	4.4 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto
	4.5 Permasalahan Pembangunan
	4.6 Isu-Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1 Visi Pembangunan Daerah
	5.2 Misi Pembangunan Daerah
	5.3 Tujuan dan Sasaran
	5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah
	6.2 Arah Kebijakan
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	7.1 Kebijakan Umum
	7.2 Program Prioritas
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
	10.1 Pedoman Transisi
	10.2 Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Mojokerto. Termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode 2014-2019 di lingkungan pemerintahan Kota Mojokerto harus mengacu pada RPJMD ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kota Mojokerto ini antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2014-2019.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2014 sampai tahun 2019, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2014 sampai tahun 2019;
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto antara tahun 2014 sampai tahun 2019;



5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KOTA MOJOKERTO

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mojokerto berada di Provinsi Jawa timur yang terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto 16,46 km², terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan, yang keseluruhannya meliputi 18 kelurahan.

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto

Kecamatan	Altitude	Luas Wilayah Km ²	% Luas Wilayah
Kecamatan Prajuritkulon	22	7.76	37,90%
Kelurahan Surodinawan	22	1.46	8,87%
Kelurahan Prajuritkulon	22	1.20	7,29%
Kelurahan Blooto	22	1.78	10,81%
Kelurahan Mentikan	22	0.19	1,15%
Kelurahan Kauman	22	0.19	1,15%
Kelurahan Pulorejo	22	1.42	8,63%
Kecamatan Magersari	22	8.70	40,21%
Kelurahan Wates	22	1.32	8,02%
Kelurahan Gunung Gedangan	22	1.70	10,33%
Kelurahan Kedundung	22	2.29	13,91%
Kelurahan Balongsari	22	0.83	5,04%
Kelurahan Magersari	22	0.33	2,00%
Kelurahan Gedongan	22	0.15	0,91%
Kecamatan Kranggan	22	8.70	21,89%
Kelurahan Kranggan	22	1.13	6,87%
Kelurahan Miji	22	0.39	2,37%
Kelurahan Meri	22	1.65	10,02%
Kelurahan Jagalan	22	0.16	0,97%
Kelurahan Sentanan	22	0.14	0,85%
Kelurahan Purwotengah	22	0.13	0,79%
Kota Mojokerto	22	16.46	100%

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2016, diolah

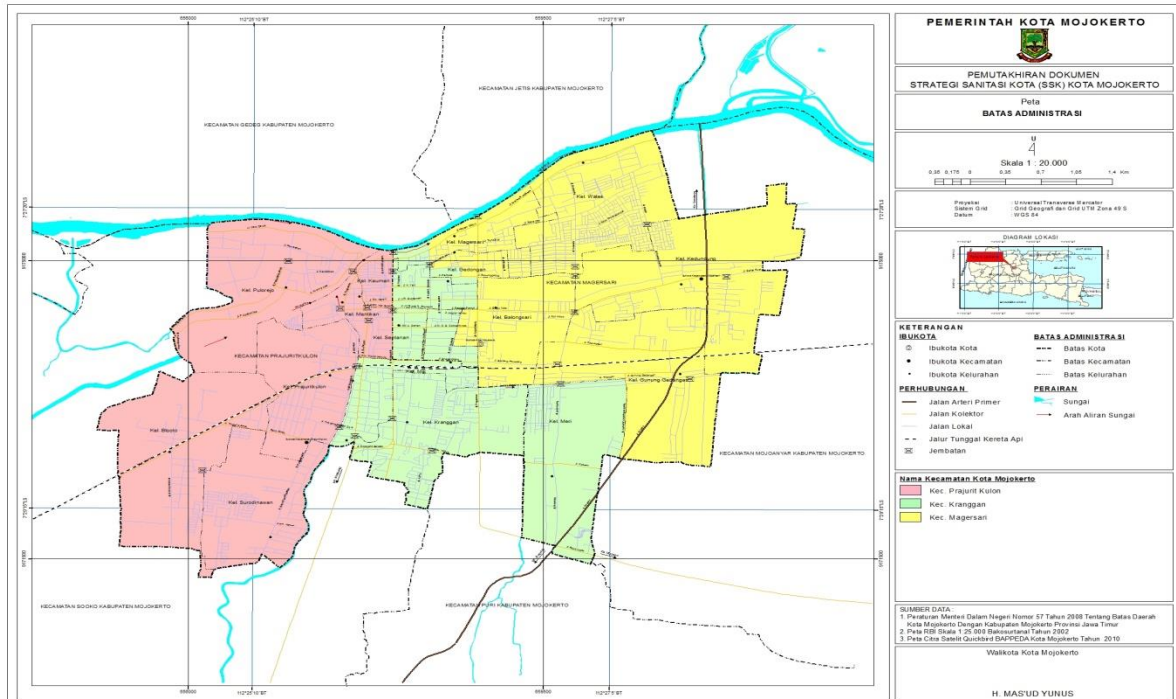
Batas-batas wilayah administrasi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

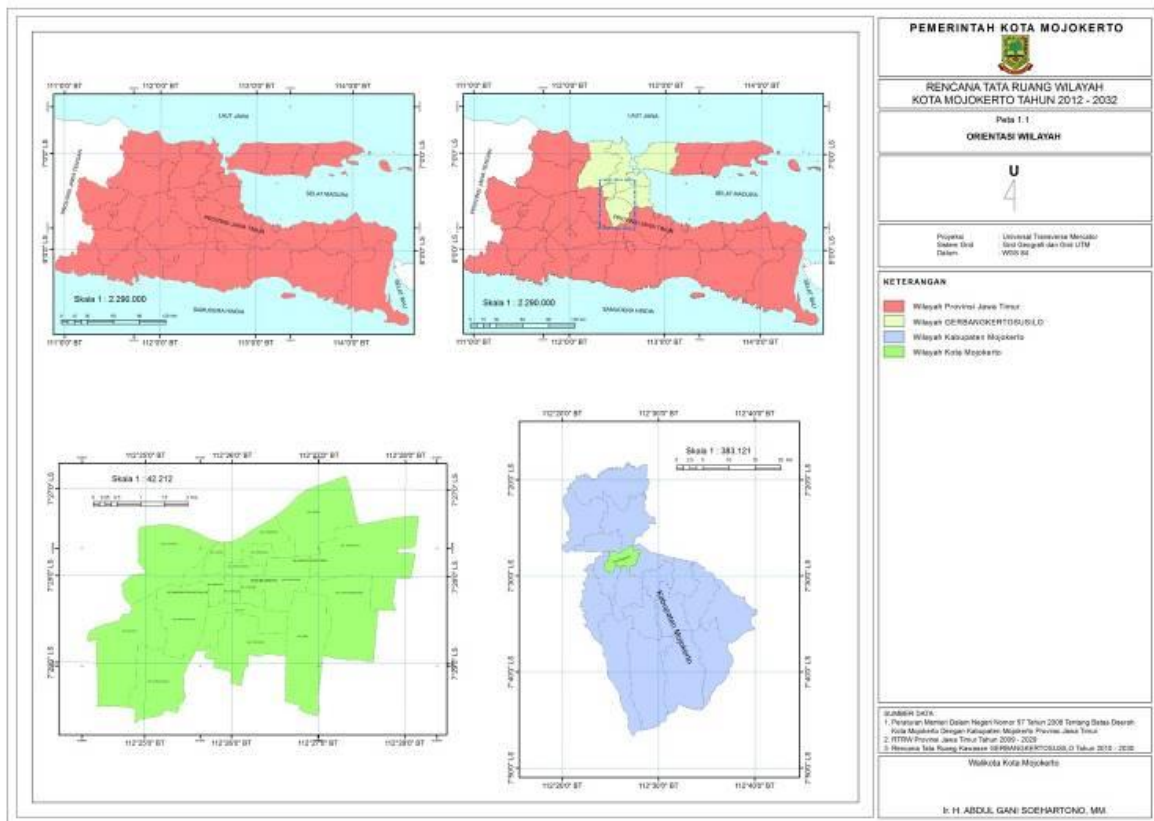


Gambar 2. 1 Peta Kota Mojokerto

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Mojokerto terletak pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya–Jogjakarta–Jakarta. Kota Mojokerto memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur, secara khusus menjadi penyangga bagi Kota Surabaya yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi Jawa Timur.

Peran Kota Mojokerto dalam kerangka pengembangan Gerbangkertosusila sangat strategis, karena akses ke Surabaya yang hanya berjarak 52 km, cukup memadai dalam hal sarana dan prasarana seperti jalan antar kota, prasarana angkutan antar kota dan sebagainya. Hal inilah yang dapat memacu perputaran ekonomi di Kota Mojokerto. Secara regional, Kota Mojokerto berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah belakangnya (*hinterland*), yaitu Kabupaten Mojokerto, masyarakat di wilayah perbatasan Jombang, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan.



Gambar 2. 2 Peta Tata Ruang Kota Mojokerto

2.1.1.3. Topografi

Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan), sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti *Lepek* (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota Mojokerto.

Berdasarkan peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.

Tabel 2. 2 Kemiringan Tanah dan Luas Wilayah Topografi di Wilayah Kota Mojokerto

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kemiringan Tanah 0-20% (Ha)	Luas Wilayah Topografi	
			18,75 mdpl	25 mdpl
1	Prajuritkulon	776,27		
	1. Surodinawan	145,88	141,42	4,46
	2. Prajuritkulon	119,53	118,88	0,65
	3. Blooto	178,07	178,07	0,00
	4. Mentikan	18,90	18,90	0,00

	5. Kauman	18,63	18,63	0,00
	8. Pulorejo	142,35	142,35	0,00
2	Magersari	870,27		
	1. Wates	132,10	132,10	0,00
	2. Gunung Gedangan	170,45	170,45	0,00
	3. Kedundung	228,58	228,58	0,00
	4. Balongsari	82,86	82,86	0,00
	5. Magersari	32,89	32,89	0,00
	6. Gedongan	14,68	14,68	0,00
3	Kranggan	870,27		
	1. Kranggan	113,31	113,31	0,00
	2. Miji	39,60	39,60	0,00
	3. Meri	164,84	164,63	0,21
	4. Jagalan	16,55	16,55	0,00
	5. Sentanan	13,85	13,85	0,00
	6. Purwotengah	13,47	13,47	0,00
	Jumlah	1.646,54	1.641,22	5,32

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

2.1.1.4. Geologi

Lapisan batuan yang terdapat di Kota Mojokerto sebagian besar merupakan seri batuan *aluvium*, *pleistosenfasies* sedimen dan *alluvium fasies* gunung api. Jenis *aluvium* mendominasi di sebagian besar wilayah Kota Mojokerto seluas 980,35 Ha, *Pleistosen fasies* sedimen seluas 223,40 Ha terdapat di Kelurahan Gunung Gedangan dan Kedundung, *alluvium fasies* gunung api seluas 442,79 Ha meliputi Kelurahan Surodinawan, Kranggan, Miji, Prajuritkulon, Blooto, Mentikan, Kauman, Jagalan, Sentanan, Purwotengah, Gedongan dan Magersari.

Tabel 2. 3 Kondisi Geologi Wilayah Kota Mojokerto

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Geologi			Jumlah (Ha)
		<i>Alluvium</i>	<i>Pleistosen, Fasies Sedimen</i>	<i>Alluvium, Fasies Gunung Berapi</i>	
1	Prajuritkulon				
	1. Surodinawan	--	--	145,88	145,88
	2. Prajuritkulon	11,53	--	108,00	119,53
	3. Blooto	123,86	--	54,21	178,07
	4. Mentikan	5,67	--	13,23	18,90
	5. Kauman	11,44	--	7,19	18,63
	6. Pulorejo	142,35	--	--	142,35
2	Magersari				
	1. Wates	132,10	--	--	132,10
	2. Gunung Gedangan	104,62	65,83	--	170,45
	3. Kedundung	71,01	157,57	--	228,58

	4. Balongsari	82,86	--	--	82,86
	5. Magersari	26,17	--	6,72	32,89
	6. Gedongan	14,55	--	0,13	14,68
3	Kranggan				
	1. Kranggan	51,36	--	61,95	113,31
	2. Miji	17,74	--	21,86	39,60
	3. Meri	164,84	--	--	164,84
	4. Jagalan	13,44	--	3,11	16,55
	5. Sentanan	--	--	13,85	13,85
	6. Purwotengah	6,82	--	6,65	13,47
	Jumlah	980,35	223,40	442,79	1.646,54

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032,

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis *alluvial* seluas $\pm 633,93$ Ha ($\pm 38,50\%$) dan jenis *gromosol* seluas $\pm 1.012,61$ Ha ($\pm 61,50\%$). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat erosi yang tinggi.

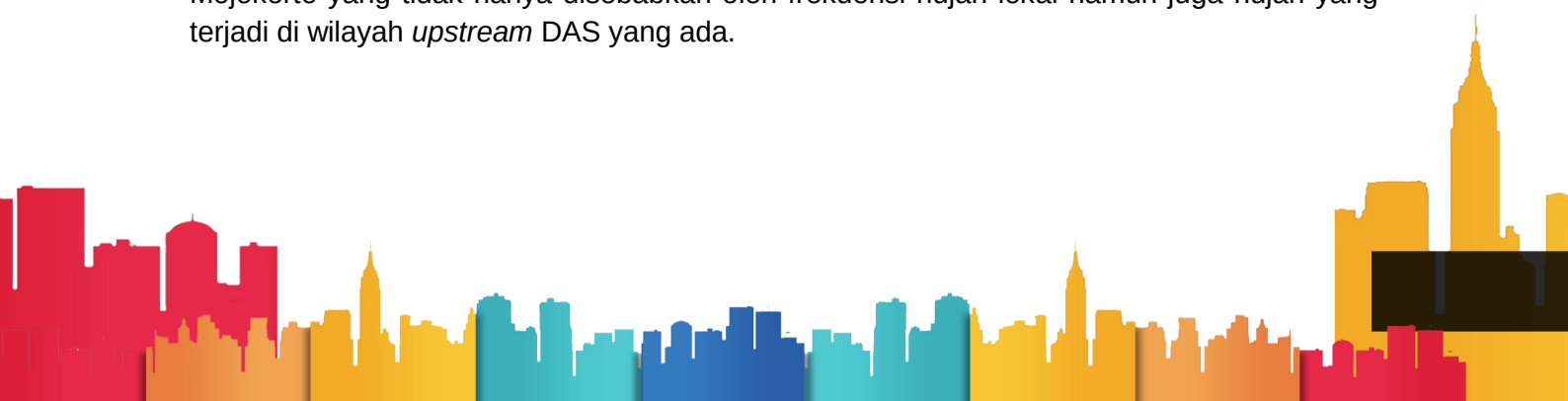
Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah sekitarnya.

2.1.1.5. Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir, Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.



Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (M)	LUAS (M ²)	KARAKTER
1	Sungai Brantas	11.088,661	733.247,014	Bertanggul
2	Sungai Brangkal	7.616,542	103.337,774	Bertanggul
3	Sungai Sadar	7.860,713	70.842,839	Bertanggul
4	Sungai Cemporat	1.874,852	8.533,763	Bertanggul
5	Sungai Ngrayung	3.818,769	17.779,728	Bertanggul
6	Watu Dakon	4.211,452	31.708,677	Bertanggul
7	Ngotok/Pulo	4.902,914	119.103,526	Bertanggul

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Potensi kuantitas air tanah di Kota Mojokerto telah dilakukan dalam Studi Potensi Air Bawah Tanah atau dalam Neraca Air Tanah, jumlah air tanah yang masuk meliputi presipitasi dan kembalian penggunaan air sebesar $\pm 359.865.971,892 \text{ m}^3/\text{tahun}$ sedangkan jumlah air tanah yang hilang meliputi *evapotranspirasi*, aliran sungai, penggunaan air tanah domestik dan non domestik sebesar $\pm 290.431.808.830 \text{ m}^3/\text{tahun}$ sehingga terdapat cadangan air tanah yang tersimpan sebesar $\pm 69.434.163.061 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Studi Neraca Air Tanah ini tidak dilakukan tiap tahun namun dilakukan tiap 5 tahun sekali. Perhitungan kesetimbangan air yang pernah dilakukan ada 3 sistem, yaitu *Climatic System*, *Surface Water System* dan *Ground Water System* diperoleh seperti Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Kesetimbangan Air di Kota Mojokerto

No	Uraian	Jumlah Kesetimbangan Air (m ³)
1	Presipitasi	350.836.474.048
2	Evapotranspirasi	279.868.260.047,166
3	Limpasan Permukaan	227.975,23
4	Imbuhan Air Bawah Tanah	70.967.986.025,223
5	Penggunaan Air (Domestik dan Non Domestik)	10.563.320.808
6	Cadangan Air yang Tersimpan	69.434.163.061

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032

2.1.1.6. Klimatologi

Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober – April) dengan curah hujan rata-rata sebesar 177,57 mm. Kota Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 22 mdpl. Pada tahun 2011, temperatur udara maksimum sebesar 34,8°C terjadi pada bulan Januari dan November, dan minimum sebesar 14,8° C yang terjadi pada bulan Februari. Sedangkan kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Januari dan Mei yaitu sebesar 98%, dan minimum sebesar 42% yang terjadi pada bulan September. Gambaran secara keseluruhan kondisi temperatur dan kelembaban dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Keadaan Cuaca Tiap Bulan

Bulan	Tempe- ratur		Kelembaban		Tekanan Udara	Rata-rata penyinaran matahari	Arah angin	Kecepatan Angin
	Max	Min	Max	Min				
Januari	34,6	23,5	96,0	54,0	1.010,9	18,0	W	15,0
Februari	33,6	23,1	95,0	53,0	1.011,2	61,0	W	11,0
Maret	32,7	22,8	92,0	51,0	1.012,2	45,0	W	16,0
April	33,4	24,1	95,0	53,0	1.013,9	83,0	E	12,0
Mei	32,7	22,7	93,0	48,0	1.011,9	79,0	E	12,0
Juni	32,0	21,5	96,0	48,0	1.013,7	87,0	E	13,0
Juli	32,4	20,6	90,0	48,0	1.013,7	89,0	E	13,0
Agustus	33,1	20,6	95,0	42,0	1.014,2	97,0	E	14,0
September	33,4	20,6	88,0	37,0	1.014,3	98,0	E	14,0
Oktober	35,1	23,5	83,0	37,0	1.015,3	94,0	E	14,0
Nopember	35,4	24,6	91,0	40,0	1.011,4	76,0	E	13,0
Desember	34,3	22,4	97,0	56,0	1.011,0	48,0	W	12,0

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada bulan Desember merupakan tertinggi yang terjadi selama tahun 2013 yaitu mencapai 504,00 mm. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober 2013. Berikut adalah tabel curah hujan per bulan.

Tabel 2. 7 Jumlah Curah Hujan Rata-rata Bulanan Menurut Seksi Pengairan

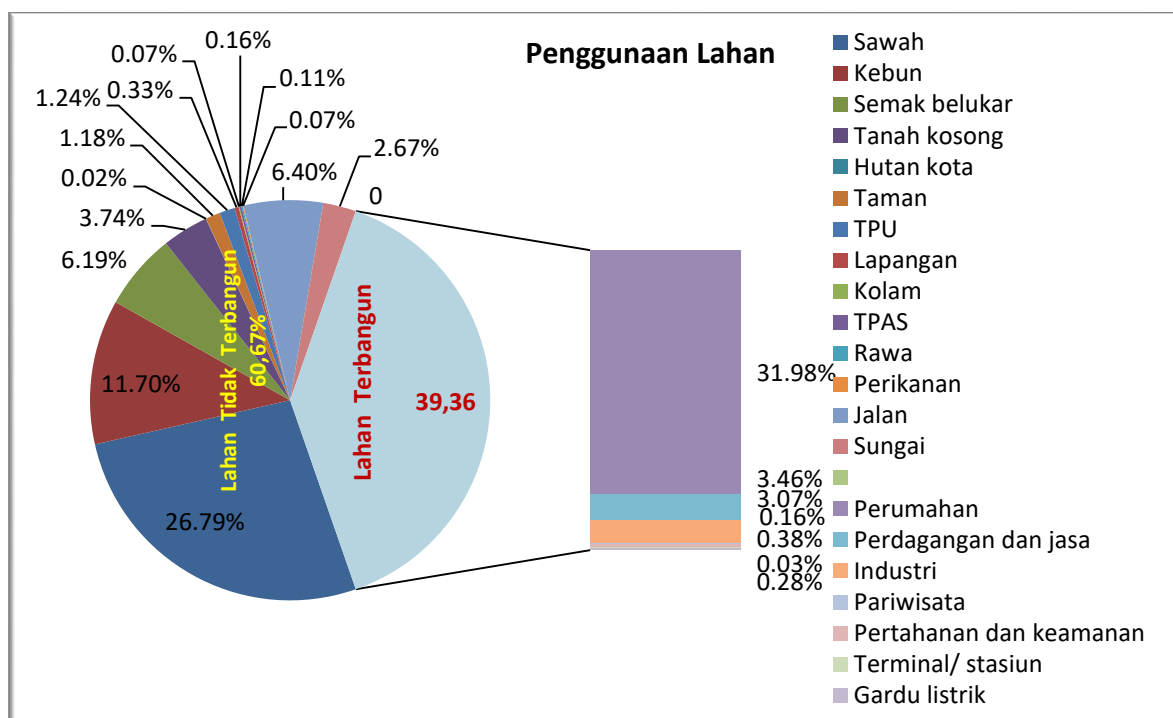
Bulan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari/ <i>January</i>	132	499	212	163	340
02. Februari/ <i>February</i>	190	738	85	86	166
03. Maret/ <i>March</i>	186	372	255	212	423
04. April/ <i>April</i>	91	445	400	331	389
05. Mei/ <i>May</i>	213	113	96	70	323
06. Juni/ <i>June</i>	4	34	33	73	192
07. Juli/ <i>July</i>	--	30	--	--	265
08. Agustus/ <i>August</i>	--	57	--	--	--
09. September/ <i>September</i>	--	122	--	--	--
10. Oktober/ <i>October</i>	1	90	--	--	6
11. November/ <i>November</i>	26	129	176	368	174
12. Desember/ <i>December</i>	175	239	184	724	504

Sumber : Dinas Pertanian Kota Mojokerto

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk perumahan dengan persentase terbesar yaitu 31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3,46%, industri sebesar 3,07%, pariwisata 0,16%, pertanian dan keamanan sebesar 0,38%, terminal/ stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.



Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto Tahun 2012

(Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032)

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.
2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.

Rencana penggunaan lahan untuk Kota Mojokerto pada tahun perencanaan 2012–2032 diharapkan dapat menyebar ke arah barat dan timur agar dapat mengurangi dan menyeimbangkan beban kawasan fungsional dan kegiatan masyarakat yang terkonsentrasi di pusat dan kawasan timur. Rencana penggunaan lahan untuk Kota Mojokerto meliputi penggunaan lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan cagar budaya yang terdapat di Kota Mojokerto diantaranya adalah :

1. Kawasan makam Pahlawan Nasional R. Panji Soeroso yang terletak di Kelurahan Surodinawan dengan luas kurang lebih 0,15 Ha².
2. Pendopo Kabupaten Mojokerto di Jl. Ahmad Yani dengan luas sebesar 2,19 Ha.
3. Kawasan cagar budaya
 - a. yang terletak di Jalan Ahmad Yani.
 - b. Masjid Agung Al-Fatah yang terletak di Kelurahan Kauman.
 - c. Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya terdapat di Jalan Veteran sebelah utara dari alun-alun Kota Mojokerto.
4. SMP Negeri 2 Mojokerto terletak di Jalan Ahmad Yani yang sudah lain di Kota Mojokerto ini sekitar 0,13%, terdiri dari :
 - d. Bangunan tua Dinas Pengairan berdiri sejak tahun 1919.

Secara umum, arahan pengelolaan pada cagar budaya antara lain:

1. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
2. Pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
3. Pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, dan pengawasan yang ketat terhadap penetapan fungsi kawasan;
5. Rencana pengembangan kawasan cagar budaya di Kota Mojokerto dengan luas kurang lebih 2,18 Ha atau 0,13%.

Tabel 2. 8 Rencana penggunaan lahan untuk kawasan lindung tahun 2012-2032

Kecamatan/ Kelurahan	Perlindungan Setempat						RTH KOTA					Cagar budaya
	Sungai	Ska	ssutt	Hutan kota	T Kota	T Kecamatan	T kelurahan	T RW	T RT	TPU	Taman Jalan	
Kec. Prajurit Kulon												
1. Surodinawan	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	1.14	1.33	0.29	0.85	0.30	0.15
2. Kranggan	2.05	0.00	0.00	1.61	0.40	0.00	1.90	1.22	0.02	1.64	0.43	0.00
3. Miji	0.99	1.92	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	1.08	0.10	0.00
4. Prajurit Kulon	2.31	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.27	0.19	2.33	0.22	0.00
5. Blooto	0.45	4.27	0.00	10.85	33.75	0.00	2.50	0.44	0.29	3.25	0.08	0.00
6. Mentikan	0.69	0.16	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.97	0.01	0.49	0.16	0.00
7. Kauman	0.64	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06	0.00
8. Pulorejo	9.44	0.00	0.00	36.97	1.73	0.00	1.37	0.93	0.08	0.65	0.46	0.00
Kec. Magersari												
1. Meri	2.99	2.74	4.63	5.47	30.08	0.00	6.05	0.32	0.31	0.94	0.32	0.00
2. Gunung Gedangan	1.55	3.01	13.41	7.84	7.19	6.10	0.00	0.65	0.31	1.13	0.01	0.00

Kecamatan/ Kelurahan	Perlindungan Setempat						RTH KOTA					Cagar budaya
	Sungai	Ska	ssutt	Hutan kota	T Kota	T Kecamatan	T kelurahan	T RW	T RT	TPU	Taman Jalan	
3. Kedundung	1.63	1.03	1.90	11.65	8.71	0.02	5.13	0.82	0.17	6.53	0.30	0.00
4. Balongsari	0.36	1.64	0.00	0.86	17.95	0.00	0.00	0.70	0.00	0.17	0.27	0.00
5. Jagalan	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.02	0.00
6. Sentanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Purwotengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8. Gedongan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.13	0.00
9. Magersari	0.68	0.00	0.00	0.02	0.92	0.00	0.00	0.34	0.06	0.00	0.30	2.04
10. Wates	6.75	0.00	0.00	10.45	2.50	0.00	0.84	0.42	0.37	1.14	0.48	0.00
Jumlah	32.33	17.55	19.94	86.85	103.86	14.48	19.32	9.27	2.14	20.21	3.67	2.18
Persentase	1.96	1.07	1.21	5.27	6.31	0.88	1.17	0.56	0.13	1.23	0.22	0.13

Sumber : RTRW Kota Mojokerto (2012 – 2032)

Kawasan budi daya adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan dengan kegiatan terbangun dan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Penataan kawasan budi daya bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budi daya di Kota Mojokerto antara lain: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.



Tabel 2. 9 Rencana penggunaan lahan untuk kawasan budidaya tahun 2012-2032

Kecamatan/Ke- lurahan	Perdagangan						RTN H	Pelay- anan umu m	Pertah- anan dan Keama- nan	Lahan cadang- an	Pertan- ian	Peri- kanan	Termi- nal/ Stasiun	Gard- u	TPA	Jalan	Sungai
	Peru- mahan	Jasa	Perkan- toran	Industri	Pari wisa- ta	Infor- mal											
Kec. Prajurit Kulon																	
1. Surodinawan	30.67	10.12	3.47	1.04	0.00	0.27	0.02	9.04	0.00	62.75	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26	1.43
2. Kranggan	40.68	5.88	2.43	18.23	0.00	0.00	0.32	8.49	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	1.63
3. Miji	17.40	4.41	0.48	4.16	0.00	0.10	0.05	0.38	0.84	1.76	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	4.18	0.93
4. Prajurit Kulon	29.46	3.79	1.80	0.00	0.00	0.00	7.91	1.51	0.45	21.08	35.6	1.05	0.00	0.00	0.00	6.95	1.61
5. Blooto	31.05	0.28	0.33	0.72	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	29.10	52.6	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	1.44
6. Mentikan	7.70	3.59	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	1.79	1.77
7. Kauman	9.77	1.64	0.34	0.11	0.00	0.00	0.00	0.44	0.41	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	1.58
8. Pulorejo	34.23	1.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	18.73	12.4	0.08	0.00	0.00	0.00	6.47	15.74
Kec. Magersari																	
1. Meri	38.19	17.11	0.60	0.19	0.00	0.77	0.99	1.34	0.00	38.56	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	8.66	2.05
2. Gunung Gedangan	31.65	17.63	0.21	10.64	0.00	0.00	0.46	3.01	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	10.23	2.11
3. Kedundung	42.03	21.26	2.07	53.08	0.00	0.00	0.24	2.11	0.28	46.09	0.00	0.00	0.00	4.49	2.65	11.43	2.54
4. Balongsari	17.75	12.82	4.57	0.00	0.00	0.00	0.27	3.86	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.41
5. Jagalan	6.62	5.94	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
6. Sentanan	3.90	6.51	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00
7. Purwotengah	3.86	4.59	1.70	0.00	0.00	0.00	0.08	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.03
8. Gedongan	8.24	1.75	0.14	0.00	0.00	0.00	0.10	1.87	0.34	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.12
9. Magersari	13.25	0.53	0.94	0.00	0.47	0.00	0.50	0.21	2.62	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	4.00
10. Wates	59.96	5.60	0.58	3.10	0.00	0.00	0.29	4.87	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	6.58
Jumlah	426.40	124.48	20.91	91.27	0.47	1.15	11.24	43.26	6.24	324.94	104	1.22	2.66	4.53	2.65	105.13	43.97
Persentase	25.90	7.56	1.27	5.54	0.03	0.07	0.68	2.63	0.38	19.73	6.33	0.07	0.16	0.28	0.16	6.39	2.67

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032

2.1.1.8 Kawasan Lindung

Data RTRW Kota Mojokerto 2012-2032 menetapkan luas kawasan lindung sebesar 331,8 Ha. Adapun kawasan lindung meliputi:

a. Pengembangan pada kawasan lindung, yang meliputi :

- Pembatasan kegiatan pada sempadan sungai.
- Pemanfaatan daerah sempadan sungai.
- Penataan kawasan tepian sungai untuk pariwisata.
- Perlindungan sempadan sungai meliputi larangan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai.

b. Ruang Terbuka Hijau Kota

- Pengembangan RTH publik meliputi: RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH taman kelurahan, RTH taman kecamatan, RTH taman kota, RTH taman jalan, RTH pemakaman umum, RTH hutan kota dan kebun bibit, RTH pengaman jalur kereta api, dan RTH SUTT/SUTET.
- Pengembangan RTH privat meliputi: pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan

c. Kawasan Cagar Budaya

- Perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya.
- Pengembangan cagar budaya sebagai pendukung pariwisata budaya.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

- Perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk mengurangi genangan.
- Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana.



Tabel 2. 10 Kawasan Lindung (Ha)

No	Kecamatan/Kelurahan	Sungai	SKA	SSUIT	Hutan Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	TPU	Taman jalan	Cagar Budaya
1	Kec. Prajuritkulon												
1	Surodinawan	1,8	0	0	0	0	8,36	1,14	1,33	0,3	0.85	0,3	0,15
2	Kranggan	2,05	0	0	1,61	0,4	0	1,9	1,22	0	1.64	0,43	0
3	Miji	0,99	1,92	0	0,49	0	0	0	0,15	0	1.08	0,1	0
4	Prajuritkulon	2,31	2,65	0	0	0	0	0,39	0,27	0,2	2.33	0,22	0
5	Blooto	0,45	4,27	0	10,85	33,75	0	2,5	0,44	0,3	3.25	0,08	0
6	Mentikan	069	0,16	0	0,63	0	0	0	0,97	0	0.49	0,16	0
7	Kauman	0,64	0	0	0	0,63	0	0	0,09	0	0	0,06	0
8	Pulorejo	9,44	0	0	36,97	1,73	0	1,37	0,93	0,1	0.65	0,46	0
2	Kec. Magersari												
1	Meri	2,99	2,74	4,63	5,47	30,08	0	6,05	0,32	0,3	0.94	0,32	0
2	Gunung Gedangan	1,55	3,01	13,4	7,84	7,19	6,1	0	0,65	0,3	1.13	0,01	0
3	Kedundung	1,63	1,03	1,9	11,65	8,71	0,02	5,13	0,82	0,2	6.53	0,3	0
4	Balongsari	0,36	1,64	0	0,86	17,95	0	0	0,7	0	0.17	0,27	0
5	Jagalan	0	0,13	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0,02	0
6	Sentanan	0	0	0	0	0	0	0	0,24	0	0	0	0
7	Purwotengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
8	Gedongan	0	0	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0,13	0
9	Magersari	0,68	0	0	0,02	0,92	0	0	0,34	0,1	0	0,3	2,04
10	Wates	6,75	0	0	10,45	2,5	0	0,84	0,42	0,4	1.14	0,48	0
Jumlah		32,33	17,6	19,9	86,85	103,9	14,48	19,32	9,27	2,1	20.2	3,67	2,18
Prosentase		1.96	1,07	1,21	5,27	6,31	0,88	1,17	0,56	0,1	1.23	0,22	0,13

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012-2032



2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

2.1.3 Identifikasi Potensi Dan Masalah Kawasan Budi Daya

2.1.3.1 Kawasan Perumahan

A. Potensi

- a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.
- b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau *developer* berkembang pesat.

B. Masalah

- a. Pesatnya perkembangan permukiman oleh *developer* semakin mengurangi luasan lahan pertanian khususnya sawah teknis.
- b. Berkembangnya pembangunan rumah pada kawasan sempadan/Squater.

C. Prospek Pengembangan

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan/ squater.
- c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi kebutuhan rumah.

2.1.3.2 Kawasan Perdagangan Dan Jasa

A. Potensi

- a. Memiliki banyak kawasapeta wilayahn perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern.
- b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Jombang.
- c. Memiliki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan pariwisata modern, Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan (CAREFOUR di Jalan Benteng Pancasila, SANRIO Jl. Residen Pamuji, SULTAN KRATON MOJOPAHIT di Jl. Mojopahit, dan BENTAR di Jl. Mojopahit), Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan dan Pasar Hewan di Kelurahan Miji.
- d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan

Kabupaten Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah berkembangnya beberapa industri besar/sedang yang ada di Kota Mojokerto. Dimana sampai dengan tahun 2010 berdasar pada Mojokerto Dalam Angka (MDA) Tahun 2013 jumlah industri sedang sebanyak 47 unit.

- e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.

B. Masalah

- a. Berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa tidak diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana pendukung, misalnya tempat parkir yang memadai, tempat bongkar muat, dll. sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
- b. Pada kawasan perdagangan dan jasa tidak terdapat alokasi khusus untuk kegiatan sektor informal
- c. Kurangnya penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan pada lingkungan pasar.

C. Prospek Pengembangan

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.
- c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.
- d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
- e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai wisata belanja dan kuliner.

2.1.3.3 Kawasan Perkantoran

A. Potensi

- a. Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl. Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl. By Pass Jl. Benteng Pancasila dan di Kelurahan Surodinawan.
- b. Perkantoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu Nala.

B. Masalah

- a. Lokasi kawasan perkantoran pemerintah belum terintegrasi pada satu kawasan, masih tersebar sehingga menyulitkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kawasan perkantoran pemerintah masih beraglomerasi dengan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta permukiman penduduk sehingga terkesan tidak nyaman.

C. Prospek Pengembangan

Pengembangan kawasan perkantoran dalam satu kawasan yang terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.4 Kawasan Industri

A. Potensi

- a. Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas, Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan



sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home industri logam cetakan kue, home industri batik, home industri makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar di Kota Mojokerto.

- b. Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi hasil produksi.

B. Masalah

- a. Untuk industri kecil maupun home industri masih terkendala oleh SDM dan permodalan.
- b. Kurangnya promosi sehingga menyulitkan dalam hal pemasaran.
- c. Kurangnya karyawan lokal pada industri besar maupun industri menengah.

C. Prospek Pengembangan

- a. Peningkatan SDM melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan.
- b. Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan home industri oleh pemerintah setempat.
- c. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.
- d. Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

2.1.3.5 Kawasan Pariwisata

A. Potensi

Memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian Tirta Suam, wisata pemandian Sekar Sari, wisata Sentra Industri dan Kerajinan (SIK) di Jalan By Pass, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi Masjid Al-Fatah di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata kampung batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata sumber air panas di Kel. Kedungsari, dan wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim.

B. Masalah

- a. Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat.
- b. Pengembangan wisata bukan merupakan tujuan utama pembangunan Kota Mojokerto.

C. Prospek Pengembangan

Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada kawasan wisata kuliner dan jogging track, wisata pemandian air hangat dan wisata sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil kerajinan home industri Kota Mojokerto.

2.1.3.6 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

A. Potensi

Kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Mojokerto berupa alun-alun, lapangan olahraga, Stadion dan Tempat Rekreasi.



B. Masalah

Kurangnya pemeliharaan pada kawasan ruang terbuka non hijau yang ada di Kota Mojokerto.

2.1.3.7 Kawasan Peruntukan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi: kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (*developer*) dan/atau dibangun oleh pemerintah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 426,40 Ha atau sekitar 25,90% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

2. Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

3. Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain:

1. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.
2. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
3. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan perumahan.
 - a. Pembentukan kelembagaan lokal dan mekanisme pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep “Tridaya”. Berdasarkan jenisnya, kebutuhan perumahan di wilayah perencanaan dibagi menjadi perumahan kapling besar, kapling sedang dan kapling kecil dengan menggunakan perbandingan 1:3:6. Standar luas kebutuhan perumahan tersebut adalah Kapling Besar luas 500 m², Kapling Sedang luas 300 m² dan Kapling Kecil luas 150 m².

Menurut hasil analisa yang telah dilakukan kebutuhan rumah di Kota Mojokerto pada tahun 2032 sebesar 41.699 unit seluas 10.772.343 m². Jumlah rumah pada tahun 2027 sebanyak 38.992 unit, seluas 10.073.021 m², kebutuhan rumah pada tahun 2022 sebanyak 32.685 unit, seluas 9.373.699 m², kebutuhan rumah pada tahun 2017 sebanyak 33.037 unit, seluas 8.534.514 m², dan kebutuhan rumah pada tahun 2012 sebanyak 30.330 unit, seluas 7.835.892 m².

2.1.3.8 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 124,48 atau sekitar 7,56%. Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

- a. Rencana revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang bisa mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern.
- b. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- c. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- d. Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan dan pasar Prajuritkulon.

2. Pusat perbelanjaan dan toko modern

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut diarahkan pada Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass, Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut :

- a. Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- b. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- d. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

Berdasarkan standar tersebut, maka kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Mojokerto hingga tahun 2032 adalah :

- a. Warung sebanyak 667 unit seluas 6,7 Ha yang akan didistribusikan di setiap unit pengembangan.
- b. Pertokoan sebanyak 53 unit seluas 6,4 Ha akan didistribusikan di setiap unit pengembangan.
- c. Pusat perbelanjaan lingkungan 4 unit seluas 6,0 Ha didistribusikan di setiap pusat pelayanan masing-masing 2 unit.
- d. Pusat perbelanjaan niaga sebanyak 1 unit seluas 3,98 Ha didistribusikan di pusat pengembangan kawasan di Kelurahan Kedundung Kota Mojokerto.

2.1.3.9 Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan. Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

1. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.
2. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal.
3. Rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu direncanakan di Kelurahan Surodinawan dengan luasan total sebesar lebih kurang 20,91 Ha atau sekitar 1,27%.
4. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan
5. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

2.1.3.10 Kawasan Peruntukan Industri

Kegiatan peruntukan industri yang terdapat di Kota Mojokerto meliputi industri kecil/rumah tangga dan industri besar.

1. Industri Kecil/rumah tangga

Industri-industri kecil yang terdapat di Kota Mojokerto diantaranya meliputi :

- a. Industri batik tulis di Kelurahan Surodinawan dan lingkungan Keboan dan Kelurahan Gunung Gedangan.
- b. Industri miniatur perahu layar tradisional yang terdapat di Jalan Brawijaya, Kedung Kwali dan Kelurahan Prajuritkulon.
- c. Industri gips (yang produknya antara lain tempat miniuman, mainan anak-anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang serta lain-lainya) yang diproduksi di Kelurahan Gedongan.
- d. Industri keciput dan onde-onde, industri sepatu dan sandal yang tersebar di Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedongan,



Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Mentikan.

- e. Industri cetakan kue yang berbahan dasar dari alumunium.

2. Industri Sedang

Industri sedang meliputi :

- a. Industri rokok Bokor Mas di Jl. Pahlawan
- b. Industri sepatu Dragon di Jl. Pahlawan
- c. Industri pakan ternak di Jl. By Pass

Rencana kawasan industri sedang Kota Mojokerto direncanakan di Jalan By Pass, Kelurahan Kedundung dengan luas kurang lebih 47,47 Ha atau 2,88%. Rencana pengembangan kawasan industri di Kota Mojokerto yang diperkirakan seluas 96,11 Ha atau sebesar 5,84%, yang diarahkan dengan rencana sebagai berikut :

- a. Pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- b. Pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan meliputi radius/jarak, tingkat pencemaran, dan upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya.
- c. Pembangunan kawasan industri harus memenuhi kebutuhan luas lahan, jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik meliputi parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d. Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai upaya-upaya terpadu mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL), penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan disertai pengawasan oleh pemerintah daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

2.1.3.11 Kawasan Peruntukan Pariwisata

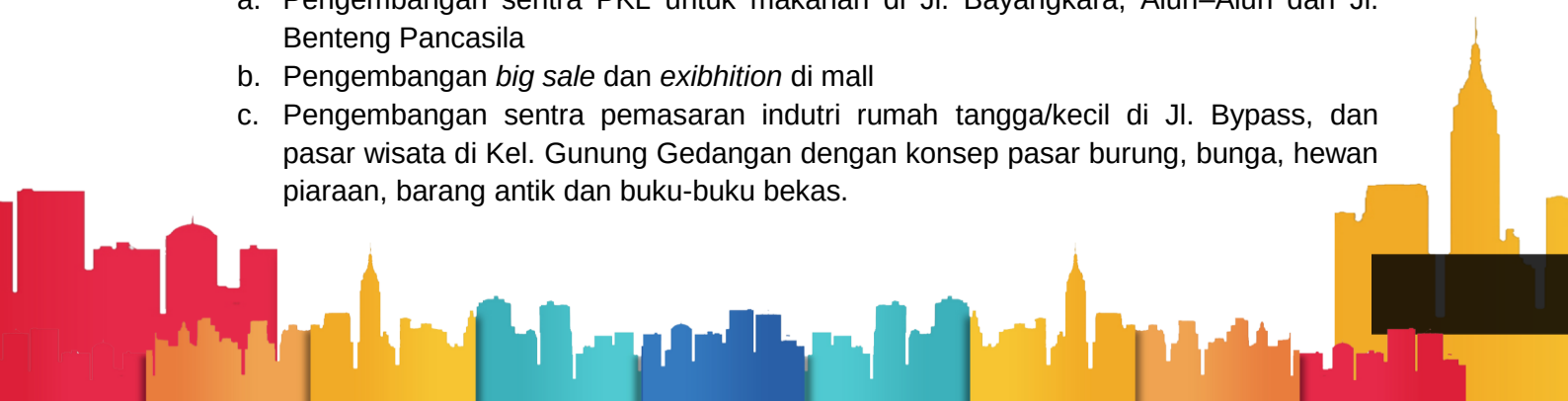
Kawasan wisata yang terdapat di Kota Mojokerto, yaitu : wisata air *jogging track* dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian Tirta Suam, wisata pemandian Sekar Sari, wisata Sentra Industri dan Kerajinan (SIK) di Jalan By Pass, wisata kampung sepatu di Kel.Miji, wisata religi Masjid Al-Fatah di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel.Pulorejo, wisata kampung batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata sumber air panas Kedungsari, dan wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim.

Rencana pengembangan wisata di Kota Mojokerto yaitu :

1. Pengembangan semua wisata yang terdapat di Kota Mojokerto
2. Pengembangan wisata penunjang perbelanjaan

Wisata penunjang perbelanjaan yang dikembangkan meliputi :

- a. Pengembangan sentra PKL untuk makanan di Jl. Bayangkara, Alun–Alun dan Jl. Benteng Pancasila
- b. Pengembangan *big sale* dan *exibhition* di mall
- c. Pengembangan sentra pemasaran indutri rumah tangga/kecil di Jl. Bypass, dan pasar wisata di Kel. Gunung Gedangan dengan konsep pasar burung, bunga, hewan piaraan, barang antik dan buku-buku bekas.



2.1.3.12 Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

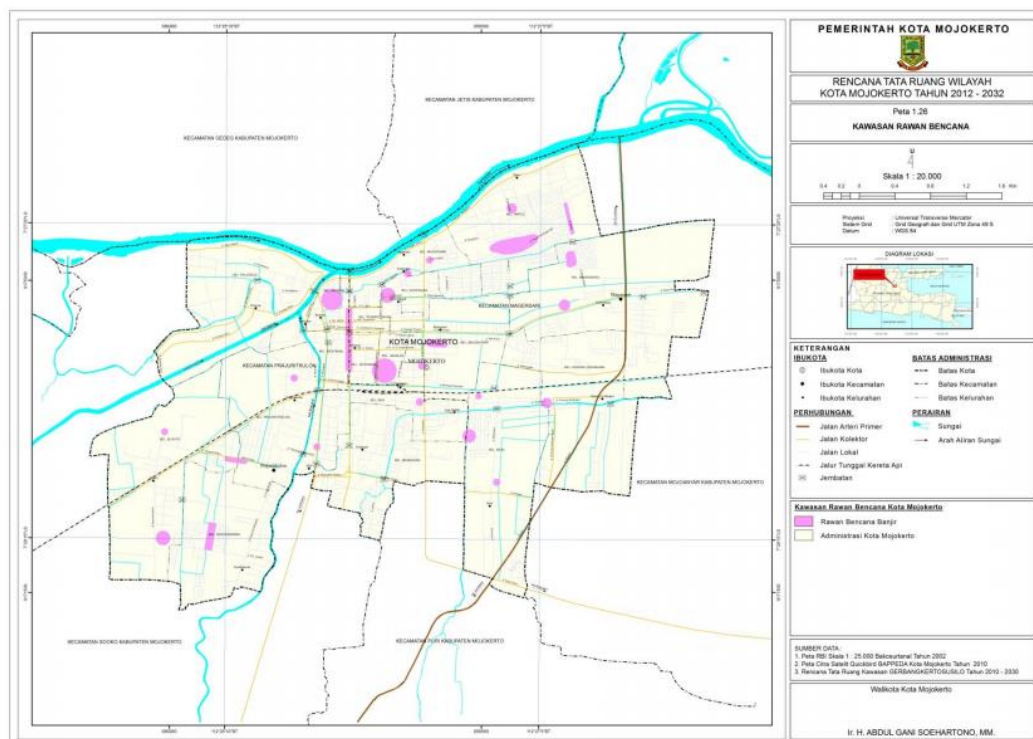
Ruang Terbuka Non Hijau merupakan ruang terbuka dengan kegiatan budi daya di atasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kawasan ruang terbuka non hijau yang terdapat di Kota Mojokerto berupa: lapangan olahraga tertutup, Stadion Ahmad Yani di Jl. Ijen, Kel. Wates, dan rencana pembangunan GOR dan seni di Kel. Prajuritkulon.

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau adalah sebesar 11,24 Ha atau sekitar 0,68%, yang diarahkan sebagai berikut :

- 1 Mempertahankan keberadaan ruang terbuka non hijau yang ada.
- 2 Mencegah pengalihfungsian kawasan ruang terbuka non hijau menjadi kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi (permukiman, perdagangan, dll).

2.1.3.13 Kawasan Rawan Bencana dan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan rawan bencana yang ada di Kota Mojokerto merupakan kawasan rawan bencana kota yaitu banjir. Kawasan rawan banjir yaitu terdapat pada Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Pajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Surodinawan Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gunung Gedangan, dan Kelurahan Meri.



Gambar 2. 4 Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto

Ruang evakuasi bahaya Kota Mojokerto terdiri dari bahaya kebakaran serta rawan bencana banjir. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana untuk penampungan korban bencana banjir dan kebakaran di Kota Mojokerto, lokasinya dialokasikan di Alun-alun Kota Mojokerto, stadion Ahmad Yani, rencana pembangunan GOR dan seni di Kelurahan Prajuritkulon, lapangan parkir Kantor Walikota, lapangan parkir Rumah Sakit Gatoel, dan lapangan parkir kantor DISHUBKOMINFO.

2.1.3.14 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kota.
2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.
3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.
4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran kota dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal PKL dengan luas sebesar 1,15 Ha yang diarahkan dilokasikan pada:

1. Kawasan PKL stasiun kereta api di Jalan Bhayangkara
2. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila
3. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

Dalam upaya mengembangkan kawasan peruntukan sektor informal diperlukan adanya arahan-arahan. Arahan tersebut antara lain:

1. Merekomendasi kegiatan potensial meliputi kawasan industri, perdagangan dan jasa yaitu 2,5% dari kepemilikan tanah, dimanfaatkan untuk ruang PKL.
2. Menetapkan kebijakan penataan dengan program rombongan atau tendanisasi.
3. Pengalihan dan penampungan PKL diarahkan pada salah satu zona alternatif.

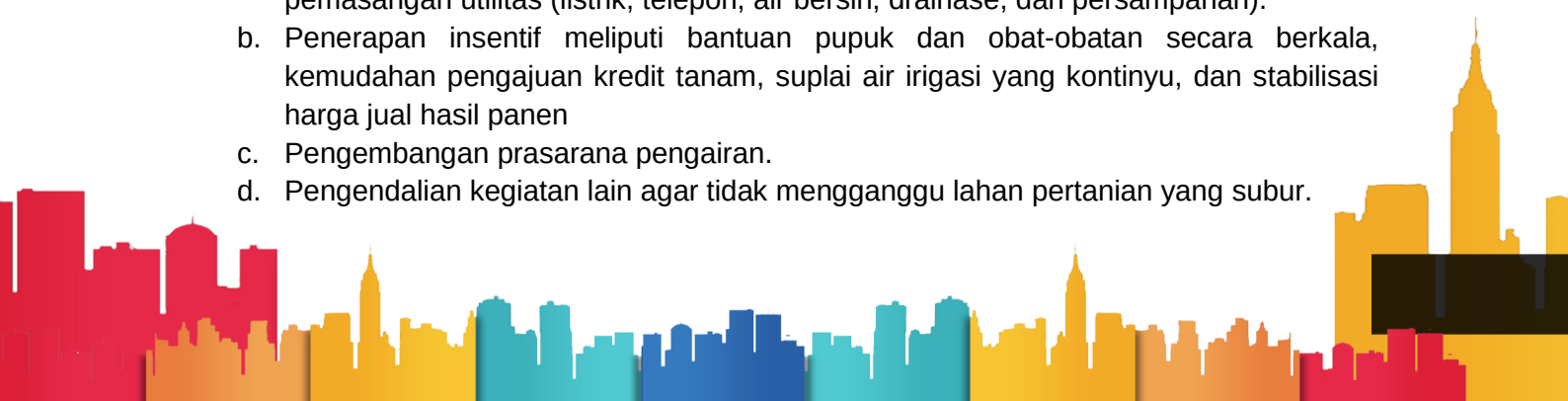
2.1.3.15 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

1. Kawasan Pertanian

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat di perairan umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon. Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha. Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut :

- a. Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan, pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air bersih, drainase, dan persampahan).
- b. Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen
- c. Pengembangan prasarana pengairan.
- d. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur.



- e. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian
- f. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial.
- g. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian meliputi daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian.
- h. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

2. Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan luas sebesar 43,26 Ha.

a. Fasilitas Pendidikan

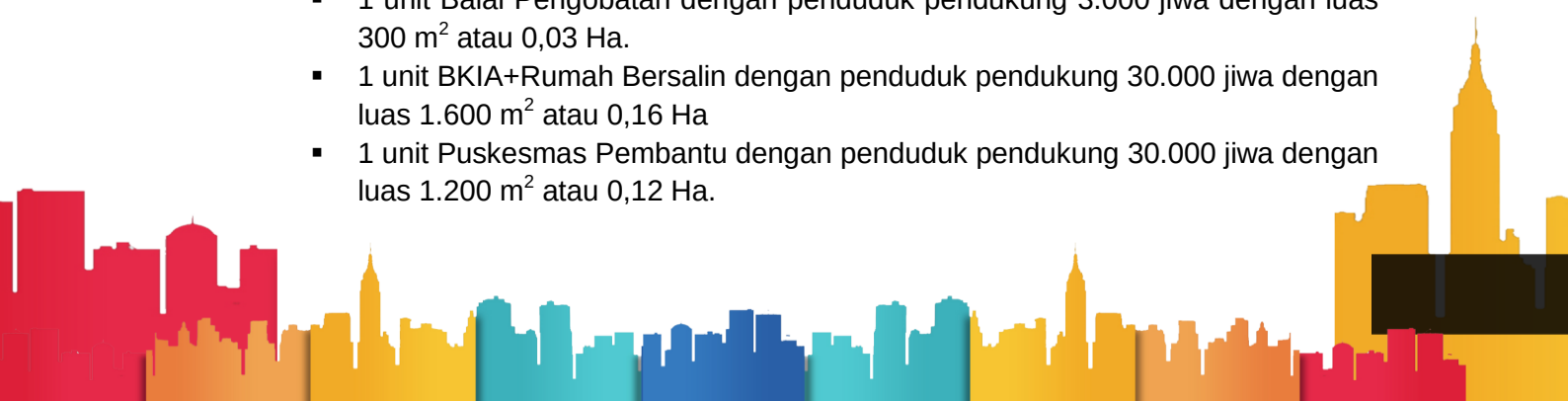
Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- ❖ Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.
- ❖ Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di Kelurahan Surodinawan. Prediksi kebutuhan fasilitas pendidikan menggunakan standart :
 - Asumsi 1 TK terdiri dari 2 kelas yang dapat menampung 35-40 murid/kelas, luas tanah : 1.200 m².
 - Asumsi 1 SD terdiri dari 6 kelas yang dapat menampung 40 murid/kelas, luas tanah : 1.200 m².
 - Asumsi 3 (tiga) SD dilayani oleh 1 (satu) SLTP dengan luas tanah yang dibutuhkan 2.700 m².
 - Asumsi 1 (satu) SLTP dilayani oleh 1 (satu) SLTA dengan luas tanah yang dibutuhkan 2.700 m².

b. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, rumah sakit swasta, dan puskesmas juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- ❖ Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B. Penentuan kebutuhan fasilitas kesehatan menggunakan standar sebagai berikut :
 - 1 unit Balai Pengobatan dengan penduduk pendukung 3.000 jiwa dengan luas 300 m² atau 0,03 Ha.
 - 1 unit BKIA+Rumah Bersalin dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan luas 1.600 m² atau 0,16 Ha
 - 1 unit Puskesmas Pembantu dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan luas 1.200 m² atau 0,12 Ha.



- 1 unit Puskesmas dengan penduduk pendukung 120.000 jiwa dengan luas 2.400 m² atau 0,24 Ha.
- 1 unit Praktek Dokter dengan penduduk pendukung 5.000 menyatu dengan rumah.
- 1 unit Apotik dengan penduduk pendukung 10.000 jiwa dengan luas 350 m² atau 0,035 Ha.
- 1 unit Rumah Sakit dengan penduduk pendukung 240.000 jiwa.

c. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

- ❖ Perbaikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
- ❖ Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaanya tetap dipertahankan dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto, antara lain, yaitu :

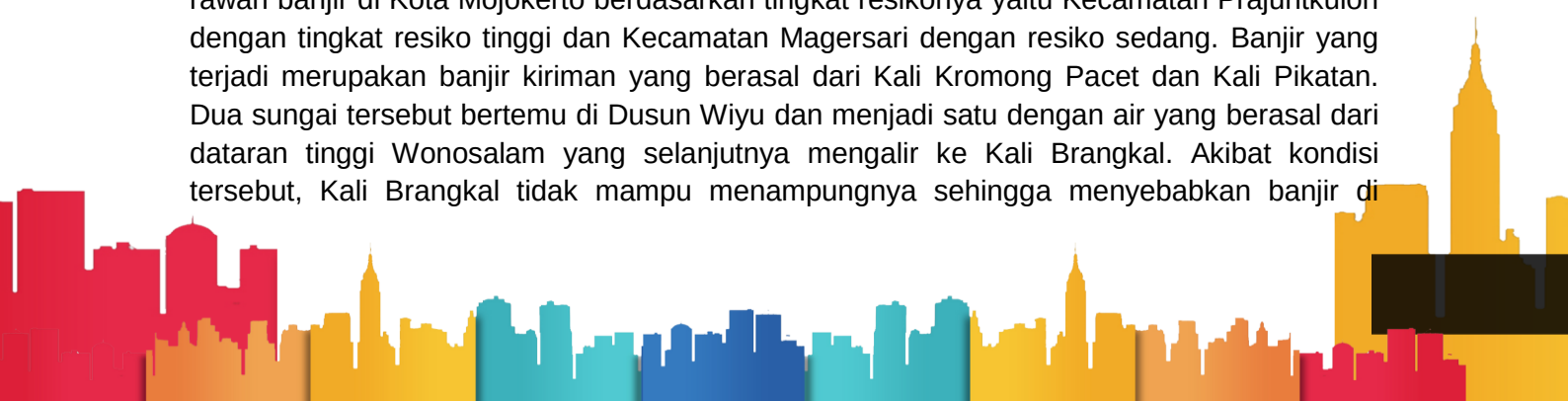
- a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan Kauman;
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah Kota Mojokerto;
- d. Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan Magersari;
- e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji;
- f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara Kelurahan Sentanan;
- g. Kepolisian Sektor Magersari di Jalan By Pass Kelurahan Kedundung; dan
- h. Kepolisian Sektor Prajuritkulon di Jalan Raya Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon.

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

2.1.4.1 Banjir

Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun 2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai tersebut bertemu di Dusun Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal dari dataran tinggi Wonosalam yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal. Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga menyebabkan banjir di



sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam.

Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota Mojokerto berpotensi terjadi genangan air akibat infrastuktur drainase Kota Mojokerto seperti tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan	Tinggi (cm)	Luas Genangan (km ²)	Lama Genangan (jam)	Luas genangan tidak memenuhi SPM (km ²)*
Kecamatan Prajuritkulon		4,815		0,335073069
Surodinawan		0	0	0
Kranggan		0	0	0
Miji	10	0,1	3	0,1
Prajuritkulon		0,1	0	0
B l o o t o		0	0	0
Mentikan		0	0	0
Kauman		0	0	0
Pulorejo		0	0	0
Kecamatan Magersari		4,715		0,2
Meri	10	0,1	1	0,1
Gunung Gedangan	10	0,1	1	0,1
Kedundung		2,155	0	0
Balongsari		0	0	0
Jagalan		2,36	0	0
Sentanan	-	-	-	-
Purwotengah	-	-	-	-
Gedongan	-	-	-	-
Magersari	-	-	-	-
Wates	-	-	-	-

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032.

*) Mengacu SPM; lebih dari 30 cm, lebih dari 2 jam, lebih dari 2 kali kejadian dalam setahun

2.1.5 Kondisi Demografis

2.1.5.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto terus mengalami pertumbuhan secara signifikan mulai tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2013. Berikut tabel pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk dan Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah	Penduduk	Jumlah	Pertum-	Kepadatan



	KK	Laki	Perempuan		buhan	(Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2009	36.550	59.164	60.336	119.500	2,70	7.277,71
2010	36.432	59.476	60.588	120.064	0,47	7.312,06
2011	36.901	66.365	67.857	134.222	11,15	8.174,30
2012	38.210	66.818	68.206	135.024	0,60	8.223,14
2013 *)	38.436	67.198	68.491	135.689	0,49	8.263,64

Sumber data : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

*) . Data Diolah

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Mojokerto sekitar 1% kecuali pada tahun 2011 sebesar 11,15%, kondisi ini dijelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelum 2010 perhitungan jumlah penduduk dan pertumbuhannya menggunakan data yang diperoleh dari BPS yang bersumber dari data registrasi penduduk di Kecamatan. Namun pada tahun 2010 terdapat sensus penduduk dengan metode yang berbeda yang mengakomodasi keinginan penduduk/calon penduduk yang sudah tinggal di Kota Mojokerto selama 6 bulan dianggap sebagai penduduk, sehingga datanya melonjak hingga tumbuh 11,15% namun di tahun 2012 dan seterusnya menggunakan data registrasi kependudukan yang bersifat normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk perempuan hampir 4% di atas laki-laki, namun kenyataannya mereka berusia di atas 50 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia harapan hidup perempuan masih di atas laki-laki secara proporsional. Kepadatan rata-rata 8.263 Jiwa/Km² menunjukkan bahwa Kota Mojokerto merupakan Kota dengan tipe sedang yang dalam waktu tidak lama akan bertumbuh menjadi kota besar dalam jumlah penduduk, sehingga perlu dilakukan pengaturan tingkat pertumbuhan akibat jumlah luasan wilayah yang tidak mungkin berkembang lagi.

2.1.5.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan pertengahan tahun 2013 sebanyak 135.689, dengan kepadatan penduduk sebesar 8.263,64 jiwa/Km². Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.263,64 penduduk per kilometer persegi (km²) di tahun 2013. Pada tahun 2013 wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah kecamatan Magersari yaitu 8.542,68 jiwa per km².

Pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto tidak hanya disebabkan karena kelahiran, namun juga disebabkan banyaknya urbanisasi khususnya anak usia sekolah. Kondisi ini sebagai akibat daya tarik pendidikan di Kota Mojokerto yang masih tinggi bagi anak-anak sekitar Kota karena di samping kualitas yang bagus juga ditunjang dengan kebijakan pendidikan gratis bagi KK Kota Mojokerto. Akibatnya banyak anak sekolah dari luar kota Mojokerto yang pindah KK ke dalam KK famili dan sanak keluarganya yang ada di Kota Mojokerto. Sejauh ini belum ada regulasi yang membatasi laju perpindahan penduduk masuk ke Kota Mojokerto, sehingga perlu direncanakan regulasi tersebut sehingga ada alasan secara legalitas dalam mengatur pembatasan perpindahan penduduk tersebut.

2.1.5.3 Struktur Umur Penduduk

Sampai dengan pertengahan tahun 2013, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 135.689 jiwa yang tersebar di 2 kecamatan dan 18 kelurahan. Penduduk Laki-laki sebanyak 67.198 jiwa atau sebesar 49,5%; dan Penduduk perempuan sebanyak 68.491 atau sebesar 50,5%. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan tersebut menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kota Mojokerto adalah sebesar 96,84%; artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 96 penduduk laki-laki.

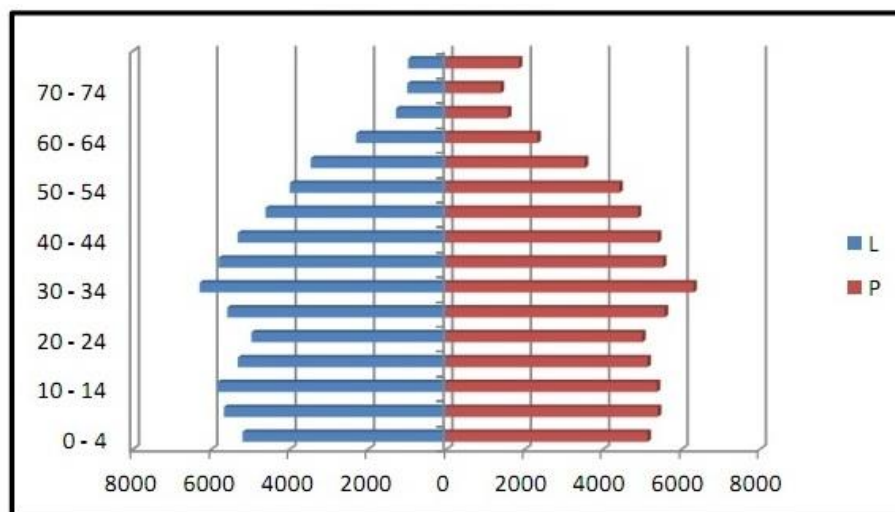
Apabila dilihat secara kelompok umur, maka struktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda, artinya jumlah penduduk usia muda yang terdiri dari usia remaja dan usia produktif dominan, sedangkan untuk usia tua masih relatif sedikit. Struktur penduduk menurut kelompok umur ini apabila digambarkan akan berbentuk piramida. Namun yang terjadi di Kota Mojokerto justru tidak sepenuhnya menganut teori demografi, dimana semakin tua usia penduduk jumlahnya akan semakin berkurang. Kondisi tersebut membuat bentuk piramida terlihat semakin mengerucut ke atas, yang menggambarkan usia tua semakin kecil jumlahnya.

Di Kota Mojokerto penduduk usia 0–14 tahun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 15–34 tahun. Usia 0–14 tahun hanya sebanyak 33.877 jiwa. Sedangkan penduduk usia 15-34 tahun berjumlah 43.475 jiwa. Penduduk usia 35-64 tahun apabila diklasifikasikan menurut kelompok 5 tahunan jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya. Tetapi yang istimewa adalah penduduk usia 65 ke atas yang jumlahnya melebihi kelompok umur 60-64 tahun. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kota Mojokerto sudah diatas 65 tahun.

Tabel 2. 13 Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 – 4	5950	5700	11650
5 – 9	6148	5491	11639
10 – 14	5452	5137	10589
15 – 19	4950	5021	9972
20 – 24	4740	4891	9631
25 – 29	6105	6263	12367
30 – 34	5890	5615	11505
35 – 39	5625	5503	11128
40 – 44	5088	5410	10498
45 – 49	4494	5248	9742
50 – 54	4565	4635	9200
55 – 59	3350	3102	6452
60 – 64	1698	1987	3685
65 – 69	1350	1628	2978
70 – 74	818	1304	2122
75 Keatas	922	1609	2531
J u m l a h	67145	68544	135689

Sumber :Kota Mojokerto dalam Angka 2013



Gambar 2. 5 Piramida Penduduk Kota Mojokerto menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2013

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Kondisi ini merupakan hal baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Data dan analisa di atas dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

Proyeksi penduduk tiap Kecamatan di Kota Mojokerto tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk

No	Kecamatan/ Kelurahan	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (r)
1	Prajuritkulon	61901	62180	62460	62741	62741	0.45
2	Magersari	74554	75046	75541	76040	76040	0.66
Jumlah		136455	137226	138001	138781	138781	0.555

Sumber: Hasil Analisa Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

2.1.5.4 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto tahun 2013 tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang berkerja. Hal ini dapat dilihat, ketika peningkatan jumlah penduduk yang berkerja pada tahun 2013 sebanyak 61.400 jiwa, namun angkatan kerja sebanyak 61.400 jiwa. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan

lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja yang cenderung menurun. Kondisi tersebut nampaknya masih terjadi di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 15 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	61,66	61,46	63,06	64,89	65,10
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	55,93	56,84	59,83	60,14	61,40
Angkatan Kerja 15 thn keatas (ribu jiwa)	55,94	56,84	59,37	60,14	61,40

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut perkembangan jumlah pengangguran Kota Mojokerto tahun 2009-2013.

Tabel 2. 16 Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pengangguran (ribu orang)	5,73	4,62	3,70	4,75	3,70

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Jumlah pengangguran mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Namun pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mencapai 4.749 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya 2011 yang berjumlah 3.698 orang. Peningkatan ini juga berkaitan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2012 tidak bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Namun pada tahun 2013 menurun kembali hingga 3.702 orang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Mojokerto dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ketiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, terus-menerus meningkat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	30,279.17	29,708.05	32,130.68	34,768.32	37,546.81
1.1. Tanaman Bahan Makanan	25,461.63	24,761.24	25,205.17	27,350.34	30,177.45
1.2. Tanaman Perkebunan	481.47	473.20	484.28	484.97	535.18
1.3. Peternakan	3,978.35	4,078.55	4,270.83	4,327.07	4,261.52
1.4. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Perikanan	357.71	395.07	2,170.40	2,605.95	2,572.65
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Pertambangan Non Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	410,781.00	474,865.82	533,098.57	586,761.34	635,774.83
1. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Industri Tanpa Migas	410,781.00	474,865.82	533,098.57	586,761.34	635,774.83
3.2.1. Makanan Minuman dan Tembakau	97,732.50	108,979.52	122,859.40	135,226.67	146,522.46
3.2.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	282,674.49	332,555.51	372,710.65	410,228.45	444,495.74
3.2.3. Brng dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	12,458.76	13,674.73	15,425.71	16,978.49	18,396.75
3.2.4. Kertas dan Barang Cetak	8,157.26	8,964.01	10,113.83	11,131.91	12,061.78
3.2.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,584.11	1,657.45	1,784.23	1,963.83	2,127.88
3.2.6. Semen dan Brng Galian bukan Logam	1,000.99	1,106.40	1,249.70	1,375.49	1,490.39
3.2.7. Logam dasar besi dan baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. Barang lainnya	7,172.89	7,928.20	8,955.06	9,856.49	10,679.83
Listrik, Gas dan Air Bersih	63,758.06	69,616.18	76,862.70	83,053.56	86,040.19
4.1. Listrik	61,889.01	67,713.92	75,029.34	81,143.27	84,138.38
4.2. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Air Bersih	1,869.05	1,902.26	1,833.36	1,910.30	1,901.80
Konstruksi	19,890.89	23,181.79	26,970.03	30,201.07	33,165.97
Perdagangan , Hotel dan Restoran	932,562.23	1,100,613.95	1,221,125.22	1,428,072.39	1,646,181.65
6.1. Perdagangan	684,237.55	840,627.81	923,285.82	1,082,532.02	1,246,816.51
6.2. H o t e l	2,620.69	2,832.70	3,234.67	3,421.38	3,959.32
6.3. Restoran	245,703.99	257,153.44	294,604.74	342,118.98	395,405.82
Pengangkutan dan Komunikasi	349,065.22	386,194.78	446,417.65	494,227.88	560,047.35
a. Angkutan	117,721.74	129,268.24	147,269.66	156,370.83	169,853.14
7.1.1. Angkutan Rel	8,405.79	10,121.35	11,723.72	12,500.54	14,193.50
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	79,091.38	85,228.87	96,334.60	102,910.09	113,754.73

Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
7.1.3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4. Angkutan Penyebrangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	30,224.58	33,918.02	39,211.34	40,960.20	41,904.92
b. Komunikasi	231,343.48	256,926.54	299,147.99	337,857.05	390,194.21
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi	149,988.54	167,633.99	198,327.77	226,312.89	263,822.77
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi	81,354.94	89,292.55	100,820.22	111,544.16	126,371.44
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	171,464.54	193,801.34	219,874.75	244,034.94	274,918.90
8.1. B a n k	36,164.96	40,595.17	45,063.80	51,148.75	56,843.59
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	67,359.80	76,998.99	89,919.42	99,009.02	111,858.42
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4. Sewa Bangunan	56,506.68	63,681.08	70,765.64	78,301.21	88,674.66
8.5. Jasa Perusahaan	11,433.10	12,526.10	14,125.89	15,575.96	17,542.24
Jasa – Jasa	473,242.75	521,017.88	580,823.80	636,863.88	707,649.85
a. Pemerintahan Umum	171,353.53	190,306.09	218,753.14	246,782.60	261,444.97
9.1.1. Admi Pemerintahan dan Pertahanan	171,353.53	190,306.09	218,753.14	246,782.60	261,444.97
9.1.2. Pemerintahan Lainnya					
b. Swasta	301,889.22	330,711.78	362,070.66	390,081.28	446,204.88
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	107,110.83	119,916.02	129,964.31	138,876.14	157,930.40
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	9,953.25	11,224.76	12,529.53	13,699.78	15,342.52
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT	184,825.14	199,571.00	219,576.82	237,505.35	272,931.95
Produk Domestik Regional Bruto	2,451,043.85	2,798,999.78	3,137,303.41	3,537,983.38	3,981,325.55

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Sementara itu, atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000, PDRB Kota Mojokerto tahun 2009 hingga 2013 berturut-turut sebesar Rp 1,157,929.82, Rp 1,228,437.25, Rp 1,308,084.03, Rp 1,400,641.09, dan Rp 1,496,657.21. Dengan perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota Mojokerto sejak tahun 2009 – 2013, secara riil terus tumbuh, jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Berikut adalah tabel Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2013 pada setiap sektor atau sub sektornya:



Tabel 2. 18 Produk Domestik Regional Bruto Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2000

Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	15,203.82	15,128.71	15,611.14	15,982.57	16,150.60
1.1. Tanaman Bahan Makanan	12,833.22	12,681.03	12,469.15	12,820.77	13,166.83
1.2. Tanaman Perkebunan	251.73	247.40	249.46	244.19	263.31
1.3. Peternakan	1,966.95	2,043.08	2,065.53	1,997.09	1,844.92
1.4. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Perikanan	151.92	157.20	827.01	920.52	875.55
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Pertambangan Non Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	184,448.78	189,516.70	195,818.96	207,308.73	218,811.47
1. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Industri Tanpa Migas	184,448.78	189,516.70	195,818.96	207,308.73	218,811.47
3.2.1. Makanan Minuman dan Tembakau	40,033.94	41,145.98	43,149.79	44,288.89	46,767.86
3.2.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	130,907.65	134,529.32	138,381.23	147,888.23	156,141.35
3.2.3. Brng dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	4,940.89	5,086.27	5,218.38	5,495.26	5,780.14
3.2.4. Kertas dan Barang Cetak	3,920.13	4,011.07	4,167.83	4,497.32	4,704.64
3.2.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	985.57	1,000.35	1,036.82	1,104.01	1,173.53
3.2.6. Semen dan Brng Galian bukan Logam	448.28	458.46	473.30	496.06	525.52
3.2.7. Logam dasar besi dan baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. Barang lainnya	3,212.31	3,285.23	3,391.59	3,538.95	3,718.43
Listrik, Gas dan Air Bersih	39,531.87	42,285.81	46,641.36	50,301.45	51,125.74
4.1. Listrik	38,293.47	41,039.11	45,440.67	49,052.69	49,905.93
4.2. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Air Bersih	1,238.40	1,246.69	1,200.69	1,248.77	1,219.81

Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Konstruksi	10,211.57	10,793.63	11,775.02	12,615.33	13,578.83
Perdagangan , Hotel dan Restoran	414,122.23	445,538.87	477,557.08	519,828.86	561,276.65
6.1. Perdagangan	308,481.12	335,288.13	360,334.15	392,573.65	423,221.72
6.2. H o t e l	1,148.50	1,191.80	1,260.56	1,267.52	1,382.86
6.3. Restoran	104,492.62	109,058.94	115,962.38	125,987.69	136,672.07
Pengangkutan dan Komunikasi	177,252.43	191,012.76	210,739.21	228,387.52	248,317.28
a. Angkutan	54,612.45	56,112.85	58,318.10	60,143.53	61,166.57
7.1.1. Angkutan Rel	4,006.22	4,132.03	4,275.57	4,402.15	4,548.05
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	35,957.51	36,277.53	37,257.42	38,432.26	39,016.43
7.1.3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4. Angkutan Penyebrangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	14,648.73	15,703.29	16,785.11	17,309.12	17,602.08
b. Komunikasi	122,639.98	134,899.91	152,421.11	168,243.99	187,150.72
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi	87,398.81	97,073.85	110,838.93	123,369.76	138,438.25
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi	35,241.17	37,826.05	41,582.18	44,874.24	48,712.47
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	91,312.96	97,306.20	102,693.10	108,145.36	114,233.93
8.1. B a n k	19,561.52	20,704.76	21,713.64	22,902.96	24,110.67
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	33,460.63	36,478.78	39,087.01	41,227.91	43,322.24
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4. Sewa Bangunan	31,377.39	32,796.52	34,099.62	35,783.13	38,178.63
8.5. Jasa Perusahaan	6,913.42	7,326.15	7,792.83	8,231.36	8,622.39
Jasa – Jasa	225,846.17	236,854.58	247,248.14	258,071.27	273,162.70
a. Pemerintahan Umum	68,431.60	72,619.61	75,282.19	80,145.23	82,499.60
9.1.1. Admi Pemerintahan dan Pertahanan	68,431.60	72,619.61	75,282.19	80,145.23	82,499.60
9.1.2. Pemerintahan Lainnya					
b. Swasta	157,414.57	164,234.97	171,965.96	177,926.04	190,663.10
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	60,515.06	64,111.42	66,722.75	68,757.60	73,988.19
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	5,320.47	5,642.25	5,975.65	6,311.92	6,739.27

Sektor/Sub Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT	91,579.03	94,481.30	99,267.56	102,856.52	109,935.65
Produk Domestik Regional Bruto	1,157,929.82	1,228,437.25	1,308,084.03	1,400,641.09	1,496,657.21

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Tabel 2. 19 Perkembangan Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) dalam persen

Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
Pertanian	1.24	1.31	1.06	1.23	1.02	1.19	0.98	1.14	0.94	1.08
1.1. Tanaman Bahan Makanan	1.04	1.11	0.88	1.03	0.80	0.95	0.77	0.92	0.76	0.88
1.2. Tanaman Perkebunan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
1.3. Peternakan	0.16	0.17	0.15	0.17	0.14	0.16	0.12	0.14	0.11	0.12
1.4. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Perikanan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Pertambangan Non Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	16.76	15.93	16.97	15.43	16.99	14.97	16.58	14.80	15.97	14.62
1. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Industri Tanpa Migas	16.76	15.93	16.97	15.43	16.99	14.97	16.58	14.80	15.97	14.62
3.2.1. Makanan Minuman dan Tembakau	3.99	3.46	3.89	3.35	3.92	3.30	3.82	3.16	3.68	3.12
3.2.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	11.53	11.31	11.88	10.95	11.88	10.58	11.59	10.56	11.16	10.43
3.2.3. Brng dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.51	0.43	0.49	0.41	0.49	0.40	0.48	0.39	0.46	0.39
3.2.4. Kertas dan Barang Cetak	0.33	0.34	0.32	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.30	0.31
3.2.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.05	0.08

Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
3.2.6. Semen dan Brng Galian bukan Logam	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
3.2.7. Logam dasar besi dan baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. Barang lainnya	0.29	0.28	0.28	0.27	0.29	0.26	0.28	0.25	0.27	0.25
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.60	3.41	2.49	3.44	2.45	3.57	2.35	3.59	2.16	3.42
4.1. Listrik	2.53	3.31	2.42	3.34	2.39	3.47	2.29	3.50	2.11	3.33
4.2. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Air Bersih	0.08	0.11	0.07	0.10	0.06	0.09	0.05	0.09	0.05	0.08
Konstruksi	0.81	0.88	0.83	0.88	0.86	0.90	0.85	0.90	0.83	0.91
Perdagangan , Hotel dan Restoran	38.05	35.76	39.32	36.27	38.92	36.51	40.36	37.11	41.35	37.50
6.1. Perdagangan	27.92	26.64	30.03	27.29	29.43	27.55	30.60	28.03	31.32	28.28
6.2. H o t e l	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09
6.3. Restoran	10.02	9.02	9.19	8.88	9.39	8.87	9.67	9.00	9.93	9.13
Pengangkutan dan Komunikasi	14.24	15.31	13.80	15.55	14.23	16.11	13.97	16.31	14.07	16.59
a. Angkutan	4.80	4.72	4.62	4.57	4.69	4.46	4.42	4.29	4.27	4.09
7.1.1. Angkutan Rel	0.34	0.35	0.36	0.34	0.37	0.33	0.35	0.31	0.36	0.30
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	3.23	3.11	3.04	2.95	3.07	2.85	2.91	2.74	2.86	2.61
7.1.3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4. Angkutan Penyebrangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	1.23	1.27	1.21	1.28	1.25	1.28	1.16	1.24	1.05	1.18
b. Komunikasi	9.44	10.59	9.18	10.98	9.54	11.65	9.55	12.01	9.80	12.50
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi	6.12	7.55	5.99	7.90	6.32	8.47	6.40	8.81	6.63	9.25
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi	3.32	3.04	3.19	3.08	3.21	3.18	3.15	3.20	3.17	3.25
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7.00	7.89	6.92	7.92	7.01	7.85	6.90	7.72	6.91	7.63
8.1. B a n k	1.48	1.69	1.45	1.69	1.44	1.66	1.45	1.64	1.43	1.61

Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.75	2.89	2.75	2.97	2.87	2.99	2.80	2.94	2.81	2.89
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4. Sewa Bangunan	2.31	2.71	2.28	2.67	2.26	2.61	2.21	2.55	2.23	2.55
8.5. Jasa Perusahaan	0.47	0.60	0.45	0.60	0.45	0.60	0.44	0.59	0.44	0.58
Jasa – Jasa	19.31	19.50	18.61	19.28	18.51	18.90	18.00	18.43	17.77	18.25
a. Pemerintahan Umum	6.99	5.91	6.80	5.91	6.97	5.76	6.98	5.72	6.57	5.51
9.1.1. Admi Pemerintahan dan Pertahanan	6.99	5.91	6.80	5.91	6.97	5.76	6.98	5.72	6.57	5.51
9.1.2. Pemerintahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	12.32	13.59	11.82	13.37	11.54	13.15	11.03	12.70	11.21	12.74
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	4.37	5.23	4.28	5.22	4.14	5.10	3.93	4.91	3.97	4.94
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0.41	0.46	0.40	0.46	0.40	0.46	0.39	0.45	0.39	0.45
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT	7.54	7.91	7.13	7.69	7.00	7.59	6.71	7.34	6.86	7.35
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013



Rata-rata pertumbuhan PRDB atas harga berlaku 442.46% dan PRDB atas harga konstan 183.36%. Tabel selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) 2009-2013

Sektor/Sub Sektor	Rata-rata Pertumbuhan	
	Hb	Hk
Pertanian	277.50	131.76
1.1. Tanaman Bahan Makanan	281.04	135.22
1.2. Tanaman Perkebunan	117.43	59.98
1.3. Peternakan	223.73	106.08
1.4. Kehutanan	0.00	0.00
1.5. Perikanan	1,608.21	582.04
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00
2.1. Pertambangan Migas	0.00	0.00
2.2. Pertambangan Non Migas	0.00	0.00
2.3. Penggalian	0.00	0.00
Industri Pengolahan	337.39	127.22
1. Industri Migas	0.00	0.00
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00
3.1.2. Gas Alam Cair	0.00	0.00
2. Industri Tanpa Migas	337.39	127.22
3.2.1. Makanan Minuman dan Tembakau	370.80	130.64
3.2.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	325.02	124.85
3.2.3. Brng dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	438.53	151.17
3.2.4. Kertas dan Barang Cetak	374.24	158.08
3.2.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	142.06	82.58
3.2.6. Semen dan Brng Galian bukan Logam		
3.2.7. Logam dasar besi dan baja	0.00	0.00
3.2.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	0.00	0.00
3.2.9. Barang lainnya	373.48	143.61
Listrik, Gas dan Air Bersih	262.50	159.09
4.1. Listrik	263.01	159.07
4.2. Gas Kota	0.00	0.00
4.3. Air Bersih	244.03	159.48
Konstruksi	543.17	240.11
Perdagangan , Hotel dan Restoran	494.17	188.83
6.1. Perdagangan	487.23	185.60
6.2. H o t e l	484.73	188.58
6.3. Restoran	517.18	199.52
Pengangkutan dan Komunikasi	614.73	290.25
a. Angkutan	372.04	149.93
7.1.1. Angkutan Rel	372.41	139.72
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	340.80	133.48
7.1.3. Angkutan Laut	0.00	0.00
7.1.4. Angkutan Penyebrangan	0.00	0.00
7.1.5. Angkutan Udara	0.00	0.00
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	486.06	214.16

Sektor/Sub Sektor	Rata-rata Pertumbuhan	
	Hb	Hk
b. Komunikasi	891.09	450.03
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi	750.08	415.35
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,417.38	579.43
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	452.79	210.67
8.1. B a n k	377.59	179.08
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	772.18	335.79
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00
8.4. Sewa Bangunan	336.62	161.98
8.5. Jasa Perusahaan	374.75	204.66
Jasa – Jasa	419.71	178.43
a. Pemerintahan Umum	493.76	171.89
9.1.1. Admi Pemerintahan dan Pertahanan	493.76	171.89
9.1.2. Pemerintahan Lainnya	0.00	0.00
b. Swasta	385.35	181.46
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	355.38	181.60
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	411.81	196.81
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT	403.86	180.52
Produk Domestik Regional Bruto	442.46	183.36

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Secara detail pertumbuhan PRDB harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 21 Perkembangan PRDB Harga Berlaku dan konstan Tahun 2009-2013 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku

Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
Pertanian	255.50	128.29	250.68	127.66	271.12	131.73	293.38	134.86	316.83	136.28
1.1. Tanaman Bahan Makanan	269.11	135.64	261.70	134.03	266.39	131.79	289.07	135.50	318.95	139.16
1.2. Tanaman Perkebunan	114.96	60.10	112.98	59.07	115.63	59.56	115.79	58.30	127.78	62.87
1.3. Peternakan	212.77	105.20	218.13	109.27	228.41	110.47	231.42	106.81	227.91	98.67
1.4. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. Perikanan	355.03	150.78	392.11	156.02	2,154.13	820.81	2,586.42	913.62	2,553.38	868.98
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. Pertambangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Pertambangan Non Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	262.36	117.81	303.29	121.04	340.49	125.07	374.76	132.41	406.06	139.75
1. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Industri Tanpa Migas	262.36	117.81	303.29	121.04	340.49	125.07	374.76	132.41	406.06	139.75
3.2.1. Makanan Minuman dan Tembakau	296.40	121.41	330.51	124.79	372.61	130.86	410.11	134.32	444.37	141.84
3.2.2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas kaki	249.30	115.45	293.29	118.64	328.70	122.04	361.79	130.43	392.01	137.70
3.2.3. Brng dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	355.08	140.82	389.74	144.96	439.64	148.73	483.89	156.62	524.31	164.74
3.2.4. Kertas dan Barang Cetak	302.68	145.46	332.62	148.84	375.28	154.65	413.06	166.88	447.57	174.57
3.2.5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	123.41	76.78	129.12	77.93	139.00	80.77	152.99	86.01	165.77	91.42
3.2.6. Semen dan Brng Galian bukan Logam	300.38	134.52	332.01	137.58	375.01	142.03	412.76	148.86	447.24	157.70
3.2.7. Logam dasar besi dan baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
3.2.8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9. Barang lainnya	300.38	134.52	332.01	137.58	375.01	142.03	412.76	148.20	447.24	155.72
Listrik, Gas dan Air Bersih	220.61	136.78	240.88	146.31	265.95	161.38	287.37	174.05	297.71	176.90
4.1. Listrik	220.02	136.13	240.72	145.89	266.73	161.54	288.47	174.38	299.11	177.42
4.2. Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. Air Bersih	242.17	160.46	246.48	161.53	237.55	155.57	247.52	161.80	246.42	158.05
Konstruksi	404.92	207.88	471.91	219.73	549.03	239.70	614.81	256.81	675.16	276.43
Perdagangan , Hotel dan Restoran	364.10	161.68	429.71	173.95	476.76	186.45	557.56	202.95	642.71	219.14
6.1. Perdagangan	348.91	157.30	428.66	170.97	470.80	183.74	552.01	200.18	635.78	215.81
6.2. H o t e l	395.28	173.23	427.26	179.76	487.89	190.13	516.05	191.18	597.19	208.58
6.3. Restoran	413.92	176.03	433.21	183.72	496.30	195.35	576.34	212.24	666.11	230.24
Pengangkutan dan Komunikasi	479.84	243.66	530.88	262.58	613.67	289.69	679.39	313.95	769.87	341.35
a. Angkutan	303.94	141.00	333.75	144.88	380.23	150.57	403.73	155.28	438.54	157.92
7.1.1. Angkutan Rel	274.87	131.00	330.96	135.12	383.36	139.81	408.76	143.95	464.12	148.72
7.1.2. Angkutan Jalan Raya	282.35	128.37	304.27	129.51	343.91	133.01	367.39	137.20	406.10	139.29
7.1.3. Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4. Angkutan Penyebrangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan	394.45	191.18	442.66	204.94	511.74	219.06	534.56	225.90	546.89	229.72
b. Komunikasi	680.14	360.56	755.36	396.60	879.49	448.11	993.29	494.63	1,147.16	550.22
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi	559.11	325.80	624.89	361.86	739.30	413.17	843.62	459.88	983.45	516.05
7.2.2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,131.87	490.30	1,242.31	526.26	1,402.69	578.52	1,551.89	624.32	1,758.17	677.72
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	351.59	187.24	397.39	199.53	450.86	210.57	500.40	221.75	563.72	234.24
8.1. B a n k	297.10	160.70	333.49	170.09	370.20	178.38	420.19	188.15	466.97	198.07
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	584.24	290.22	667.84	316.39	779.91	339.02	858.74	357.59	970.19	375.75
8.3. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4. Sewa Bangunan	265.71	147.55	299.45	154.22	332.76	160.35	368.20	168.26	416.98	179.53

Sektor/Sub Sektor	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
8.5. Jasa Perusahaan	300.87	181.93	329.63	192.79	371.73	205.07	409.89	216.61	461.64	226.90
Jasa – Jasa	340.16	162.33	374.50	170.25	417.48	177.72	457.76	185.50	508.64	196.34
a. Pemerintahan Umum	388.59	155.19	431.57	164.69	496.08	170.72	559.65	181.75	592.90	187.09
9.1.1. Admi Pemerintahan dan Pertahanan	388.59	155.19	431.57	164.69	496.08	170.72	559.65	181.75	592.90	187.09
9.1.2. Pemerintahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	317.68	165.65	348.01	172.83	381.01	180.96	410.49	187.23	469.54	200.64
9.2.1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	291.11	164.47	325.91	174.24	353.22	181.34	377.44	186.87	429.22	201.09
9.2.2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	326.60	174.58	368.32	185.14	411.14	196.08	449.54	207.12	503.44	221.14
9.2.3. Jasa Perorangan dan RT	334.91	165.94	361.62	171.20	397.88	179.87	430.36	186.38	494.56	199.20
Produk Domestik Regional Bruto	340.89	161.05	389.29	170.85	436.34	181.93	492.07	194.80	553.73	208.16

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013



Tabel 2. 22 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Keterangan		2009	2010	2011	2012	2013
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PDRB ADHB (Rupiah)	2,451,043.85	2,798,999.78	3,137,303.41	3,537,983.38	3,981,325.55
2.	PDRB ADHK 2000 (Rupiah)	1,157,929.82	1,228,437.25	1,308,084.03	1,400,641.09	1,496,657.21
3	Pertumbuhan Ekonomi Mojokerto(%)	5,14	6,09	6,68	7,11	7,56
3.	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (%)	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
4.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,10	6,50	6,23	5,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2013, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 7,56% (harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, yakni sebesar 7,11%. Hal ini menjadi titik harapan bagi perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Dengan inflasi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat sudah tinggi dan sudah dapat mengikuti perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.

**Gambar 2. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto**

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

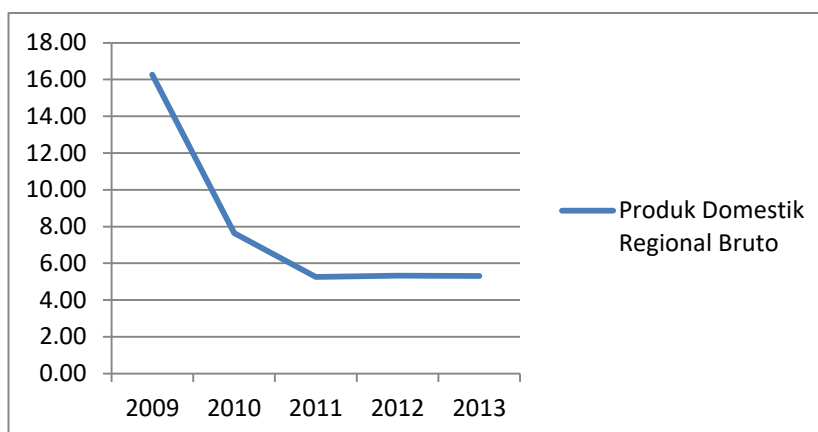
Jika dilihat pertumbuhan ekonomi sektoralnya maka sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi tertinggi baik pertumbuhannya sejak tahun 2009 hingga 2013 maupun nilai perbandingan pertumbuhan antar sektornya di atas rata-rata sektor lainnya dalam setiap tahunnya. Sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor konstruksi.

2.2.1.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi di kota Mojokerto mengalami

fluktuasi, Rata-rata inflasi di Kota Mojokerto dalam 5 tahun terakhir masih di bawah 2 digit, dengan inflasi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 16.27%. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada beberapa kelompok komoditi yang dominan. Namun, sejak tahun 2011 capaiannya mengalami penurunan, hingga pada tahun 2013 mencapai 5.31%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga-harga barang dan jasa selama tahun 2012 masih bisa terkendali, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang selalu memantau kondisi harga kebutuhan pokok untuk masyarakat di Kota Mojokerto.

Jika dilihat selama enam tahun terakhir (2008-2013), faktor penyebab inflasi dari tujuh kelompok pengeluaran, kelompok Transport (Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan) tahun 2013 mencapai rekor inflasi tertinggi sebesar 12,60%. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 11,70%. Pada tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 16,22%, sedangkan inflasi tertinggi pada kelompok perumahan terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,54%, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok sandang terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,66%, inflasi tertinggi pada kelompok kesehatan terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,97%.



Gambar 2. 7 Inflasi dari PRDB Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

(Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)

Tabel 2. 23 Inflasi dari PRDB Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	16.27	7.64	5.26	5.32	5.31	-37.93

(Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)

2.2.1.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi adalah PDRB per kapita yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku, karena PDRB

per kapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB ADHB.

Tabel 2. Perkembangan Beberapa Agregat PDRB Kota Mojokerto ADHB dan ADHK 2000 Tahun 2009-2013

Sektor/Sub Sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. PDRB ADHB	2,451,043.85	2,798,999.78	3,137,303.41	3,537,983.38	3,981,325.55
2. PDRB ADHK	1,157,929.82	1,228,437.25	1,308,084.03	1,400,641.09	1,496,657.21
3. Pendapatan per Kapita	20.581.614	23.389.123	24.014.440	26.288.180	28.581.180
4. Pertumbuhan Ekonomi	5,14	6,09	6,68	7,11	7,56
5. Penduduk Pertengahan Tahun	119.089	119.671	133.685	134.581	135.689

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

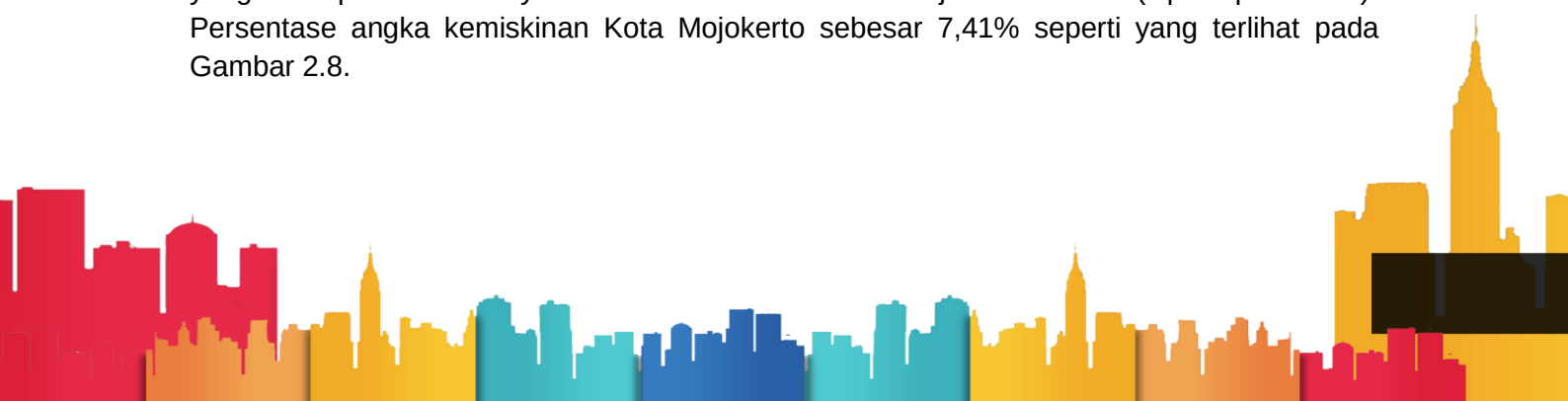
Besaran PDRB ADHB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output dari PDRB. Pada Tahun 2009, PDRB per kapita Kota Mojokerto mencapai Rp.20.581.614,00 dan terus mengalami peningkatan hingga Rp 28.581.180.00 di tahun 2013.

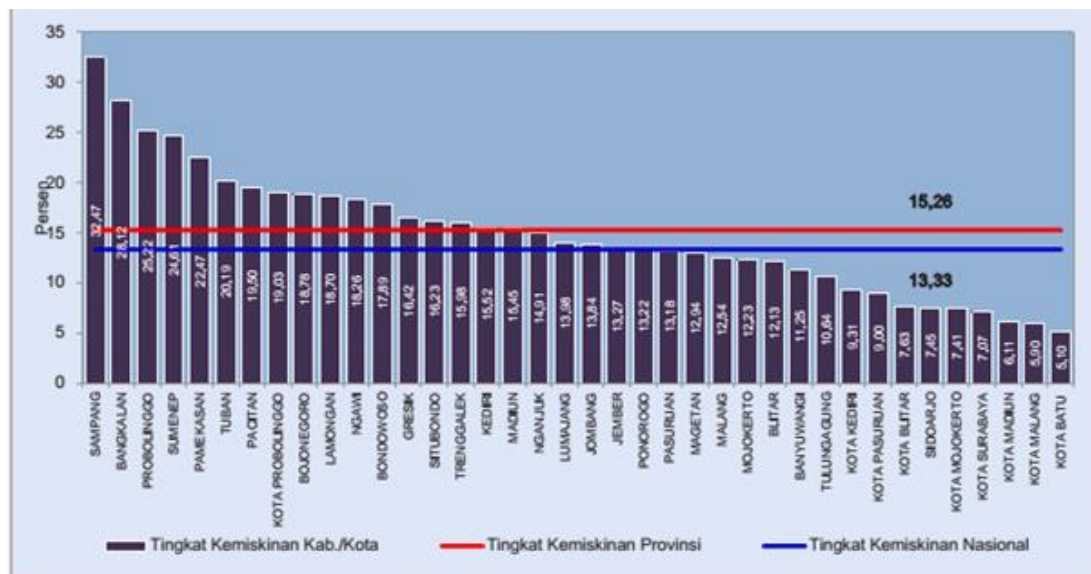
2.2.1.1.4 Angka Kemiskinan

Data hasil SUSENAS, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan garis kemiskinan Kota Mojokerto sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk Miskin pada Tahun 2010 sebanyak 8.900 jiwa atau 7,41 %, dengan Garis kemiskinan (Rp./Kapita/bulan) 244.778, sementara untuk Jawa Timur sebesar 218.568.
- Jumlah Penduduk Miskin pada Tahun 2011 sebanyak 8.338 jiwa atau 6,89 %, dengan garis kemiskinan sebesar (Rp./Kapita/bulan) 266.978.
- Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012 sebanyak 8.080 jiwa atau 6,59 %, dengan Garis kemiskinan masih sama dengan Tahun sebelumnya yaitu sebesar (Rp./Kapita/bulan) 266.978.

Uraian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Mojokerto, mulai Tahun 2010-2012 mengalami penurunan sebesar 720 jiwa atau sebesar 10,15%. Hal ini cukup membanggakan karena penurunan tersebut juga diikuti dengan kenaikan Garis kemiskinan yang cukup signifikan yaitu dari 244.778 naik menjadi 266.978 (Rp./Kapita/bulan). Persentase angka kemiskinan Kota Mojokerto sebesar 7,41% seperti yang terlihat pada Gambar 2.8.





Gambar 2. 8 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%)

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2013

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf

Cara yang dipakai dalam perhitungan indeks pendidikan Kota Mojokerto 2009 hingga kini adalah *adult literacy rate* dengan batasan usia 15 tahun atau lebih dengan bobot 2/3 ditambah dengan *Combined Gross Enrolment Ratio* (CGER) yang mempunyai bobot 1/3. Definisi yang dipakai oleh PBB, CGER adalah kombinasi jumlah penduduk yang pernah mengenyam pendidikan setara sekolah dasar (*primary school*), sekolah lanjutan (*secondary school*) dan sekolah tinggi (*tertiary school*) tanpa melihat usia kapan mereka bersekolah. Oleh sebab itu disebut kasar (*gross*).

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto pada tahun 2013 sebesar 92.582 orang sedangkan yang bisa membaca di atas usia 15 tahun sebesar 89.507. Angka melek huruf di Kota Mojokerto tahun 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Provinsi/Kab/Kota	Angka Melek Huruf			
	(tahun)			
	2009	2010	2011	2012
Kabupaten				
01. Pacitan	91,56	91,58	91,60	87,50
02. Ponorogo	85,72	85,73	87,32	90,60
03. Trenggalek	92,69	92,83	92,84	92,50
04. Tulungagung	93,50	93,55	93,58	94,50
05. Blitar	91,90	92,00	92,02	91,40

06. Kediri	92,76	92,81	92,84	91,70
07. Malang	89,54	89,55	89,59	90,50
08. Lumajang	86,30	86,32	86,56	82,50
09. Jember	83,08	83,48	83,60	82,30
10. Banyuwangi	86,48	86,66	87,36	90,20
11. Bondowoso	75,31	76,72	78,25	80,20
12. Situbondo	78,20	78,24	78,27	77,00
13. Probolinggo	77,86	78,91	80,44	79,90
14. Pasuruan	88,93	89,99	90,03	90,90
15. Sidoarjo	97,40	97,42	97,76	97,50
16. Mojokerto	94,09	94,11	94,12	93,80
17. Jombang	92,50	92,52	92,87	93,70
18. Nganjuk	90,46	90,48	91,07	90,30
19. Madiun	88,31	89,53	89,55	87,50
20. Magetan	90,28	90,54	90,56	90,90
21. Ngawi	85,12	85,14	85,54	84,90
22. Bojonegoro	84,58	84,78	84,81	84,30
23. Tuban	85,56	85,79	85,83	83,20
24. Lamongan	86,97	87,15	88,71	88,20
25. Gresik	94,36	94,47	94,56	96,10
26. Bangkalan	82,82	82,84	82,87	79,90
27. Sampang	64,81	66,03	67,56	70,70
28. Pamekasan	80,21	80,84	81,82	83,70
29. Sumenep	78,63	78,64	78,66	77,80
Kota				
30. Kediri	97,41	97,53	97,56	96,80
31. Blitar	97,23	97,24	97,27	96,70
32. Malang	97,19	97,20	97,24	98,30
33. Probolinggo	92,33	92,49	92,51	92,00
34. Pasuruan	96,14	96,41	96,43	97,00
35. Mojokerto	97,11	97,12	97,13	97,14
36. Madiun	97,75	97,79	97,80	96,80
37. Surabaya	98,00	98,06	98,07	97,80
38. Batu	97,78	98,26	98,27	95,50
Jawa Timur	87,80	88,34	88,79	89,00

Angka melek huruf di Kota Mojokerto cukup tinggi jauh di atas rata-rata angka melek huruf di Jawa Timur. Mulai tahun 2009 sampai tahun 2013, angka melek huruf di Kota Mojokerto sudah mencapai lebih dari 97%. Artinya hanya kurang 3% saja masyarakat di Kota Mojokerto yang belum bisa membaca dan menulis. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota karena dalam kondisi sekarang selayaknya seluruh masyarakat harus melek huruf sehingga pengurangan angka buta aksara ini akan menjadi program prioritas bagi pemerintahan lima tahun ke depan dengan target capaian pada tahun 2018 sudah mencapai 100% melek huruf. Tantangan ini tidak mudah karena terhambat dengan masalah motivasi dari para target sasaran yang rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga merasa tidak perlu lagi mampu membaca. Strateginya harus melibatkan kelompok masyarakat di mana target berada seperti keluarga, RT/RW, PKK dan keseluruhan pemerintahan di Kota Mojokerto.



2.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. *MYS* bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (*IPM/HDI*).

Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Mojokerto masih di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7.34 di tahun 2011 sedangkan di Kota Mojokerto rata-rata lama sekolah mencapai 9.98. Berikut perbandingan angka *IPM* Kota Mojokerto jika dibandingkan dengan *IPM* Jawa Timur ternyata keseluruhan komponen di atas rata-rata Jawa Timur.

Tabel 2. 25 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	(Tahun)			
	2009	2010	2011	2012
Kabupaten				
01. Pacitan	6,71	6,90	6,94	6,96
02. Ponorogo	6,61	6,68	6,99	7,18
03. Trenggalek	7,19	7,24	7,26	7,31
04. Tulungagung	7,80	7,84	7,85	7,95
05. Blitar	7,23	7,35	7,36	7,40
06. Kediri	7,59	7,60	7,69	7,72
07. Malang	6,80	6,80	7,02	7,08
08. Lumajang	6,03	6,10	6,41	6,43
09. Jember	6,45	6,53	6,73	6,79
10. Banyuwangi	6,81	6,85	6,89	7,25
11. Bondowoso	5,49	5,54	5,66	5,94
12. Situbondo	5,99	6,18	6,19	6,22
13. Probolinggo	5,08	5,57	5,80	5,92
14. Pasuruan	6,33	6,34	6,54	6,83
15. Sidoarjo	9,78	9,84	9,85	9,92
16. Mojokerto	7,79	7,81	7,82	7,94
17. Jombang	7,76	7,77	7,84	8,04
18. Nganjuk	7,11	7,19	7,44	7,61
19. Madiun	6,96	7,38	7,39	7,44
20. Magetan	7,55	7,57	7,60	7,85
21. Ngawi	6,34	6,36	6,99	7,02
22. Bojonegoro	6,53	6,66	6,68	6,72
23. Tuban	6,22	6,41	6,49	6,53
24. Lamongan	7,03	7,19	7,46	7,59
25. Gresik	8,49	8,53	8,84	8,98
26. Bangkalan	5,13	5,16	5,30	5,74
27. Sampang	3,93	3,95	4,20	4,22

Kabupaten/Kota	(Tahun)			
	2009	2010	2011	2012
28. Pamekasan	5,73	6,11	6,32	6,32
29. Sumenep	5,20	5,63	5,64	5,71
Kota				
30. Kediri	10,00	10,20	10,21	10,24
31. Blitar	9,71	9,72	9,75	9,77
32. Malang	10,82	10,83	10,84	10,87
33. Probolinggo	8,35	8,52	8,53	8,67
34. Pasuruan	8,81	8,85	8,96	9,05
35. Mojokerto	9,67	9,97	9,98	10,11
36. Madiun	10,38	10,43	10,44	10,46
37. Surabaya	9,94	9,95	10,08	10,10
38. Batu	8,34	8,51	8,52	8,54
Jawa Timur	7,20	7,24	7,34	7,45

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, tentunya akan memberi pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula.

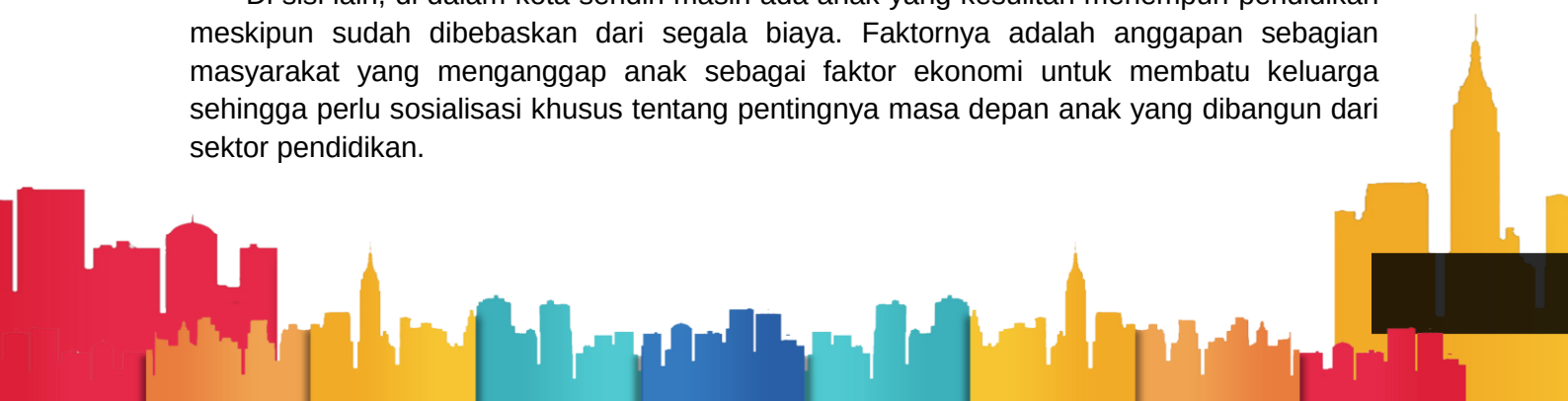
Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Bertambahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pendidikan yang berlangsung saat ini.

2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

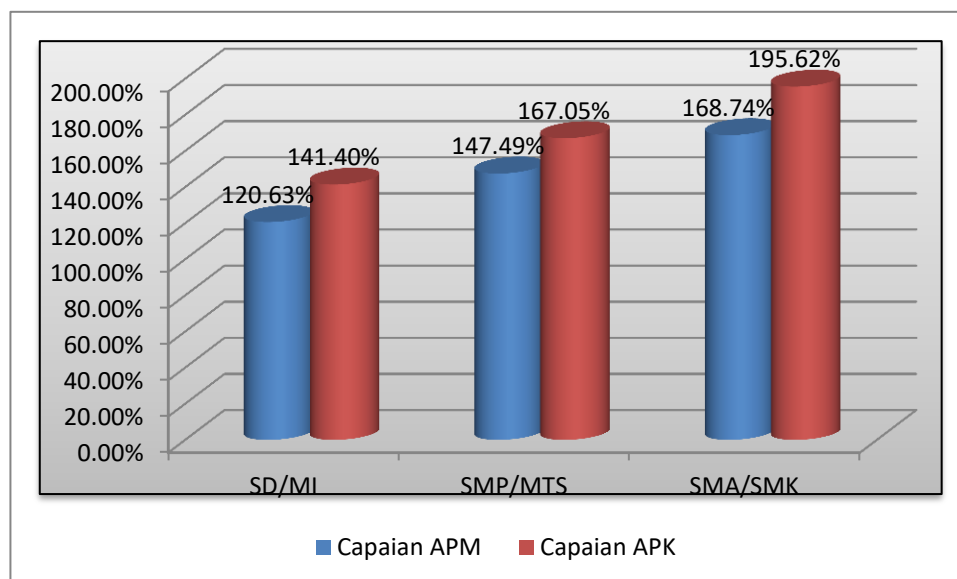
Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) merupakan gambaran dari tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Perkembangan APM di Kota Mojokerto yaitu untuk penduduk usia SD (7-12) mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. APM tahun 2010/2011 sebesar 119,49% meningkat menjadi 120,63% pada tahun 2011/2012 demikian juga dengan APKnya.

APM dan APK untuk anak usia SMP/MTs (13-15 tahun) dari tahun 2010/2011 sampai dengan tahun 2011/2012 terus mengalami peningkatan. APM SLTA setiap tahun juga mengalami peningkatan mencapai 168,74% pada tahun 2012. Data perkembangan APK dan APM tersebut menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun Kota Mojokerto sangat efektif dan signifikan terhadap peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP hingga SMA. Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya minat pelajar yang berasal dari luar Kota Mojokerto bersekolah di Kota Mojokerto.

Di sisi lain, di dalam kota sendiri masih ada anak yang kesulitan menempuh pendidikan meskipun sudah dibebaskan dari segala biaya. Faktornya adalah anggapan sebagian masyarakat yang menganggap anak sebagai faktor ekonomi untuk membantu keluarga sehingga perlu sosialisasi khusus tentang pentingnya masa depan anak yang dibangun dari sektor pendidikan.



Gambaran capaian APK dan APM di Kota Mojokerto dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2. 9 Capaian APK dan APM Kota Mojokerto Tahun 2012
(Sumber : LKPJ Kota Mojokerto 2013)

Pada tahun 2013 APK SD dan SMP Kota Mojokerto di atas 100%. Kondisi ini disebabkan oleh usia masuk SD yang diluar 7-12 tahun bahkan masih kurang dari 7 tahun. Hal ini berimbas pada usia masuk SMP yang kurang dari 13 tahun. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini disebabkan banyak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Capaian APK Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 26 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Mojokerto Tahun 2011-2013

Uraian	APK SD			APK SLTP			APK SLTA		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Kota Mojokerto	152,84	152,85	115,05	126,47	126,49	112,66	102,45	102,46	75,41

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.1.4 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2012 sebagian besar tamatan SD yaitu sebesar 29.27% dan yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 5.95%. Penduduk yang tidak punya ijazah sebesar 24.09% (Tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD), maka hampir sekitar seperempat penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Tentu hal ini menjadi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Jika dilihat perkembangan pertahun penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas sebesar 31,97 persen menjadi 46,64 persen pada tahun 2012. Kondisi yang cukup baik ini diiringi oleh menurunnya persentase penduduk yang tidak punya ijazah, yaitu pada tahun 2008 penduduk yang tidak punya ijazah sebesar 26,07 persen menjadi 24,09 persen pada tahun 2012.

Tabel 2. 27 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Berdasar Ijazah Yang Dimiliki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

Kabupaten/kota	Tidak/belum sekolah	Tidak tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	Jumlah Penduduk
Kabupaten								
01. Pacitan	10,49	13,39	40,15	21,2	10,7	4,08	100,00	426.801
02. Ponorogo	6,60	20,58	29,49	21,07	17,24	5,01	100,00	674.753
03. Trenggalek	4,28	15,25	39,02	23,09	13,80	4,56	100,00	529.610
04. Tulungagung	4,43	12,41	32,74	24,88	20,41	5,13	100,00	762.829
05. Blitar	6,91	16,31	34,41	22,79	15,4	4,19	100,00	858.810
06. Kediri	5,54	16,45	29,47	22,84	21,55	4,14	100,00	1.143.291
07. Malang	7,39	18,95	32,32	20,16	16,84	4,34	100,00	1.883.845
08. Lumajang	12,82	18,02	38,82	15,77	11,25	3,31	100,00	777.144
09. Jember	14,66	20,37	31,41	15,56	13,56	4,43	100,00	1.778.614
10. Banyuwangi	7,39	20,17	28,42	20,63	17,97	5,43	100,00	1.194.979
11. Bondowoso	12,76	27,65	30,39	12,88	11,32	5,01	100,00	577.866
12. Situbondo	18,86	22,71	26,72	14,81	12,64	4,26	100,00	512.577
13. Probolinggo	12,03	27,21	31,65	14,31	11,23	3,57	100,00	840.912
14. Pasuruan	7,62	20,18	33,77	18,21	17,67	2,56	100,00	1.164.719
15. Sidoarjo	2,02	6,46	17,8	24,73	38,13	10,87	100,00	1.522.964
16. Mojokerto	5,11	15,46	25,58	26,29	23,39	4,18	100,00	794.998
17. Jombang	5,88	12,44	27,96	25,51	23,75	4,45	100,00	912.817
18. Nganjuk	7,15	14,62	31,98	20,8	19,49	5,95	100,00	780.474
19. Madiun	9,17	16,47	28,34	20,81	20,97	4,24	100,00	517.736
20. Magetan	6,66	13,67	30,77	19,09	23,66	6,15	100,00	488.041
21. Ngawi	14,37	14,9	29,21	23,11	14,22	4,19	100,00	637.787
22. Bojonegoro	11,84	14,57	34,14	22,36	14,39	2,70	100,00	943.980
23. Tuban	13,93	14,08	34,52	20,22	14,21	3,04	100,00	873.128
24. Lamongan	8,94	15,78	26,42	23,17	19,33	6,35	100,00	918.933
25. Gresik	4,27	9,90	21,55	24,66	31,97	7,65	100,00	905.259
26. Bangkalan	21,85	13,09	39,38	12,26	9,94	3,47	100,00	665.031
27. Sampang	30,81	25,75	26,62	9,09	6,10	1,62	100,00	644.078
28. Pamekasan	15,68	17,55	33,61	15,81	13,69	3,66	100,00	609.762
29. Sumenep	25,47	17,65	31,12	12,78	10,23	2,74	100,00	824.473
Kota								
30. Kediri	2,31	8,76	17,83	21,46	37,37	12,27	100,00	208.873
31. Blitar	2,21	10,36	20,13	23,56	33,06	10,68	100,00	101.662
32. Malang	2,35	5,89	16,45	18,64	38,8	17,86	100,00	647.468
33. Probolinggo	5,59	11,66	23,65	19,37	30,55	9,18	100,00	165.351
34. Pasuruan	3,17	12,04	23,19	21,31	30,02	10,27	100,00	140.026

Kabupaten/kota	Tidak/belum sekolah	Tidaktamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	Jumlah Penduduk
35. Mojokerto	2,48	7,30	14,77	21,74	39,28	14,42	100,00	92.582
36. Madiun	2,23	5,79	16,16	22,02	39,95	13,85	100,00	133.681
37. Surabaya	2,91	6,44	19,83	20,67	36,37	13,77	100,00	2.160.062
38. Batu	3,53	14,14	28,3	20,34	26,6	7,09	100,00	147.745
Jawa Timur	9,25	15,58	29,01	19,97	20,30	5,88	100,00	28.963.661

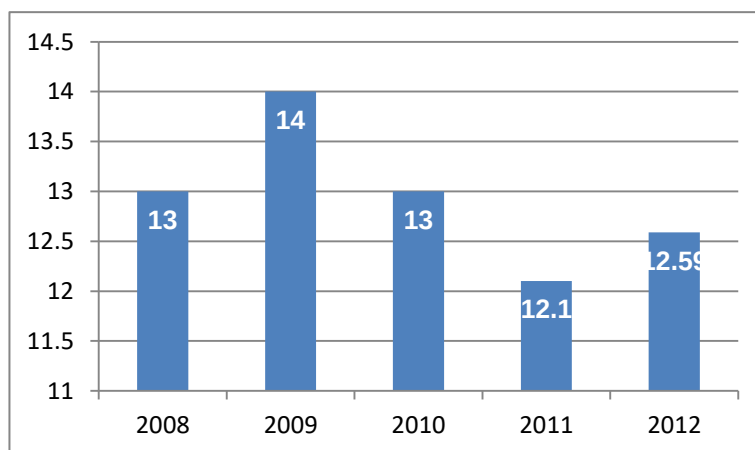
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.2. Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Bayi yang berusia kurang dari 1 bulan (0 – 28 hari) sangat rawan terkena resiko gangguan kesehatan, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan kesehatan pada bayi perlu dilakukan kunjungan neonatus (KN). Data yang diperoleh dari Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pada tahun 2011 cakupan KN lengkap mencapai 95,8% dari jumlah 1.823 bayi. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan cakupan di tahun 2010 sebesar 98,74%.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, kondisi AKB Kota Mojokerto menunjukkan kenaikan dari 11,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 12,1 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 dengan kejadian kematian terbanyak terjadi pada bayi berjenis kelamin laki - laki. Sedangkan untuk kasus AKABA, jumlah kematian balita yang dilaporkan di tahun 2011 sebanyak 6 kasus dari 1.896 kelahiran hidup, dengan AKABA dilaporkan 3,2 per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 2. 10 Kelahiran Bayi Hidup dan Yang Meninggal Sebelum Usia 1 Tahun Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa capaian di tahun 2011 mengalami penurunan dan menjadi capaian terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dibutuhkan peran aktif tenaga kesehatan untuk melaksanakan kunjungan neonatus ke rumah warga masyarakat yang mempunyai bayi, agar capaian KN lengkap mencapai nilai yang maksimal, sehingga meminimalkan risiko kematian bayi akibat penyakit yang tidak terdeteksi sejak dini.

2.2.2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 2. 28 Angka Harapan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Tahun	Angka Harapan Hidup
2009	71.35
2010	71.52
2011	71.7
2012	71,97
2013	72,18

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan angka harapan hidup ini menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus diiringi dengan dukungan masyarakat dalam memberikan dukungan suasana dan akses prasarana publik yang memihak kepada para lansia agar dapat hidup bahagia di masa tuanya.

Tabel 2. 29 Indikator Urusan Kesehatan Kota Mojokerto 2011-2013

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	97,07	80,62	93,18
Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100	100	100
Angka kesembuhan penderita TB paru dan BTA positif (%)	93,48	92,39	84,8
Angka kesakitan DBD /100.000 jiwa (%)	18,6	19,58	18,6
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	51,2	52,98	39,17
Cakupan kunjungan bayi (%)	92,54	77,63	89,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 2013

Secara umum, indikator urusan kesehatan Kota Mojokerto mengalami peningkatan pada tahun 2012, kecuali untuk indikator cakupan kunjungan bayi. Indikator kunjungan bayi bermanfaat untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi kesehatan bayi, utamanya menyangkut peningkatan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Data yang dimiliki di tingkat Kota Mojokerto menyebutkan pada tahun 2011 terdapat 1.823 sasaran bayi, dimana yang melakukan kunjungan sebanyak 1.778 bayi atau 92,54 %.

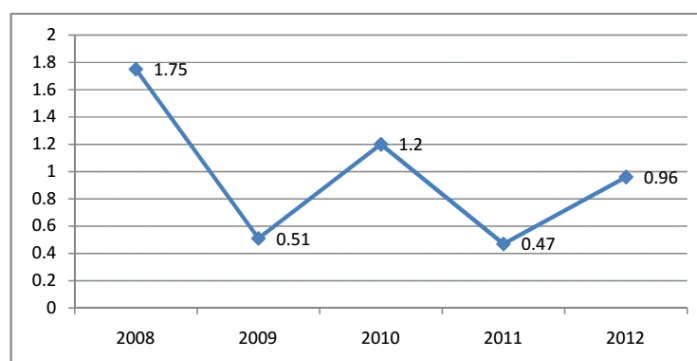
Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menunjukkan bahwa hampir setiap kelahiran yang terjadi telah ditangani dengan tepat. Kemudian, pada setiap tahun *universal child immunization* 100% sudah diberikan pada setiap kelurahan. Begitu juga dengan angka kesembuhan penderita TB paru dan BTA positif yang mengindikasikan bahwa penanganan pasien TB paru dan BTA positif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Walaupun indikator di atas menunjukkan peningkatan yang memuaskan, namun target pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto harus terus ditingkatkan khususnya untuk mendekati angka 100% meskipun tidak dapat sama persis. Oleh karena itu dalam RPJM ini kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi prioritas dalam pelayanan masyarakat di Kota Mojokerto.

2.2.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO dengan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu: rendah (<10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%) dan sangat tinggi (30%).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan terhadap balita adalah penimbangan. Dari jumlah 9.130 balita yang ada di Kota Mojokerto tahun 2011, hanya 70,3% atau sebesar 6.419 balita saja yang ditimbang. Hanya 69% saja yang mengalami kenaikan berat badan, sedangkan 1,4% lainnya atau sebanyak 92 balita dinyatakan BGM. Selain itu, ditemukan juga 52 balita yang dinyatakan berstatus gizi buruk. Kondisi ini tentunya cukup mengkhawatirkan mengingat hampir setiap tahun masih ditemukan kasus balita gizi buruk di Kota Mojokerto.



Gambar 2. 11 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

(Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase pada tahun 2010 dan 2012, sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 capaiannya cenderung menurun. Persentase terbaik dari capaian gizi buruk adalah pada tahun 2011, dengan capaian 0,47%. Namun, kondisi pada tahun 2012 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011, dimana capaian persentase balita gizi buruk mencapai 0,96%. Namun, secara umum tren capaian persentase balita gizi buruk cenderung menurun.

2.2.2.2.4 Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular

a. TBC

Pada tahun 2011, di Kota Mojokerto ditemukan 91 penderita TB Paru BTA(+) baru atau 70,54% dari jumlah perkiraan penderita TB paru yang ditargetkan sebesar 129 penderita. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2010, dimana dari target 129 orang penderita baru ditemukan 92 pasien TB BTA (+).

b. Demam Berdarah

Penyakit demam berdarah dengue ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Kota Mojokerto termasuk daerah endemis penyakit DBD karena hampir setiap tahun ditemukan kasus DBD pada periode tertentu (musiman). Wilayah yang perlu diwaspadai karena merupakan daerah endemis DBD di Kota Mojokerto, yaitu : kelurahan Magersari, Balongsari, Kedundung, Wates, Meri, Mentikan, Miji dan Kranggan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus DBD yang ditemukan di Kota Mojokerto cenderung mengalami penurunan. Incidence Rate (IR) DBD tahun 2011 sebesar 11,6/100.000 penduduk (14 kasus), dibanding tahun 2010 angka tersebut telah mengalami penurunan dan berhasil ditekan tidak melebihi target nasional yang telah ditetapkan, yaitu sebesar < 20/100.000 penduduk. Penurunan angka kejadian DBD ini tidak lepas dari peran serta masyarakat Kota Mojokerto yang telah memiliki kesadaran dalam menggalakkan Gerakan Jum'at Berseri dan PSN 60 Menit melalui Instruksi Walikota Mojokerto No. 1 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006. Kader Motivator Kesehatan bersama dengan masyarakat sekitar melakukan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Selain itu, kegiatan pencegahan penyebaran penyakit juga dilakukan melalui fogging focus segera setelah ada indikasi penderita DBD dan fogging masal sebelum musim penularan dengan dua siklus, terutama pada daerah endemis DBD.

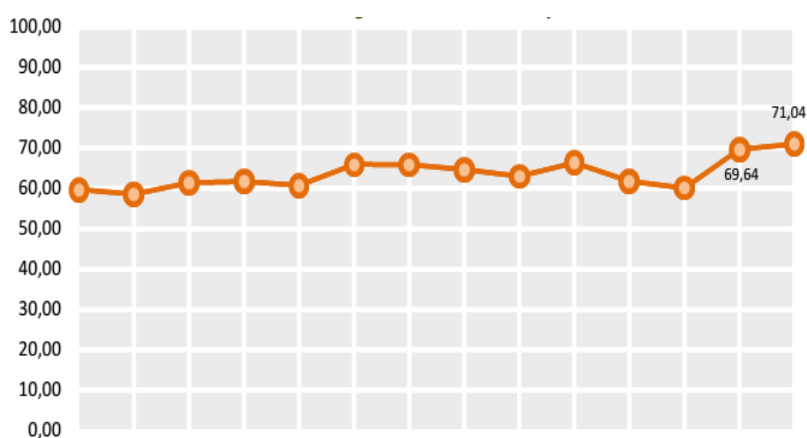
c. HIV/AIDS

Perkembangan penyakit HIV/AIDS di wilayah Kota Mojokerto, berjalan seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk dan ditunjang dengan wilayah Kota Mojokerto sebagai kota "Hinterland" atau penyangga ibukota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Jumlah penderita HIV(+) di Kota Mojokerto dari tahun 2003 hingga tahun 2011 berturut-turut sebanyak 6 Orang (2003); 7 orang (2004); 15 orang (2005); 2 orang (2006); 43 orang (2007); 56 orang (2008); 55 orang (2009); 43 orang (2010) dan tahun 2011 sebanyak 9 orang. Adapun jumlah kumulatif penderita sampai dengan tahun 2011 berjumlah 236 orang.

Selama tahun 2011, di Kota Mojokerto ditemukan sebanyak 433 kasus. Jumlah ini memang lebih sedikit dibanding penemuan kasus di tahun 2010 sebanyak 731 kasus. Namun bukan berarti hal tersebut menandakan bahwa pencegahan penularan HIV/AIDS sudah bisa ditekan, selama masih ada IMS yang ditemukan penularan HIV/AIDS masih sangat dimungkinkan terjadi.

2.2.2.3 Kesempatan Kerja

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang tergabung secara aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun pengangguran. TPAK menyediakan ukuran relatif pasokan tenaga kerja dalam produksi barang maupun jasa.



Gambar 2. 12 Perkembangan TPAK di Kota Mojokerto, 1999-2012

Sumber: *Incremental Capital Output Ratio (Icor) dan Incremental Labour Output Ratio (Ilor) Kota Mojokerto Tahun 2013*

TPAK Kota Mojokerto bergerak pada kisaran wajar 50-70% pada tahun 1999-2012. Naik/turunnya TPAK sangat tergantung pada kesempatan kerja yang tersedia dan keinginan untuk menambah pendapatan. Kesempatan kerja ini juga tergantung pada status pernikahan, status pendidikan, tipe daerah dan kondisi sosial ekonomi. TPAK tertinggi Kota Mojokerto terjadi pada 2012 sebesar 71,04% dengan angka sebelumnya tahun 2011 sebesar 69,64%.

Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam suatu kegiatan ekonomi disebut sebagai angkatan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja yang cenderung menurun. Kondisi tersebut nampaknya masih terjadi di Kota Mojokerto.

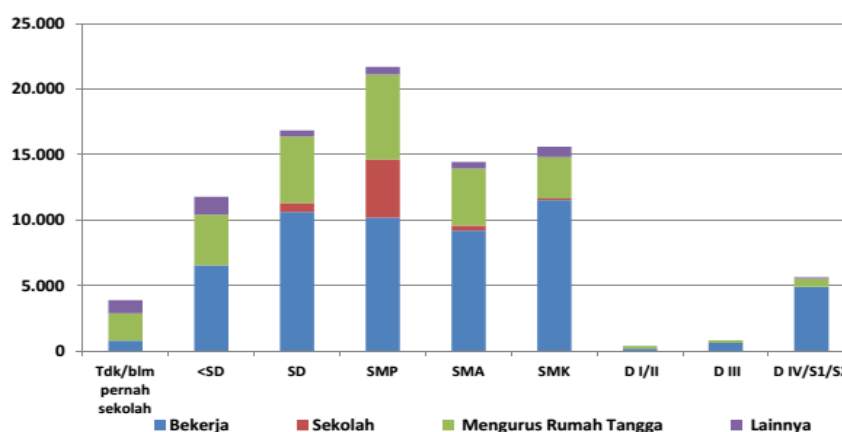
Tabel 2. 30 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja 15 Tahun keatas Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	83,385	83,385	83,385	91.346	92,218
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	55,934	56,836	59,836	60,144	61,402

Angkatan Kerja 15 thn keatas (org)	83,385	83,385	83,385	91.346	92,218

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan angkatan kerja 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, penduduk usia kerja (15+) di Kota Mojokerto memiliki ijazah setara SLTA (36,46%), SLTP (26,83%), SD (17,61%) dan 5,80% berijazah D-I ke atas. Kondisi ini memberi gambaran kepada investor tentang kualitas dan ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Mojokerto. Penduduk yang berijazah D-III ke atas kegiatan terbanyak dihabiskan untuk bekerja, sedangkan penduduk kurang dari SD dan tidak tamat SD memiliki persentase bekerja paling sedikit. Berkaitan dengan program wajib belajar 12 tahun, penduduk yang mempunyai ijazah SLTA akan memperbesar kesempatan mendapatkan pekerjaan. Sementara penduduk yang berijazah DI/II dan D II kegiatan terbanyak mereka adalah bekerja dan mengurus rumah tangga.



Gambar 2. 13 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Kota Mojokerto, 1999-2012

Sumber: *Incremental Capital Output Ratio (Icor)* dan *Incremental Labour Output Ratio (Ilor)* Kota Mojokerto Tahun 2013)

2.2.2.3.1 Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Mojokerto tahun 2009-2013.

Tabel 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT/%)	9,29	7,52	5,86	7,31	5,68

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

Jumlah pengangguran mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 9,29% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mojokerto. Tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2011 dan 2013 yakni sebesar 5,86%. Namun pada Tahun 2012 TPT Kota

Mojokerto mencapai 7,31%, meningkat 1,45% dari tahun 2011. Peningkatan ini berkaitan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2012 tidak bekerja. Sehingga, hal tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat.

2.2.2.3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk Kota Mojokerto adalah 44,07. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 46 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Selengkapny dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 32 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	29237	29999	29999	31500	33712
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5952	6116	6116	8056	7593
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	35189	36115	36115	39556	41305
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	81166	83385	83385	94666	93719
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	43.35	43.31	43.31	41.78	44.07

Sumber: *Incremental Capital Output Ratio (Icor)* dan *Incremental Labour Output Ratio (Ilor)* Kota Mojokerto Tahun 2013)

2.2.2.4 Keamanan dan Ketertiban

Jumlah demonstrasi adalah jumlah kejadian unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2. 33 Jumlah Unjukrasa/Demonstrasi Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

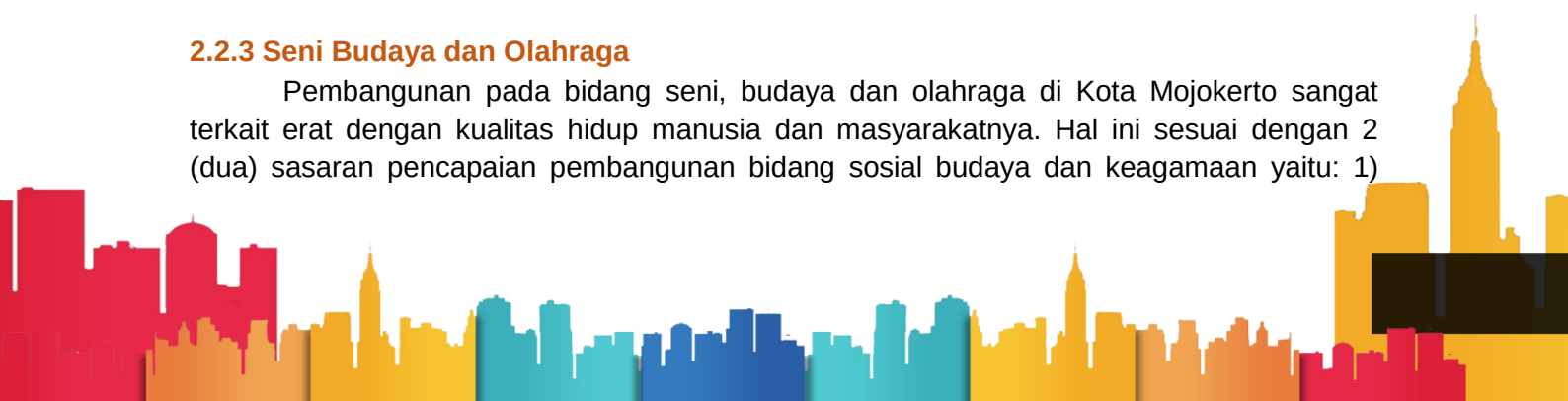
Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Unjukrasa/Demonstrasi dalam 1 tahun	10	9	11	12	13

Sumber: Bakesbangpol. Kota Mojokerto 2013,

Jumlah Unjukrasa/Demonstrasi dalam 1 tahun di Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Unjukrasa/Demonstrasi terbanyak terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 13 kali.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan pada bidang seni, budaya dan olahraga di Kota Mojokerto sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: 1)



untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga Kota Mojokerto selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 34 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009 -2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah group kesenian	Group	41	41	41	44	44
2	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah club olahraga	Group	28	29	29	29	29
4	Jumlah gedung olahraga	Unit	5	5	5	6	6

Sumber: Dinas P & K Kota Mojokerto 2013

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan pembangunan olahraga. Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Jumlah organisasi olahraga sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Organisasi Olahraga Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Organisasi Olahraga	21	23	24	24	24

Sumber: Dinas P & K Kota Mojokerto 2013

Perkembangan jumlah organisasi olahraga di Kota Mojokerto menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Permasalahannya terletak pada keterbatasan dukungan prasarana pendukung pengembangan olah raga seperti lapangan olah raga, pembinaan dalam bentuk pertandingan-pertandingan, dan penghargaan yang mendorong atlet untuk berprestasi. Untuk ini perlu dilakukan regulasi yang mampu mendorong aktivitas dan prestasi para olah ragawan di Kota Mojokerto.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Secara umum Rasio Ketersediaan Sekolah pada tahun 2012 dan 2013 yang terus mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah, serta persaingan dengan pelajar dari luar Kota Mojokerto yang sekolah di Kota Mojokerto karena keunggulan kualitas dan pendidikan gratisnya.

Tabel 2. 35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 - 2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Satuan	Tahun



			2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	Unit	67	70	70	70	70
1.1	Jumlah Ruang Kelas	Ruang	450	458	479	479	479
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	Jiwa	10.681	11.826	12.316	13.545	-
1.3	Rasio		42,1	38,7	38,9	35,4	33,73
2	SMP/MTS	Unit	20	20	20	20	20
2.1	Jumlah Ruang Kelas	Ruang	234	239	257	261	268
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	Jiwa	5.625	6.886	4.559	5.015	-
2.3	Rasio		41,6	34,7	56,4	52	32,7
3	SMA/MA/SMK	Unit	21	21	21	22	22
3.1	Jumlah Ruang Kelas	Ruang	289	303	303	303	303
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	Jiwa	5486	8178	5859	7.854	-
3.3	Rasio		52,7	37,1	51,7	38,6	37,9

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

1.3.1.1.2. Rasio Guru/Murid

Secara keseluruhan, rasio guru/murid di Kota Mojokerto pada tahun 2013 mengalami penurunan. Rasio guru dengan murid Kota Mojokerto pada jenjang SD/MI tahun 2012 sebesar 66,2 menurun dibanding tahun 2013 sebesar 55,5. Pada jenjang SMP/MTs tahun 2013 sebesar 75,47 meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 73,4 dan jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 83,5 menurun dibanding tahun 2012 sebesar 85,3. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Mojokerto lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah murid. Namun dari segi idealitas rasio ini masih terlalu tinggi dari angka ideal 20 murid per seorang guru.

Tabel 2. 36 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2009 - 2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	42.1	38.7	41.3	66,2	55,5
2	SMP/MTS	87.9	73.2	59.9	73,4	75,47
3	SMA/MA/SMK	78.0	63.5	64.3	85,3	83,55

Sumber: Dinas P & K Kota Mojokerto 2013

2.3.1.1.3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar namun juga untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak. Program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak dini.

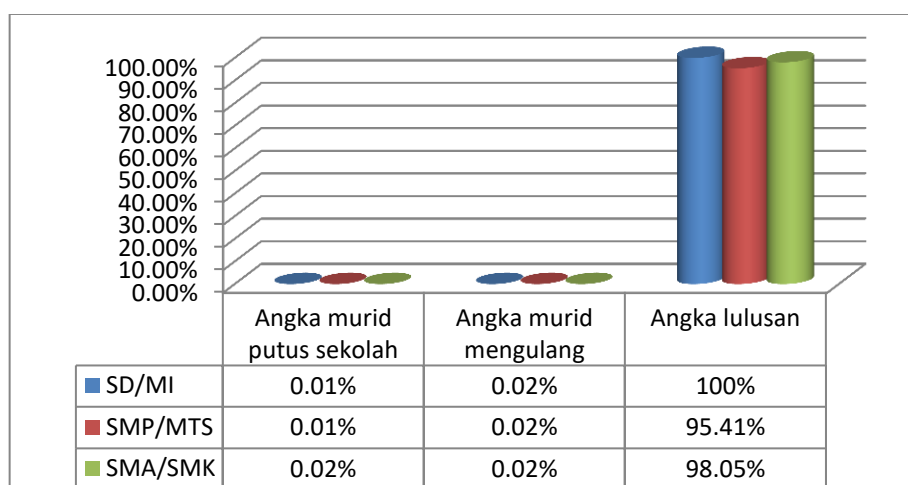
Indikator Keberhasilan Program Pendidikan anak Usia Dini dapat dilihat dari keberadaan jumlah pendidikan pra sekolah/playgroup dan TK yang semakin meningkat yaitu pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah sekolah sebanyak 57 unit, naik menjadi 64 unit di tahun ajaran 2012/2013. Jumlah penduduk usia 5-6 tahun masuk TK naik menjadi 4.594 orang dengan jumlah guru 313 orang, dan pada tahun ajaran 2013/2014 diperkirakan jumlah

murid dan guru TK mengalami kenaikan dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pra sekolah atau lembaga TK semakin meningkat.

2.3.1.1.4. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Angka Lulusan

Perkembangan capaian angka murid putus sekolah atau DO pada tahun ajaran 2010/2011 hingga tahun 2011/2012 cenderung menurun, yaitu untuk SD/MI dari 0,03% turun menjadi 0,01% pada tahun 2011/2012. Perkembangan angka putus sekolah SMP dari tahun 2010/2011 dan tahun 2011/2012 tetap pada 0,01%. Stabilitasnya angka putus sekolah tersebut berkaitan erat dengan program pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs dari APBN dan dana pendamping BOS dari APBD Kota Mojokerto.

Sedangkan Perkembangan angka putus sekolah paling tinggi adalah SMA/SMK yaitu sebesar 0,02%. Angka ini sudah sangat turun dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 0,97%. Penurunan angka murid putus sekolah tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di sekolah semakin membaik.



Gambar 2. 14 Capaian Angka Murid Mengulang, Angka Murid Putus Sekolah, dan Angka Lulusan Kota Mojokerto Tahun 2012
(Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013)

Angka murid mengulang kelas untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK pada tahun ajaran 2011/2012 mencapai 0,02%. Angka mengulang kelas di atas menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di sekolah sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga siswa mengulang bisa lebih diminimalisir.

Angka lulusan tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI 100%, diikuti SMA/SMK sebesar 98,05% dan SMP/MTs sebesar 95,41%. Berdasarkan capaian ketiga jenjang pendidikan, kinerja terbaik berada pada tingkat SD/MI. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka mengulang dan putus sekolah yang cukup rendah serta angka lulusan yang cukup tinggi.

2.3.1.1.5. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Mojokerto adalah TK, SD, SLTP, SMA/SMK yang tersebar diseluruh kelurahan di Kota Mojokerto. Data jumlah sekolah di Kota Mojokerto terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 37 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mojokerto

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan

	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
Prajuritkulon	23	7	5	4	5	1	1
Magersari	36	13	6	6	4	1	0
JUMLAH	59	20	11	10	9	2	1

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV pada jenjang pendidikan dasar di Kota Mojokerto dalam lima tahun meningkat dari 70% pada tahun 2009 menjadi 86% pada tahun 2013. Begitu juga pada jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan, dari 93% pada tahun 2009 menjadi 96% pada tahun 2013. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV pada jenjang menengah jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan pada pendidikan dasar. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV terus mengalami peningkatan, karena adanya tuntutan zaman serta sistem sertifikasi guru yang mengharuskan adanya peningkatan tingkat pendidikannya.

Tabel 2. 38 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Per Jenjang Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan Dasar (SD/MI-SMP/MTs)					
1.1.	Jumlah Guru	1397	1346	1195	1538	1519
1.2.	Jumlah Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV	990	827	1007	1099	1315
1.3.	Persentase	70%	61%	84%	71%	86%
2	Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK)					
2.1.	Jumlah Guru	977	1356	549	919	939
2.2.	Jumlah Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV	912	962	510	522	903
2.3.	Persentase	93%	70%	92%	56%	96%
3.	Semua jenjang Pendidikan (SD/MI-SMP/MTs dan SMA/MA/SMK)					
3.1.	Jumlah Guru	2374	2702	1744	2457	2458
3.2.	Jumlah Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV	1902	1789	1517	1621	2218
3.3.	Persentase	80%	66%	86%	65%	90%

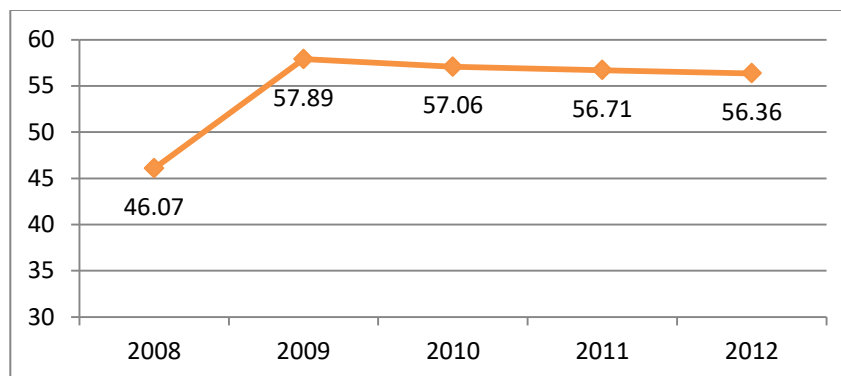
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas, membudayakan NKKBS, meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, serta kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera, dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera, menganalisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan

tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.



Gambar 2. 15 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota Mojokerto

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

Rasio posyandu per satuan balita Kota Mojokerto cenderung meningkat walaupun pada beberapa tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah balita dari tahun ke tahun sedangkan jumlah posyandu tidak berubah, yakni 160 posyandu pada tahun 2008-2010. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah posyandu meningkat sebesar 1 unit. Capaian rasio tertinggi untuk posyandu dibandingkan balita terjadi pada tahun 2009, dimana jumlah balita sebanyak 9.262 dan jumlah posyandu sebanyak 160 unit. Kemudian capaian pada tahun 2012 sebesar 56,36%. Artinya, rata-rata 1 posyandu di Kota Mojokerto dimanfaatkan oleh 56 balita. Capaian ini melebihi angka ideal, dimana 1 posyandu melayani 100 balita.

2.3.1.2.2. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis

Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Kota Mojokerto menunjukkan rasio yang cukup ideal terhadap jumlah penduduk. Perkembangan RSUD Surodinawan menjadi RSUD Tipe B merupakan keberhasilan yang perlu terus ditingkatkan. RSUD ini akan terus dikembangkan sarana dan fasilitasnya hingga menjadi RSUD Pendidikan (Tipe B plus) sedangkan beberapa PUSKESMAS yang telah memenuhi kriteria akan dikembangkan menjadi RSUD Tipe D yang akan memasok pasien rujukan ke RSUD Tipe B+.

Beberapa Klinik maupun RS swasta terus berkembang dan menjadi pesaing tersendiri bagi pelayanan kesehatan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Tabel 2. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit dan Tenaga Medis Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah puskesmas	5	5	5	5	5
Jumlah poliklinik	10	13	11	10	10
Jumlah puskesmas pembantu	14	14	14	14	14
Jumlah rumah sakit	7	7	7	7	7
Jumlah dokter	67	59	84	73	52
Jumlah tenaga medis	120	113	135	123	227

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan sumber data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto, persentase penanganan sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya volume sampah. Berdasarkan komposisi dan karakteristik sampah, persentase jenis sampah terbanyak adalah sampah organik (± 70 persen), kemudian kertas dan plastik. Persentase ini menunjukkan potensi dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos serta daur ulang kertas dan plastik.

Tabel 2. 39 Jumlah Volume Sampah Organik dan Anorganik Tahun 2008- 2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Organik	m ³	208,8	215,1	220,5	226,8	242,1	260,1
2	Anorganik	m ³	23,2	23,9	24,5	25,2	26,9	28,9
	Jumlah	m ³	232	239	245	252	269	289

Sumber: DKP Kota Mojokerto 2013

Sampah di Kota Mojokerto dikelola oleh DKP dengan *Integrated system*. Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan *open dumping*, yaitu dengan cara digelar kemudian ditimbun tanah dengan interval waktu 3 bulan sekali atau disesuaikan dengan anggaran. Pembuangan di TPA dilakukan dengan sistem blok/kelompok setiap hari di lokasi paling ujung dimana setelah timbunan mencapai kapasitas volume dilakukan perataan dengan Buldozer setiap 2 – 3 hari sekali. Sedangkan untuk mengatasi jumlah populasi lalat dalam pengelolaan sampah di TPA, dilakukan penyemprotan setiap 1 – 2 minggu sekali oleh Dinas Kesehatan. Selain itu disediakan pula tandon air bersih untuk warga di sekitar TPA yang volumenya ± 4000 liter dan diisi setiap 2 hari sekali oleh PDAM. Secara umum pengelolaan persampahan di Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik, terbukti dari penghargaan Adipura yang berhasil diraih.

Tabel 2. 40 Pelayanan Persampahan di Kota Mojokerto

Parameter	Jumlah	
	Satuan	Volume
Rata-rata timbunan sampah	m ³ /hari	377
Luas area pelayanan	m ²	13.999
Produksi sampah:		
a. Jumlah sampah rumah tangga	m ³ /hari	181,5
b. Jumlah sampah daerah perdagangan	m ³ /hari	10
c. Jumlah sampah pasar	m ³ /hari	82
d. Jumlah sampah fasilitas umum	m ³ /hari	69,5
e. Lain-lain	m ³ /hari	34
Jumlah sampah yang diangkat	m ³ /hari	338,55

Sumber: DKP Kota Mojokerto 2013, diolah

Lokasi TPA sampah di Kota Mojokerto berada di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari dengan luas area $\pm 3,5$ hektar dengan menggunakan kombinasi pengolahan sampah sistem *Open Dumping* dan *Controlled Landfill*. Selain itu di lokasi TPA Sampah juga dilengkapi dengan 2 (dua) buah alat pencacah/penghancur sampah yang fungsinya agar pengelolaan sampah lebih mudah serta kegiatan pengkomposan yang dilakukan.

Tabel 2. 41 Volume Sampah TPS

NO	Kecamatan/Kelurahan	Timbunan Sampah (m ³ /hari)	Sampah Yang Terangkut (m ³ /hari)	Prosentase Yang Tertanggulangi
PRAJURITKULON				
1	Dipo Prapanca	30	29,5	98
2	TPS Surodinawan	5	4,5	90
3	TPS Perum Gatoel	9	8	88,89
4	TPS Les Padangan	15	14,5	96,67
5	TPS Prajuritkulon	9	8,5	94,44
6	TPS Kranggan	12	12	100
7	TPS Blooto	6	6	100
MAGERSARI				
1	Dipo Wates	40	39,5	98,75
2	Dipo A Yani	40	39,5	98,75
3	Dipo Tropodo	46	45	97,83
4	TPS Kandang Babi	33	32,5	98,48
5	Dipo Pasar Tanjung	62	61	98.39
6	TPS Terminal	10	10	100
7	TPS Kedundung	10	9,5	95
8	TPS Gunung	6	6	100
9	TPS Rumah Dinas Walikota	3	3	100
	Sampah Lain-lain	12	12	100
	Sampah Saluran	4	4	100

Sumber: DKP Kota Mojokerto 2013,

2.3.1.4. Pekerjaan Umum

2.3.1.4.1. Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kondisi jalan dibagi menjadi kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Hal ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- ❖ Kondisi Baik (B) adalah ruas jalan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dengan tingkat kerusakan $\leq 6\%$, sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang disebabkan kondisi jalan.
- ❖ Kondisi Sedang (S) adalah ruas jalan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dengan tingkat kerusakan 6-10%. Kerusakan yang ada tidak atau sedikit saja menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas.
- ❖ Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah ruas jalan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dengan tingkat kerusakan 10-16%. Kerusakan yang ada menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- ❖ Kondisi Rusak (R) adalah ruas jalan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dengan tingkat kerusakan 16-20%. Kerusakan yang ada sangat menghambat kelancaran arus lalu lintas, sehingga kendaraan harus berjalan perlahan-lahan,

mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan pada permukaan perkerasan.

- ❖ Kondisi Rusak Berat (RB) adalah ruas jalan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dengan tingkat kerusakan > 20%. Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel 2. 42 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	103,865	112,115	118,540	128,741	122,148
2	Total panjang jalan	Km	118,438	122,488	127,278	137,068	137,068
3	Proporsi panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik	%	88	92	93	93.92	89,427

Sumber: DPU Kota Mojokerto 2013, diolah

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik setiap tahun di Kota Mojokerto selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tercatat sebesar 89,4% dari total panjang jalan di Kota Mojokerto. Selain perawatan rutin, peningkatan jaringan jalan juga terus dilakukan. Permasalahannya adalah tipe jalan-jalan di Kota Mojokerto adalah tipe jalan dalam kota yang sempit dan padat serta belum terintegrasinya pembangunan sarana jalan dengan prasarana pendukung lain seperti drainase, tata lampu kota dan penataan iklan yang belum terkoordinasi.

Tabel 2. 43 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi, Kelas dan Status Jalan (Km)

No	Uraian	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kota	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
A	Jenis Permukaan	4,900	4,900	-	-	127,338	136,096
1	Diaspal/Asphalt	4,900	4,900	-	-	120,640	128,549
2	Kerikil/Gravel	-	-	-	-	0,000	0,000
3	Tanah/Underground	-	-	-	-	6,698	7,547
4	TidakDirinci/NotSpecify	-	-	-	-	0,000	0,000
B	KondisiJalan/Surface Condition	4,900	4,900	-	-	127,338	136,096
1	Baik/Good	-	-	-	-	59,261	61,129
2	Sedang/Moderate	4,900	4,900	-	-	65,977	66,640
3	RusakRingan/Light Damaged	-	-	-	-	2,100	0,780
C	RusakBerat/Seriously Damaged	-	-	-	-	7,547	
3	Kelas Jalan/Road Class	4,900	4,900	-	-	127,338	136,096
1	Arteri	4,900	4,900	-	-	0,000	0,000
2	Kelas I	-	-	-	-	0,000	0,000
3	Kelas II	-	-	-	-	12,190	12,190
4	Kelas III	-	-	-	-	0,000	0,000

No	Uraian	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kota	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
5	Kelas IIIA	-	-	-	-	8,277	8,352
6	Kelas IIIB	-	-	-	-	78,508	44,114
7	Kelas IIIC	-	-	-	-	21,725	71,440
8	Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	6,638	0,000

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

2.3.1.4.1.2. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Panjang saluran irigasi di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2008-2012 tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 44 Jaringan Irigasi Tahun 2009-2013 Kota Mojokerto

Tahun	Panjang saluran irigasi (Km)
2009	38,543
2010	38,543
2011	38,543
2012	38,543
2013	38,543

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Jaringan irigasi yang ada di Kota Mojokerto ternyata panjangnya stagnan artinya sepanjang lima tahun terakhir ternyata tidak ada pembangunan jaringan irigasi. Bahkan jika dicermati di lapangan justru banyak di antara jaringan irigasi ini yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai akibat perubahan tata guna lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan kawasan bisnis serta fasilitas umum lainnya.

Sektor pertanian di Kota Mojokerto dari sisi ekonomis kurang berkembang dibanding dengan sektor usaha ekonomi dan jasa lainnya, sehingga pelan tapi pasti lahan-lahan pertanian akan tergusur dan jaringan irigasi dan kelengkapannya yang dibangun dengan biaya yang mahal akan semakin tidak terurus dan tidak berfungsi.

2.3.1.4.1.3. Jumlah Prasarana LLAJ yang terpelihara

Indikator ini menggambarkan jumlah prasarana lalu lintas yang terpelihara oleh pemerintah. Target pada tahun 2013 adalah sebanyak 428 buah prasarana lalu lintas. Capaian kinerja dari target adalah 100%, artinya jumlah prasarana lalu lintas yang terpelihara sebanyak 428 buah.

Capaian kinerja pemeliharaan kondisi gedung terminal Kertajaya juga 100% dari target yang ditetapkan. Persoalan yang dihadapi oleh Terminal Kertajaya adalah hambatan dalam peningkatan status terminal akibat dari status tanah yang belum tersertifikasi. Sebenarnya tersedia anggaran peningkatan prasarana yang memadai dari Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah jika status kejelasan sertifikat tanah tersebut dapat terselesaikan.

2.3.1.4.2. Prasarana Drainase

Sistem drainase di Kota Mojokerto secara umum cukup memadai. Hal itu terlihat dari kapasitas saluran dan jaringan jalan yang sudah dilengkapi dengan saluran drainase, yaitu

61,74 km (tahun 2003). Sungai yang melewati Kota Mojokerto ada 2 (dua), yaitu Kali Brangkal dan Kali Sadar. Namun karena kondisi topografi Kota Mojokerto cukup rendah dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, maka tidak dapat dihindari Kota Mojokerto menjadi langganan banjir. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya adalah sebesar 66,7 Ha, dengan tinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-rata 12 jam.

Langkah rasional yang dapat dilakukan adalah normalisasi sungai yang ada di dalam kota dengan mengembalikan kondisi drainase yang dulunya cukup memadai dan membangun beberapa embung sebagai pengganti dari areal persawahan yang selama ini menjadi tempat buangan air hujan yang banyak diantaranya berubah fungsi menjadi perumahan dan prasarana umum lainnya.

2.3.1.5. Perumahan

2.3.1.5.1. Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*drinking water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Tabel 2. 45 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	99,6%	86,88%	68,88%	76,3%	78,31 %

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Mojokerto cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan karena kondisi air tanah yang ada di Kota menurut masyarakat masih layak dipakai termasuk dikonsumsi. Padahal hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa kandungan logam khususnya Fe di air tanah cukup tinggi, termasuk di antaranya adalah kandungan bakteri e-coli yang tinggi akibat sanitasi yang kurang sehat khususnya di pemukiman padat penduduk di tengah kota. Di sisi lain, pelayanan PDAM juga belum memuaskan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan air bersih yang di sisi lain dilakukan revitalisasi pelayanan PDAM bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Mojokerto sampai dengan pertengahan tahun 2013 sebesar 135.689 jiwa dengan rata-rata kepadatan ± 8.263 jiwa/km² (BPS Kota Mojokerto 2013) secara otomatis akan meningkatkan buangan limbah cair domestik, yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Limbah cair domestik dapat berasal dari pembuangan tinja yang tidak tepat, misalnya pada air sungai atau saluran air lainnya. Oleh karena itu kepemilikan jamban keluarga merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat mengurangi terjadinya pencemaran air akibat limbah domestik yang berasal dari tinja. Berikut adalah data mengenai jumlah sarana tempat buang air besar (jamban keluarga) penduduk Kota Mojokerto:



Tabel 2. 46 Rumah memiliki jamban

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Sarana Pembuangan Air Besar (Jamban)			
			Septictank	Cemplung	MCK/WC Umum	Sanimas
Kecamatan Magersari						
1	Wates	4.748	4.564	43	7	1
2	Kedundung	3.406	2.239	199	4	2
3	Gn.Gedangan	1.277	695	18	4	1
4	Meri	1.695	1.405	37	3	1
5	Gedongan	508	505		1	-
6	Magersari	1.726	1.056		6	-
7	Purwotengah	494	455		2	-
8	Sentanan	434	470		10	1
9	Jagalan	743	723		9	1
10	Balongsari	1.99	1.257		5	3
Kecamatan Prajuritkulon						
11	Mentikan	1.737	1.013	140	3	1
12	Kauman	760	518	190	1	-
13	Pulorejo	1.289	957	56	14	2
14	Miji	1.778	1.395	230		1
15	Blooto	1.225	677	56		3
16	Prajuritkulon	1.159	649	20		1
17	Surodinawan	2.209	1.327	33		3
18	Kranggan	2.063	1.366	128		2
JUMLAH		29241	21271	1150	69	23

Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar penduduk telah memiliki jamban keluarga yang dilengkapi dengan septic tank, bahkan Pemerintah Kota Mojokerto telah berpartisipasi dalam program Sanimas yang bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran terhadap badan air oleh limbah domestik. Namun perlu diwaspadai adanya kemungkinan pencemaran yang berasal dari rembesan septic tank yang bocor/rusak, atau juga karena jarak antara septic tank dengan sumur penduduk terlalu dekat (kurang dari 9 meter) akibat dari pola pemukiman padat penduduk di tengah kota.

Tabel 2. 47 Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) Rumah Tangga

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah SPAL Rumah Tangga			
			Asal bantuan dari Sektor		Swadaya Masyarakat	
			Kesehatan	Non Kesehatan	Ada	Memenuhi Syarat
Kecamatan Magersari						
1	Wates	4.748	2	2	4.635	4.388
2	Kedundung	3.406	8	40	2.787	2.787
3	Gn. Gedangan	1.277	10		1.106	1.106
4	Meri	1.695	9		1.596	1.596

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah SPAL Rumah Tangga			
			Asal bantuan dari Sektor		Swadaya Masyarakat	
			Kesehatan	Non Kesehatan	Ada	Memenuhi Syarat
5	Gedongan	508			508	426
6	Magersari	1.726			1.926	1.329
7	Purwotengah	494			494	425
8	Sentanan	434			434	345
9	Jagalan	743			743	580
10	Balongsari	1.99			1.99	1.573
Kecamatan Prajuritkulon						
11	Mentikan	1.737		17	1.058	634
12	Kauman	760			654	557
13	Pulorejo	1.289			1.192	859
14	Miji	1.778			1.681	1.678
15	Blooto	1.225			894	894
16	Prajuritkulon	1.159			777	777
17	Surodinawan	2.209			1.657	1.657
18	Kranggan	2.063			1.671	1.671
JUMLAH		29.241	29	59	25.803	23.282

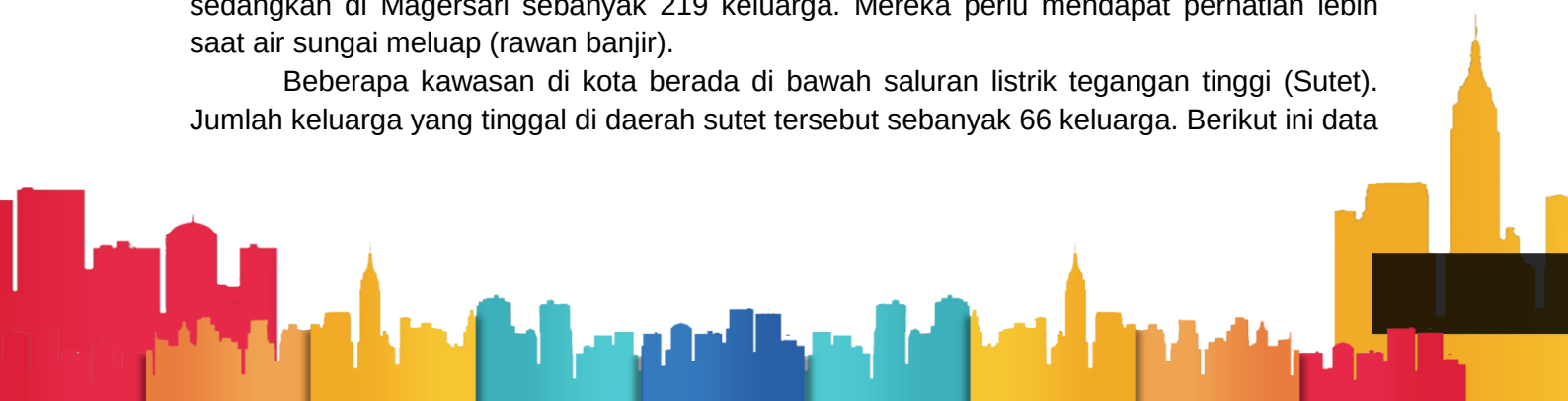
Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar telah memiliki SPAL sehingga tekanan terhadap sumber daya air telah diminimalkan. Berdasarkan kondisi pencemaran kualitas air (beban pencemaran yang masuk ke lingkungan per satuan area) dan daya dukung lingkungan, maka pengelolaan penanganan air limbah perkotaan di Kota Mojokerto hirarkinya dilaksanakan berdasarkan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk merupakan faktor yang paling dominan terhadap pencemaran air. Kepemilikan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi kesehatan khususnya jamban dan septic tank serta bangunan resapan, terutama di daerah pemukiman padat, dan daerah bantaran sungai di Kota Mojokerto merupakan kebutuhan yang harus dilakukan karena bila tidak dilakukan menimbulkan dampak terhadap kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

2.3.1.5.2. Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh rumah tidak layak huni (gubuk, rumah dari bahan bekas), banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, buang air besar tidak di jamban dan berada di area marjinal (tepi sungai, pingir rel kereta, dan sebagainya). Masih banyak rumah tangga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai. Rumah di bantaran sungai terdapat di 7 kelurahan di Kecamatan Prajuritkulon dan 4 kelurahan di Kecamatan Magersari. Di Prajuritkulon jumlah keluarga yang mendiami rumah di bantaran sungai sebanyak 1009 keluarga, sedangkan di Magersari sebanyak 219 keluarga. Mereka perlu mendapat perhatian lebih saat air sungai meluap (rawan banjir).

Beberapa kawasan di kota berada di bawah saluran listrik tegangan tinggi (Sutet). Jumlah keluarga yang tinggal di daerah sutet tersebut sebanyak 66 keluarga. Berikut ini data



tentang jumlah rumah di bantaran sungai, di bawah Sutet, dan pemukiman kumuh di Kota Mojokerto:

Tabel 2. 48 Ketidakteraturan Perumahan di Kota Mojokerto

Kecamatan	Rumah di Bantaran Sungai	Rumah di Bawah Listrik Tegangan Tinggi	Rumah Kumuh
Prajuritkulon	925	-	40
Magersari	219	62	-
Kota Mojokerto	1144	62	40

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,

2.3.1.5.3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area/kawasan terbuka tanpa bangunan yang dalam pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman secara alamiah atau budidaya. Hampir 40% lahan di Kota Mojokerto merupakan kawasan terbangun. Yang terdata sebagai RTH yang dikelola Pemkot Mojokerto meliputi taman kota seluas $\pm 18.120 \text{ m}^2$ dan hutan kota seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$.

Keterbatasan lahan di Kota Mojokerto menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan 30% RTH di Kota ini, akibatnya banyak prasarana/lahan masyarakat yang kemudian masuk dalam kawasan RTH pada proses penyusunan RTRW lalu. Kondisi ini menjadi masalah ketika masyarakat akan menggunakan lahannya untuk kepentingan produktif. Sehingga perlu dibuat catatan untuk merevisi RTRW lima tahunan yang akan datang untuk menghindari konflik sosial lebih lanjut.

Jumlah luas dan lokasi taman kota Mojokerto sudah teridentifikasi seperti berikut di bawah ini. Permasalahan terletak pada pemeliharaan dan dukungan prasarana yang kurang optimal seperti kebersihan, penerangan, tempat sampah, toilet dan prasarana olah raga dan santai untuk keluarga sehingga taman-taman kota ini tidak berfungsi secara optimal.

Tabel 2. 49 Jumlah, luas, dan lokasi Taman Kota di Kota Mojokerto

NO	NAMA TAMAN/MONUMEN	LOKASI	LUAS (m)
1	Monumen Proklamasi	Alun-alun	200
2	Taman Kota (Alun-alun)	Alun-alun	10
3	Perempatan Sekar Putih	By Pass	15
4	Taman Gapura Pintu Masuk Kota	By Pass	25
5	Taman Tabanas	Jl. A. Yani	150
6	Taman Jalur Pemisah	Jl. Benteng Pancasila	100
7	Perempatan Bhayangkara	Jl. Bhayangkara	10
8	Taman Sudut Pom Bensin	Jl. Bhayangkara	80
9	Taman Kelurahan Miji	Jl. Brawijaya	50
10	Taman Swadesi	Jl. Brawijaya	45
11	Taman Pot Sekarsari	Jl. Empunala	50
12	Perempatan Sekar Sari	Jl. Empunala	40
13	Taman Kerp. Empunala	Sepanjang Jl. Empunala	2.39
14	Kirab Remaja	Jl. Gajah Mada	30

NO	NAMA TAMAN/MONUMEN	LOKASI	LUAS (m)
15	Pot Space Wan	Jl. Gajah Mada	-
16	Taman Jalur Pemisah	Jl. Gajah Mada	600
17	Taman Monumen Adipura	Jl. Gajah Mada	20
18	Taman PKK	Jl. Gajah Mada	50
19	Taman Sudut KBN	Jl. Gajah Mada	65
20	Taman Masjid Jamik Al - Fattah	Jl. Hasyim Asyari	300
21	Monumen Pancasila	Jl. Hayam Wuruk	15
22	Taman 8 Jalur Pemerataan	Jl. Hayam Wuruk	50
23	Taman Jogging Track	Jl. Hayam Wuruk	1.05
24	Taman Selamat Datang (PMI)	Jl. Hayam Wuruk	200
25	Monumen Trophy matematika	Jl. Jawa	40
26	Taman Jalan jawa	Jl. Jawa	100
27	Gapura Pintu masuk Kota	Jl. Mojopahit	25
28	Monumen AMD	Jl. Mojopahit	20
29	Monumen Pancasila	Jl. Mojopahit	15
30	Taman Air Tumpah Penarip	Jl. Mojopahit	55
31	Taman Air Tumpah Perempatan Miji	Jl. Mojopahit	25
32	Taman Kerp.	Jl. Mojopahit	100
33	Taman R. Wiyono	Jl. Mojopahit	125
34	Taman Kerp.	Jl. Mojopahit Selatan	100
35	Monumen Koperasi	Jl. Mojopahit Utara	50
36	Pot Space Wan	Jl. Pahlawan	-
37	Taman Jalur Pemisah	Jl. Pahlawan	500
38	Taman Surya Mojopahit	Jl. Pahlawan	50
39	Taman Tebek	Jl. Pahlawan	50
40	Taman TMP	Jl. Pahlawan	400
41	Taman Sudut Pemuda	Jl. Pemuda	100
42	Taman Kerp. R. Wijaya	Jl. R. Wijaya	600

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

2.3.1.6. Perhubungan

2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penumpang/barang yang diangkut oleh angkutan umum mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 50 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2009 -2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penumpang Semua moda angkutan umum dalam setahun (Orang)	35,330,850	21,222,995	39,307,524	39.173.701	39.565.438
2	Jumlah barang atau penumpang yang terangkut angkutan umum (Ton/orang)	10,450,555	11,177,585	21,031,458	20.647.259	20.853.731

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	(ribu))					
3	Jumlah barang atau penumpang melalui dermaga, bandara, terminal Pertahun (Ton/orang (ribu))	35,330,850	21,222,995	39,307,524	39.173.701	39.565.438

Sumber: DISHUBKOMINFO. 2013

Peningkatan jumlah orang/barang setiap tahun mengindikasikan bahwa pemanfaatan fasilitas perhubungan yang disediakan oleh pemerintah semakin meningkat dan jumlah penumpang semua angkutan umum dalam satu tahun juga meningkat.

2.3.1.6.2. Jumlah Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan/atau mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Jaringan trayek di Kota Mojokerto secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010, dengan capaian sebesar 75 izin trayek. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 85 izin trayek. Namun, pada tahun 2013 izin trayek ini mengalami penurunan menjadi 59 izin trayek

Tabel 2. 51 Jumlah Izin Trayek Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

Tahun	Jumlah Izin Trayek
2009	8
2010	75
2011	85
2012	66
2013	59

Sumber: DISHUBKOMINFO. 2013

2.3.1.6.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala.

Tabel 2. 52 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Mojokerto Tahun 2009 -2013

Tahun	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Dalam Setahun
2009	2.270
2010	2.389
2011	2.640
2012	2.547
2013	2.265

Sumber: DISHUBKOMINFO. 2013

Jumlah izin uji kir angkutan umum Kota Mojokerto pada setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2013 jumlahnya menurun seiring dengan penurunan izin trayek. Hal ini disebabkan karena jumlah izin uji kir angkutan umum juga tergantung pada jumlah angkutan umum yang dioperasikan.

2.3.1.6.4 Jumlah Terminal Bus



Gambar 2. 16 Terminal Bus Kertajaya Kota Mojokerto

Jumlah terminal bus dan angkot di Kota Mojokerto sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 1 unit. Sedangkan layanan trayek transportasi massal kota berupa angkutan kota pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Trayek MPU di Kota Mojokerto Tahun 2013

No	Kode Trayek	Panjang Trayek (Km)	Izin	Jumlah Armada MPU	Operasi
1	Lyn A	8	29	29	28
2	Lyn B	10	33	33	32
3	Lyn C	12	38	38	32
4	Lyn D	12	40	40	38
5	Lyn E	18	15	15	14
6	Lyn F	12	22	22	20
7	Lyn G	12	10	10	9
Jumlah		84	187	187	173

Sumber: DISHUBKOMINFO. 2013

2.3.1.7 Urusan Penanaman Modal

2.3.1.7.1 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan

menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, jumlah PMA dan PMDN, jumlah proyek investasi berskala nasional, nilai total investasi PMA skala nasional, dan nilai total investasi PMDN skala nasional di Kota Mojokerto capaiannya tidak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah untuk meningkatkan investasi di daerah tidak mengalami perubahan.

Tabel 2. 54 Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai investasinya Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN)	3	3	3	3	2
Jumlah Proyek Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	3	3	3	3	2
Nilai Total Investasi PMA skala nasional (\$)	1.870.715	1.870.715	1.870.715	1.870.71	1.850.680
Nilai Total Investasi PMDN skala nasional (Ribu Rp)	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

2.3.1.7.2 Daya Serap Tenaga Kerja

Daya serap tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN di Kota Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2013.

Tabel 2. 55 Daya Serap Tenaga Kerja Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN (orang)	412	414	412	411	256

Sumber: DISNAKERTRANS. 2013

2.3.1.8 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2.3.1.8.1 Rasio Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2. 56 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Koperasi	Unit	202	211	217	196	199
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	164	173	144	140	168
3	Presentase Koperasi Aktif	%	81	82	66	71,4	84

Sumber : DISKOPERINDAG. 2013,

Sampai dengan tahun 2013, jumlah koperasi, jumlah koperasi aktif dan persentase koperasi aktif Kota Mojokerto mengalami peningkatan. Presentase koperasi aktif pada tahun 2013 meningkat sebesar 84 %. Namun masih ada koperasi yang tidak aktif sebesar 16%. Hal ini perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan, SDM, keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan koperasi tidak aktif sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali.

Tabel 2. 57 Profil Koperasi Primer Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Uraian	Prajuritkulon	Magersari	Jumlah
1	Jumlah Koperasi	73	126	199
2	Anggota (Orang)	6777	3735	10512
3	Karyawan (Orang)	326	1314	1640
4	Modal Sendiri (000Rp)	23.902.712	12.964.272	36.866.984
5	Modal Luar (000Rp)	22.599.314	122.035.52	34.802.866
6	Manager Koperasi	14	60	74
7	Volume Usaha(000Rp)	26588736	2.900.007	29.940.008
8	Sisa Hasil Usaha (000Rp)	14.865.769	2.303.122	17.168.891
9	Kekayaan (000Rp)	22.933.654	32.479.907	55.413.561

Sumber: DISKOPERINDAG. 2013

2.3.1.8.2 Jumlah UKM Non BPR/LKMUUKM

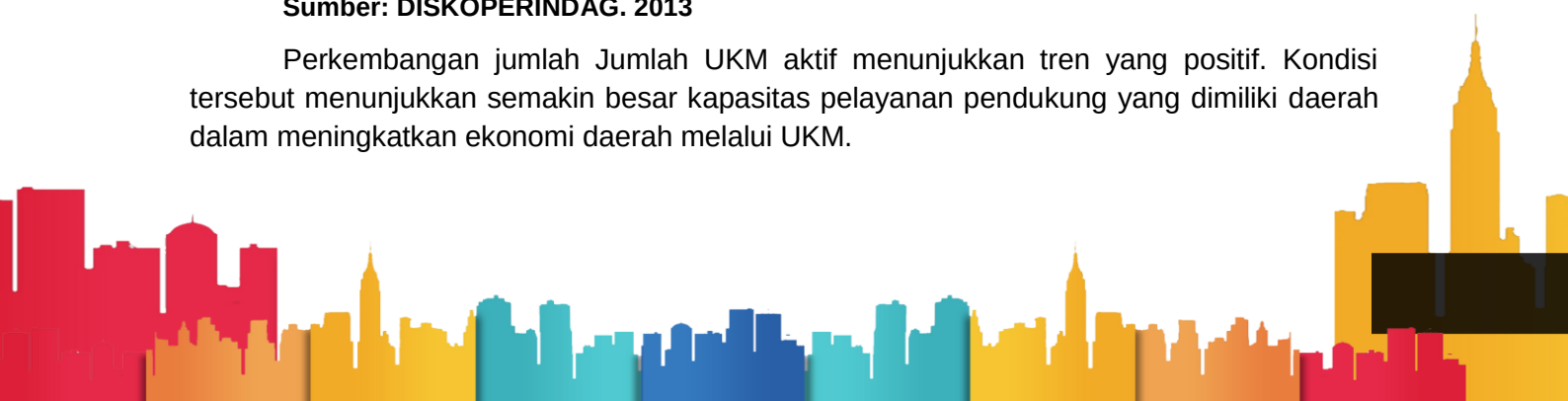
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2. 58 Jumlah UKM Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah UKM aktif	unit	210	330	477	266	552

Sumber: DISKOPERINDAG. 2013

Perkembangan jumlah Jumlah UKM aktif menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.



2.3.1.9 Ketenagakerjaan

Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam suatu kegiatan ekonomi disebut sebagai angkatan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja yang cenderung menurun. Kondisi tersebut nampaknya masih terjadi di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 59 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	61,66	61,46	63,06	64,89	65,10
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	55,93	56,84	59,83	60,14	61,40
Angkatan Kerja 15 thn keatas (ribu jiwa)	55,94	56,84	59,37	60,14	61,40

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto tahun 2013 tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang berkerja. Hal ini dapat dilihat, ketika peningkatan jumlah penduduk yang berkerja pada tahun 2013 sebanyak 61.400 jiwa, namun angkatan kerja sebanyak 61.400 jiwa.

Tabel 2. 60 Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pengangguran (ribu orang)	5,73	4,62	3,70	4,75	3,70

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Perkembangan jumlah pengangguran mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Namun pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mencapai 4.749 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya 2011 yang berjumlah 3.698 orang. Peningkatan ini juga berkaitan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2012 tidak bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Namun pada tahun 2013 menurun kembali hingga 3.702 orang.

2.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender sangat diperlukan. Peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2. 61 Jumlah Peristiwa KDRT Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kejadian/ Peristiwa KDRT	Kasus	3	15	20	19	14

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Mojokerto yang sangat pesat terjadi pada tahun 2011 dengan capaian 20 kasus. Kemudian menurun sampai dengan tahun 2013 sebesar 14 kasus.

2.3.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah akseptor KB dalam menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Jumlah akseptor KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011, namun mengalami penurunan pada tahun 2012. Sehingga rasio akseptor KB pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel 2. 62 Rasio akseptor KB Tahun 2009-2013 Kota Mojokerto

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Akseptor KB (Orang)	14.573	15.022	16.696	13.639	14.854
2	Jumlah Pasangan Usia subur (pasangan)	19.329	19.463	19.880	18.565	19.726
3	Rasio Akseptor KB	1.33	1.30	1.19	1,36	75.20

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Tabel 2. 63 Jumlah Rata-rata Anak Per Keluarga Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

Tahun	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
2009	3,29
2010	3,10
2011	2,5
2012	2,55
2013	1,19

Sumber: Mojokerto Dalam Angka 2013

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2009-2010 sebanyak 3 anak. Kemudian pada tahun 2011-2013 rata-rata setiap keluarga memiliki 2 anak. Capaian yang semakin baik ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah dalam mensosialisasikan program KB.

2.3.1.12 Komunikasi dan Informasi

2.3.1.12.1 Rasio Jumlah Wartel/Warnet

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Semakin besar rasio wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 64 Rasio Jumlah Wartel/Warnet Tahun 2008 -2012 Kota Mojokerto

Tahun	Rasio Wartel/ Warnet Per 1000 Penduduk
2008	6,63
2009	5,77
2010	5,60
2011	4,55
2012	4,52

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

2.3.1.12.2 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Banyaknya jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jenis surat kabar yang ada di Kota Mojokerto cukup banyak dan jumlahnya relatif stabil sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 2. 65 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jenis surat kabar
2009	39
2010	39
2011	39
2012	39
2013	39

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Tahun 2013

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Perkembangan jumlah LPM sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan kondisi yang relatif stabil.

Tabel 2. 66 Jumlah LPM Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah LPM Aktif (unit)	18	18	18	18	18

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013

Disamping LPM, terdapat pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Besarnya jumlah LSM aktif menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 2. 67 Jumlah LSM Aktif Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah LSM Aktif (unit)	10	10	12	5	10

Sumber:BAKESBANGPOL Tahun 2013

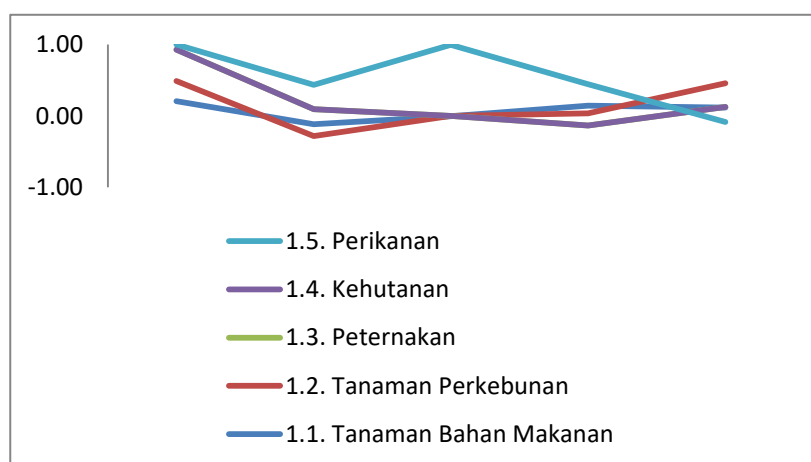
Perkembangan jumlah LSM aktif di Kota Mojokerto menunjukkan tren yang meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah juga semakin meningkat.

2.3.2 Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 sektor pertanian di Kota Mojokerto mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan pada tahun 2010 yaitu sebesar -0,49%. Pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2011 dan 2012 dimana nilai pertumbuhan tersebut masing-masing sebesar 3.19%, 2.38% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.05%.

Penurunan pada tahun 2013 secara umum disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan untuk sektor pertanian, karena dari lahan yang ada sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk sektor riil properti maupun untuk industri. Perkembangan kota Mojokerto menuju ke arah kota jasa dan perdagangan menuntut adanya peningkatan di sektor sumber daya manusia serta sektor pendukung lain untuk menuju kota transisi yang dapat menyangga ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.



Gambar 2. 17 Pertumbuhan Sektor Pertanian Kota Mojokerto

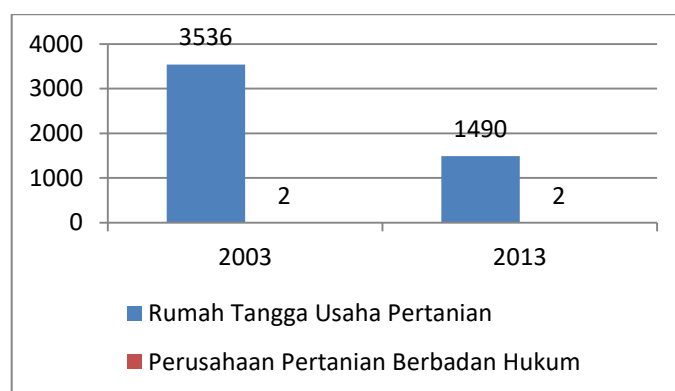
(Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013)

Sub sektor tanaman bahan makanan seperti tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kedelai dan lainnya merupakan salah satu sub sektor pada sektor

pertanian. Setiap tahunnya produksi padi di Kota Mojokerto relatif kecil, karena luas panen yang sangat minim. Menurunnya luas panen tanaman pangan bukan berarti produksinya juga mengalami penurunan, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya produktifitas. Pada tahun 2012, produksi padi sebesar 6.398 ton dari luas panen seluas 958 Ha. Total produksi buah-buahan di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan kuantitas. Hal ini bisa dipahami karena keterbatasan lahan dan pergeseran status lahan dari lahan kering menjadi bangunan-bangunan perumahan dan perkantoran.

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kota Mojokerto sebanyak 1.490 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 2 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 1 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di atas tersebar di 2 kecamatan, Kecamatan Magersari mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 859 rumah tangga dan 631 rumah tangga ada di Kecamatan Prajuritkulon.

Jumlah rumah tangga usaha pertanian di kota Mojokerto mengalami penurunan dari 3.536 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 1.490 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 19,29% per tahun.



Gambar 2. 18 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
(Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,)

2.3.2.2 Peternakan

Pada tahun 2012, populasi ternak besar maupun kecil di Kota Mojokerto mencapai 22.219 ekor, sedangkan produksi telur sebesar 392.141 kg. Sub sektor ternak dan unggas yang terbanyak diusahakan oleh masyarakat adalah kambing, itik dan ayam ras, sedangkan jenis ternak yang lain seperti sapi, babi dan kerbau masih sangat sedikit.

Tabel 2. 68 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya

Jenis Ternak	2009	2010	2011	2012

1. Sapi	247	261	384	355
2. Sapi Perah	20	16	12	15
3. Kerbau	48	37	8	9
4. Kambing	1678	1670	1550	1630
5. Domba	704	701	845	765
6. Babi	82	79	89	75
7. Itik	3440	4210	4880	1150
8. Ayam Ras	450	2200	1150	1500
9. Ayam Buras	14275	13399	14395	16720

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Produksi telur dari keseluruhan jenis unggas pada tahun 2009 sebesar 405.289 menurun drastis menjadi 392.141 pada tahun 2012. Penurunan ini membawa dampak pada penurunan kesempatan berusaha di sektor peternakan yang dapat meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu perlu kebijakan penggalakan usaha ternak melalui akses perbankan dan bantuan pemerintah lainnya agar penurunan usaha ternak dapat dikendalikan.

Tabel 2. 69 Produksi Telur Menurut Jenis Unggas

Tahun	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Jumlah
2008	6,155	-	15,249	21,404
2009	5,995	384,000	15,294	405,289
2010	5,609	386,000	18,718	410,327
2011	6,045	390,000	2,176	398,221
2012	7,022	380,000	5,119	392,141

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

2.3.2.3 Perikanan

Sub sektor perikanan ini hanya mengantungkan pada perikanan darat. Perikanan darat dirinci menjadi penangkapan ikan di perairan umum dan budidaya pemeliharaan ikan di tambak, kolam, keramba dan sawah. Data jumlah produksi ikan yang ada di wilayah Kota Mojokerto diperoleh dari Dinas Pertanian dalam Buku Kota Mojokerto dalam Angka 2013. Pada tahun 2012 produksi ikan darat mengalami kenaikan 5,21% dari tahun sebelumnya yaitu dari 173.415 kg menjadi 182.446 kg.

Tabel 2. 70 Produksi Ikan Darat Menurut Jenisnya (Kg)

Jenis Ikan	2009	2010	2011	2012
Ikan Mas	-	-	-	-
Ikan Tawes	-	255	318	-
Ikan Mujair	1.785	1.356	1.107	-
Ikan Nila	1.176	1710	20005	20200
Ikan Lele	20.611	23.19	127.59	128.8
Ikan Gurami	3.252	2.078	12940	23.87
Lainnya	2.641	2.857	11.415	9600

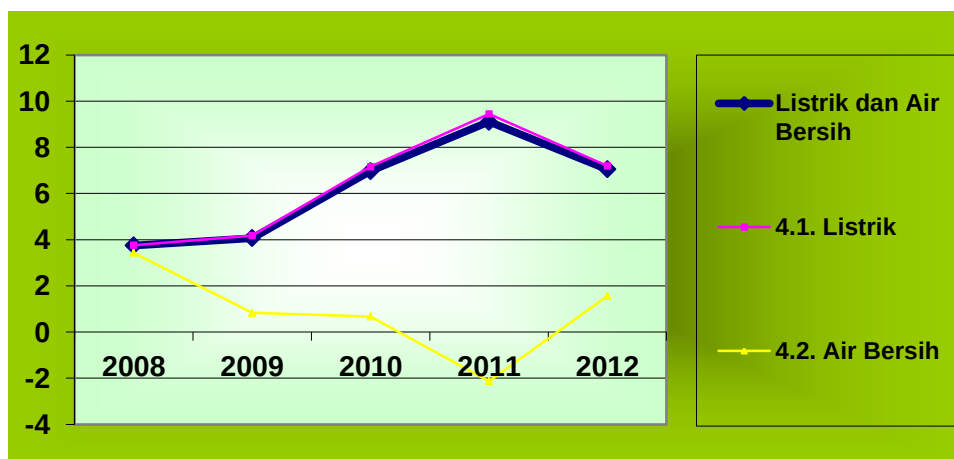
Sumber: Kota Mojokerto dalam angka 2013

Peningkatan produksi ikan darat mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan permintaan konsumsi gizi termasuk ikan darat. Implikasi lebih jauh bahwa sektor tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dalam jangka panjang.

2.3.2.4 Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 6,23% pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya yaitu 3,33%. Momentum pertumbuhan yang positif dari sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun diharapkan terus berlanjut agar dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran, mengingat sektor industri pengolahan sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Mojokerto.

Berdasarkan data dari Diskoperindag Kota Mojokerto, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri selama tahun 2011 sebanyak 66.009 orang dan pada tahun 2012 sebesar 66.253 orang. Selama tahun 2012 jumlah industri besar/sedang tercatat sebanyak 47 unit, industri kecil formal sebanyak 806 unit dan industri kecil non formal sebanyak 1.236 unit, sedangkan total nilai produksi tahun 2012 sebesar 271.323,13 juta rupiah, dan total nilai investasi yang terserap dari sektor industri ini sebesar 1.158.392,89 juta rupiah.



Gambar 2. 19 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

Sumber: PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

Kota Mojokerto merupakan sentra industri sepatu, dimana sebagian besar industri pengolahan merupakan industri yang bergerak di bidang alas kaki sandal maupun sepatu. Industri sepatu & alas kaki peran sertanya mencapai 11,60% dari total PDRB Kota

Mojokerto dengan pertumbuhan 6,87%, sedangkan kontribusi kelompok makanan, minuman dan tembakau menempati urutan kedua dengan sumbangan sebesar 3,82% dengan pertumbuhan 4,25%.

Tabel 2. 71 Kelompok Industri Berdasarkan Nilai Investasi (dalam Ribuan)

Kelompok Industri	Unit usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi	Nilai investasi
Industri Besar	3	1,077	205,413.80	35,799.86
Industri Sedang	44	46,164	1,903,894.45	1,109,673.33
Industri Kecil	806	6,663	180,337.49	35,122.63
Industri Mikro	1,277	12,816	28,541.70	1,168.93

Sumber: DISKOPERINDAG. Tahun 2013

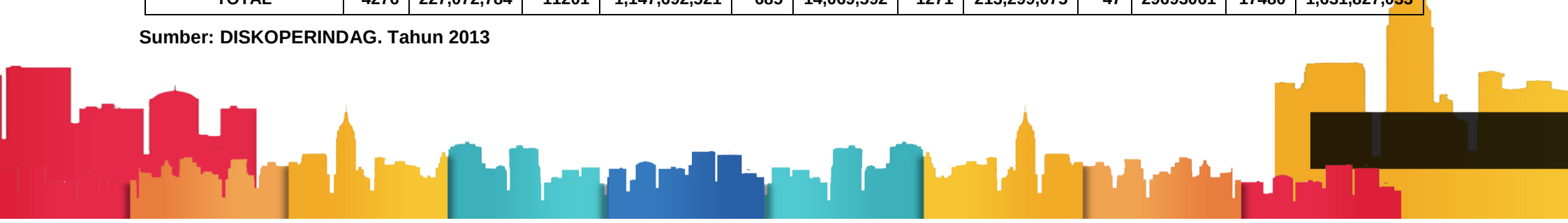
Pada tahun 2011 jumlah industri besar sebanyak 3 unit, industri sedang sebanyak 44 unit, industri kecil sejumlah 806 unit, dan industri mikro sejumlah 1.204 unit. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah industri besar, industri sedang dan industri kecil masih sama serta industri mikro sejumlah 1.277 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri selama tahun 2010 sebanyak 66.009 orang, tahun 2011 naik menjadi 66.253 orang, dan di tahun 2012 jumlah tenaga kerja di sektor industri mengalami kenaikan lagi menjadi 66.720 orang. Sedangkan nilai produksi tahun 2012 sebesar 2.318.187,44 juta rupiah dan nilai investasi yang terserap dari kegiatan tersebut adalah sebesar 1.181.764,75 juta rupiah. Penyerapan investasi ini harus menjadi perhatian pihak birokrat, mengingat masuknya investor asing ke Kota Mojokerto menjadi harapan pemerintah untuk dapat menggenjot pemasukan PAD.



Tabel 2. 72 Jumlah dan Jenis UMKM Kota Mojokerto

KECAMATAN/ KELURAHAN	Jasa		Pemasaran		Pertanian		Produksi		Simpan Pinjam		Total UMKM	
	JML	OMZET	JML	OMZET	JML	OMZET	JML	OMZET	JML	OMZET	JML	OMZET
PRAJURITKULON	2006	90,928,018	5024	453,859,230	201	6,025,582	897	139,662,190	18	5484200	8146	695,959,220
BLOOTO	105	3,518,930	295	25,349,400	105	1,234,392	271	33,535,860			776	63,638,582
KAUMAN	112	7,118,200	418	43,282,000			28	8,233,000			558	58,633,200
KRANGGAN	501	25,377,390	1058	143,494,930	20	220,000	79	14,855,320	11	3508200	1669	187,455,840
MENTIKAN	336	7,726,730	1123	100,172,101	3	85,000	45	3,634,700			1507	111,618,531
MIJI	310	12,095,570	778	42,975,168	11	2,168,000	160	20,095,560	3	800000	1262	78,134,298
PRAJURITKULON	219	21,946,670	529	31,757,985	17	247,300	151	32,657,730			916	86,609,685
PULOREJO	203	6,375,848	390	34,064,270	14	984,190	39	10,763,760	1	720000	647	52,908,068
SURODINAWAN	220	6,768,680	433	32,763,376	31	1,086,700	124	15,886,260	3	456000	811	56,961,016
MAGERSARI	2270	136,144,766	6177	693,833,291	484	8,044,010	374	73,636,885	29	24208861	9334	935,867,813
BALONGSARI	280	18,423,796	701	70,131,950	21	579,200	22	2,096,000	3	756604	1027	91,987,550
GEDONGAN	90	15,370,280	193	58,097,488	7	555,000	20	1,140,600	4	10472000	314	85,635,368
GUNUNG GEDANGAN	264	6,497,725	469	26,036,785	127	913,950	18	3,856,700	2	522000	880	37,827,160
JAGALAN	75	3,495,740	1182	212,077,850	1	18,000	1	180,000	2	3780000	1261	219,551,590
KEDUNDUNG	540	14,093,130	1054	74,615,530	197	3,189,360	76	34,826,200	3	204000	1870	126,928,220
MAGERSARI	111	4,347,960	333	20,330,400			42	3,814,600	1	16000	487	28,508,960
MERI	218	8,869,790	475	32,070,080	85	2,182,400	21	1,961,600			799	45,083,870
PURWOTENGAH	84	2,319,960	300	32,179,800	1	2,400	14	1,003,000	5	462257	404	35,967,417
SENTANAN	63	4,151,530	415	83,625,968			17	1,921,560	1	3600000	496	93,299,058
WATES	545	58,574,855	1055	84,667,440	45	603,700	143	22,836,625	8	4396000	1796	171,078,620
TOTAL	4276	227,072,784	11201	1,147,692,521	685	14,069,592	1271	213,299,075	47	29693061	17480	1,631,827,033

Sumber: DISKOPERINDAG. Tahun 2013



Tabel 2. 73 Jumlah dan Omzet UMKM Unggulan Kota Mojokerto

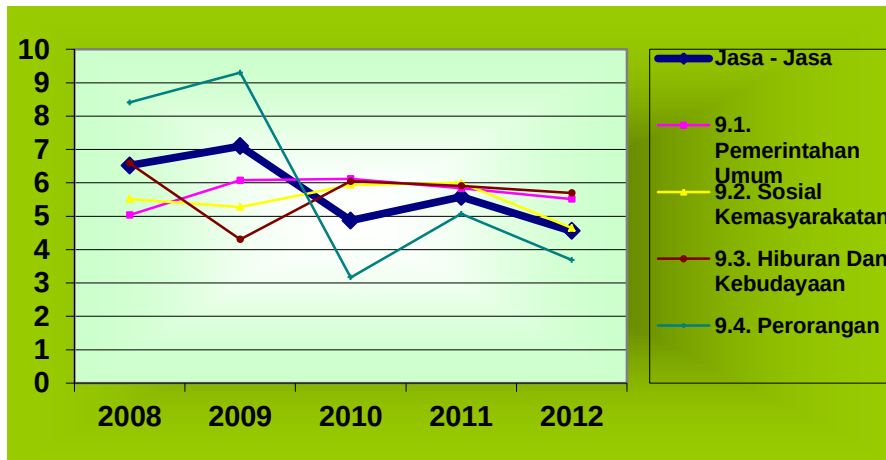
Kecamatan Kelurahan	UMKM Pembuatan Makanan dan Minuman		UMKM Alas Kaki	
	JML	Omzet	JML	Omzet
PRAJURITKULON	115	10,229,260	515	68,463,830
BLOOTO	15	1,617,600	209	18,589,060
KAUMAN	16	1,251,400	2	252,000
KRANGGAN	7	1,529,000	65	23,654,240
MENTIKAN	23	1,284,700	19	1,224,550
MIJI	24	1,346,800	32	4,889,700
PRAJURITKULON	0	-	27	3,871,400
PULOREJO	22	2,597,960	3	645,600
SURODINAWAN	8	601,800	158	15,337,280
MAGERSARI	268	31,866,785	71	11,696,140
BALONGSARI	15	840,800	5	751,800
GEDONGAN	17	990,600	2	402,000
GUNUNG GEDANGAN	7	574,200	10	2,486,100
JAGALAN	0	3,902,800	2	144,000
KEDUNDUNG	47	1,632,600	7	3,991,000
MAGERSARI	30	1,373,600	2	1,120,000
MERI	12	336,000	11	339,040
PURWOTENGAH	9	1,921,560	14	295,360
SENTANAN	17	20,294,625	15	2,022,840
WATES	114	42,096,045	3	144,000
Grand Total	383	42,096,045	586	80,159,970

Sumber: DISKOPERINDAG. Tahun 2013

2.3.2.5 Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan salah satu sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri. Selama tiga tahun terakhir perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih ini cukup tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh pada kisaran 3%-9%. Pada tahun 2011, sektor ini mengalami pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu tersebut, dimana pertumbuhannya mencapai 9,11%. Sedangkan tahun 2012 pertumbuhan sektor ini mencapai 7,05%.

Sampai saat ini layanan jaringan gas kota di Mojokerto masih belum tersedia. Sehingga sub sektor ini tidak memberikan andil dalam pembentukan PDRB Kota Mojokerto. Sedangkan untuk sub sektor air bersih, pertumbuhannya belum begitu menggembirakan. Pada tahun 2011 pertumbuhannya melambat dan bahkan mengalami penurunan. Penurunan tersebut yaitu sebesar -2,13%. Sedangkan tahun 2012 sub sektor air bersih hanya tumbuh sebesar 1,56%.

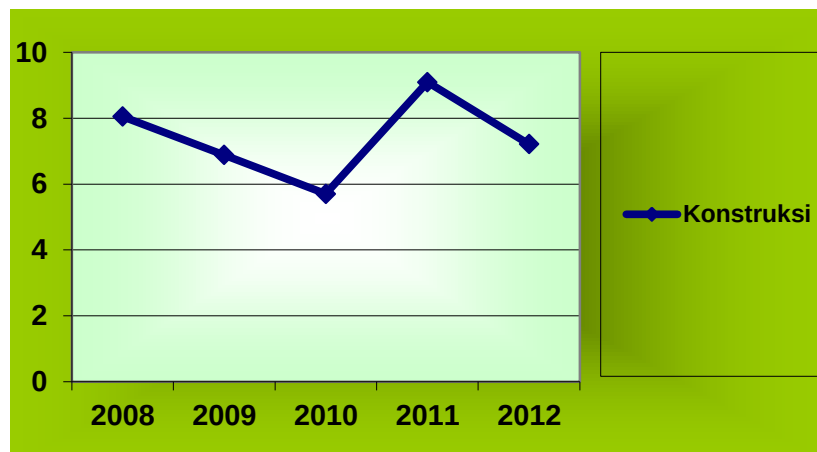


Gambar 2. 20 Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kota Mojokerto Tahun 2008-2012 (Persen)

Sumber: PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

2.3.2.6 Konstruksi

Pada tahun 2012 sektor konstruksi mampu berkembang hingga mencapai 7,21%, meskipun sebelumnya mampu mencapai level pertumbuhan tertinggi hingga 9,09%. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembangunan perumahan dan pertokoan terutama dengan adanya program sejuta rumah oleh Perum Perumnas. Program ini mendongkrak peranan sektor konstruksi sampai saat ini dimana pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 0,84% terhadap total perekonomian Kota Mojokerto.



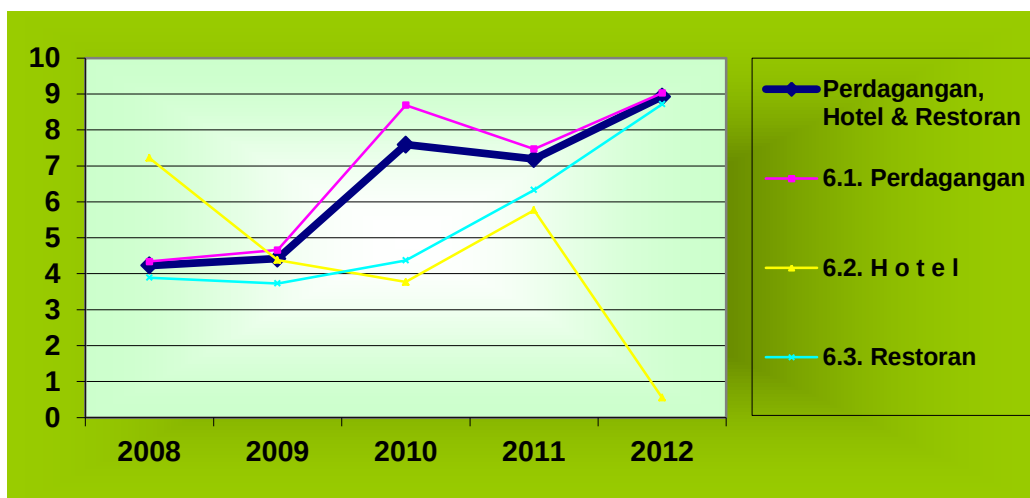
Gambar 2. 21 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

Sumber: PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

2.3.2.7 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mojokerto, dengan kontribusi pada tahun 2012 sebesar 40,17% dalam struktur perekonomian (bila dilihat pada distribusi PDRB ADHB). Sektor ini

selalu menempati urutan teratas dalam struktur ekonomi Kota Mojokerto dari tahun ke tahun..



Gambar 2. 22 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

Sumber : PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

Sektor ini mempunyai angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 8,93%. Kontribusi subsektor hotel dan restoran terhadap total perekonomian di Kota Mojokerto tidak begitu besar yaitu 0,10% dan 9,68%. Hal ini disebabkan oleh jumlah hotel dan restoran yang tidak terlalu banyak, yaitu 8 hotel pada tahun 2012. Sedangkan pertumbuhan kedua subsektor ini masing-masing sebesar 0,55% dan 8,72%.

Sedangkan, sub sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar (30,40%) terhadap perekonomian Kota Mojokerto, dengan pertumbuhan sebesar 9,03% pada tahun 2012. Pertumbuhan yang relatif tinggi pada sub sektor ini disebabkan oleh letak Kota Mojokerto yang strategis karena berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.

Selain itu sektor perdagangan tidak terlepas dari pasar, dimana pasar sebagai sentra perdagangan di Kota Mojokerto merupakan sarana perputaran uang yang cukup signifikan. Perda Kota Mojokerto yang mengatur secara khusus keberadaan pasar tradisional dan modern ini diperlukan, yang selanjutnya dibuatkan pula Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) sehingga dalam pelaksanaannya didasarkan pada payung hukum yang jelas dan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional. Tabel berikut adalah tabel banyaknya los, kios dan ruko yang terdapat dalam lokasi pasar.

Tabel 2. 74 Banyaknya los, kios dan ruko

Lokasi Pasar	Los	Kios	Ruko
Pasar Tanjung Anyar	636	306	17
Pasar Kliwon	24	19	-
Pasar Kranggan	21	21	-
Pasar Prapanca	235	-	-

Pasar Prajuritkulon	85	22	-
Pasar Burung Empunala	40	54	12
2012	1041	422	29
2011	494	414	27
2010	65	431	27

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Sejak tahun 2007, terdapat 7 unit pasar di Kota Mojokerto. Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar di Kota Mojokerto karena memiliki fasilitas paling banyak yaitu 44 unit Los, 343 unit kios dan 15 unit Ruko. Tabel selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Luas Los, Kios Dan Ruko Menurut Lokasi Pasar (M2)

Lokasi Pasar	Los	Kios	Ruko
Pasar Tanjung Anyar	2196	3240	300
Pasar Kliwon	1052	270	
Pasar Kranggan	265	230	
Pasar Prapanca	1806		
Pasar Prajuritkulon	1212	46	
Pasar Hewan	36	84	
Pasar Burung Empunala	264	600	288
2013	6831	4470	588
2012	6831	4470	588
2011	6831	4470	588
2010	6831	4470	588

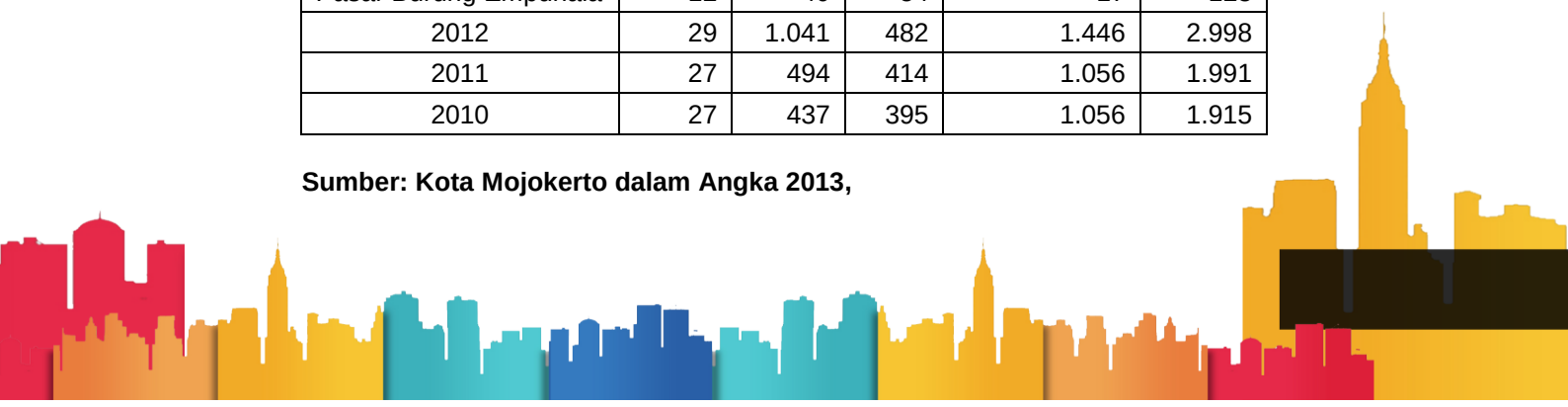
Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Dari keenam pasar di Kota Mojokerto, Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar dengan jumlah pedagang sebanyak 2.292 orang dan memiliki luas 5.736 m². Kemudian diikuti oleh Pasar Prapanca dengan jumlah pedagang sebanyak 331 orang dan memiliki luas 1.806 m². Sedangkan pasar terkecil di Kota Mojokerto adalah Pasar Kranggan dengan luas hanya 625 m² dengan jumlah pedagang 42 orang.

Tabel 2. 76 Banyaknya Pedagang Menurut Lokasi Pasar dan Tempat Usaha

Lokasi Pasar	Tempat Usaha				Jumlah
	Ruko	Los	Kios	Non Kios	
Pasar Tanjung Anyar	17	636	366	1.273	2.292
Pasar Kliwon	-	24	19	51	94
Pasar Kranggan	-	21	21	-	42
Pasar Prapanca	-	235	-	96	331
Pasar Prajuritkulon	-	85	22	9	116
Pasar Burung Empunala	12	40	54	17	123
2012	29	1.041	482	1.446	2.998
2011	27	494	414	1.056	1.991
2010	27	437	395	1.056	1.915

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013,



2.3.2.8 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang juga berpotensi menghasilkan PAD bagi Kota Mojokerto. Kuantitas sarana dan prasarana wisata di Kota Mojokerto cukup memadai dengan ditunjang jumlah hotel kelas melati sebanyak 8 buah dan rumah makan yang berjumlah sampai saat ini 12 buah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 140 orang. Sedangkan jumlah tamu yang datang sebanyak 48.541 orang yang terdiri dari 48.387 tamu domestik dan 154 tamu asing. Jumlah tamu yang datang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,59%; dengan rincian untuk tamu domestik turun 8,45% dan tamu asing turun sebesar 38,40%.

Tabel 2. 77 Jumlah Tenaga Kerja Hotel Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan	Tahun		
	2010	2011	2012
SMP	22	24	24
SMU	79	77	77
Diploma	4	6	6
Sarjana	8	7	7

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2013

Prospek pengembangan pariwisata di Kota Mojokerto sebenarnya bisa diarahkan kepada wisata belanja, santai dan sejarah. Obyek wisata berpotensi untuk menjadi pilihan tujuan bagi wisatawan, seperti pemandian atau *joging track* dan obyek wisata lainnya. Objek wisata tersebut ditunjang banyaknya sentra industri kecil dan kerajinan. Beberapa tempat wisata yang berada di Kota Mojokerto adalah:

Tabel 2. 78 Profil Pariwisata Kota Mojokerto

Pariwisata	Jenis	Fasilitas/Keterangan
Alun-alun	Ruang Terbuka Hijau	yaitu dokar dan sepur kelinci dengan rute mengelilingi sekitar alun-alun dan Kota Mojokerto
Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat	Wisata religi dan Sejarah	Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat merupakan salah satu gereja tertua di Kota Mojokerto dan merupakan peninggalan jaman Belanda. Gereja ini terletak di Jl. A. Yani dan didirikan pada tanggal 23 Desember 1899. Saat ini telah direnovasi guna menampung berbagai kegiatan gerejani serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas di antaranya AC, Band.
Kawasan Sungai Brantas Indah dan Jogging Track	Wisata Buatan	Area <i>jocking track</i> sambil menikmati indahnya Sungai Brantas dan cafe lesehan menyediakan beberapa macam makanan
Klenteng Hok Siang Kiong	Wisata Religi dan Sejarah	Klenteng Hok Siang Kiong didirikan pada jaman Belanda sekitar tahun 1823. Sedangkan Vihara Metta Sraddha didirikan pada tahun 1955. Lokasi klenteng dan vihara ini berada di Jl. Residen Pamudji. Ciri khas yang menonjol pada bangunan klenteng dan vihara ini adalah arsitektur khas Cina
Masjid Agung Al-Fattah	Wisata Religi dan Sejarah	Masjid Agung Al-Fattah didirikan pada zaman Belanda tepatnya pada tanggal 7 Mei 1878. Lokasi masjid ini berada di pusat kota sebelah Barat alun-alun Kota Mojokerto yang digunakan untuk syiar agama islam
Pemandian Sekar Sari	Wisata Buatan	kolam renang dan kafe nuansa kolam renang (bakso, kikir dll)

Pariwisata	Jenis	Fasilitas/Keterangan
Benteng Pancasila Car Free Day Mojokerto	Wisata Buatan	Hari Minggu pagi di Jalan Benteng Pancasila oleh pemerintah Kota Mojokerto, memang dijadikan sebagai kawasan yang bebas kendaraan, sehingga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata kuliner bagi masyarakat Mojokerto dengan suasana udara pagi yang segar.
Kolam Renang Royal Regency	Wisata Buatan	Pilihan berenang di kolam ini yang dilengkapi fasilitas lengkap seperti cafe ini bisa jadi pilihan yang menarik. Lokasinya tak jauh dari Taman Makam Pahlawan Mojokerto
Kolam Pancing Balong Lupis	Wisata Buatan	Di tengah keramaian kota, terdapat satu fasilitas kolam pemancingan yang tak jauh dari alun-alun, yaitu Balong Lupis. Di Balong Lupis ini kita akan menjumpai pemancing yang paling ramai pada malam hari.
Wisata Belanja		Selama di Kota Mojokerto anda bisa mencoba wisata belanja sambil jalan-jalan santai. Lokasinya ada di pusat pertokoan Mojopahit [Jalan Mojopahit], pusat oleh-oleh Kota Mojokerto [Jalan Mojopahit, Jalan Niaga dan Jalan Gajahmada], dan pasar tradisional yang terletak di Jalan J.A. Suprpto.
Cinderamata		Berbagai souvenir dari anyaman bambu juga bisa anda gunakan sebagai oleh-oleh sepulang jalan-jalan ke Kota Mojokerto. Anda bisa membelinya di pusat oleh-oleh di Jalan Gajahmada, atau datang langsung ke Kelurahan Kranggan. Beberapa kelurahan di Kota Mojokerto memproduksi sepatu dan sandal dengan kualitas bagus yang bisa anda jadikan oleh-oleh atau cinderamata. Kerajinan sandal dan sepatu bisa anda temukan di Kelurahan Miji, Kranggan, Surodinawan, Prajuritkulon dan Blooto. Selain itu, Kota Mojokerto juga terkenal sebagai sentra penghasil cetakan kue [di Pulorejo], miniatur kapal [di Miji], helm [di Blooto], onde-onde, batik tulis dan berbagai produk yang tak kalah dengan daerah lainnya.

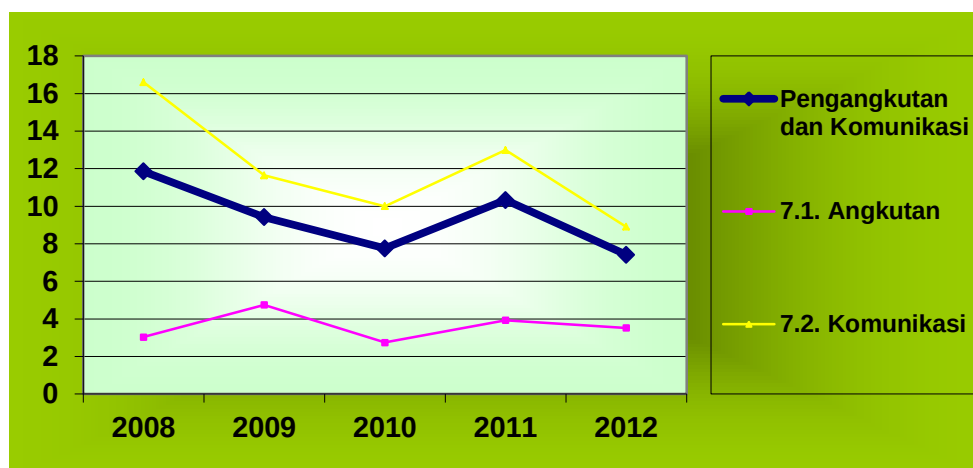
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan

2.3.2.9 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Peran sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi indikator penting bagi kemajuan ekonomi sektor lainnya di Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan karena sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya sub sektor transportasi merupakan sarana bagi mobilitas perekonomian di suatu wilayah.

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam perekonomian Kota Mojokerto cukup besar dan menempati urutan keempat setelah sektor industri. Pada tahun 2012 kontribusi sektor ini adalah sebesar 13,88% dari total PDRB Kota Mojokerto. Selain mempunyai kontribusi yang cukup besar, ternyata pertumbuhan sektor ini menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 7,42%.





Gambar 2. 23 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

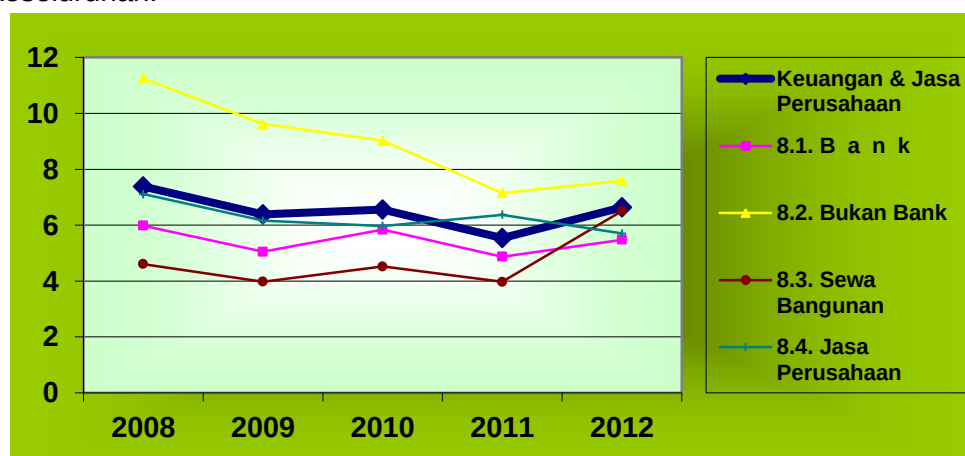
sumber: PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

Apabila dilihat ke dalam sub sektornya, pertumbuhan sub sektor angkutan tidak secepat pertumbuhan dari sub sektor komunikasi. Pertumbuhan sub sektor angkutan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 hanya berkisar antara 2%-4%. Sedangkan sub sektor komunikasi pertumbuhannya sempat mencapai titik tertinggi yaitu 16,60% pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2012 tumbuh sebesar 8,91%.

2.3.2.10 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mempunyai peranan sebesar 7,01% dalam perekonomian Kota Mojokerto dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,64% pada tahun 2012. Tingkat pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pertumbuhan dari sub sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Tingginya pertumbuhan sub sektor tersebut disebabkan sejak tahun 2007 di Kota Mojokerto banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbentuk koperasi maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan dari data yang ada, pada tahun 2007 jumlah koperasi di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 162 buah, dan pada tahun 2012 jumlah tersebut sudah mencapai 217 buah. Oleh sebab itu, nilai tambah yang dihasilkan dari sub sektor tersebut bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto secara keseluruhan.



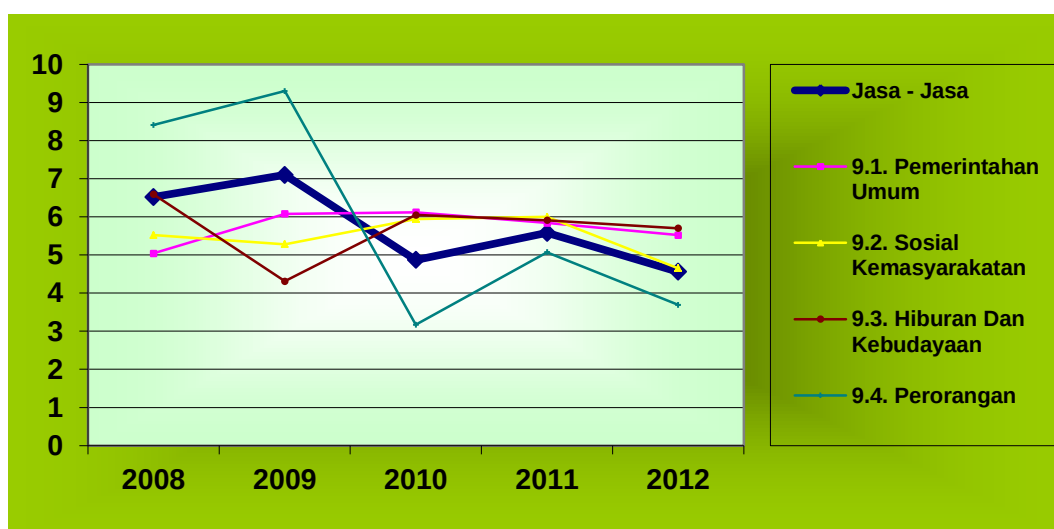
Gambar 2. 24 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

sumber: PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

2.3.2.11 Sektor Jasa

Apabila melihat perkembangan sektor jasa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diperkirakan sektor ini akan mempunyai prospek yang cukup baik di masa mendatang. Sub sektor jasa pemerintahan yang mendominasi sektor jasa, pertumbuhannya tergantung dari adanya penambahan atau pengurangan pegawai. Selain itu kenaikan gaji pegawai pemerintah juga menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan sub sektor ini. Sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan banyak bergantung pada dunia pendidikan dan kesehatan swasta serta lembaga swasta yang tidak mencari untung, sehingga saat ini juga sedikit sulit untuk melaju dengan cepat.

Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, sektor jasa-jasa tumbuh pada kisaran 4%-7%. Pada tahun 2009, sektor ini mampu tumbuh menembus angka 7,10%. Selanjutnya tahun 2012 tumbuh sebesar 4,56% persen. Jika diamati lebih dalam, pertumbuhan sektor jasa-jasa sejalan dengan pertumbuhan sub sektor jasa pemerintahan. Pada tahun 2008 sampai 2012 pertumbuhan sub sektor pemerintahan berkisar antara 5%-6%, dimana tahun 2010 sub sektor ini mempunyai pertumbuhan terbesar yaitu 6,12%. Pertumbuhan sub sektor ini dari tahun ke tahun bisa dikatakan relatif stabil, yaitu pada kisaran 4%-7%. Pada tahun 2012 pertumbuhannya yaitu sebesar 4,14%.



Gambar 2. 25 Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa Kota Mojokerto Tahun 2008 - 2012 (Persen)

Sumber : PDRB Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah diukur dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan PDRB per sektor. Pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan perkapita disusun untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga untuk pangan dan di luar pangan. Pengukuran pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga perkapita menggunakan proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk pangan terhadap total pengeluaran. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi rumah tangga untuk non

pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Berikut merupakan hasil perhitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam sektor pangan dan non pangan di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 79 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Pangan dan Non Pangan) Tahun 2009 – 2013 Kota Mojokerto

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013*)
Total Pengeluaran Konsumsi RT (ribu Rp)	233,57	265,55	317,10	332,43	366.504
Total Pengeluaran RT non Pangan (ribu Rp)	286,17	296,08	415,44	367,59	317.009

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

***) Angka Sementara**

Berdasarkan tabel di atas, total pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kota Mojokerto lebih besar dalam sektor non pangan. Meskipun pada tahun 2008 sempat mengalami persamaan, yaitu berada pada angka Rp. 262,13 ribu, namun pada tahun-tahun selanjutnya total pengeluaran non pangan meningkat lebih tinggi daripada total pengeluaran pangan.

Tabel 2. 80 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Mojokerto

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Total Pengeluaran RT	262,130	233,570	265,550	317,100	332,430
2	Jumlah RT	31,417	38,482	35,479	36,583	38,301
3	Rasio (1./2.)	8.34	6.07	7.48	8.67	8.68

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Tabel 2. 81 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Non Pangan

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Total pengeluaran RT non pangan	262130	286170	296080	415440	367590
2	Total pengeluaran	262130	233570	265550	317100	332430
3	Rasio	100.00%	122.52%	111.50%	131.01%	110.58%

Sumber : KotaMojokerto Dalam Angka 2013

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Keamanan dan Ketertiban

2.4.2.1.1 Angka Kriminalitas

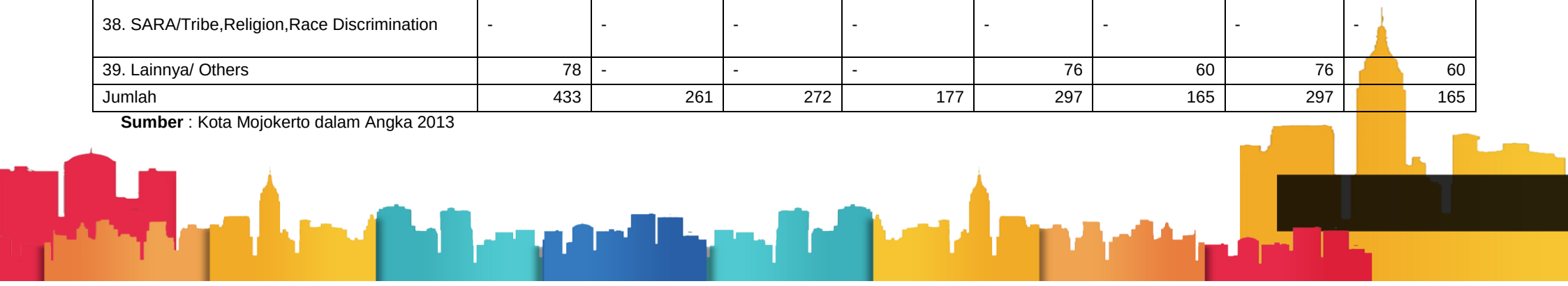
Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Kriminalitas yang terjadi di Kota Mojokerto pada tahun 2012 cukup banyak yaitu mencapai 267 kejadian dan yang tertangani sebanyak 165 kejadian. Angka tersebut mengalami penurunan yang berarti dari tahun 2009 seperti rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Angka Kriminalitas Kota Mojokerto 2009-2012

Jenis Tindak Pidana	2009		2010		2011		2012	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
01. Politik/Politic	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara/Against the President	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Ketertiban Umum/Public Order	76	76	-	-	-	-	-	-
04. Pembakaran/Arson	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Kebakaran/Fire	3	3	1	1	-	-	-	-
06. Penyuapan/Bribery	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Kejahatan Mata Uang/Crime Related to Money	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Meterai, Surat, Merek/Seals, Document, Trade Mark	4	4	-	-	-	-	-	-
09. Perkosaan/Rape	-	-	-	-	1	-	1	-
10. Pelanggaran Kesopanan/Morality Offence	1	1	-	-	-	-	-	-
11. Perjudian/Gambling	59	59	59	59	44	44	44	44
12. Penculikan/Kidnapping	-	-	-	-	1	-	1	-
13. Pembunuhan/Murder	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Penganiayaan Berat/Heavy Violence	21	17	29	28	-	-	-	-
15. Penganiayaan Ringan/Light Violence	-	-	1	1	27	19	27	19
16. Pencurian Dengan Kekerasan/Theft by Force	2	2	6	3	4	2	4	2
17. Pencurian Biasa/Theft	38	18	38	24	9	4	9	4
18. Pencurian Berat/Heavy Theft	46	20	35	11	54	6	54	6
19. Pencurian Kayu Jati/Teak Wood Theft	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Pencurian Kendaraan Bermotor/Motor'd Vehicle Theft	25	2	32	3	27	-	27	-

Jenis Tindak Pidana	2009		2010		2011		2012	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
21. Pencurian Kawat Telepon/Telephone Wire Theft	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Pencurian Ternak/Livestock Theft	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Perampasan/Blackmail	2	1	-	-	-	-	-	-
24. Penggelapan/Embezzlement	16	13	19	16	9	8	9	8
25. Penipuan/Swindle	28	9	41	20	37	14	37	14
26. Penadahan/Fence	4	5	4	4	-	-	-	-
27. Perusakan/Destruction	3	3	2	2	-	-	-	-
28. Ekonomi/Economic	-	1	-	-	-	-	-	-
29. Penyelundupan/Smuggling	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Kejahatan Pelita/5-Year Plan Development Crime	17	17	-	-	-	-	-	-
31. Narkotik/Narcotic	-	-	5	5	8	8	8	8
32. Kenakalan Remaja/Jouvenile Delinquency	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Senjata Api,Peledak/Firearms,Explosive Material	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Senjata Tajam/ Sharp Explosive	10	10	-	-	-	-	-	-
35. Unjuk Rasa/Demonstration	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Kecelakaan Kereta Api/Railway Accident	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sengketa Tanah/Land Dispute	-	-	-	-	-	-	-	-
38. SARA/Tribe,Religion,Race Discrimination	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Lainnya/ Others	78	-	-	-	76	60	76	60
Jumlah	433	261	272	177	297	165	297	165

Sumber : Kota Mojokerto dalam Angka 2013



2.4.2.1.2 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah Demonstrasi/unjuk rasa dalam 1 tahun di Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan yang cukup besar selama kurun lima tahun terakhir. Dimana jumlahnya berkisar antara 9-13 kali dalam setahun. Demonstrasi/unjuk rasa terbanyak terjadi pada tahun 2013 dimana jumlahnya mencapai 13 kali.

Tabel 2. 83 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa Tahun 2009 – 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Demonstrasi/unjuk rasa dalam 1 tahun	10	9	11	12	13

Sumber : BAKESBANGPOL Tahun 2013,

2.4.2.1.2 Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Lamanya perizinan tersebut, utamanya izin usaha industri akan berdampak pada nilai investasi yang ada, yaitu pada pengenaan pajak daerah (jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah) dan retribusi daerah.

Tabel 2. 84 Lamanya Proses Perizinan Tahun 2010 – 2013 Kota Mojokerto

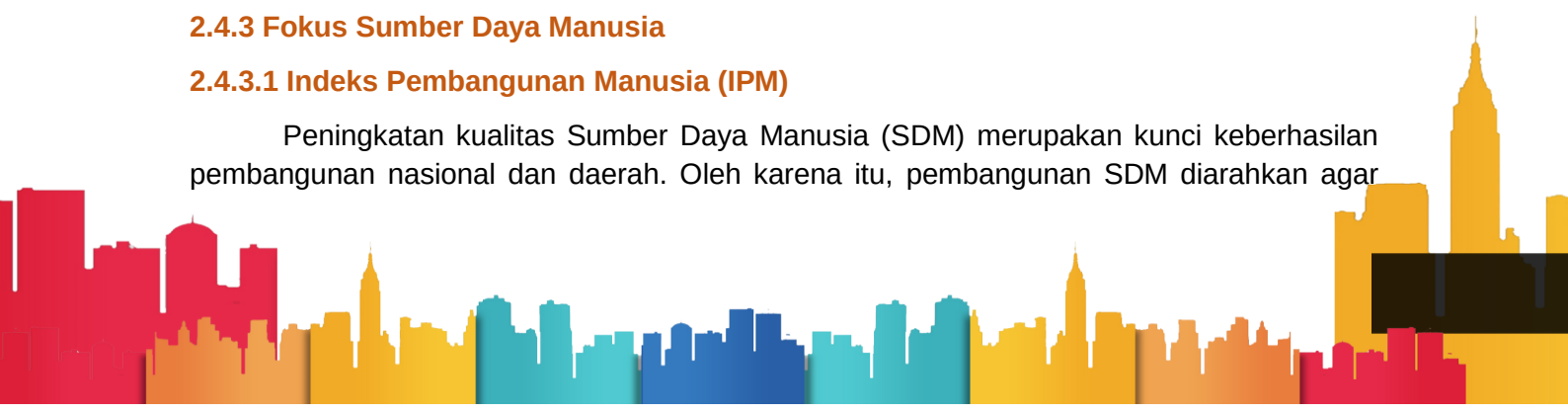
No	Jenis Surat Izin	Waktu Penyelesaian			
		2010	2011	2012	2013
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	5	3	3	5
2.	Tanda Daftar Perusahaan	5	3	3	5
3.	Izin Pergudangan	7	5	5	5
4.	Izin Mendirikan Bangunan	7	7	7	7
5.	Izin Gangguan / Keramaian	35	35	14	14
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3	2	14	7
7.	Tanda Daftar Industri	30	14	5	5
8.	Izin Usaha Industri	7	5	15	5
9.	Izin Penggunaan Lapangan	15	15	14	5
10.	Izin Trayek	7	7	2	2
11.	Izin Rekreasi dan Hiburan Umum	1	1	7	7
12.	Izin Reklame	-	14	1	3

Sumber : KPPT Tahun 2013,

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan agar



benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam pembangunan nasional.

Tabel 2. 85 Komponen IPM Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

No.	Komponen	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013 *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angka harapan hidup	71.35	71.56	71.78	71.85	71.93
2	Indeks Kesehatan	77.24	77.61	77.97	78.09	78.22
3	Angka melek huruf (%)	97.11	97.12	97.13	97.14	97.14
4	Rata-rata lama sekolah (th)	9.67	9.97	9.98	10.04	10.10
5	Indeks Pendidikan	86.22	86.90	86.93	87.07	87.24
6	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	644.86	648.01	652.47	653.06	653.66
7	Indek PPP	65.83	66.56	67.59	67.73	67.89
8	IPM	76.43	77.02	77.50	77.63	78.15

Sumber: INMAKRO Tahun 2013

Nilai IPM Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar 78,15 dalam kriteria UNDP termasuk dalam kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$). Hal ini mengidentifikasikan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan tetap konsisten bahkan lebih baik, yaitu dari tahun ke tahun tetap mampu meningkatkan kualitas SDM di Kota Mojokerto. Hal ini bisa dibuktikan dengan besaran IPM Kota Mojokerto selama periode 5 tahun terakhir (Tahun 2009-2013) selalu masuk dalam kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$)

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 86 HDI/IPM Kota Mojokerto Tahun 2012

Uraian	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita	Disesuaikan IPM
HDI/IPM	71.78	97.13	9.98	652.47	77.5

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2013

2.4.3.2 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri. Kualitas tenaga kerja pada suatu

daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk.

Tabel 2. 87 Persentase Penduduk Berijazah Pendidikan Tinggi Per 10.000 Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2008 – 2013

Uraian	Satuan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3	%	9.4	10.24	9.071	8.711	8.557	8.617
Jumlah Penduduk	%	116.355	119.5	120.064	134.222	135.024	135.689
Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	%	8,08	8,57	7,56	6,49	6,34	6.0%

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013,

Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk di Kota Mojokerto masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari capaian rasionya yang masih di bawah 10%. Bahkan selama kurun waktu lima tahun terakhir rasionya semakin menurun.

2.4.3.3 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif dan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 2. 88 Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2013 Kota Mojokerto

Uraian	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penduduk <15 thn dan >64 thn	Jiwa (ribu)	36.115	36.880	39.556	41.305	41509
Jumlah Penduduk Usia 15-64	Jiwa (ribu)	83.385	83.184	94.666	93.719	90495
Rasio ketergantungan		43,31	44.34	41,78	44,07	45,8

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Mojokerto masih tergolong tinggi, dimana selama kurun waktu lima tahun terakhir rasionya berada di atas 40. Pada tahun 2012 rasio ketergantungan di Kota Mojokerto meningkat menjadi 44,07 dari tahun sebelumnya sebesar 41,78. Dengan kata lain, setiap 100 orang penduduk usia produktif pada tahun 2011 menanggung 41 orang dan tahun 2013 menanggung 45 orang.

2.4.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.4.1 Penataan Wilayah

2.4.4.1.1 Ketaatan Terhadap RTRW

Ukuran keberhasilan urusan pilihan penataan ruang Kota Mojokerto ditentukan oleh ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Jika melihat dari sisi luas, hanya luas wilayah produktif yang mengalami perkembangan sementara yang lainnya relatif konstan. Namun penataan ruang dapat diberikan apresiasi karena tingkat ketaatan terhadap RTRW mencapai 96.86%, artinya bahwa hanya sekitar 3.74% yang tidak taat dalam penataan ruang. Ini menjadi tugas bagi SKPD terkait untuk menjamin bahwa penggunaan ruang dan wilayah harus sesuai dengan RTRW Kota Mojokerto. Rasio ketaatan terhadap RTRW di Kota Mojokerto sudah cukup baik dimana luas total area pemukiman dalam RTRW daerah sebanding dengan Luas Area Pemukiman sesuai peruntukan dalam RTRW Daerah, sehingga persentasenya mencapai 100% tiap tahun.

Tabel 2. 89 Rasio Ketaatan Dengan RTRW

Uraian	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Luas Area Pemukiman sesuai peruntukan dalam RTRW Daerah	Ha	882,99	873,44	858,49	526,43	430,757
Luas total area pemukiman dalam RTRW daerah	Ha	882,99	873,44	858,49	526,43	430,757
Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100

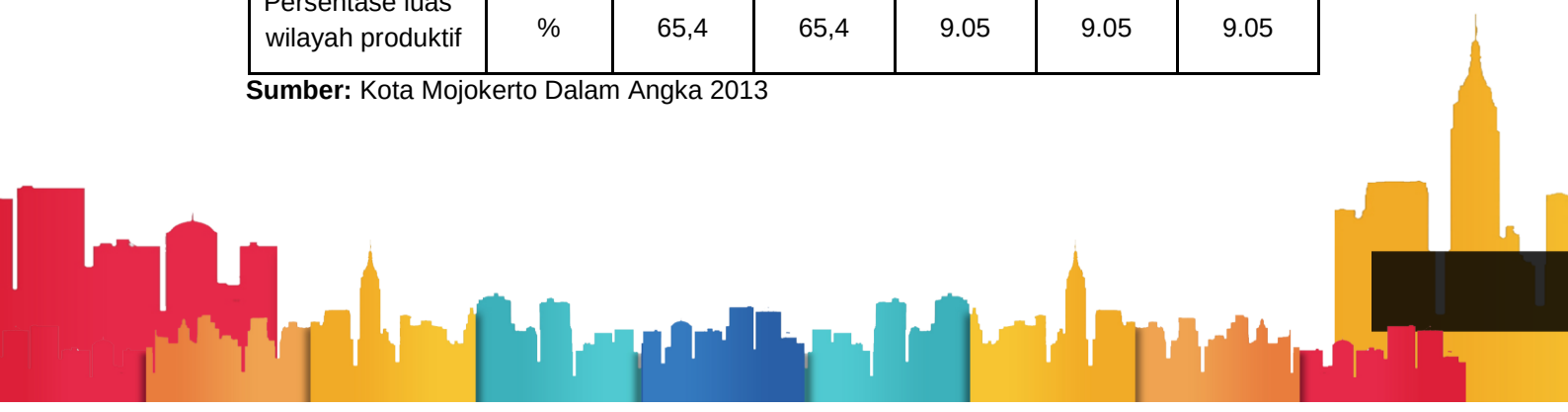
Sumber:Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Sedangkan luas area produktif terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 90 Luasan Area Produktif Kota Mojokerto

Uraian	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Luas wilayah produktif	Ha	762,19	762,19	105,47	105,47	105,47
Luas wilayah budidaya	Ha	1.165,63	1.165,63	1.165,63	1.165,63	1.165,63
Persentase luas wilayah produktif	%	65,4	65,4	9.05	9.05	9.05

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013



Persentase luas wilayah produktif di Kota pada tahun 2008-2009 mencapai 65,4% menurun menjadi 9,05% pada tahun 2010-2012. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang diperuntukkan budidaya di Kota Mojokerto masih banyak yang *useless* atau tidak digunakan.

2.4.4.1.2 Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas wilayah keseluruhan sesuai dengan RTRW.

Tabel 2. 91 Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2008 – 2012

Uraian	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Luas wilayah industri	Ha	42,27	44,56	44,56	50,48	50,48
Luas wilayah keseluruhan	Ha	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54
Persentase luas wilayah industri	%	2.57	2.71	2.71	3.07	3.07

Sumber: DPU Kota Mojokerto

Persentase luas wilayah industri di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Sejak tahun 2008 persentasenya meningkat dari 2,57% menjadi 3,07% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah industri di Kota Mojokerto sedikit demi sedikit semakin meluas.

2.4.4.1.3 Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas wilayah keseluruhan. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa seluruh wilayah di Kota Mojokerto memang merupakan wilayah perkotaan, sehingga persentase luas wilayah perkotaannya sebesar 100%.

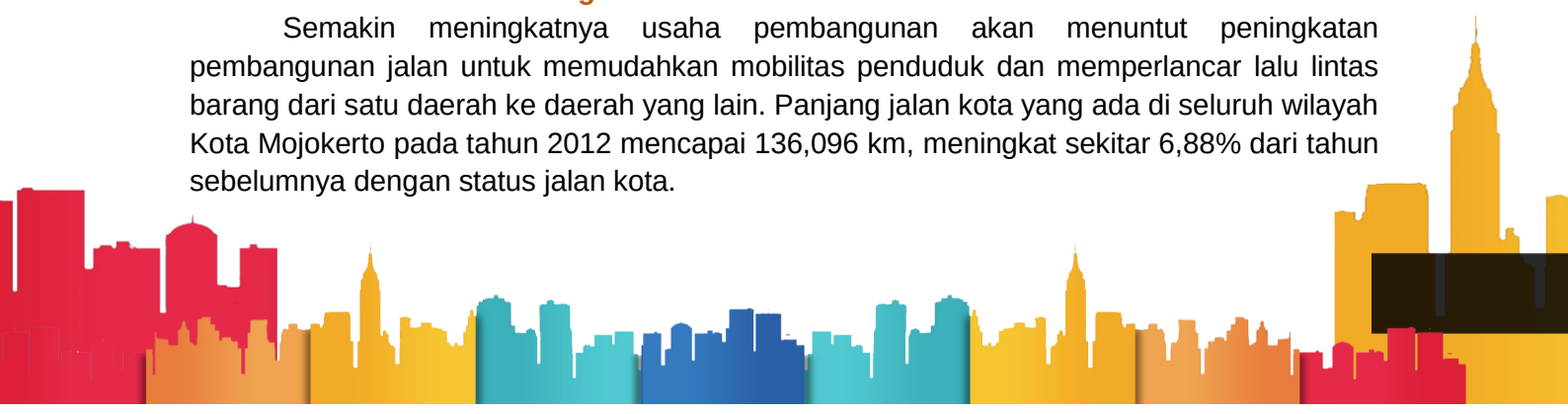
Tabel 2. 92 Persentase Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2008 – 2012

Uraian	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Luas wilayah perkotaan	Ha	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54
Luas wilayah keseluruhan	Ha	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54	1.646,54
Persentase luas wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPU Kota Mojokerto

2.4.4.1.4 Fasilitas Perhubungan Darat

Semakin meningkatnya usaha pembangunan akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Panjang jalan kota yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto pada tahun 2012 mencapai 136,096 km, meningkat sekitar 6,88% dari tahun sebelumnya dengan status jalan kota.



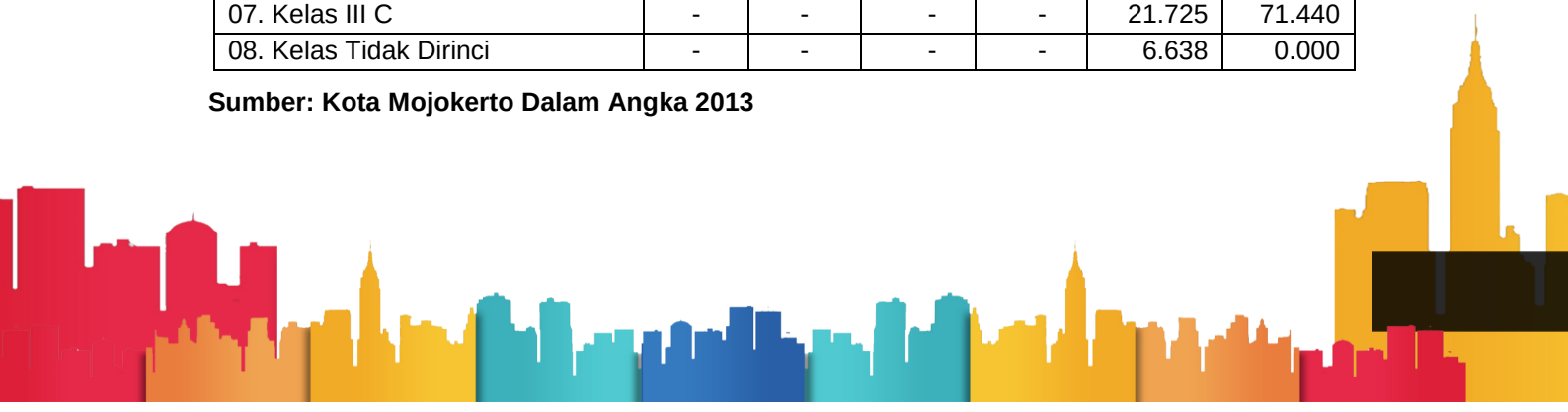
Kota Mojokerto hanya memiliki jalan negara sepanjang 4,9 km. Dari panjang jalan kota tersebut terdapat 61,129 km kondisi jalan di Kota Mojokerto dalam kondisi baik, 66,640 km dalam kondisi sedang dan 8,327 km dalam kondisi rusak. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi jalan yang baik mengalami kenaikan sebesar 3,15 persen, sedangkan jalan dengan kondisi sedang mengalami kenaikan sebesar 1,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pihak birokrat telah banyak memperhatikan kondisi jalan yang ada di Kota Mojokerto.

Selain jaringan jalan, karakteristik transportasi di Kota Mojokerto juga diwarnai oleh angkutan umum maupun angkutan kereta api sebagai salah satu moda angkutan. Berdasarkan data dari Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2011, jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari Terminal Kertajaya pada Tahun 2010 sebanyak 17.567.732 dan 19.421.753 penumpang berangkat dengan bus antar kota. Jumlah bus yang datang dan berangkat sebanyak 399.344 bus dan 399.344 bus. Penumpang bemo yang datang sebanyak 805.470 penumpang dan yang berangkat sebanyak 1.073.960 penumpang. Hal ini bisa dimaklumi karena penumpang bemo ternyata lebih banyak yang melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus.

Tabel 2. 93 Jaringan Jalan Kota Mojokerto

Uraian	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kota	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Jenis Permukaan/ <i>Types of Road</i>	4.900	4.900	-	-	127.338	136.096
01. Diaspal/ <i>Asphalt</i>	4.900	4.900	-	-	120.640	128.549
02. Kerikil/ <i>Gravel</i>	-	-	-	-	0.000	0.000
03. Tanah/ <i>Underground</i>	-	-	-	-	6.698	7.547
04. Tidak Dirinci/ <i>Not Specify</i>	-	-	-	-	0.000	0.000
2. Kondisi Jalan/ <i>Surface Condition</i>	4.900	4.900	-	-	127.338	136.096
01. Baik/ <i>Good</i>	-	-	-	-	59.261	61.129
02. Sedang/ <i>Moderate</i>	4.900	4.900	-	-	65.977	66.640
03. Rusak Ringan/ <i>Light Damaged</i>	-	-	-	-	2.100	0.780
04. Rusak Berat/ <i>Seriously Damaged</i>	-	-	-	-		7.547
3. Kelas Jalan/ <i>Road Class</i>	4.900	4.900	-	-	127.338	136.096
01. Arteri	4.900	4.900	-	-	0.000	0.000
02. Kelas I	-	-	-	-	0.000	0.000
03. Kelas II	-	-	-	-	12.190	12.190
04. Kelas III	-	-	-	-	0.000	0.000
05. Kelas III A	-	-	-	-	8.277	8.352
06. Kelas III B	-	-	-	-	78.508	44.114
07. Kelas III C	-	-	-	-	21.725	71.440
08. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	6.638	0.000

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013



Tabel 2. 94 Jumlah Kendaraan Angkutan dan Penumpang

Jenis Kendaraan	Kendaraan		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01. Bus Antar Kota/ Buses Inter City				
2003	517 350	517 350	24,832,800	25,867,500
2004	522 420	522 420	24,913,600	25,948,300
2005	429 046	429 046	11,808,000	13,693,850
2006	421 712	421 712	10,220,000	9,777,300
2007	432 807	432 807	20,165,529	22,654,305
2008	401 880	401 880	18,791,062	20,949,459
2009	392 565	392 565	17,645,471	19,150,829
2010	399 344	399 344	17,567,732	19,421,753
2011	389 727	389 727	17,658,414	20,207,922
2012	389 135	389 135	17,801,938	19,777,811
02. Angkutan Bemo/ Microlet Vehicles				
2003	385 075	385 075	5,391,050	4,928,960
2004	329 644	329 644	5,403,297	4,941,207
2005	183 538	183 538	2,001,649	1,770,604
2006	199 290	199 290	1,000,021	1,003,421
2007	196 538	196 538	1,001,521	1,004,521
2008	150 989	150 989	718,341	1,360,640
2009	135 240	135 240	939,300	1,127,160
2010	134 245	134 245	805,470	1,073,960
2011	102 942	102 942	617,652	823,536
2012	144 908	144 908	724,504	869,448

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Kota Mojokerto yang mempunyai sarana transportasi Kereta Api sebagai jalur transit dari Surabaya menuju Jakarta dan sebaliknya, juga menjadi jalur penghubung antara Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Jumlah angkutan penumpang dan barang kereta api melalui stasiun pemberangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 95 Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api Kota Mojokerto

Tahun/ Year	Penumpang / Passangers		Barang/Goods	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Orang/Person	(000 Rp)	(ton)	(000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	ts/na	ts/na	ts/na	ts/na
2008	258,425	7,647,103	59,194	329,881
2009	302,310	8,227,424	28,741	178,359
2010	465,396	9,426,144	25,727	695,170
2011	430,026	10,430,874	404,631	ts/na
2012	260,964	11,516,709	547,500	ts/na

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

2.4.4.1.5 Fasilitas Hotel dan Restoran

Jumlah hotel yang ada di Kota Mojokerto hingga tahun 2012 sebanyak 8 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 335 dan jumlah tempat tidur sebanyak 476 tempat tidur. Sedangkan jumlah tamu yang datang sebanyak 48.541 orang yang terdiri dari 48.387 tamu domestik dan 154 tamu asing. Jumlah tamu yang datang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,59 persen; dengan rincian untuk tamu domestik turun 8,45 persen dan tamu asing turun sebesar 38,40 persen.

2.4.4.1.6 Ketersediaan Restoran (Persentase Jumlah Restoran Menurut Jenis dan Kelas)

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Tabel 2. 96 Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Warung

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warteg	27	28	28	28	67

Sumber: Bag. Adm. Pembangunan Kota Mojokerto

Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warteg di Kota Mojokerto semakin meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2009, jumlah restoran, rumah makan dan warteg di Kota Mojokerto stagnan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012 seiring dengan perekonomian yang terus tumbuh, Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warteg yang didirikan di Kota Mojokerto mencapai dua kali lipat lebih dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 67 buah.

2.4.4.1.7 Fasilitas Ketersediaan Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi

Mengacu pada RTR KSN Gerbangkertosusila, wilayah Jawa Timur memiliki 4 aliran sungai, yaitu : Sungai Solo, Sungai Pekalen, Sungai Sampean, dan Sungai Madura. Aliran

sungai di Kawasan GKS adalah aliran Sungai Brantas yang mengalir melalui Sidoarjo, Mojokerto, dan Surabaya. Aliran Sungai Brantas ini dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi, dan pengendalian banjir yang dilaksanakan melalui bendungan. Volume air oleh Badan Pengelolaan Aliran Sungai (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) yang mengelola aliran sungai, dan permintaan air di aliran sungai tersebut diflkuksi secara musiman.

Sungai Brantas mempunyai rencana induk, yaitu: Rencana Pengelolaan Komprehensif untuk Sumber Daya Air Sungai Brantas (1998). Adapun rencana termasuk langkah-langkah pengelolaan air adalah sebagai berikut: pengembangan sumber daya air, pengelolan batas air, pengelolaan kualitas air, pengelolaan pengendalian banjir, dan kerangka kerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air tanah merupakan hal yang penting sebagai alternatif untuk keperluan rumah tangga, industri, dan perdagangan. Pengelolaan dan pemeliharaan air tanah menjadi hal yang krusial karena permintaan air tanah meningkat cepat dan sumber daya tersebut tidak tak terbatas. Berdasar pada UndangUndang No.22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang pengelolaan air tanah maka perlu bersama-sama memastikan daya dukung lingkungannya dengan jalan membandingkan keseimbangan antara recharge dan yield. Untuk Kota Mojokerto sendiri mempunyai potensi debit air tanah sebesar 11,65 Yield(m³/detik).

Air minum untuk wilayah perkotaan di pasok oleh PDAM yang dimiliki oleh tiap kota/kabupaten. Sedangkan air mentah dipasok dari Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo oleh Perum Jasa Tirta 1 (PJT 1). Provinsi Jawa Timur mendirikan Perusahaan Pemasok Air Provinsi untuk pasokan air antar kabupaten.

Tabel 2. 97 Penggunaan Air Bersih di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan	PDAM Populasi terlayani	Populasi pengguna air bersih non PDAM		Populasi belum terlayani air bersih
		S Gali	S PT	
Kecamatan Prajuritkulon	52,582	639	13,800	6,202
Surodinawan	7,173	16	1,566	1,783
Kranggan	11,757	287	3,795	2,690
Miji	9,228	87	1,730	1,777
Prajurit Kulon	7,641	48	1,610	1,705
B l o o t o	5,999	78	1,438	1,699
Mentikan	7,529	-	1,255	1,256
Kauman	3,255	-	780	777
Pulorejo	-	123	1,626	5,485
Kecamatan Magersari	40,776	183	7,650	8,120
Meri	8,107	30	1,747	1,862
Gunung Gedangan	6,784	62	1,315	1,443
Kedundung	14,645	57	2,790	3,049
Balongsari	7,918	30	1,233	1216
Jagalan	3,322	4	565	550
Sentanan	2,502	9	531	540
Purwotengah	1,759	3	194	188

Kecamatan/Kelurahan	PDAM Populasi terlayani	Populasi pengguna air bersih non PDAM		Populasi belum terlayani air bersih
		S Gali	S PT	
Gedongan	2,392	1	314	318
Magersari	5,844	15	773	786
Wates	20,360	233	3,299	3,483
Jumlah	93,358	822	21,450	14,322

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

2.4.4.1.8 Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Perhitungan ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya ke depan dapat mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang telah disusun. Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa daya listrik terpasang maupun jumlah kebutuhan listrik di Kota Mojokerto semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. 98 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Listrik

Uraian	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Daya Listrik Terpasang	Mwatt / kVa	43.759,60	44.954,55	48.490,00	52.954	56.249
Jumlah Kebutuhan Listrik	Mwatt	81.742.901	89.093.124	91.926.997	100.618.110	112.819.769

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah dalam penyediaan listrik adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 99 Jumlah Rumah Tangga yang Berlistrik

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	28.071	28.294	28.557	29.293	29.293

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga berlistrik memiliki kecenderungan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Mojokerto semakin konsumtif terhadap penggunaan listrik. Sedangkan tabel keterpenuhan fasilitas listrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 100 Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang dan Listrik Terjual menurut Golongan Tarip di Kota Mojokerto

Golongan Tarip		Pelanggan	Daya Terpasang (KVA)	Terjual (KWH)	Nilai Produksi (000 Rp)
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
Sosial/Social	S1	-	-	-	-
	S2		3,214.85	4,967,071	3,512,223.30
	S3	-	-	-	-
Rumah Tangga/Household	R1	30,	24,881.60	52,530,078	27,774,095.87
	R2	2	1,147.30	1,803,824	1,612,166.33
	R3	3	354.10	491,685	574,045.74
Usaha, Multiguna dan Hotel	B1	1	3,664.50	5,737,175	4,825,454.86
Business & Hotel	B2		7,284.10	11,704,181	13,692,226.70
	B3	4	1,690.00	3,648,270	3,219,397.40
Industri/Industry	L		451.20	951,312	1,136,808.70
	I1		160.90	189,267	173,276.46
	I2	6	3,847.50	6,198,432	5,392,219.38
	I3		6,650.00	17,378,916	12,696,085.42
	I4	-	-	-	-
Gedung/Kantor/ Offices	P1		1,571.90	2,184,730	2,390,823.27
	P2	-	-	-	-
Jalan/Street	P3		1,331.70	5,034,828	4,144,443.96
Jumlah/ Total	2012	34	56,249.65	112,819,769	81,143,267.39
	2011	151	52,954.80	100,618,110	75,029,339.03
	2010	31	48,490.00	91,926,977	67,713,919.47

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Produksi pulsa yang dihasilkan oleh jaringan Telkom pada tahun 2012 yaitu pulsa lokal sebanyak 9.074.892 dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) sebanyak 23.661.493. Hal ini menunjukkan bahwa sarana komunikasi melalui jaringan Telkom masih dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Mojokerto, meskipun saat ini sudah banyak bermunculan operator telepon swasta.

Tabel 2. 101 Sambungan Telepon Kota Mojokerto

Tahun	Jenis Sambungan			
	Berbayar	Dinas	Lainnya	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

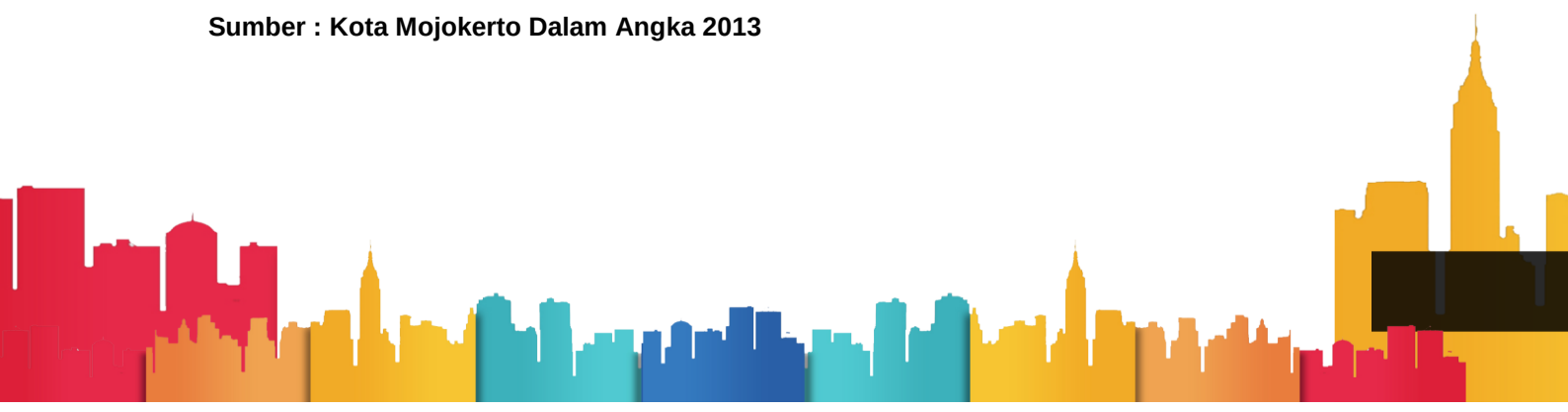
Tahun	Jenis Sambungan			
	Berbayar	Dinas	Lainnya	Jumlah
2003	36,298	215	2,533	39,046
2004	39,742	237	2,711	42,473
2005	40,642	254	2,607	43,503
2006	39,703	248	2,580	42,531
2007	37,946	290	2,210	40,446
2008	35,939	402	1,802	38,143
2009	18,200	284	821	19,305
2010	17,872	280	739	18,891
2011	16,502	275	740	17,517
2012	15,232	269	740	16,241

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013

Tabel 2. 102 Pulsa Telepon Kota Mojokerto

Bulan	Lokal	SLJJ	Telepon Umum	Wartel	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01. Januari/January	732,690	2,014,823	0	0	2,747,513
02. Februari/February	722,447	2,015,221	0	0	2,737,668
03. Maret/March	752,892	1,987,120	0	0	2,740,012
04. April/April	742,513	1,959,406	0	0	2,701,919
05. Mei/May	732,276	1,986,738	0	0	2,719,014
06. Juni/June	742,371	1,959,030	0	0	2,701,401
07. Juli/July	752,332	1,931,703	0	0	2,684,035
08. Agustus/August	762,566	1,958,653	0	0	2,721,219
09. September/September	773,080	1,931,332	0	0	2,704,412
10. Oktober/October	783,738	1,959,030	0	0	2,742,768
11. Nopember/November	794,396	1,931,703	0	0	2,726,099
12. Desember/December	783,591	2,026,734	0	0	2,810,325

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2013



2.5. Pencapaian Target Indikator 15 (Lima Belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis dibawah koordinasi dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Mojokerto telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kota Mojokerto meliputi 15 Bidang SPM yakni Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, Bidang Kesenian, Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perumahan Rakyat,, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Sosial, Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Penanaman Modal.

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Walikota sebagai wakil pemerintah di daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel Rencana Pencapaian dan Penerapan SPM 15 (Lima Belas) Bidang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 sebagai berikut:



Tabel 2. 103 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Bidang/ Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
I.	BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kota	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen didaerah terpencil	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
2.		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100%	2014	60%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
3.		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

No	Bidang/ Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
4.		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
5.		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
6.		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
7.		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100%	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
8.		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100%	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
9.		Di setiap Kota semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
10.		Di setiap kota semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

No	Bidang/ Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
		pendidik									
11.		Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
12.		Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
13.		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	2014	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
14.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
15.		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
16.		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan	100%	2014	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

No	Bidang/ Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
		optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA									
17.		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100%	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
18.		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
19.		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
20.		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
21.		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

No	Bidang/ Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
22.		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
23.		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
24.		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
25.		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota atau Kantor Kementerian Agama di kota pada setiap akhir semester	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
26.		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target	Target Pencapaian Tahunan	SKPD	Keterangan

				Nasional	2015	2016	2017	2018	2019		
II.	BIDANG KESEHATAN										
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2015	93%	94%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil disatu wil kerja dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
2.		Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wil kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wil kerja pada waktu tertentu}} \times 100\%$
3.		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	2015	94%	95%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
4.		Cakupan pelayanan Ibu nifas	95%	2015	93%	94%	95%	96%	97%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh ibu nifas disatu wil kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
5.		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	90%	91%	92%	93%	94%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100\%$
6.		Cakupan kunjungan bayi	90%	2015	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wil kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh seluruh bayi lahir hidup disatu wil kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
7.		Cakupan Desa / kelurahan universal child immunization (UCI)	$\geq 95\%$	2015	96%	97%	98%	99%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kelurahan/desa UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.		Cakupan pelayanan anak balita.	90%	2015	85%	87%	90%	92%	95%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jmlh anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wil kerja pd waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wil kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
9.		Cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin}} \times 100\%$
10.		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlh balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di wil kerja pada waktu tertentu}} \times 100\%$
11.		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat disatu wil kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
12.		Cakupan peserta KB aktif	70%	2015	70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh PUS disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
13.		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit									
		a. Penemuan penderita AFP	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	2015	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15 th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15th	$\geq 2/100.000$ Pddk < 15 th	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk umur < 15 tahun}} \times 100.000$
		b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%	2015	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
14.		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	90%	2015	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		d. Penemuan dan penanganan DBD	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jml penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		e. Penanganan penderita diare	100%	2015	85%	90%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader disatu wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah perkiraan penderita disatu wil kerja pada waktu yg sama}} \times 100\%$
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di Satker strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kabupaten}} \times 100\%$
15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien maskin di Satker strata 2 dan 3}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kabupaten}} \times 100\%$
16.		Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten / Kota	100%	2015	95%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
17.	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jmlh KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$
18.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
III.	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA										
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	2014	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%	3%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\Sigma \text{ PUS yg usia istrinya } < 20 \text{ th}}{\Sigma \text{ PUS yg usia istrinya } 15-49 \text{ th}}$ X 100%
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%	2014	75%	80%	80%	85%	85%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\Sigma \text{ peserta KB akti}}{\Sigma \text{ PUS}}$ X 100%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5%	2014	25%	20%	15%	10%	5%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\Sigma \text{ PUS (tak KB) iat + tial}}{\Sigma \text{ PUS } 15-49 \text{ th}}$ X 100%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%	2014	75%	80%	80%	85%	85%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Anggota BKB ber-KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}}$ X 100%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	2014	75%	80%	80%	85%	90%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Anggota UPPKS Status PUS}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}}$ X 100%
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah PLKB/PKB} \times 2}{\text{Jumlah Kelurahan}}$ X 100%

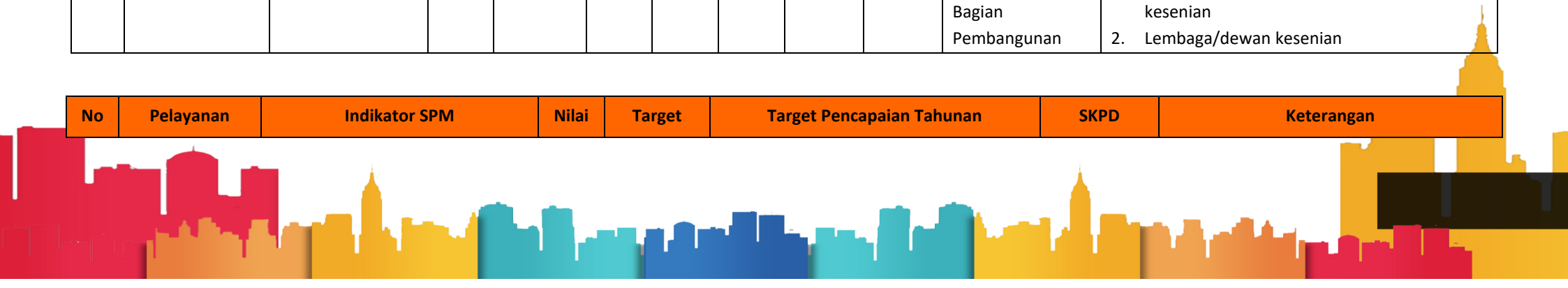
No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
		1 Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan									
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah PPKBD}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$
2.	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	2014	15%	30%	30%	30%	30%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah obat dan alat kontrasepsi yang dilayani Pemerintah Kota}}{\text{Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi}} \times 100\%$
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga Kelurahan}}{\text{Jml Kelurahan}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
IV.	BIDANG KESENIAN										
1.	Pelindungan, Pengembanga, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni	50%	2014	60%	65%	70%	75%	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Pembangunan	Kegiatan yang bersifat kajian antara lain : 1. seminar 2. sarasehan 3. diskusi* 4. bengkel seni (workshop) *

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
											5. penyerapan narasumber 6. studi kepustakaan 7. penggalan 8. eksperimentasi 9. rekonstruksi 10. revitalisasi 11. konservasi 12. studi banding 13. inventarisasi* 14. dokumentasi* 15. pengemasan bahan kajian.
		Cakupan Fasilitasi Seni	30%	2014	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Pembangunan	Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian al : 1. penyuluhan substansial maupun teknis 2. pemberian bantuan 3. bimbingan organisasi 4. kaderisasi 5. promosi 6. penerbitan & pendokumentasian 7. kritik seni
		Cakupan Gelar Seni	75%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Pembangunan	Wujud gelar seni antara lain: 1. pertunjukan 2. pameran 3. festival 4. lomba.
		Misi Kesenian	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah kota wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurangkurangnya satu

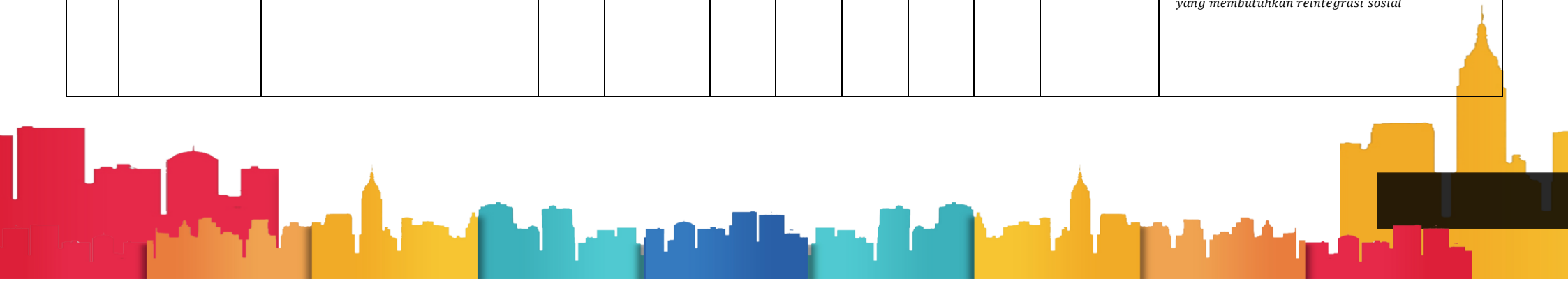
No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
										Bagian Pembangunan	kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah
2.	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	2014	40%	45%	50%	55%	60%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Pembangunan	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi SDM Kesenian sebagai berikut: 1. sarjana seni 2. pakar seni 3. pamong budaya* 4. seniman/budayawan* 5. kritikus 6. insan media massa 7. pengusaha 8. penyanggah dana.
		Cakupan Tempat	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Pembangunan	Pemerintah kota berkewajiban menyediakan minimal : 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
		Cakupan Organisasi	34%	2014	65%	65%	65%	65%	65%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Pembangunan	Pemerintah kota membentuk: 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan kesenian

No	Pelayanan	Indikator SPM	Nilai	Target	Target Pencapaian Tahunan	SKPD	Keterangan



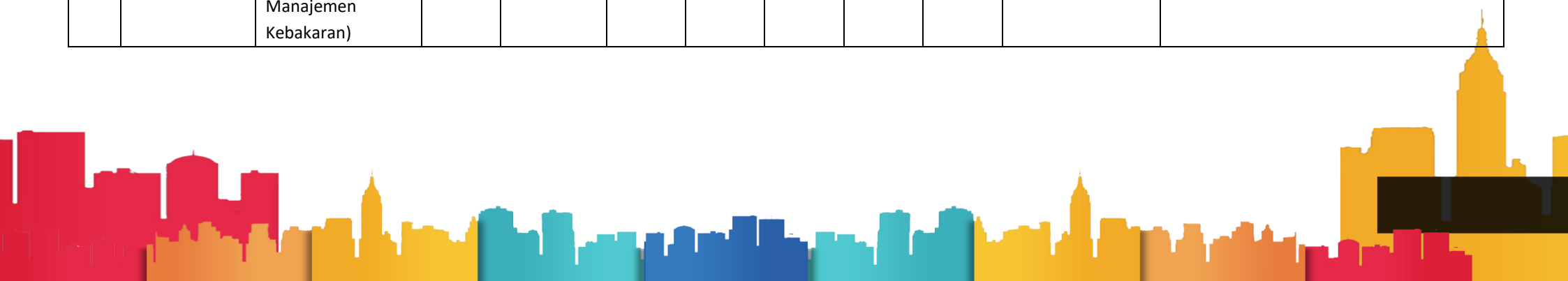
	Dasar			Nasional	2015	2016	2017	2018	2019		
V.	BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN										
1.	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor KB dan PP., unit PP	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana atau RS}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata di Puskesmas mampu tatalaksana atau RS}} \times 100\%$
3.	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	50%	60%	75%	80%	100%	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	75%	75%	80%	90%	100%	Kantor KB dan PP. Dinas Sosial, Kemenag.	$\frac{\text{Jmlh korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan bimbingan rohani}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bimbingan rohani}} \times 100\%$

4.	Penegakan dan bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	80%	80%	80%	80%	80%	Kantor KB dan PP Pengadilan Negeri, POLRI, Kejaksaan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	50%	60%	60%	70%	70%	Kantor KB dan PP Pengadilan Negeri	$\frac{\text{Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$
5.	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	50%	60%	60%	70%	70%	Kantor KB dan PP BNP2TKI, Dinas Sosial.	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor KB dan PP, Dinas Sosial.	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
VI.	BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI										
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	2020	95%	96%	97%	98%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	2020	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota	100%	2015	40%	70%	90%	100%	100%	Satpol PP	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 kali	2014	6	6	6	6	6	Satpol PP	

3.		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota	1 org /RT	2014	1	1	1	1	1	Satpol PP	
4.	Penanggulang an Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	65%	70%	75%	80%	85%	Dinas PU	
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
VII. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.	Prioritas utama penyediaan	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100 %	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air dari instalasi pengolahan}}{\text{Jumlah kebutuhan air baku berdasarkan MDGs}} \times 100\%$
2.	Air untuk Kebutuhan Masyarakat	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70 %	2014	65%	70%	75%	80%	85%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam}}{\text{Jumlah kebutuhan air irigasi sesuai rencana tanam}} \times 100\%$
3.	Aksesibilitas Jaringan Jalan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan penghubung PK akhir pencapaian SPM}}{\text{Jumlah panjang jalan penghubung seluruh PK}} \times 100\%$
4.	Mobilitas Jaringan Jalan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Angka Mobilitas yang ditargetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}} \times 100\%$
5.	Keselamatan Jaringan Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$
6.	Kondisi Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$
7.	Kecepatan Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$
8.	Pelayanan air minum Dengan cluster sbb :	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan	80 % - 100 %	2014	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU, PDAM	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat terlayani}}{\text{Jumlah Proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$

		Sangat : 40% Buruk : 50% Buruk : 70% Sedang : 80% Baik : Sangat Baik 100%	jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari									
9.	Penyehatan lingkungan permukiman (Sanitasi)	Air limbah permukaan	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60 %	2014	60%	60%	60%	60%	60%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah tangkiseptik yang dilayani}}{\text{Jumlah tangkiseptik}} \times 100\%$
10.			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	5 %	2014	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
11.		Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20 %	2014	10%	20%	30%	40%	45%	DKP	$\frac{\text{Vol. sampah yang direduksi di TPST}}{\text{Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPST}} \times 100\%$
12.			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70 %	2014	80%	90%	95%	100%	100%	DKP	$\frac{\text{Vol sampah terangkut}}{\text{Volume Sampah Kab/Kota}} \times 100\%$
13.		Pengelolaan Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola}}{\text{Jumlah infrastruktur yang harus dibangun}} \times 100\%$
14.			Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	50%	2014	20%	30%	40%	50%	60%	Dinas PU	$\frac{\text{Luas daerah bebas genangan}}{\text{luas daerah rawan genangan}} \times 100\%$
15.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 %	2014	95%	96%	97%	98%	100%	Dinas PU	$\frac{\text{Permukiman Kumuh yang Tertangan di Kota A}}{\text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} \times 100\%$
16.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kota.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	$\frac{\text{Jumlah penerbitan IMB}}{\text{Rencana jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB}} \times 100\%$
17.		Harga Standar	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kota.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pembang	$\frac{\text{HSBGN kabupaten yang telah tersusun}}{\text{HSBGN yang harus disusun}} \times 100\%$

		Bangunan Gedung Negara (HSBGN)										unan	
18.	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan Lengkap	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	$\frac{\text{Pelayanan IUJK yang terbit paling lama 10 hari}}{\text{Seluruh permohonan IUJK yang lengkap persyaratannya}} \times 100\%$
19.		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	$\frac{\text{Jumlah jenis layanan minimal terupdate}}{\text{Jumlah jenis layanan minimal}} \times 100\%$
20.	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kota dan kecamatan	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeko	$\frac{\text{Jumlah peta analog / digital}}{\text{Jumlah peta analog atau digital seluruh kabupaten/kecamatan}} \times 100\%$
21.			Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kelurahan	90 %	2014	50%	80%	90%	100%	100%	100%	Bappeko	$\frac{\text{Jumlah peta analog / digital}}{\text{Jumlah peta analog atau digital seluruh desa / kelurahan}} \times 100\%$
22.		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeko	$\frac{\text{Jumlah konsultasi publik}}{\text{Jumlah konsultasi publik seluruh Kabupaten}} \times 100\%$

23.	Izin Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeko, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang terbit tentang RTRW Kabupaten}}{\text{Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten yang seharusnya terbit}} \times 100\%$
24.	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeko	$\frac{\text{Jumlah kasus yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus yang teridentifikasi}} \times 100\%$
25.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25 %	2014	20%	21%	22%	23%	25%	25%	KLH, DKP, Dinas Pertanian, Bappeko	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{Luasan 20% dari luas kabupaten}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
						2015	2016	2017	2018	2019		
VIII.	BIDANG PERHUBUNGAN											
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan angkutan jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	75%	2014	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah angkutan umum dalam trayek penghubung jaringan jalan X 100% Jumlah jaringan jalan penghubung dalam

												Kota
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yg telah berkembang pada wilayah yang tersedia jaringan jalan	60%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah daerah terpencil dalam Kota dengan jaringan trayek}}{\text{Jumlah daerah terpencil dalam Kota}} \times 100\%$
		b. Jaringan prasarana angkutan jalan	Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah halte}}{\text{Jumlah kebutuhan halte dalam jaringan angkutan umum}} \times 100\%$
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kabupaten yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah terminal dengan layanan angkutan umum}}{\text{Jumlah terminal skala Kota}} \times 100\%$
		c. Fasilitas Perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota	60%	2014	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas PU Cipta Karya	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang telah ada}}{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan sesuai persyaratan perlengkapan jalan}} \times 100\%$
		d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	DISHUBKO-MINFO	$\frac{\text{Jumlah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor}}{1} \times 100\%$
		e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	DISHUBKO-MINFO	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang terminal}}{\text{Jumlah terminal dalam Kota}} \times 100\%$
			Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	DISHUBKO-MINFO	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang pengujian kendaraan bermotor}}{\text{Jumlah SDM Bidang Pengujian sesuai}} \times 100\%$

												persyaratan
			Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir Kota	40%	2014	33%	33%	66%	66%	100%	DISHUBKO-MINFO	Jumlah SDM bidang MRLL, Andalalin, Pengelolaan Parkir 3 X 100%
			Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	DISHUBKO-MINFO	Jumlah SDM bidang pengawas kendaraan bermotor Jumlah SDM Bidang pengawas kelaikan kendaraan bermotor sesuai persyaratan X 100%
		f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam Kota	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	DISHUBKO-MINFO	Jumlah angkutan umum dengan standar keselamatan X 100% Jumlah angkutan umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
IX.	BIDANG KETAHANAN PANGAN										
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90%	2015	80%	85%	90%	95%	100%	Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian	
2.		Penguatan Cadangan Pangan.	60%	2015	45%	45%	50%	55%	60%	Dinas Pertanian	
3.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	2015	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
4.		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	2015	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
5.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	80%	85%	90%	95%	100%	Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian	
6.		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian	
7.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian	

[illegible]

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
					hari	hari	hari	hari	hari	Kominfo	
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12kali/th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	Dishub Kominfo, Dinas P & K	
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;	12kali/th	2014	>4 kali	>4 kali	>4 kali	>4 kali	>4 kali	Bag. Humas	
		e. Media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12kali/th	2014	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	> 12 kali	Dishub Kominfo, Bagian Humas	
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Dishub Kominfo	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kec. dalam Kab}} \times 100\%$

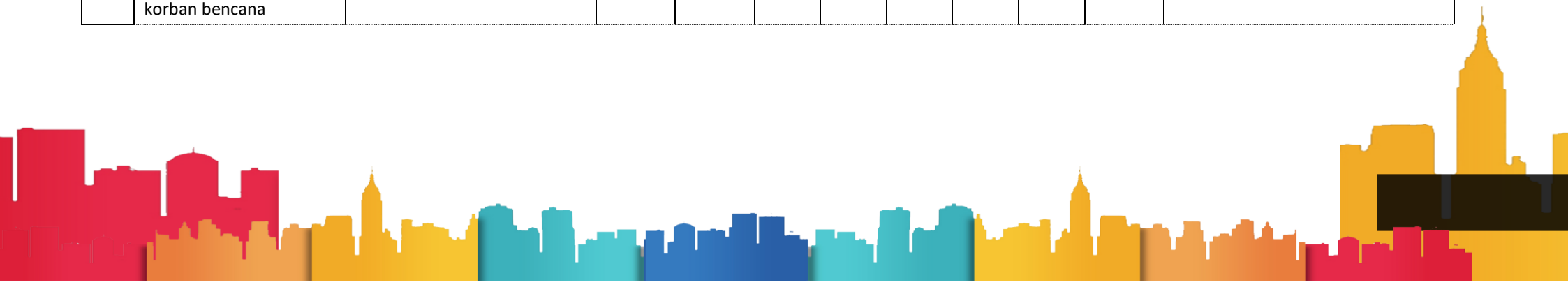
No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
XI	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air;	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis	100 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan pencegahan X 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
		pencegahan pencemaran air									pencemaran air Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan limbah air
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan pencegahan pencemaran udara X Jumlah usaha dan atau kegiatan tidak bergerak yang mengeluarkan limbah udara 100%
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100 %	2013	80%	85 %	90 %	95 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah luas lahan untuk produksi biomassa yang ditetapkan status kerusakannya X 100% Jumlah luas lahan untuk produksi biomassa wilayah Kota
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan	90 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
	akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti									$\frac{\text{pencemaran / perusakan lingkungan hidup}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
XII	BIDANG SOSIAL										
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial										
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2015	60%	65%	70%	75%	80%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kotayang menerima program pemberdayaansosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2015	10%	15%	20%	25%	30%	Dinas Sosial	<i>Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis</i> $\frac{\text{Jmlh PMKS yg seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis}}{\text{Jmlh PMKS yg seharusnya}} \times 100\%$
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial										
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota	Presentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	<i>Jumlah panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesos</i> $\frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota	Presentase (%) wahanakesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2015	75%	80%	85%	90%	95%	Dinas Sosial	<i>Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos</i> $\frac{\text{Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarpras pelayanan kesos}} \times 100\%$
3.	Penanggulangan korban bencana										



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
XIII	BIDANG KETENAGAKERJAAN										

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Ket
					2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	62%	65%	67%	70%	72%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$
2.		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.	60%	2016	54%	56%	60%	65%	70%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$
3.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	40%	2016	38%	40%	42%	45%	48%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
4.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Jumlah kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
5.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	73%	75%	78%	82%	85%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah pekerja peserta JAMSOSTEK}}{\text{Jumlah pekerja / buruh}} \times 100\%$
6.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	22%	27%	31%	36%	40%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah diperiksa}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
7.		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah peralatan yang telah diuji}}{\text{Jumlah peralatan yang terdaftar}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
XIV	BIDANG PENANAMAN MODAL										
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 sektor/bidang ang	2014	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan, Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat Kota dengan pengusaha tingkat propinsi / nasional	1 kali/tahun	2014	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Diskoperindag	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	1 kali/tahun	2014	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, al : 1. Pendaftaran penanaman modal	100%	2014	83%	83%	83%	83%	83%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah perizinan dan non perizinan yg dapat dilayani PTSP 6 x100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
		dalam negeri 2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri 3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sesuai kewenangan pemerintah kabupaten									
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/tahun	2014	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Diskoperin dag	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), al : 1. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri 2. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah pelayanan yg dapat dilayani SPIPISE $\frac{\quad}{4} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
		3. Izin usaha penanaman modal dalam negeri 4. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)									
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/tahun	2014	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Diskoperin dag	



BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

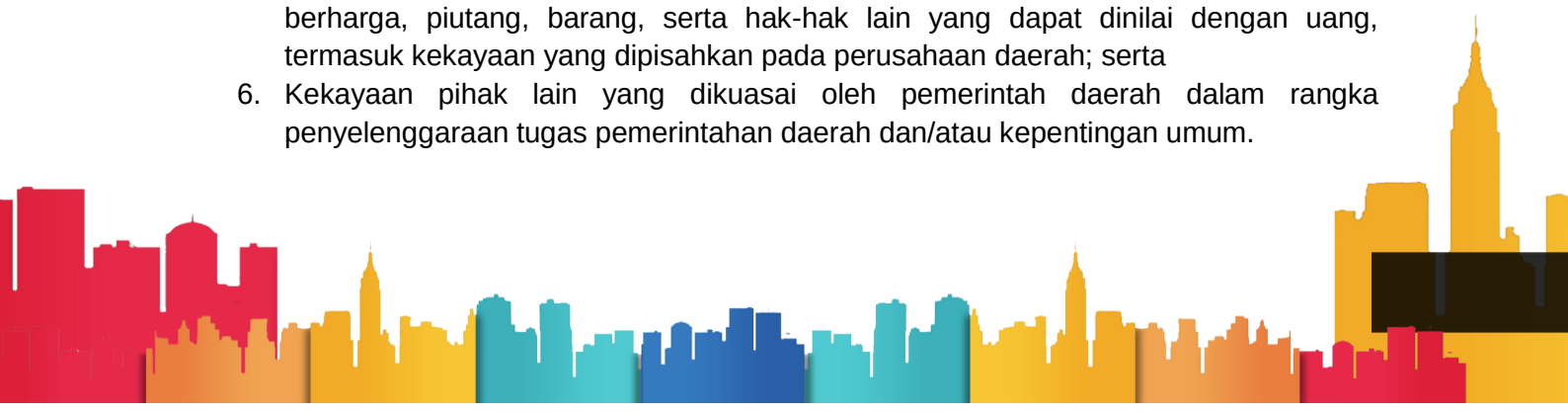
Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2009-2013), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.



Kinerja Keuangan Kota Mojokerto periode tahun 2009–2013 berdasarkan pada data kinerja keuangan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari beberapa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Mojokerto

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kota Mojokerto secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013

No	URAIAN	JUMLAH					Rata2 Pertumbuhan
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	
I.	PENDAPATAN DAERAH						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	28,154,863,948.45	31,596,313,387.11	42,165,056,510.12	53,439,861,756.12	74,944,029,536.47	28.16
	1.1.1. Pajak Daerah	6,419,093,230.30	7,270,048,616.27	12,633,038,537.65	15,987,117,382.15	23,417,626,747.57	40.01
	1.1.2. Retribusi Daerah	16,016,381,509.00	19,615,315,177.00	23,279,025,482.50	28,038,854,258.50	9,783,744,297.50	(0.88)
	1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,094,872,039.55	1,302,325,710.11	2,577,719,163.03	2,426,474,670.94	3,075,784,187.86	34.44
	1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,624,517,169.60	3,408,623,883.73	3,675,273,326.94	6,987,415,444.53	38,666,874,303.54	131.26
1.2.	Dana Perimbangan	291,496,817,179.00	300,126,050,134.00	326,532,622,484.00	379,471,619,712.00	419,223,180,215.00	9.61
	1.2.1. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	26,663,907,179.00	40,114,087,134.00	40,689,275,484.00	54,904,848,712.00	45,381,463,215.00	17.37
	1.2.2. Dana alokasi umum	238,044,910,000.00	244,969,563,000.00	265,452,147,000.00	309,102,871,000.00	354,452,407,000.00	10.60
	1.2.3. Dana alokasi khusus	26,788,000,000.00	15,042,400,000.00	20,391,200,000.00	15,463,900,000.00	19,389,310,000.00	(1.77)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,313,115,631.00	58,031,918,159.00	75,351,417,221.00	83,054,744,161.00	74,733,359,846.00	19.42
	1.3.1. Hibah	8,287,520,000.00	23,182,213,800.00	36,235,985,220.00	-	-	23.55
	1.3.2. Dana darurat	-	-	-	-	-	-
	1.3.3. Bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	20,408,061,212.00	29,870,036,544.00	31,539,231,999.00	29,760,438,868.00	32,176,161,785.00	8.03
	1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	27,922,735,000.00	40,428,194,000.00	11.20
	1.3.5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	10,617,534,419.00	4,979,667,815.00	7,576,200,002.00	25,371,570,293.00	2,129,004,061.00	45.27
	1.3.6. Pendapatan transfer	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	358,964,796,758.45	389,754,281,680.11	444,049,096,215.12	515,966,225,629.12	568,900,569,597.47	12.24

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Rata-rata pertumbuhan realiasasi pendapatan daerah Kota Mojokerto selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Tercatat hanya ada 2 yang

mengalami pertumbuhan yang cenderung minus yakni Retribusi Daerah dengan pertumbuhan mencapai -0.88% dan Dana Alokasi Khusus yang mencapai -1.77%. Di tahun 2009 pendapatan mencapai Rp 358,964,796,758.45, kemudian meningkat di tahun 2010 mencapai Rp 389,754,281,680.11, di tahun 2011 mencapai Rp 444,049,096,215.12, di tahun 2012 mencapai Rp 515,966,225,629.12, dan di tahun 2013 mencapai Rp 568,900,569,597.47.

Mengingat RPJMD Kota Mojokerto dilakukan revisi pada tahun 2017, maka setidaknya pada tahun 2014-2016 telah adanya realisasi pendapatan Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:

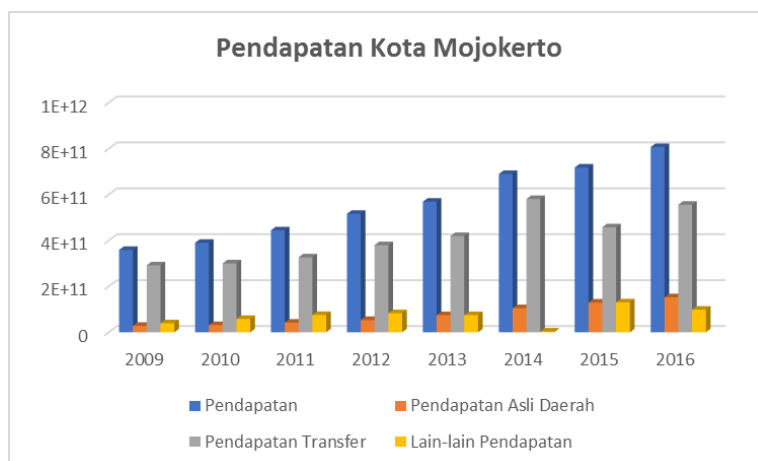
Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016

NO	Uraian	Jumlah			Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	
	PENDAPATAN	689,461,578,822.80	717,544,079,472.41	806,770,159,042.56	8.25
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105,179,719,367.80	129,258,132,763.41	152,460,360,279.56	20.42
	Pendapatan Pajak Daerah	25,092,877,550.28	31,324,086,639.85	35,333,988,082.55	18.81
	Pendapatan Retribusi Daerah	10,813,462,499.50	11,862,967,589.50	13,004,631,686.46	9.66
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,317,593,067.09	3,566,250,784.99	3,448,803,749.90	2.1
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65,955,786,250.93	82,504,827,749.07	100,672,936,760.65	23.55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	580,809,016,051.00	457,456,088,791.00	555,817,062,047.00	0.13
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3,472,843,404.00	130,829,857,918.00	98,492,736,716.00	1821.25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Mojokerto selama kurun waktu 2014-2016 semuanya mengalami peningkatan bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan mencapai Rp 589,461,578,822.80, di tahun 2015 mencapai Rp 717,544,079,472.41, dan di tahun 2016 Rp 806,770,159,042.56.

Realisasi pendapatan daerah Kota Mojokerto setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata pada tahun 2009-2013 Pendapatan Asli Daerah merupakan proporsi terendah bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Sedangkan mulai tahun 2014-2016 Pendapatan Asli Daerah menempati peringkat kedua dibawah pendapatan transfer atau dana perimbangan dan diatas pendapatan lain-lain. Adapun perkembangan dan posisi masing-masing pendapatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3. 1 Grafik Proporsi Pendapatan Kota Mojokerto 2009-2016

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota/ desa
7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan
8. Belanja tidak terduga.

Sedangkan Belanja Langsung meliputi

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Mojokerto selama tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

No	URAIAN	JUMLAH					Rata2 Pertumb uhan
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	
II.	BELANJA DAERAH						
2.1.	Belanja Tidak Langsung	151,133,059,367	190,384,656,103	212,005,090,029	223,616,313,105	239,654,724,050	12.49
	2.1.1. Belanja pegawai	132,457,973,525	157,944,347,903	176,685,718,321	194,502,722,800	210,274,230,681	12.32
	2.1.2. Belanja bunga	0	0	0	0	0	0.00
	2.1.3. Belanja subsidi	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0.00
	2.1.4. Belanja hibah	14,021,525,000	13,042,750,000	13,309,380,000	27,699,282,215	27,363,793,419	25.49
	2.1.5. Belanja bantuan sosial	4,503,560,842	18,759,609,000	21,817,231,708	892,000,000	1,518,750,000	76.80
	2.1.6. Belanja bagi hasil kepada Prop./Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0	0	0	0.00
	2.1.7. Belanja Hibah bantuan keuangan kepada Prop./Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	487,949,200	0	473,404,590	487,949,950	0.77
	2.1.8. Belanja tidak terduga	0	0	42,760,000	48,903,500	10,000,000	(16.30)
2.2	Belanja Langsung	247,929,367,274	213,331,402,135	197,659,821,183	265,329,192,791	271,436,821,396	3.81
	2.2.1. Belanja pegawai	19,599,293,255	24,095,041,892	32,042,335,650	30,920,291,143	37,642,634,150	18.54
	2.2.2. Belanja barang dan jasa	108,270,360,208	101,219,301,003	115,315,390,424	127,610,523,687	166,147,866,882	12.07
	2.2.3. Belanja modal	120,059,713,811	88,017,059,240	50,302,095,109	106,798,377,961	67,646,320,365	1.53
B.	JUMLAH BELANJA	399,062,426,641	403,716,058,238	409,664,911,212	488,945,505,896	511,091,545,446	6.63

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat selama periode 2009-2013 hampir semua komponen belanja Kota Mojokerto mengalami peningkatan. Meskipun hampir semua komponen belanja mengalami peningkatan pertumbuhan, namun tercatat Belanja Tidak Terduga mengalami rata-rata pertumbuhan yang minus yakni -16.30%.

Dilihat dari total belanja setiap tahunnya Kota Mojokerto mengalami peningkatan, di tahun 2009 mencapai Rp 399,062,426,641, di tahun 2010 mencapai Rp 403,716,058,238, di tahun 2011 mencapai Rp 409,664,911,212, di tahun 2012 mencapai Rp 488,945,505,896, dan di tahun 2013 mencapai Rp 511,091,545,446.

Dengan di revisinya RPJMD Kota Mojokerto di tahun 2017, maka berikut merupakan tabel belanja tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2016

NO	Uraian	Jumlah			Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	
	Belanja	631,979,414,509.86	706,783,751,688.70	944,717,143,504.53	22.75
1.1	Belanja Tidak Langsung		281,090,106,457.00	277,418,352,958.00	-1.3
1.2	Belanja Langsung		425,693,645,231.70	667,298,790,546.53	56.76

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Dilihat dari total belanja setiap tahunnya pada tahun 2014-2016 Kota Mojokerto mengalami peningkatan di tahun 2014 realisasi belanja mencapai Rp 631,979,414,509.86, di tahun 2015 mencapai Rp 706,783,751,688.70, dan di tahun 2016 mencapai Rp 944,717,143,504.53.

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilaksanakan pada wilayahnya. Berdasarkan proporsi belanja pemerintah dapat dilihat apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah selama periode 2011-2015 lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi pemerintah atau pada kebutuhan diluar organisasi pemerintah. Proporsi alokasi anggaran yang memiliki kriteria baik adalah proporsi alokasi anggaran yang proporsi belanja tidak langsungnya tidak melebihi 70% dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah. Proporsi belanja Kota Mojokerto pada tahun 2009-2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Grafik Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Mojokerto Tahun 2009-2016

Sumber: Diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi alokasi anggaran di Kota Mojokerto sudah cukup baik karena prosentase belanja tidak langsung selama tahun 2009-2016 berada di bawah 70%. Bahkan besar belanja langsung selalu lebih besar bila dibandingkan belanja tidak langsung setiap tahunnya. Tercatat hanya di tahun 2011

proporsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Untuk itu, pemerintah tetap harus menekan dan menstabilkan proporsi belanja daerah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3. 5 Realisasi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

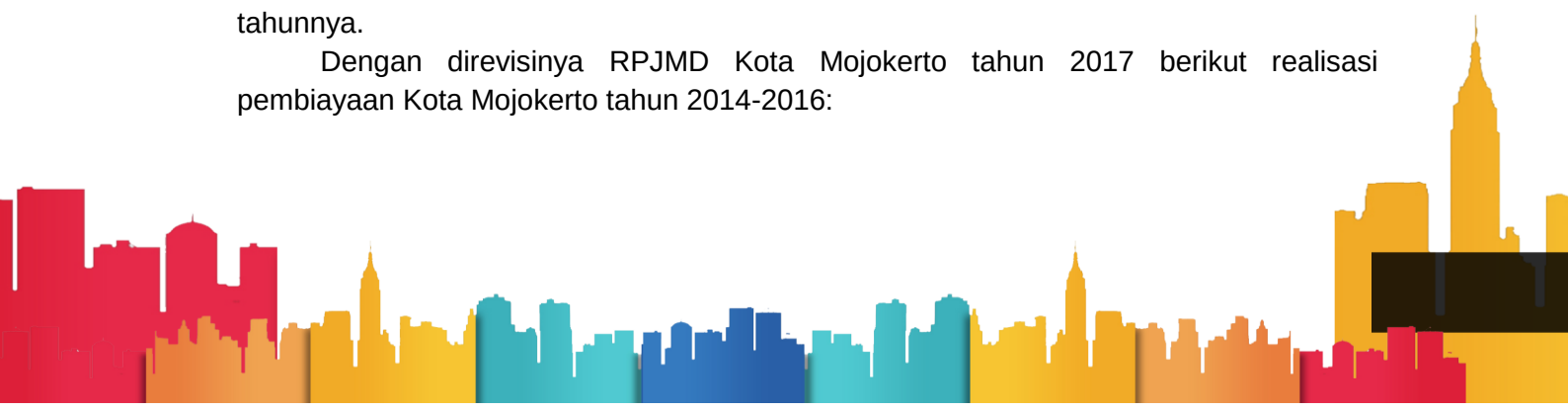
No	URAIAN	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Rata2 Pertumbuhan
III	PEMBIAYAAN DAERAH	74,258,689,600.05	31,494,336,717.66	14,733,865,159.36	36,653,075,842.58	61,269,605,575.59	26,28
3.1	Penerimaan Pembiayaan	79,099,425,855.21	35,369,336,717.66	19,108,865,159.36	49,403,075,842.58	65,764,105,575.59	22.60
	3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	77,794,939,055.21	34,161,059,717.66	17,532,560,159.36	47,612,910,842.58	63,673,795,575.59	25.13
	3.1.2 Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
	3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1,304,486,800.00	1,208,277,000.00	1,576,305,000.00	-	-	5.77
	3.1.6 Penerimaan piutang daerah	-	-	-	1,790,165,000.00	2,090,310,000.00	4.19
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,840,736,255.16	3,875,000,000.00	4,375,000,000.00	12,750,000,000.00	4,494,500,000.00	29.91
	3.2.1 Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah	3,365,736,255.16	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	12,750,000,000.00	4,494,500,000.00	82.42
	3.2.3 Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
	3.2.4 Pemberian pinjaman daerah	1,475,000,000.00	1,875,000,000.00	1,875,000,000.00	-	-	6.78
	3.2.5 Investasi jangka pendek berupa deposito	-	-	-	-	-	-
	3.2.6 Pengembalian Pada Pihak Ke III	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Berdasarkan tabel diatas menunjukka bahwa besaran pembiayaan daerah cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2009 total pembiayaan mencapai Rp74,258,689,600.05, di tahun 2010 turun mencapai Rp 31,494,336,717.66, di tahun 2011 turun kembali mencapai Rp 14,733,865,159.36, ditahun 2012 meningkat kembali Rp 36,653,074,842.58, dan ditahun 2013 mencapai Rp 61,269,605,575.59.

Dilihat dari penerimaan pembiayaan setiap tahunnya juga mengalami fluktuatif, hal tersebut tentunya mengindikasikan adanya gap antara target dan realisasi yang ditetapkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan juga cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Dengan direvisinya RPJMD Kota Mojokerto tahun 2017 berikut realisasi pembiayaan Kota Mojokerto tahun 2014-2016:



Tabel 3. 6 Realisasi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2014-2016

NO	Uraian	Jumlah			Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	
	Pembiayaan	109,414,109,726.93	161,612,693,889.87	169,060,076,673.58	26.16
1.1	Penerimaan Pembiayaan	121,081,809,726.93	194,695,546,889.87	172,525,076,673.58	24.70
1.2	Belanja Langsung	11,667,700,000.00	33,082,853,000.00	3,465,000,000.00	47.01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Data diatas menunjukkan peningkatan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya baik dari pembiayaan, penerima pembiayaan, dan belanja langsung. Ditahun 2014 realisasi mencapai Rp 109,414,109,726.93, ditahun 2015 meningkat mencapai Rp 161,612,693,889.87, dan di tahun 2016 mencapai Rp 169,060,076,673.58.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub – sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Mojokerto dan rata – rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Neraca Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009-2016

No. Rek.	URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Rata2 Pertumbuhan
1	ASET	1,255,365,047,441.08	1,307,939,098,372.09	1,367,346,469,195.17	1,513,037,968,452.65	1,670,898,403,131.61	7.45
1.1	A SET LANCAR	40,131,544,556.19	27,557,760,207.77	57,698,484,211.62	79,639,549,692.35	152,619,065,226.14	51.93
1.1.1	Kas	34,789,740,888.68	17,546,535,354.36	49,137,006,964.58	63,736,896,910.59	119,086,448,344.93	61.76
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0.00
1.1.3	Piutang	945,034,881.00	806,844,980.00	1,730,802,859.00	4,391,783,635.36	19,623,228,828.42	150.11
1.1.4	Piutang lain-lain	2,388,501,200.00	6,912,579,359.00	3,285,258,888.00	3,166,692,866.00	3,671,522,090.00	37.32
1.1.5	Persediaan	2,008,267,888.53	2,291,800,514.41	3,545,615,700.04	9,332,938,517.77	13,098,081,353.51	68.10
	Penyisihan Piutang tidak Tertagih	-	-	-	(988,762,237.37)	(2,860,215,390.72)	47.32
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	35,116,345,200.39	37,735,737,927.39	14,609,139,119.41	25,663,196,581.19	31,586,187,720.94	11.23
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	0.00
1.2.2	Investasi Permanen	35,116,345,200.39	37,735,737,927.39	14,609,139,119.41	25,663,196,581.19	31,586,187,720.94	11.23
1.3	A SET TETAP	1,170,309,656,773.50	1,220,856,618,075.93	1,271,317,670,284.17	1,383,622,482,618.11	1,472,447,644,679.53	5.93
1.3.1	Tanah	660,083,462,294.00	642,530,869,128.00	642,092,171,128.00	642,237,368,628.00	654,869,232,326.84	0.18
1.3.2	Peralatan dan Mesin	96,404,270,851.00	109,299,777,399.67	127,270,048,194.28	175,758,570,724.53	198,552,444,741.45	20.22
1.3.3	Gedung dan Bangunan	157,314,009,977.50	151,643,176,448.08	167,263,877,484.71	281,032,679,129.50	306,938,139,573.16	20.98
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	176,758,910,852.00	187,191,324,900.18	202,728,147,150.18	275,981,429,351.01	301,825,839,003.01	14.93
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	6,615,953,399.00	5,778,137,650.00	6,979,848,327.00	7,656,344,013.84	8,612,430,813.64	7.58
1.3.6	Konstruksi dalam Pengejaan	73,133,049,400.00	124,413,332,550.00	124,983,578,000.00	956,090,771.43	1,649,558,221.43	10.97
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.5	A SET LAINNYA	9,807,500,911.00	21,788,982,161.00	23,721,175,579.97	24,112,739,561.00	14,045,505,505.00	22.73
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0	0	0	975,250,000.00	710,811,444.00	(6.78)
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	3,227,881,250.00	4,735,446,168.97	3,815,966,150.00	3,794,966,150.00	6.68
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8,907,408,000.00	17,587,108,000.00	17,587,108,000.00	17,587,108,000.00	7,304,700,000.00	9.74
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	872,742,911.00	973,992,911.00	1,398,621,411.00	1,734,415,411.00	2,235,027,911.00	27.02
1.5.5	Aset Lain-lain	27,350,000.00	0	0	-	-	-
2	KEWAJIBAN	4,397,489,088.53	26,750,915,227.77	55,967,881,552.62	11,510,869,146.40	13,909,388,052.79	138.74
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,397,489,088.53	26,750,915,227.77	55,967,881,552.62	11,510,869,146.40	13,909,388,052.79	138.74
2.1.1	Utang Pembiayaan Pihak Ketiga (PPK)	-	17,546,535,354.36	49,137,006,964.58	-	-	46.01
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang Pajak	720,000.00	-	-	-	-	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2,388,501,200.00	6,912,579,359.00	3,285,258,888.00	3,166,692,866.00	3,671,522,090.00	37.32
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	2,008,267,888.53	2,291,800,514.41	3,545,615,700.04	9,332,938,517.77	13,098,081,353.51	68.10
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	(988,762,237.37)	(2,860,215,390.72)	47.32
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	-
2.2.2	Utang Luar Negeri	0	0	0	0	0	-

3	EKUITAS DANA	1.219.630.991.973.42	1.307.132.253.392.09	1.365.615.866.536.17	1.445.898.050.144.07	1.534.848.941.348.98	6.92
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	4.397.489.088.53	26.750.915.227.77	55.967.881.552.62	12.499.631.383.77	16.769.603.443.51	143.61
3.1.1	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)	-	17.546.535.354.36	49.137.006.964.58	-	-	46.01
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	720.000.00	-	-	-	-	-
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Uang Jangka Pendek	2.388.501.200.00	6.912.579.359.00	3.285.258.888.00	3.166.692.866.00	3.671.522.090.00	37.32
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	2.008.267.888.53	2.291.800.514.41	3.545.615.700.04	9.332.938.517.77	13.098.081.353.51	88.10
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	1.215.233.502.884.89	1.280.381.338.164.32	1.309.647.984.983.55	1.433.398.418.760.30	1.518.079.337.905.47	6.76
3.2.1	Dilvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	35.116.345.200.39	37.735.737.927.39	14.609.139.119.41	25.663.196.561.19	31.586.187.720.94	11.28
3.2.2	Dilvestasikan dalam Aset Tetap	1.170.309.656.773.50	1.220.856.618.075.93	1.271.442.398.784.17	1.383.622.482.618.11	1.472.447.644.679.53	6.83
3.2.3	Dilvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	9.807.500.911.00	21.788.982.161.00	23.596.447.079.97	24.112.739.561.00	14.045.505.505.00	22.72
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Uang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	-
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Dilvestasikan Dalam Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.224.028.481.061.95	1.333.883.168.619.86	1.421.583.748.088.79	1.457.408.919.290.47	1.548.758.329.401.77	8.88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2009 -2013 mengalami perkembangan yang meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,45%. Sedangkan untuk Kewajiban Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2009-2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 139,74%. Sedangkan ekuitas dana Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2009-2013 memiliki rata-rata pertumbuhan 5.92%.

Berikut juga merupakan realisasi aset, kewajiban, dan pengelolaan keuangan daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Realisasi Neraca Pendanaan Kota Mojokerto Tahun 2014-2016

Uraian		Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	
ASET					
ASET LANCAR					
	Kas Di Kas Daerah	155,800,229,013.79	142,529,427,547.79	19,298,781,565.99	(47.49)
	Kas Di Bendahara Penerimaan	97,772,650.00	38,733,550.00	117,013,550.00	70.86
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	396,943.07	(139,341.07)	0.00	(117.55)
	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	11,120,179,335.01	8,455,662,375.86	9,947,614,620.62	(3.16)
	Kas Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	0.00	1,373,611,191.00	1,938,431,303.00	
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	74,663,434.00	
	Piutang Pajak	13,463,195,108.00	15,120,364,144.00	0.00	(43.85)
	Piutang Retribusi	12,886,648,138.00	19,003,513,372.71	30,884,714,338.00	54.99
	Piutang Dana Bagi Hasil	4,178,369,065.00	4,178,369,065.00	13,883,657,288.02	116.14
	Piutang Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	14,212,853,234.00	
	Piutang Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	

Uraian		Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	
	Piutang Lain-lain	5,292,826,438.00	473,585,145.00	0.00	(95.53)
	Persediaan	14,786,721,438.39	17,380,006,079.77	2,589,262,102.00	(33.78)
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(10,011,215,129.45)	(411,836,679.75)	12,729,398,300.59	#####
	JUMLAH ASET LANCAR	207,615,122,999.81	208,141,296,450.31	83,520,101,991.62	(29.81)
	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Non Permanen				
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00	0.00	
	Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	2,149,038,000.00	0.00	
	JUMLAH Investasi Non Permanen	0.00	2,149,038,000.00	0.00	
	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	39,144,038,038.68	45,446,245,663.61	45,446,856,547.32	8.05
	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	
	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0.00	0.00	0.00	
	Invertasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH Investasi Permanen	39,144,038,038.68	45,446,245,663.61	45,446,856,547.32	8.05
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	39,144,038,038.68	47,595,283,663.61	45,446,856,547.32	8.54
	ASET TETAP				
	Tanah	664,718,354,016.84	665,323,935,496.84	643,671,526,290.84	(1.58)
	Peralatan dan Mesin	279,961,433,482.31	357,123,136,399.82	426,255,783,847.21	23.46
	Gedung dan Bangunan	337,106,691,904.17	357,815,385,133.47	443,823,921,130.73	15.09
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	342,016,638,161.64	366,768,800,557.64	559,574,785,589.16	29.90
	Aset Tetap Lainnya	10,186,342,784.21	10,841,653,599.97	10,599,015,247.97	2.10
	Konstruksi dalam Pengerjaan	2,504,107,341.43	10,130,071,841.43	5,766,405,467.00	130.73
	Akumulasi Penyusutan	0.00	354,500,253.00	(422,295,036,153.43)	#####
	JUMLAH ASET TETAP	1,636,493,567,690.60	1,768,357,483,282.17	1,667,396,401,419.48	1.17
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	
	ASET LAINNYA				
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	822,550,722.00	758,625,018.00	446,794,314.00	(24.44)
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4,302,463,617.00	3,666,020,000.00	3,566,370,000.00	(8.76)
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7,304,700,000.00	7,304,700,000.00	8,945,800,000.00	11.23
	Aset Tidak Berwujud	3,038,692,911.00	4,113,477,911.00	5,130,172,911.00	30.04
	Aset Lain-lain	609,824,767.00	1,699,998,715.50	2,727,838,858.00	119.61
	Akumulasi Amortisasi	0.00	(62,113,333.33)	(2,237,288,952.67)	
	JUMLAH ASET LAINNYA	16,078,232,017.00	17,480,708,311.17	18,579,687,130.33	7.50
	TOTAL	1,899,330,960,746.09	2,041,574,771,707.26	1,814,943,047,088.75	(1.81)
	KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	257,602.00	0.00	(20,663,122.00)	
	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pajak	0.00	0.00	0.00	

Uraian		Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	
	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	21,878,506,012.03	16,668,677,837.51	11,325,079,047.51	(27.94)
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,878,763,614.03	16,668,677,837.51	11,304,415,925.51	(28.00)
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	
	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	
	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	
	Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	21,878,763,614.03	16,668,677,837.51	11,304,415,925.51	(28.00)
	EKUITAS DANA				
	EKUITAS DANA LANCAR				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	159,903,049,020.94	145,282,024,004.65	65,072,880,003.12	(32.18)
	Cadangan untuk Piutang	32,875,198,638.48	45,429,370,065.89	39,414,199,217.42	12.47
	Cadangan untuk Persediaan	14,784,681,688.39	17,377,966,329.77	12,647,131,236.59	(4.84)
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(21,878,506,012.03)	(16,668,677,837.51)	(11,325,079,047.51)	(27.94)
	Pendapatan yang Ditangguhkan	25,622,650.00	1,349,000.00	0.00	(94.73)
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	185,710,045,985.78	191,422,031,562.80	105,809,131,409.62	(20.82)
	EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	39,144,038,038.68	47,595,283,663.61	45,446,856,547.32	8.54
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,636,640,681,919.77	1,768,731,099,538.34	1,406,550,191,414.52	(6.20)
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	15,933,157,537.83	17,109,131,805.00	18,426,314,529.99	7.54
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1,691,717,877,496.28	1,833,435,515,006.95	1,470,423,362,491.83	(5.71)
	EKUITAS DANA CADANGAN				
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	
	KOREKSI EKUITAS				
	Koreksi Ekuitas	0.00	0.00	217,219,852,352.31	
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0.00	0.00	217,219,852,352.31	
	TOTAL	1,877,427,923,482.06	2,024,857,546,569.75	1,793,452,346,253.76	(1.79)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan, rata-rata pertumbuhan jumlah aset Kota Mojokerto justru -1.81% dalam kurun waktu 2014-2016. Merujuk terhadap data diatas, sebenarnya ditahun 2015 jumlah aset Kota Mojokerto meningkat dari tahun 2014. Namun

ditahun 2016 kembali mengalami penurunan. Sedangkan kewajiban pemerintah Kota Mojokerto terhadap pembayaran hutang pihak ketiga dapat ditekan dengan baik setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan penurunan hutang mencapai -28% dalam kurun waktu 2014-2016. Jumlah hutang kewajiban pemerintah cenderung turun setiap tahunnya. Sedangkan dana ekuitas pemerintah rata-rata pertumbuhannya cenderung menunjukkan penurunan mencapai -1.79% pada kurun waktu 2014-2016. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun ditahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2015.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Tabel 3. 9 Rasio Kota Mojokerto Tahun 2009-2016

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Likuiditas									
1	Rasio Lancar	9.13	1.03	1.03	6.92	10.97	9.49	12.49	7.39
2	Rasio Quick	8.67	0.94	0.97	6.11	10.03	8.81	11.44	7.16
Rasio Solvabilitas									
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0.0035	0.0205	0.0409	0.0076	0.0083	0.0115	0.0082	0.0062
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0.0036	0.0205	0.0410	0.0080	0.0091	0.0117	0.0082	0.0063

Sumber: Diolah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan daerah – termasuk Pendapatan Asli Daerah – harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/ sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

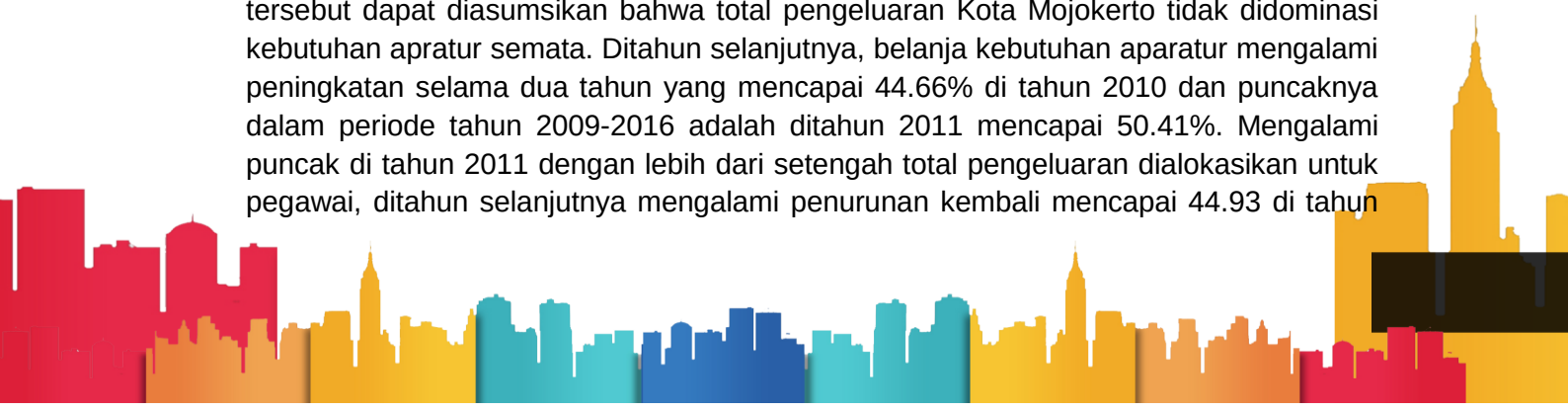


1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2009-2012 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2013 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi proporsi antara penggunaan anggaran kebutuhan aparatur dan pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran) di Kota Mojokerto terhitung tahun 2009 hingga tahun 2016 hampir sebagian besar didominasi oleh belanja dan pengeluaran non aparatur. Prosentase total belanja kebutuhan apratur terhadap total pengeluaran adalah di kisaran 33% hingga 50%. Tercatat di tahun 2009 persentase total belanja kebutuhan apratur dibanding dengan total pengeluaran adalah 37.65%. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa total pengeluaran Kota Mojokerto tidak didominasi kebutuhan apratur semata. Ditahun selanjutnya, belanja kebutuhan aparatur mengalami peningkatan selama dua tahun yang mencapai 44.66% di tahun 2010 dan puncaknya dalam periode tahun 2009-2016 adalah ditahun 2011 mencapai 50.41%. Mengalami puncak di tahun 2011 dengan lebih dari setengah total pengeluaran dialokasikan untuk pegawai, ditahun selanjutnya mengalami penurunan kembali mencapai 44.93 di tahun



2012, ditahun 2013 sempat naik kembali di tahun 48.08%, kemudian di tahun selanjutnya terus mengalami penurunan mencapai 45.06% ditahun 2014, di tahun 2015 turun kembali mencapai 41.59%, dan terendah dalam periode tersebut adalah ditahun 2016 yang mencapai 33.67%.

Bila dilihat dari persentasenya, sebenarnya Kota Mojokerto telah cukup baik untuk mengatur proporsi antara belanja pegawai dan pembangunan. Namun upaya pengendalian terhadap proporsi belanja tersebut tetap harus dilakukan, mengingat pernah terjadi pelonjakan ditahun 2011. Sehingga alokasi anggaran Kota Mojokerto dapat dikatakan berorientasi terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto secara luas. Berikut merupakan proporsi belanja Kota Mojokerto:

Tabel 3. 10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a/b) x 100
1	2009	152,057,266,780.00	403,903,162,866.16	37.65
2	2010	182,039,389,795.00	407,591,058,238.00	44.66
3	2011	208,728,053,971.00	414,039,911,212.00	50.41
4	2012	225,423,013,943.00	501,695,505,896.00	44.93
5	2013	247,916,864,831.00	515,586,045,446.00	48.08
6	2014	290,018,255,365.00	643,647,114,509.86	45.06
7	2015	307,693,429,170.00	739,866,604,688.70	41.59
8	2016	319,267,134,250.00	948,182,143,504.53	33.67

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kota Mojokerto Tahun 2009 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 3. 11 Defisit Riil Anggaran Kota Mojokerto Tahun 2009-2012

No.	Uraian	Th 2009	Th 2010	Th 2011	Th 2012
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Realisasi Pendapatan Daerah	358,964,796,758.45	389,754,281,680.11	444,049,096,215.12	515,966,225,629.12
	Dikurangi realisasi :				
2	Belanja Daerah	399,062,426,641.00	403,716,058,238.00	409,664,911,212.00	488,945,505,896.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,840,736,225.16	3,875,000,000.00	4,375,000,000.00	12,750,000,000.00
A.	Defisit riil	(44,938,366,107.71)	(17,836,776,557.89)	30,009,185,003.12	14,270,719,733.12

No.	Uraian	Th 2009	Th 2010	Th 2011	Th 2012
		Rp	Rp	Rp	Rp
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	77,794,939,055.21	34,161,059,717.66	17,532,560,159.36	47,612,910,842.58
2	Pencairan dana cadangan				
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,304,486,800.00	1,208,277,000.00	1,576,305,000.00	
6	Penerimaan Piutang Daerah				1,790,165,000.00
B	Total Realisasi Penerimaan pembiayaan Daerah	79,099,425,855.21	35,369,336,717.66	19,108,865,159.36	49,403,075,842.58
A + B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	34,161,059,747.50	17,532,560,159.77	49,118,050,162.48	63,673,795,575.70

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto

Tabel 3. 12 Defisit Riil Anggaran Kota Mojokerto Tahun 2009-2012

No.	Uraian	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Th 2016
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Realisasi Pendapatan Daerah	568,900,569,597.47	689,461,578,822.80	717,544,079,472.41	806,770,159,042.56
	Dikurangi realisasi :				
2	Belanja Daerah	511,091,545,446.00	631,979,414,509.86	706,783,751,688.70	944,717,143,504.53
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,494,500,000.00	11,667,700,000.00	33,082,853,000.00	3,465,000,000.00
A.	Defisit riil	53,314,524,151.47	45,814,464,312.94	(22,322,525,216.29)	(141,411,984,461.97)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	63,673,795,575.59	119,078,629,726.93	166,994,046,689.00	172,373,021,673.58
2	Pencairan dana cadangan				
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		3,250,000,000.00	3,000,000,000.00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	2,090,310,000.00		2,678,500,000.00	2,678,500,000.00
B	Total Realisasi Penerimaan pembiayaan Daerah	65,764,105,575.59	122,328,629,726.93	172,672,546,689.00	175,051,521,673.58
A + B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	119,078,629,727.06	168,143,094,039.87	150,350,021,472.71	33,639,537,211.61

Sumber: Laporan Reaisasi Anggaran Kota Mojokerto

Dari tabel penutup defisit anggaran diatas, dapat dilihat bahwa dari periode tahun 2009 hingga tahun 2016 Kota Mojokerto memiliki SILPA yang cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2009 sisa lebih pembiayaan anggaran mencapai Rp 34,161,059,747.50, ditahun 2010 mengalami penurunan diangka Rp 17,532,560,159.77, ditahun 2011 meningkat kembali diangka Rp 49,11,050,162.48, ditahun selanjutnya tahun 2012 mengalami peningkatan diangka Rp 63,673,795,575.70. Sisal lebih

pembiayaan anggaran ditahun selanjutnya terus mengalami peningkatan, ditahun 2013 sisa mencapai Rp 119,078,629,727.06, ditahun 2014 meningkat kembali diangka Rp 168,143,094,038.87, ditahun 2015 mengalami penurunan diangka Rp 150,350,021,472.71, dan terakhir ditahun 2016 turun cukup drastis diangka Rp 33,639,537,211.61.

Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran insentif.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan 2014-2019

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Mojokerto diharapkan semakin meningkat. Hal yang menjadi dasar adalah asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Selisih dana antara SiLPA tahun lalu dengan tahun berkenaan akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapanya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini. Sebagai catatan, dikareanakan pada tahun 2017 RPJMD Kota Mojokerto, maka data untuk tahun 2014 hingga tahun 2016 merupakan data existing.



Tabel 3. 13 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

No	Uraian	2014 Existing	2015 Existing	2016 Existing	2017 APBD	2018 RAPBD	2019 Proyeksi
I	PENDAPATAN	689.461.578.822,80	717.544.079.472,41	806.770.159.042,56	778.201.807.500,00	806.931.069.489,00	887.624.176.437,90
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.179.719.367,80	129.258.132.763,41	152.460.360.279,56	163.307.275.500,00	199.470.651.722,00	219.417.716.894,20
	Pendapatan Pajak Daerah	25.092.877.550,28	31.324.086.639,85	35.333.988.082,55	32.499.465.000,00	37.044.104.722,00	40.748.515.194,20
	Pendapatan Retribusi Daerah	10.813.462.499,50	11.862.967.589,50	13.004.631.686,46	7.809.339.700,00	7.887.915.200,00	8.676.706.720,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.317.593.067,09	3.566.250.784,99	3.448.803.749,90	3.699.950.000,00	3.723.450.000,00	4.095.795.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.955.786.250,93	82.504.827.749,07	100.672.936.760,65	119.298.520.800,00	150.815.181.800,00	165.896.699.980,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	580.809.016.051,00	457.456.088.791,00	555.817.062.047,00	543.915.189.000,00	543.915.189.000,00	598.306.707.900,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	18.083.139.663,00	50.992.997.791,00	55.436.957.047,00	64.061.992.000,00	64.061.992.000,00	70.468.191.200,00
	Dana Alokasi Umum	380.779.789.000,00	382.373.637.000,00	397.094.498.000,00	397.094.498.000,00	397.094.498.000,00	436.803.947.800,00
	Dana Alokasi Khusus	18.556.553.000,00	24.089.454.000,00	103.285.607.000,00	82.758.699.000,00	82.758.699.000,00	91.034.568.900,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.472.843.404,00	130.829.857.918,00	98.492.736.716,00	70.979.343.000,00	63.545.228.767,00	69.899.751.643,70
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		38.991.755.918,00	57.047.057.716,00	62.115.013.000,00	54.680.898.767,00	60.148.988.643,70
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		75.302.399.000,00	39.955.923.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	8.250.000.000,00
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		16.535.703.000,00	1.489.756.000,00	1.364.330.000,00	1.364.330.000,00	1.500.763.000,00
II	BELANJA	631.979.414.509,86	706.783.751.688,70	944.717.143.504,53	915.341.280.000,00	1.087.866.571.655,00	1.196.653.228.820,50
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		281.090.106.457,00	277.418.352.958,00	285.254.518.450,00	285.254.518.450,00	313.779.970.295,00
1	Belanja Pegawai		252.510.498.551,00		248.067.450.450,00	248.067.450.450,00	
2	Belanja Hibah	19.881.498.000,00	26.112.242.800,00	13.201.042.100,00	30.905.209.000,00	30.905.209.000,00	33.995.729.900,00
3	Belanja Bantuan Sosial	1.702.250.000,00	1.988.500.000,00	1.829.303.500,00	4.309.008.500,00	4.309.008.500,00	4.739.909.350,00

No	Uraian	2014 Existing	2015 Existing	2016 Existing	2017 APBD	2018 RAPBD	2019 Proyeksi
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa						
5	Belanja Bantuan Keuangan	452.105.072,00	456.238.656,00	518.651.232,00	562.050.500,00	562.050.500,00	618.255.550,00
6	Belanja Tak Terduga		22.626.450,00	0,00	1.410.800.000,00	1.410.800.000,00	1.551.880.000,00
B	BELANJA LANGSUNG		425.693.645.231,70	667.298.790.546,53	630.086.761.550,00	802.612.053.205,00	882.873.258.525,50
1	Belanja Pegawai		36.973.476.666,00	49.435.202.231,00	59.567.281.000,00	75.877.515.010,22	83.465.266.511,24
2	Belanja barang dan jasa		252.751.320.469,04	314.086.488.984,39	329.076.447.250,00	419.181.514.525,08	461.099.665.977,58
3	Belanja Modal		135.968.848.096,66	303.777.099.331,14	241.443.033.300,00	307.553.023.669,71	338.308.326.036,68
	SURPLUS / (DEFISIT)		10.760.327.783,71	-137.946.984.461,97	-137.139.472.500,00	-280.935.502.166,00	-309.029.052.382,60
III	PEMBIAYAAN						
A	PENERIMAAN DAERAH	121.081.809.726,93	194.695.546.889,87	172.525.076.673,58	137.139.472.500,00	137.139.472.500,00	150.853.419.750,00
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	119.078.629.726,93	166.994.046.689,87	172.373.021.673,58	136.639.472.500,00	136.639.472.500,00	150.303.419.750,00
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		2.701.500.200,00	152.055.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00
	Penerimaan Kembali Deposito Pemda		25.000.000.000,00				
B	PENGELUARAN DAERAH	11.667.700.000,00	33.082.853.000,00	3.465.000.000,00			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.637.700.000,00	13.082.853.000,00	3.465.000.000,00			
	Investasi Jangka Pendek (Deposito)		20.000.000.000,00				
	Pembayaran Pokok Utang						
	Pembayaran Kelebihan Penerimaan Pendapatan						
	Pembiayaan Netto	109.414.109.726,93	161.612.693.889,87	169.060.076.673,58	137.139.472.500,00	137.139.472.500,00	150.853.419.750,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	166.896.274.039,87	172.373.021.673,58	31.113.092.211,61	0,00	-143.796.029.666,00	-158.175.632.632,60



Dari tabel diatas berkenaan dengan kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2014-2019 Kota Mojokerto dapat dilihat berusaha menekan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Kota Mojokerto. SILPA terendah adalah ditahun 2013, ditahun selanjutnya diprediksi akan meningkat tipis, namun tetap untuk distabilkan diangka tersebut. Berdasarkan data diatas, ditahun 2014 SILPA mencapai Rp 166,896,274,039.87, sempat naik ditahun 2015 diangka Rp 172,373,021,673.58, ditahun 2016 mengalami puncak terendah dari tahun 2014 diangka Rp 31,113,092,211.61. Pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan terhadap SILPA, tercatat pada APBD 2017 SILPA diperkirakan 0, bahkan ditahun 2018 pembiayaan netto tidak mampu menutupi defisit anggaran dan diperkirakan defisit Rp -143.796.029.666,00 dan ditahun 2019 defisit lagi mencapai Rp -158.175.632.632,00.

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan tabel sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Tabel 3. 14 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	77,794,939,055.21	34,161,059,717.66	17,532,560,159.36	47,612,910,842.58
Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		77,794,939,055.21	34,161,059,717.66	17,532,560,159.36	47,612,910,842.58
No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	63,673,795,575.59	45,814,464,312.94	(22,322,525,216.29)	(141,411,984,461.97)
Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		63,673,795,575.59	45,814,464,312.94	-22,322,525,216.29	(141,411,984,461.97)

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2013-2015

Sisa lebih (Riil) pembiayaan anggaran dari tahun 2009 hingga tahun 2016 cenderung *fluktuatif*. Di tahun 2009 sisa lebih mencapai Rp 77,794,939,055.21, turun ditahun 2010 mencapai Rp 34,161,059,717.66, turun kembali ditahun 2011 mencapai Rp 17,532,560,159.36. Ditahun 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan, mencapai Rp 47,612,910,842.58 ditahun 2012, turun ditahun 2013 mencapai Rp 63,673,795,575.59. Ditahun 2014 hingga tahun 2016 justru mengalami penurunan, bahkan ditahun 2015 mencapai defisit. Ditahun 2014 mencapai Rp 45,814,464,312.94, turun kembali ditahun 2015 mencapai Rp -22,322,525,216.29, dan turun kembali dengan sangat drastis ditahun 2016 mencapai Rp -141,411,984,461.97.

BAB 4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan yang benar-benar penting. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kota Mojokerto pada bab II sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkumkan dalam tabulasi per urusan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	• Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang; • Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masih rendah; • Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. • Tidak adanya tenaga tata usaha di sekolah SD/MI • Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan untuk siswa dalam kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa. • Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang program – Program Pendidikan Non Formal. • Keikutsertaan dalam lomba – lomba PNF minim memperoleh kejuaraan. • Belum semua guru/pendidik memiliki kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan; • Masih sulit terkumpulnya data pendidikan yang diperlukan penyusunan profil pendidikan; • Tidak semua lembaga sekolah sudah mempunyai tower untuk antena sehingga perlu diseleksi lagi sekolah – sekolah yang sudah mempunyai tower.

No	Urusan	Permasalahan
		• Rendahnya minat baca pada aparaturnya Pemerintah Kota Mojokerto; • Belum terlaksananya otomatisasi katalog perpustakaan sehingga pencarian bahan pustaka masih memerlukan informasi bahan pustaka dari petugas perpustakaan serta kebutuhan sarana otomatisasi yang belum terpenuhi dengan baik. • Rendahnya minat dan budaya baca siswa dan pemberdayaan Perpustakaan Sekolah • Terbatasnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, serta bantuan ke Perpustakaan Masjid.
2.	Kesehatan	• Jumlah dan jenis perbekalan kesehatan bagi kepentingan pasien yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan • Belum difahaminya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPK BLU. • Peralatan medis di RSUD, belum maksimal.
3.	Pekerjaan Umum	• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga menyebabkan saluran / gorong-gorong tersumbat. • Kurang optimalnya pembersihan saluran drainase secara rutin sehingga menyebabkan penumpukan sampah/waled yang menghambat aliran air. • kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan di atas tonase yang di ijin. Disamping itu juga kerusakan yang disebabkan oleh akibat cuaca. • Keterbatasan lahan untuk membuat WC di rumah masing-masing penduduk.
4.	Perumahan Rakyat	• Kurangnya kelayakan kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang pembangunan perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah • Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum sepenuhnya mengacu pada RTRW, dan masih berorientasi pada pengembangan yang bersifat horizontal; • Adanya konflik penggunaan lahan, khususnya antara penggunaan lahan permukiman dengan penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan

No	Urusan	Permasalahan
		Lindung
5.	Penataan Ruang	• Peralihan fungsi penggunaan lahan berkembang secara sporadis dan cenderung tidak teratur.
6.	Perencanaan Pembangunan	• Kurang adanya keseimbangan dan keserasian lingkungan dalam satu bagian wilayah kota; • Belum maksimalnya penataan kawasan perumahan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan perumahan; • Masih tersendatnya pertumbuhan ekonomi lokal (konstruksi, kesempatan kerja dll.) dan percepatan pembangunan rumah dalam jumlah yang besar • Belum sinkron dan tersedianya data untuk perencanaan • Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan • Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan
7	Perhubungan	• Kurangnya pegawai yang terampil di bidang tertentu yang disebabkan tidak adanya diklat untuk menunjang pekerjaannya.
8	Lingkungan Hidup	• Masih banyaknya lampu PJU ilegal yang mengambil saluran dari jaringan lampu PJU sehingga mengakibatkan kerusakan pada komponen dan jaringan lampu PJU yang ada • Kurangnya jumlah sarana dan prasarana persampahan • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. • Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada. • Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. • Belum adanya kurikulum yang khusus untuk mendukung kegiatan ADIWiyata. • Kurangnya kooperatif pihak swasta atau pelaku industri sehingga tidak memenuhi baku mutu dengan standart yang ditetapkan. • Belum dioperasikannya laboratorium lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup karena belum adanya dukungan SDM yang memadai. • Sulitnya menambah lahan untuk RTH dan Taman – taman kota karena terbatasnya lahan yang ada.

No	Urusan	Permasalahan
9	Pertanahan	• Belanja modal pengadaan tanah belum memenuhi target.
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	• Belum semua warga masyarakat Kota Mojokerto mengetahui tentang arti pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil.
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	• Masih dijumpai ketimpangan –ketimpangan yang terjadi pada perlakuan terhadap perempuan dan anak yaitu perlakuan yang mengakibatkan kesengsaraan / penelantaran. • Belum optimalnya peran Lembaga-lembaga yang secara khusus menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih banyak masyarakat yang belum tahu / mengalami kesulitan dalam mencari penyelesaian.
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	• Minimnya partisipasi Pria terhadap Program Keluarga Berencana / keikut sertaan pria dalam pemakaian Alat Kontrasepsi. • Banyaknya masyarakat yang belum memahami program Keluarga Berencana. • Banyak Tenaga Medis / Bidan yang belum pernah mengikuti pelatihan CTU
13	Sosial	• Data primer yang digunakan untuk kegiatan berasal dari kelurahan kadang kurang valid sehingga ketika ada kegiatan yang berupa bantuan sosial sarana dan prasarana kadang terjadi kurang tepat sasaran. • Masih lemahnya tingkat koordinasi antar stakeholder dan instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. • Dinas Sosial tidak memiliki panti-panti rehabilitasi bagi PACA dan Eks Trauma • Kurangnya jumlah dana yang khusus di peruntukkan bagi PAY • Sulitnya membuka wawasan bagi PSK dan orang yang mengalami penyakit sosial untuk peningkatan potensi diri untuk bekal masa tua.
14	Ketenagakerjaan	• Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. • Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi. • Masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan, baik norma kerja, norma Jamsostek, norma K3
15	Koperasi dan UKM	• Masih banyaknya usaha mikro kecil menengah yang membutuhkan bantuan pinjaman modal untuk meningkatkan usahanya.

No	Urusan	Permasalahan
		- Banyaknya UMKM yang dalam melakukan usahanya tidak ditangani dengan serius - SDM masih rendah - Terbatasnya pengetahuan koperasi dan pra koperasi dalam mengelola manajemen dan pelaporan keuangannya
16	Penanaman modal	- Belum terbentuknya Badan Penanaman Modal. - Rendahnya minat investor
17	Kebudayaan	- Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah - Minimnya sarana dan kesempatan untuk pentas seni
18	Kepemudaan dan Olahraga	- Kurangnya fasilitas latihan atau club-club olahraga di Kota Mojokerto - Masih rendahnya kualitas atlit.
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan. - Aktivitas orang/LSM belum semua melapor. - Terbatasnya lahan relokasi PKL - Masih adanya PMKS (penyakit masyarakat sosial) yang mengganggu trantib
20	Pemerintahan Umum	- Banyak SKPD yang tidak proaktif dalam memberikan usulan spesifikasi barang. - Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah didalam penyusunan konsep produk hukum daerah. - Belum optimalnya implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. - Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama antar daerah - Lemahnya sinergi kebijakan penelitian sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil.
21	Kepegawaian	- Masih kurang lengkapnya perkembangan data identitas pegawai yang akurat. - Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan.
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum terintegrasinya program/kegiatan bulan bhakti gotong royong dengan program kegiatan SKPD terkait.
23	Statistik	Belum semua data yang dibutuhkan dalam penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA) tersedia di semua instansi pemerintah
24	Kearsipan	Belum optimalnya penataan tertib arsip di setiap

No	Urusan	Permasalahan
		SKPD. • Terbatasnya SDM pengelola arsip.
25	Komunikasi dan Informasi	• Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat. • Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public • Belum adanya rencana induk tata kelola TIK.
26	Pertanian	• Penguasaan teknologi pertanian baik sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan ditingkat petani masih kurang. • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berasal dari non beras dengan harga lebih murah tetapi tidak mengurangi nilai gizinya. • Adanya keragu-raguan bagi petani atau kelompok tani dalam menyampaikan informasi masalah luas lahan maupun hasil produk pertanian. • Jumlah sarana yang kurang memadai/ terlalu sedikit bila dibandingkan dengan luas pertanian yang ada di Wilayah Kota Mojokerto sehingga pembagian sarana yang kurang merata. • Sarana penunjang kegiatan penyuluhan masih belum lengkap. • Penyebaran penyakit zoonosis semakin berkembang sementara itu kesadaran masyarakat peternak masih kurang sehingga kemungkinan munculnya penyakit zoonosis yang endemis masih mungkin terjadi. • Kesadaran peternak untuk melakukan re-vaksinasi masih kurang. • Minat petani peternak untuk mengembangkan kelinci masih rendah. • Masih kurangnya minat peternak untuk mengubah sistem pemeliharaan kambing/domba dari ekstensif ke semi intensif.
27	Pariwisata	• Kurangnya minat dan partisipasi anggota PHRI dalam kegiatan;
28	Kelautan dan Perikanan	• Tingginya harga pakan ikan pabrikan. • Kurangnya pengetahuan petani ikan dalam pengolahan dan pemasaran produksi perikanan.
29	Perdagangan	• Banyaknya keluhan atau pengaduan konsumen.

No	Urusan	Permasalahan
		• Minimya pengetahuan manajemen usaha dan belum semua PKL yang mengikuti pembinaan.
30	Perindustrian	• Kesadaran para pengusaha industri kecil dalam mengelola usaha secara profesional masih rendah. • Adanya kesulitan penataan struktur industri karena bahan baku lebih banyak didatangkan dari luar daerah.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya, akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Oleh karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

4.2.1. Isu-isu Strategis Skala Global

A. Perkembangan Ekonomi Global

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 ini disusun dengan mencermati tiga perkembangan global. *pertama*, krisis di kawasan Eropa yang belum sepenuhnya pulih (*mild recovery*). Belum pulihnya ekonomi Eropa dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia. Kondisi ini akan menyulitkan ekspor Indonesia untuk tumbuh lebih cepat pada akhirnya. *Kedua*, harga komoditas dunia masih melanjutkan tren penurunan atau stagnan. Di saat yang sama adanya indikasi berakhirnya era *super cycle* yang juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia. *Ketiga*, berakhirnya stimulus moneter di AS

sampai 2014, dan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya. Akibatnya, hal tersebut akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

Dalam menghadapi tantangan global tersebut, perlu adanya antisipasi yang tepat, antara lain menguatkan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; meningkatkan efektivitas belanja negara, dan peningkatan efektivitas penerimaan Negara. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada 2013 dapat dipertahankan pada 2014 dan hingga tahun 2019 mendatang, kinerja ekonomi dapat lebih ditingkatkan.

Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

- Pertama adalah ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI.
- Ketiga adalah berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhannya di tahun 2014 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.

Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar akan menurunkan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh *The Fed* juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam.

B. Lingkungan Hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

C. Millenium Development Goals (MDG's)



Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan Pasca-*Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disepakati terdapat 12 agenda lanjutan Pasca MDG's 2015 yang harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh negara-negara yang berkomitmen terhadap MDG's. Ke-12 butir agenda itu adalah *pertama*, mengakhiri kemiskinan; *kedua*, meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender; *ketiga*, menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; *keempat*, memastikan kesehatan yang layak; *kelima*, ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi; *keenam*, mencapai akses air minum dan sanitasi. Selanjutnya butir *ketujuh*, yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan energi; *kedelapan*, penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil; *kesembilan*, pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan; *kesepuluh*, memastikan terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan lembaga; *kesebelas*, memastikan terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai; dan *keduabelas*, menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

D. Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

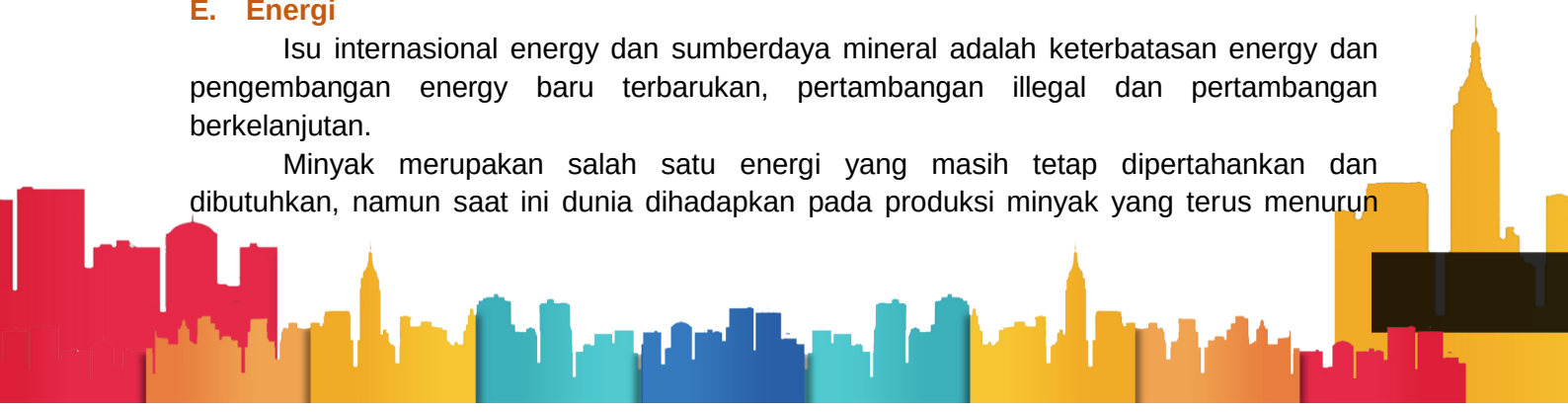
Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkeanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014. Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014 dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2, 6% di negara berkembang dan 17,4% di negara maju (*FAO Crop Prospects and Food Situation*, Desember 2013). Stok cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai internasional serta minyak nabati akan menurun juga (*FAO Food Price Index*, 9/1/2014).

E. Energi

Isu internasional energy dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan illegal dan pertambangan berkelanjutan.

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun



dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

F. Air

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- a) Pencapaian target MDG's 2015 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
- b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MDG's) bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan

G. Transportasi

- a) Kebijakan peningkatan keselamatan penerbangan melalui pembatasan usia pesawat Maskapai Penerbangan Dunia antara 5 sampai 8 tahun
- b) Terjadi pembenahan efisiensi angkutan Multimoda berupa perpanjangan Jalur Kereta Api antar dermaga pelabuhan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian negara.
- c) Penggunaan teknik informasi yang terkoneksi antara Bandara-Pelabuhan, Bandara-Kereta Api, Pelabuhan-Kereta Api dan moda lainnya.

4.2.2. Isu-Isu Strategis Skala Regional

A. Daya Saing Nasional dalam AEC

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.





Gambar 4. 1 Lingkup AEC 2015

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, *Eco Labelling*, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

B. Transportasi

- Terjadi pembenahan Bandara secara besar-besaran berupa peningkatan fasilitas dan level keselamatan penerbangan berbagai bandara di Asia menjadi Bandara Berkelas Dunia untuk meningkatkan kepercayaan dan mengundang investasi berbagai maskapai penerbangan Internasional.
- Terjadi pembenahan secara besar-besaran berbagai Pelabuhan di Asia berupa modernisasi peralatan bongkar muat kontainer, perluasan lapangan penumpukan kontainer dan computerized peralatan untuk menarik berbagai perusahaan angkutan pelayaran dunia.

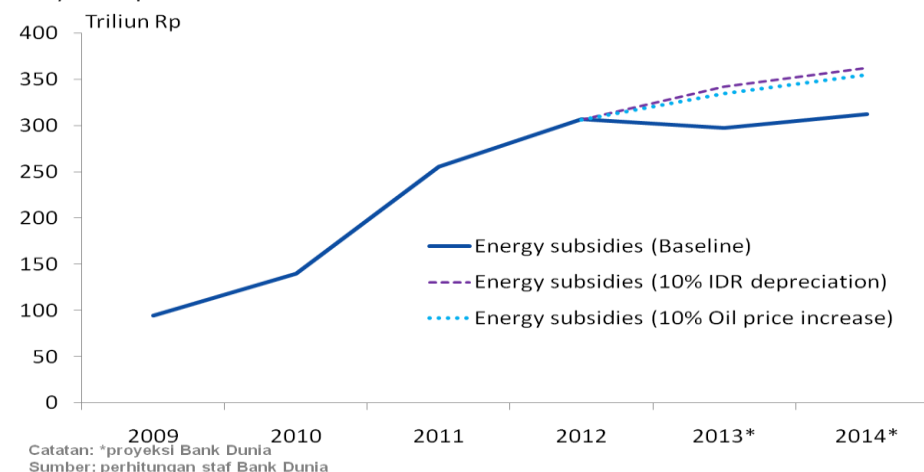
4.2.3. Isu-Isu Strategis Skala Nasional

A. Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi

Tiga isu strategis yang mewarnai perekonomian nasional Indonesia terakhir ini antara lain :

- pertama terkait beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah. Jumlah subsidi akan terus membesar jika tidak ada upaya untuk menguranginya. Beban subsidi ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi ke depan.

Biaya subsidi energi – dasar (*baseline*) dan dengan depresiasi Rupiah/peningkatan harga minyak 10 persen



Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Subsidi Energi Tahun 2009-2014

- Isu kedua adalah terkait dengan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan bawang putih yang harganya meroket. kompleksitas pasar harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga.
- Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit neraca transaksi berjalan (*current account*).
- Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan kemungkinan berbagai dampak diantaranya cadangan devisa.

B. Situasi Pangan Nasional

Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).

Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global.

C. Infrastruktur

Isu strategis infrastruktur diantaranya adalah:

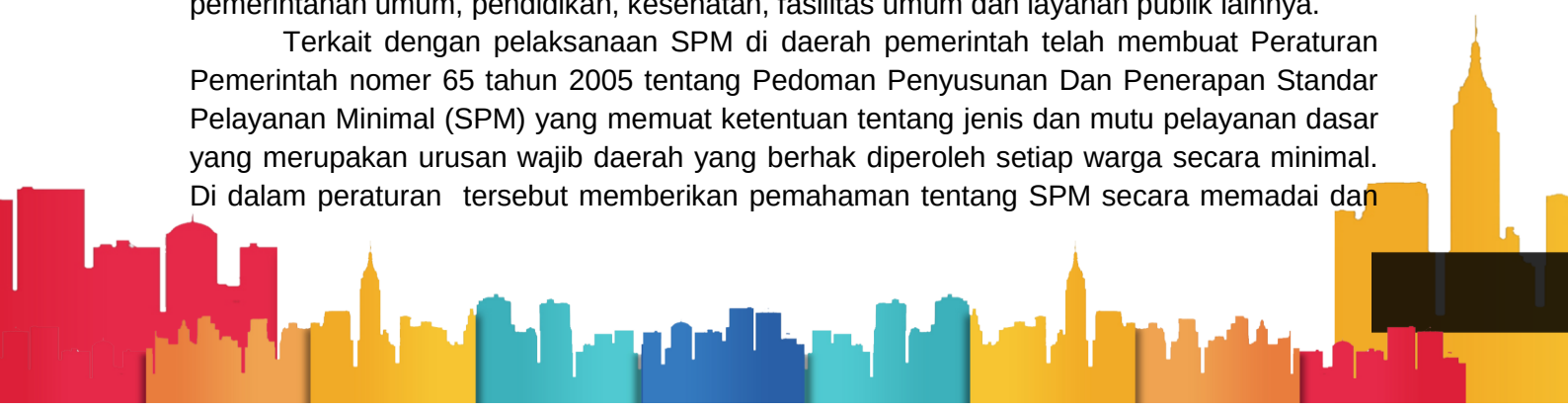
1. Percepatan penurunan angka *Backlog* perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan.
2. Mendukung program Pemerintah dalam mempertahankan surplus sepuluh juta ton beras, Jawa Timur mendapat beban penyediaan surplus beras lima juta ton dari target nasional. Sehingga masih diperlukan tambahan areal tanam baru seluas 345.770 dan tampungan air baku melalui pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air berupa pembangunan waduk dan embung.
3. Terjadi ketidak nyamanan penumpang akibat kepadatan tinggi pada sejumlah Bandara, Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api
4. Pembangunan dan pembenahan Bandara di beberapa Provinsi di Indonesia
5. Tersedianya fasilitas perijinan online bagi calon investor pelabuhan
6. Perpanjangan jalur Kereta Api *Double Track* di wilayah Utara Pulau Jawa untuk kepentingan kelancaran distribusi logistik nasional
7. Peningkatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jalan (Jalan Nasional, Jalan Tol dan *Flyover*), Bandara dan Pelabuhan
8. Peningkatan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (Nasional) di Bandara maupun Pelabuhan yang dikomersiikan.

D. Penerapan SPM

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kemudian Pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Sehingga perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah nomer 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam peraturan tersebut memberikan pemahaman tentang SPM secara memadai dan



merupakan hal yang signifikan berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di jajaran birokrasi pemerintah sendiri pengertian SPM masih sering dikacaukan dengan standar persyaratan teknis, standar kerja dan standar pelayanan prima.

Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

E. Gender

Integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di Tingkat Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan. Terkait dengan hal tersebut, Isu strategis gender yang perlu memperoleh perhatian adalah :

1. Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender belum optimal;
2. Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk *focal point*;
3. Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD;
4. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

Isu Strategis Gender ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM penggerak PPRG di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas SDM penggerak PPRG daerah diharapkan dapat mengawal pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD sehingga program dan kegiatan yang dilakukan SKPD benar-benar dapat mengintegrasikan isu kesenjangan gender sehingga dapat menjawab permasalahan pembangunan dimasing-masing sektor.

F. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

G. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan



sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

H. Energi

Isu energy dan sumber daya mineral nasional adalah ketahanan energy, diversifikasi energy, konservasi energy, dukungan terhadap MP3EI, subsidi energy, energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral, dan isu terkait lingkungan hidup. Adapun rasio elektrifikasi nasional tahun 2012 adalah sebesar 76,56%, yang berarti bahwa masih terdapat sekitar 23,44% belum terpenuhi.

4.2.4 Isu-Isu Strategis Skala Jawa Timur

A. Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

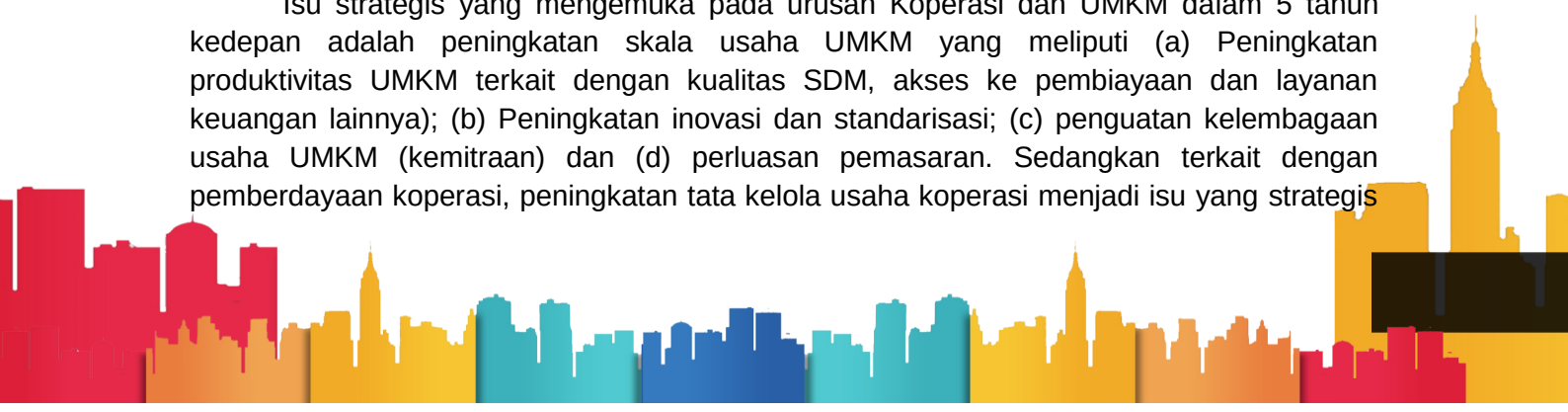
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan".

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis



yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

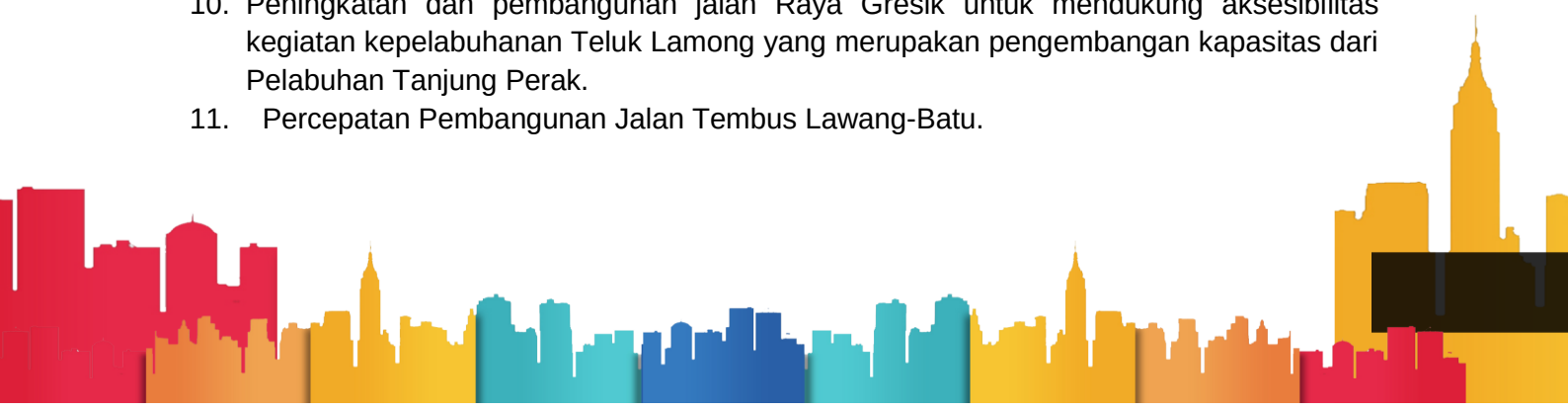
C. Disparitas Wilayah

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

D. Infrastruktur

Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari:

1. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda *Enclave* yang sudah mencapai 1 menit 20 detik serta ineffisiensi dari maskapai penerbangan akibat kurangnya kapasitas runway dan taxiway.
2. Dibutuhkan Pengembangan Bandara Internasional Sipil/komersial yang lebih luas sebagai *Multiple Airport* melalui investasi swasta (KPS) dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan perkotaan wilayah Surabaya-Sidoarjo.
3. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
4. Peningkatan efisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rel Kereta Api Double Track Dari dermaga pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan TanjungTembaga Probolinggo, hingga Pelabuhan Tanjung Wangi yang perlu segera di masukkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
5. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan.
6. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Provinsi) berupa Pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan Pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal di Bandara Abd Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah.
7. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota.
8. Percepatan pembangunan *Flyover* yang sudah dilakukan pengukuran dan menjadi perhatian masyarakat namun belum ada tindak lanjut, seperti *Flyover* Medaeng, *Flyover* Perempatan Raya Gedangan, *Flyover* Pasar Induk Agrobisnis dan *Flyover* Kertosono.
9. Peningkatan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016;
10. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak.
11. Percepatan Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu.



12. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran.
13. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
14. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.
15. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

E. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah ahlian tenaga kerja yang masih minim.

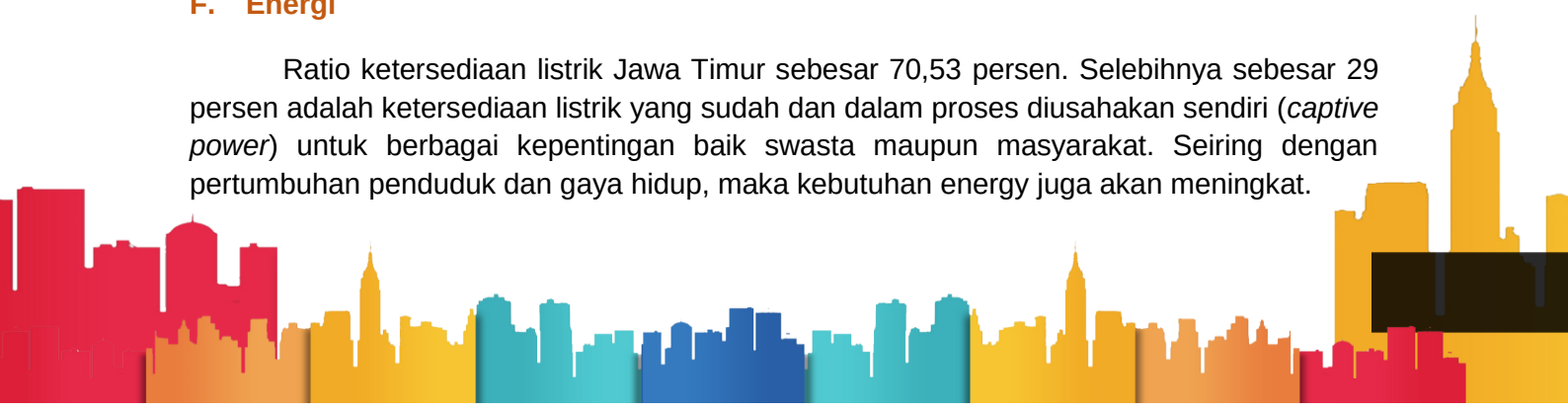
pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keSelain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

Selain itu, sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil

F. Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (*captive power*) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energy juga akan meningkat.



Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.

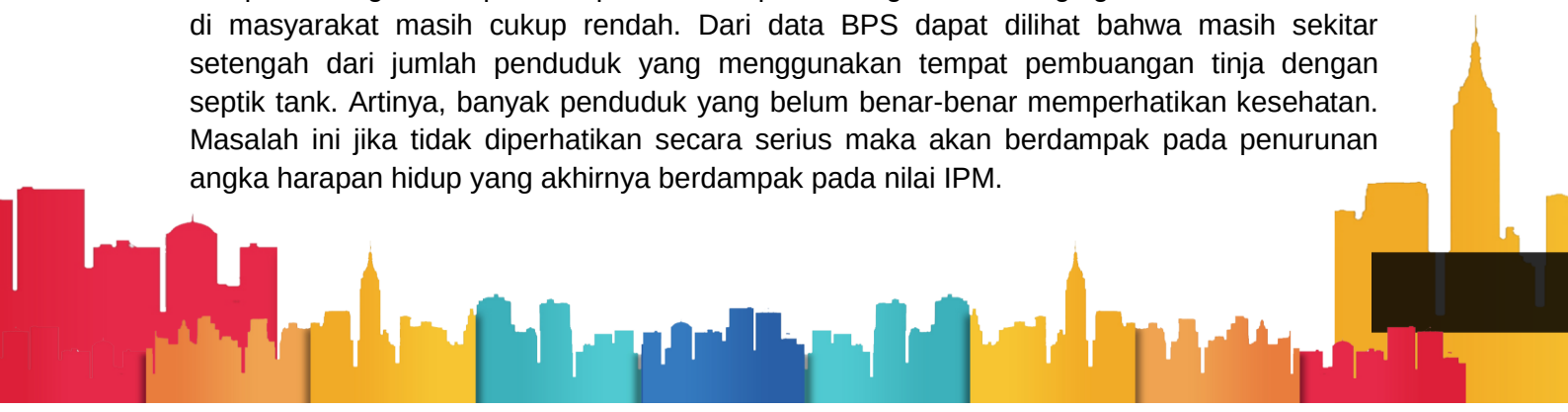
G. Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

H. IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.



Tabel 4. 2 Capaian IPM di Jawa Timur 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
IPM	71,06	71,62	72,18	72,54
a. Indeks Kesehatan	73,92	74,34	74,77	75,15
b. Indeks Pendidikan	74,53	74,98	75,33	75,73
c. Indeks Daya Beli	64,74	65,54	66,43	66,73

Sumber : RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019

Kenaikan IPM diatas dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian

I. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48 juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013
2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;

5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis;
6. Ketahanan Pangan;
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi
 - b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian

J. Kemiskinan

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentaskan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

K. Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik



keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

L. Komunikasi dan Informatika

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup tata kelola TIK, data center, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

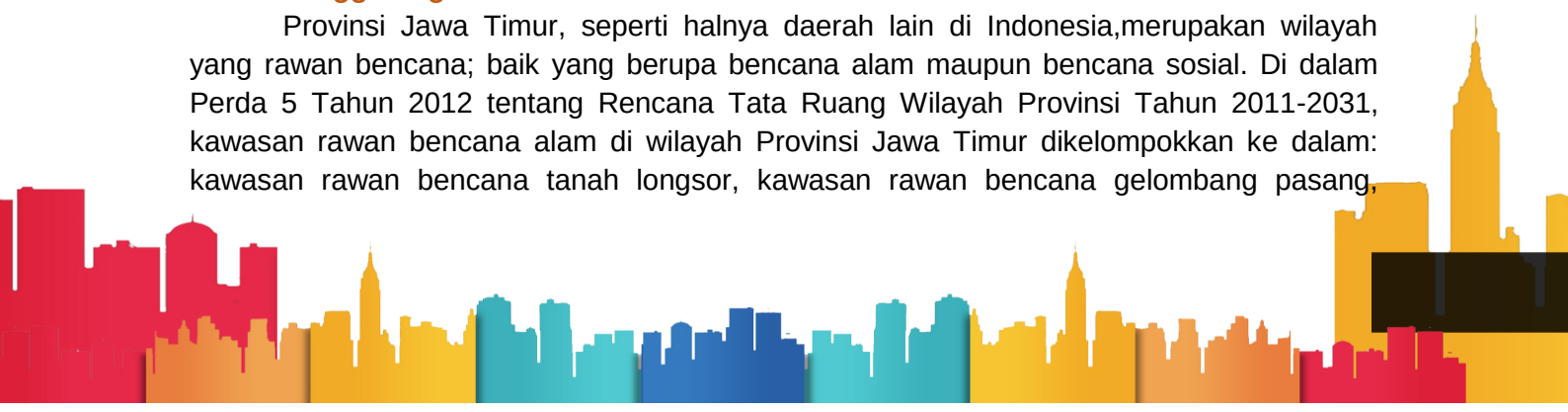
Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

M. Penanggulangan Bencana

Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Di dalam Perda 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang,



kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang. Dokumen yang sama juga mengklasifikasikan beberapa area sebagai kawasan rawan bencana alam geologi sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.

Jika menilik tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; hasil identifikasi menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah dan berpotensi terkena 13 jenis bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial), yaitu: banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, longsor, cuaca ekstrem (angin puting beliung) gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, konflik sosial/kerusuhan, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi.

Adapun beberapa Isu Strategis pada terkait kebencanaan di Provinsi Jawa Timur antara lain:

- 1). Penanganan di masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu, banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran;
- 2). Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
- 3). Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4). Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
- 5). Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;

4.2.5 Isu-Isu Strategis Kota Mojokerto

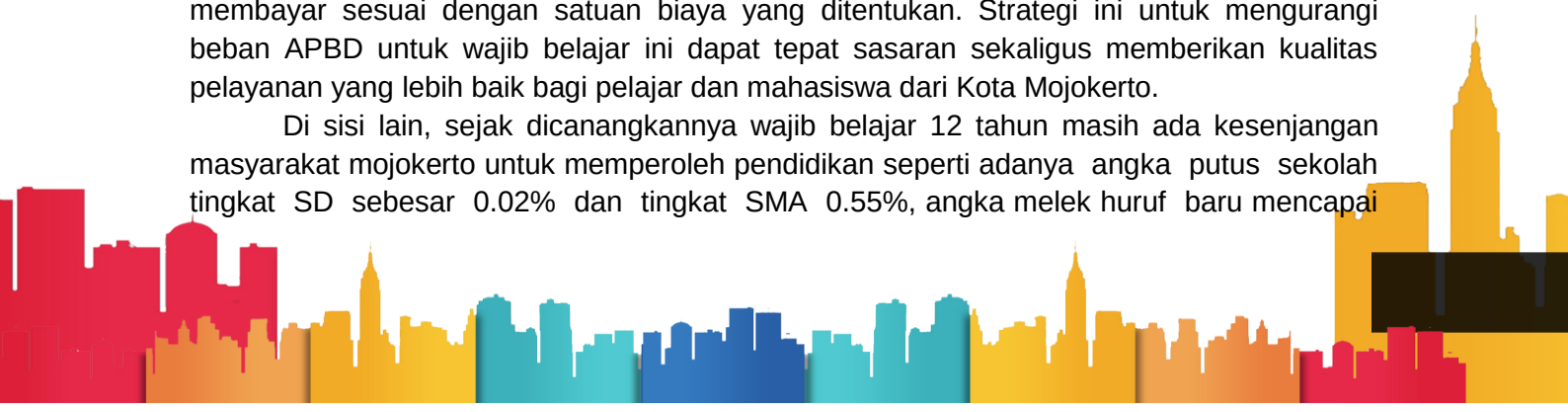
A. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Pembangunan aspek pendidikan di Kota Mojokerto dititikberatkan pada peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar terutama pada jenjang pendidikan dasar. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya, serta kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan masyarakat.

Animo masyarakat yang masih tinggi terhadap sekolah negeri memiliki kecenderungan kecenderungan anak-anak dari keluarga miskin di Kota Mojokerto banyak yang bersekolah di sekolah swasta yang masih belum banyak mendapatkan dukungan dalam program wajib belajar. Demikian pula dengan Angka partisipasi sekolah baik angka partisipasi kasar dan partisipasi murni wajib belajar 12 tahun yang telah melebihi angka 100% di sekolah negeri menunjukkan bahwa banyak siswa yang berdomisili di luar Kota Mojokerto mengakses pendidikan gratis kota Mojokerto.

Dari data di atas, perlu disusun ulang strategi bebas biaya bagi wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan akses siswa domisili Mojokerto terutama dari keluarga miskin di Kota untuk dapat bersekolah baik di negeri maupun di swasta dengan bebas biaya, dan menyeleksi agar siswa yang berdomisili luar Kota baik negeri maupun swasta tetap membayar sesuai dengan satuan biaya yang ditentukan. Strategi ini untuk mengurangi beban APBD untuk wajib belajar ini dapat tepat sasaran sekaligus memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi pelajar dan mahasiswa dari Kota Mojokerto.

Di sisi lain, sejak dicanangkannya wajib belajar 12 tahun masih ada kesenjangan masyarakat Mojokerto untuk memperoleh pendidikan seperti adanya angka putus sekolah tingkat SD sebesar 0.02% dan tingkat SMA 0.55%, angka melek huruf baru mencapai



98.9 dan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) hanya 22%. Selain itu, masih kurangnya tenaga administrasi pada tingkatan SD/MI yang berakibat menambah beban administrasi bagi guru dan mengurangi konsentrasi guru untuk mengajar. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 12 tahun dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Menambah kualifikasi guru yang memenuhi kualifikasi standar (sertifikasi guru). Hal ini disebabkan pada tahun 2013 baru 40% guru yang bersertifikasi, Guru SD/MI yang belum memiliki ijazah S1 pada tahun 2013 sekitar 23%, dan guru mata pelajaran yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan masih banyak dengan alasan kekurangan atau justru kelebihan guru pada mata ajar tertentu.
2. pembuatan database profil pendidikan sekolah untuk dapat mengetahui secara cepat kesenjangan manajemen pelayanan pendidikan
3. Perlu digiatkan dan disosialisasikan pendidikan nonformal agar angka melek huruf bisa dituntaskan dan diberikan peningkatan kapasitas *life skill education* Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan menambah jumlah buku-buku baru.

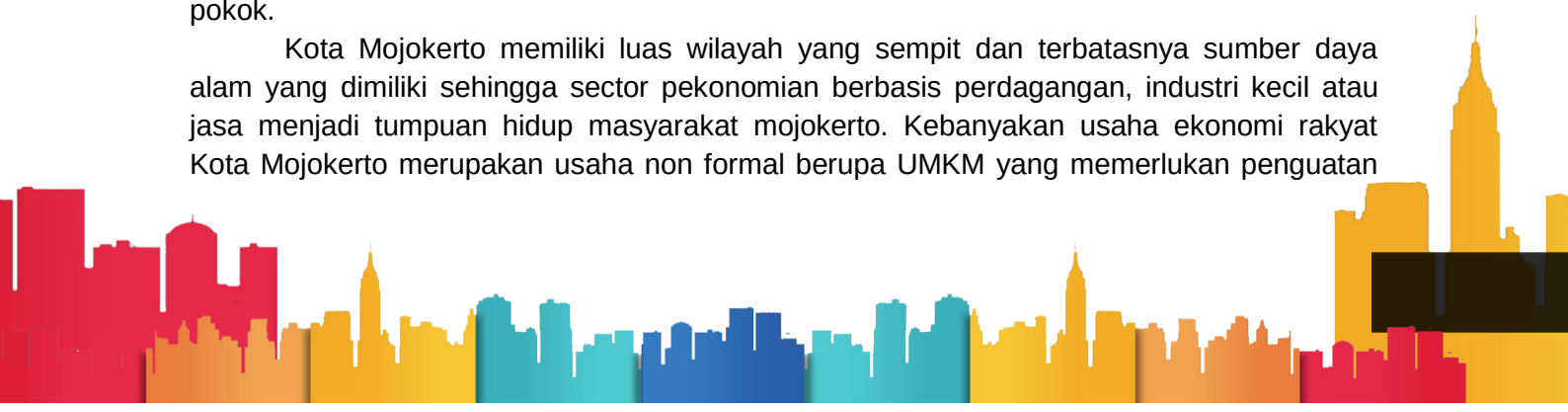
Peningkatan sumberdaya manusia memerlukan sinergitas program pembangunan daerah antara lain peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan nilai-nilai religius dan meningkatkan prestasi kepemudaan. Salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat diperlukan upaya pengembangan SDM di Kota Mojokerto diarahkan kepada model pendidikan *Vokasi yang link and match* dengan dunia usaha dan kebutuhan riil kompetensi yang berkembang di masyarakat.

Dalam hal derajat kesehatan lingkungan, masalah mendesak yang dihadapi adalah masih adanya beberapa daerah kumuh yang memiliki sanitasi buruk dengan sosialisasi dan fasilitasi pola hidup sehat. Dalam bidang layanan kesehatan diperlukan peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedik. Disamping kuantitasnya juga banyak dikeluhkan kualitas pelayanan dari tenaga medis khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah seperti RSUD dan Puskesmas yang masih belum memuaskan baik dari ketepatan jam kerja, kecepatan pelayanan, keramahan dan kemudahan prosedur pelayanan kesehatan lainnya. Untuk itu diperlukan Pengembangan upaya kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan: pemerataan fasilitas kesehatan (*equity*), peningkatan mutu pelayanan kesehatan (*equality*), dan kesinambungan pelayanan (*sustainability*).

B. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu rata rata sebesar 7 persen sejak tahun 2000 (harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dan inflasi dari PDRB Kota Mojokerto rata rata sebesar 4,22 persen, bisa menjadi titik harapan bagi perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Dengan inflasi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, mengartikan bahwa tingkat daya beli masyarakat sudah tinggi dan sudah dapat mengikuti perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.

Kota Mojokerto memiliki luas wilayah yang sempit dan terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki sehingga sector perekonomian berbasis perdagangan, industri kecil atau jasa menjadi tumpuan hidup masyarakat mojokerto. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat Kota Mojokerto merupakan usaha non formal berupa UMKM yang memerlukan penguatan



kapasitas dari segi teknis, modal, dan pemasaran untuk dapat menciptakan produk-produk yang unggul dan kompetitif.

Permasalahan utama UMKM Kota Mojokerto sebagai salah satu pilar ekonomi Kota Mojokerto yakni kurangnya akses modal ke lembaga keuangan dan perbankan. Hal ini disebabkan untuk dapat mengakses lembaga keuangan membutuhkan aspek legal formal. Untuk itu diperlukan penguatan lembaga keuangan seperti Koperasi agar UMKM dapat meningkatkan produktifitasnya.

Sinergi dengan permasalahan SDM, maka pengembangan SDM yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto adalah SDM yang berbasis ekonomi UKM dan ekonomi kreatif. Sehingga pengembangan SDM sinergi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Permasalahan umum terkait dengan aspek perekonomian akan dilihat dari urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penanaman Modal

Permasalahan pokok terkait dengan urusan penanaman modal di Kota Mojokerto antara lain :

1. Luas wilayah Kota Mojokerto yang relatif sangat kecil dan masih terbatasnya ruang usaha di Kota Mojokerto, sehingga menyulitkan untuk mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Kota Mojokerto di sektor tertentu, khususnya sektor industri;
2. Infrastruktur penunjang investasi yang masih belum memadai;
3. Belum tersedianya tenaga teknis perizinan sehingga waktu/proses pelayanan perizinan masih memerlukan proses lama

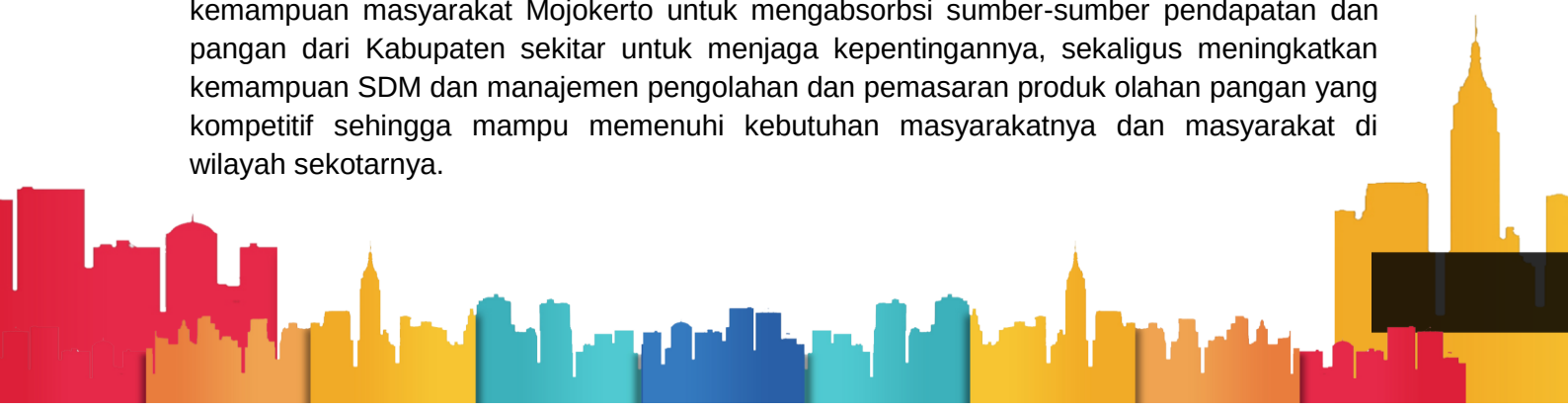
b. Ketenagakerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tenaga kerja dapat mempengaruhi aspek perekonomian Kota Mojokerto pada umumnya dan ekonomi masyarakat ada khususnya. Permasalahan utama yang masih harus ditangani diantaranya adalah perluasan kesempatan kerja belum dioptimalkan dan belum diimbangi peningkatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini dapat mengakibatkan semakin menurunnya daya daya serap tenaga kerja di pasar kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka

C. Penguatan Ketahanan Pangan Dan Daya Saing

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

Sebagai Kota yang miskin lahan pertanian maka ketahanan pangan diarahkan pada kemampuan masyarakat Mojokerto untuk mengabsorbsi sumber-sumber pendapatan dan pangan dari Kabupaten sekitar untuk menjaga kepentingannya, sekaligus meningkatkan kemampuan SDM dan manajemen pengolahan dan pemasaran produk olahan pangan yang kompetitif sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan masyarakat di wilayah sekitarnya.



Sinergis dengan pengembangan SDM maka dalam mendukung ketahanan pangan secara kreatif perlu dikembangkan pendidikan dan usaha kreatif tata boga dalam SMK maupun pendidikan lebih tinggi seperti Politeknik Boga dan sebagainya.

D. Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik

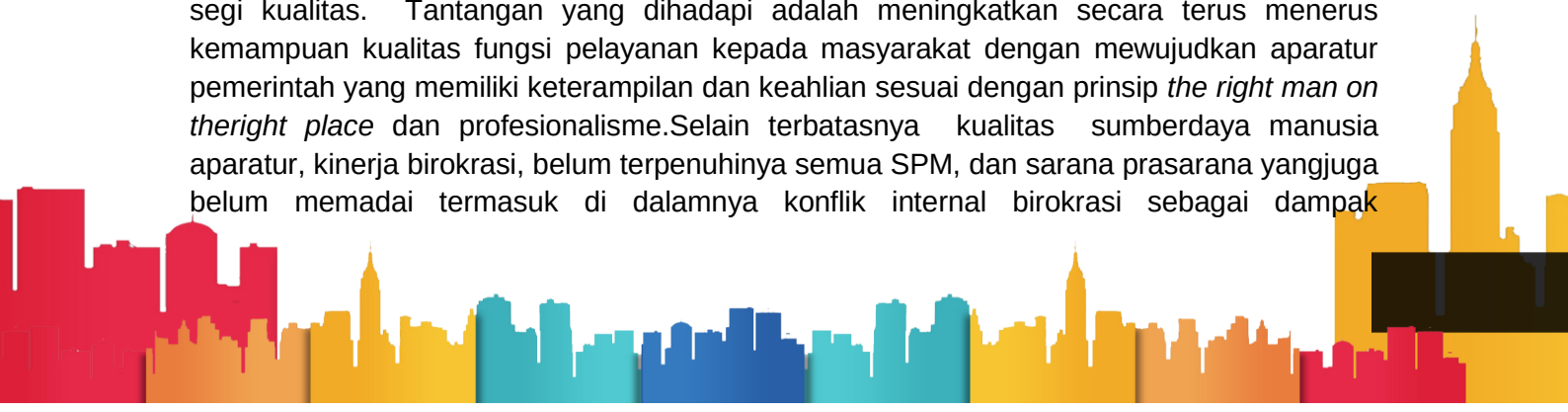
Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan di Kota Mojokerto adalah Reformasi Birokrasi belum optimal berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan, selain itu dari sisi Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang menjadi isu strategis lainnya antara lain : pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan praktek KKN; belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum optimal memadai; belum meningkatnya efisiensi dan efektifitas kerja, seperti belum lengkapnya SOP kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD dan standar manajemen mutu ISO yang terbatas; manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah yang masih mendapat penilaian WDP dari BPK; adanya hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan umum; belum optimalnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel, ditandai oleh pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib, kepastian (persyaratan biaya waktu pelayanan dan aturan hukum).

Reformasi birokrasi yang dituangkan dalam RPJP Kota Mojokerto tahun 2005-2025 yakni. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan *good governance* terus perlu ditingkatkan. Untuk target pencapaian pada tahapan lima tahun ke 3 dari RPJP yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM tahun 2014-2019 inidalam Bidang Pemerintahan adalah menyiapkan kerangka landasan bagi pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Goverment* melalui penataan kelembagaan, penentuan berbagai standart prosedur pelayanan dan penerapan berbagai *best practice* dalam segala urusan pemerintahan.

Menghadapi keluhan dan image masyarakat tentang kinerja pemerintahan di Kota Mojokerto, Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Masalah mendesak yang dihadapi adalah permasalahan kualitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Persoalan *overlapping* TUPOKSI, persoalan SDM yang tidak sesuai dengan tuntutan tugasnya, pergeseran *tour of duty* dalam mutasi yang kurang mempertimbangkan keahlian fungsional merupakan permasalahan yang menghambat kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi.

Aparatur pemerintahan daerah sebagai motor utama perkembangan Kota Mojokerto masih dihadapkan pada berbagai macam keterbatasan dan kendala terutama dari segi kualitas. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan secara terus menerus kemampuan kualitas fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan prinsip *the right man on the right place* dan profesionalisme. Selain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, belum terpenuhinya semua SPM, dan sarana prasarana yang juga belum memadai termasuk di dalamnya konflik internal birokrasi sebagai dampak



pelaksanaan PILKADA membuat koordinasi dan komunikasi antar birokrat menjadi kurang maksimal.

Perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan good governance, antara lain: menjadi entrepreneurial competitive government (pemerintahan yang kompetitif), customer driven dan accountable government (pemerintahan tanggap/responsive), serta global-cosmopolit orientation government (pemerintahan yang berorientasi global); penerapan prinsip pelayanan prima: metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, standar pelayanan minimal, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat/pengguna jasa secara terorganisasi, serta partisipasi masyarakat; proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran: elektronik di setiap instansi pemerintah serta penerapan dan pengembangan e-government; publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

E. Tata Ruang dan Infrastruktur Publik

Kondisi yang akan dihadapi Kota Mojokerto pada masa yang akan datang adalah semakin terbatasnya lahan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh kebutuhan akan perumahan dan permukiman serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Beberapa isu strategis yang akan dihadapi dalam aspek penataan ruang, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan dan pengembangan tata ruang;
2. Pertumbuhan wilayah yang belum optimal terintegrasi antar sektor pembangunan;
3. Dunia usaha dan daya saing belum optimal mendukung penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah;
4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya;
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang;
6. Belum optimalnya pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang;
7. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah.

Selain itu, keterpaduan pemanfaatan ruang kota masih perlu ditingkatkan seperti terminal, pasar dan sistem transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Pengembangan sistem transportasi di Kota Mojokerto harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah Gerbangkertasusila yang juga semakin meningkat. Untuk menangkap peluang bagi pengembangan kota/Kabupaten sekitarnya maka Mojokerto dapat dikembangkan sebagai Kota pengumpan (*feeder city*) yang mengumpulkan dan kemudian mendistribusikan barang dan jasa dari kawasan produsen untuk didistribusikan ke kota-kota sekitar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sarana transportasinya.



Rencana Tata Ruang kota Mojokerto mendapat tantangan dari kota-kota sekita seperti, Gresik selatan yang akan membangun kota baru meliputi Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Balongpanggang, Kedamaian, Benjeng dan Cerme. Demikian halnya, rencana pembangunan Bandara Internasional di Tikung Lamongan meskipun masih tahap studi kelayakan, haruslah diwaspadai. Perkembangan Sidoarjo Barat yang meliputi Kecamatan Wonoayu, Prambon, Krian, Balongbendo, Tulangan, Krembung dan Tarik juga harus diperhitungkan. Yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan Kota baru Mojosari sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto akan berkonsekuensi menarik banyak potensi dari Kota Mojokerto.

Perkembangan Kota Baru Gresik selatan akan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pelayanan *public* dan *privat* yang harus diperhitungkan. Kota Mojokerto yang memproklamirkan sebagai Kota Pelayanan (*service city*) harus mampu lebih cepat untuk memwujudkan visinya tersebut agar *Service city* Kota Mojokerto haruslah memiliki kelebihan yang masih diperhitungkan baik oleh masyarakat Kota Mojokerto maupun masyarakat sekitarnya.

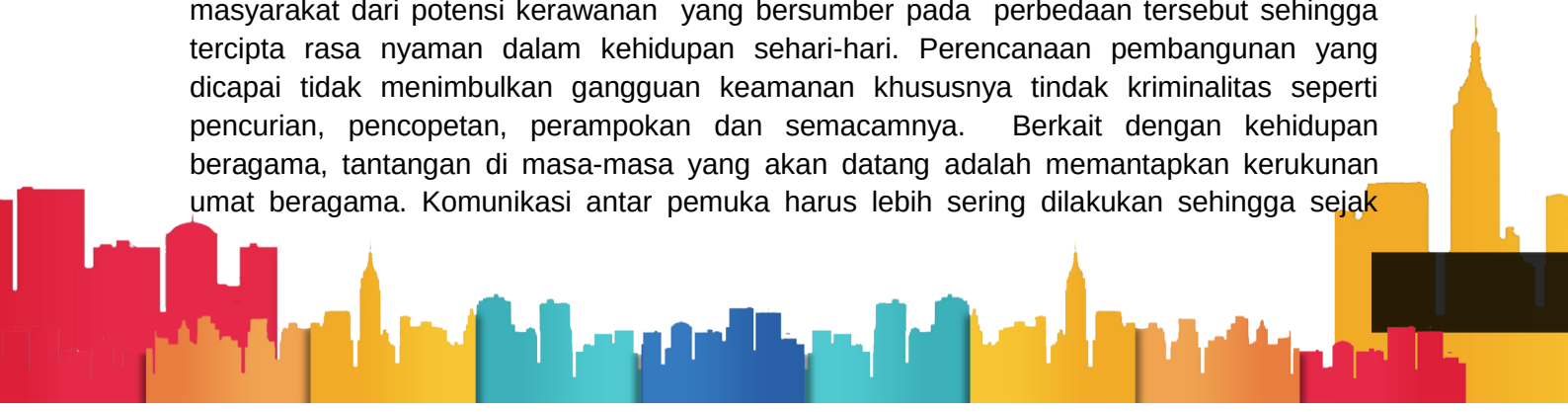
Sedangkan, Di bidang infrastruktur public masih banyak keluhan seperti dalam bidang penyediaan infrastruktur bagi layanan kesehatan, masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kesehatan, derajat kesehatan lingkungan, masalah mendesak yang dihadapi adalah masih adanya beberapa daerah kumuh yang memiliki sanitasi buruk.

Prasarana pendidikan juga masih kurang maksimal, banyaknya gedung sekolah tua dan kurangnya anggaran peningkatan bangunan dan lingkungan, prasarana bagi peningkatan prestasi pemuda dan OR yang tidak maksimal, prasarana bagi pengembangan budaya dan sosialisasi masyarakat yang berimpitan dengan urusan ekonomi termasuk kualitas prasarana jalan beserta pendukungnya seperti drainase, trotoar, penerangan lampu jalan, dan civil space lainnya yang belum menggambarkan sebagai Kota Layanan.

F. Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan yang Kondusif

Perkembangan penduduk Kota Mojokerto berkembang semakin heterogen dan plural yang menampung penduduk dari berbagai asal usul, etnis, agama, tingkat pendidikan, maupun ekonomi. Keadaan ini berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Perkembangan masyarakat yang cepat yang dipicu pertumbuhan ekonomi dan informasi memengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan, antara lain perubahan pola pikir, sikap, perilaku serta budaya dan adat istiadat. Hal ini dapat menimbulkan resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi, munculnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, Jika tidak maka gerak masyarakat akan cenderung tak terkendali serta bisa menggerogoti nilai-nilai moral dan budaya masyarakat. Tantangan yang dihadapi di bidang politik adalah menjaga gerak perkembangan masyarakat itu dengan membuat keputusan-keputusan politik yang mampu mengarahkan gerak masyarakat dan dunia usaha menuju masyarakat yang dicita-citakan seluruh warga Kota Mojokerto yang sejahtera dan maju.

Tantangan ke depan adalah memantapkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dari potensi kerawanan yang bersumber pada perbedaan tersebut sehingga tercipta rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Perencanaan pembangunan yang dicapai tidak menimbulkan gangguan keamanan khususnya tindak kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, perampokan dan sebagainya. Berkait dengan kehidupan beragama, tantangan di masa-masa yang akan datang adalah memantapkan kerukunan umat beragama. Komunikasi antar pemuka harus lebih sering dilakukan sehingga sejak



awal terbangun saling pengertian. Tantangannya adalah menumbuhkembangkan forum dialog lintas agama atas dasar saling menghargai dan menghormati. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari juga harus terus mendapat perhatian. Tantangannya adalah meningkatkan derajat ketaqwaan pada masing-masing individu agar tercipta insan yang saleh secara individual dan sosial. Pengurangan tindak kriminalitas dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban lingkungan"

Pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan merupakan salah satu langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara dapat menimbulkan bencana alam serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Mengacu pada analisis permasalahan internal dan eksternal di atas, maka dalam kerangka pembangunan Kota Mojokerto lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan selama lima tahun terakhir, ditemukan berbagai isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Kota Mojokerto dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2014–2019, yaitu sebagai berikut (1) Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan, kesalehan social dan ketenaga kerjaan). (2) Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan. (3) Ketahanan Dan Daya Saing di Bidang Pangan. (4) Kinerja Pelayanan publik. (5) Infrastruktur wilayah dan tata ruang. (6) Lingkungan hidup, Keamanan dan Ketertiban.

Keenam isu strategis dengan urutan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menjadi dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan diambil dengan penjabaran isu-isu diatas adalah sebagai berikut:

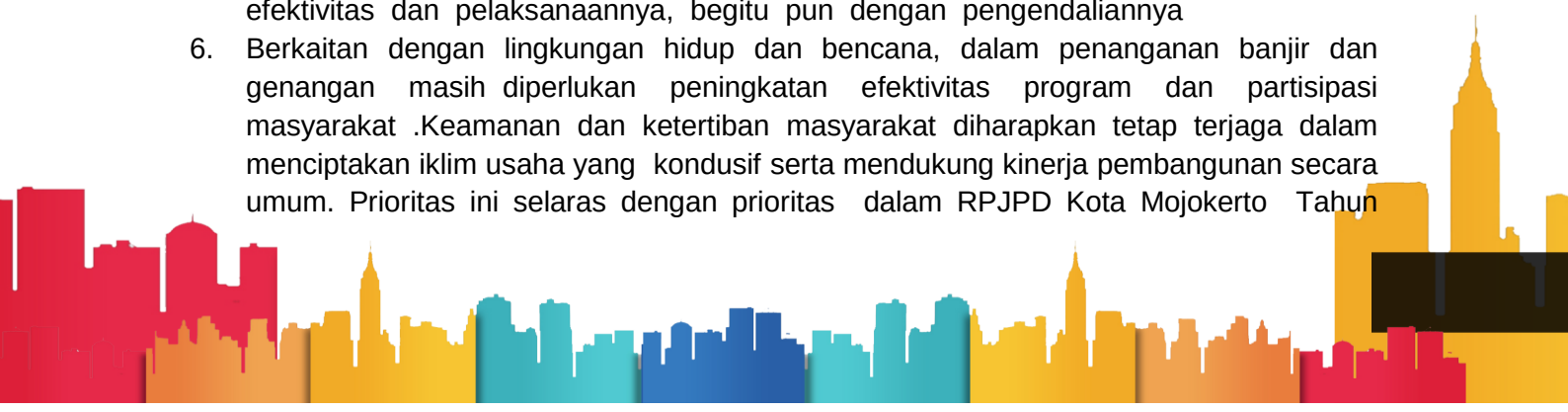
1. Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substansif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki.

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang bersifat kuratif,



preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis.

2. Permasalahan ekonomi berkaitan dengan kemampuan dan daya saing pengembangan produk dan kinerja ekonomi diantara wilayah sekitarnya, sekaligus mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kota Mojokerto. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.
3. Ketahanan pangan permasalahan pokoknya adalah keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki oleh Kota Mojokerto yang sangat sempit, dan tahun ke tahun menjadi semakin sempit karena perubahan pemanfaatan lahan, terutama untuk perluasan perumahan/ pemukiman. Dengan terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki, maka sulit bagi Kota Mojokerto untuk bisa mencapai swasembada pangan. Namun perlu diupayakan inovasi-inovasi pertanian yang mengarah ke pertanian agrobisnis. Termasuk di dalamnya pengembangan inovasi pengolahan dan manajemen pemasaran produk pangan secara kreatif. Sehingga meskipun kecil dan tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah namun SDM Kota Mojokerto harus dikembangkan secara optimal sehingga mampu bersaing dengan wilayah sekitarnya.
4. Kinerja pelayanan publik sebagai *core bussines* dari Pemerintah merupakan ukuran prestasi yang mutlak diberikan kepada masyarakat. Masalah utama adalah meningkatkan kemampuan kualitas fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan prinsip *the right man on the right place* dan profesionalisme. Selain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, belum terpenuhinya semua SPM, dan sarana prasarana yang juga belum memadai termasuk di dalamnya konflik internal birokrasi sebagai dampak pelaksanaan PILKADA membuat koordinasi dan komunikasi antar birokrat menjadi kurang maksimal.
5. Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, listrik, komunikasi dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya.
6. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun



2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.



BAB 5

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan rangkaian pentahapan lima tahunan ke 3 dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. Pada tahapan lima tahunan ke 3 ini, rangkaian kebijakan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Mojokerto di segala bidang dengan menekankan kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 menjelaskan target pencapaian RPJM yang ke 3 ini adalah untuk mempersiapkan segala fasilitas, sumberdaya dan kelembagaan yang mampu mewujudkan Kota Mojokerto Metropolitan, yang nyaman dan aman dengan kualitas kehidupan yang baik dan berbudaya. Sejalan dengan rangkaian kebijakan tersebut, maka Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Mas'ud Yunus–Suyitno dalam proses Pemilukada Tahun 2013 lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah:

“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai *Service City* yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

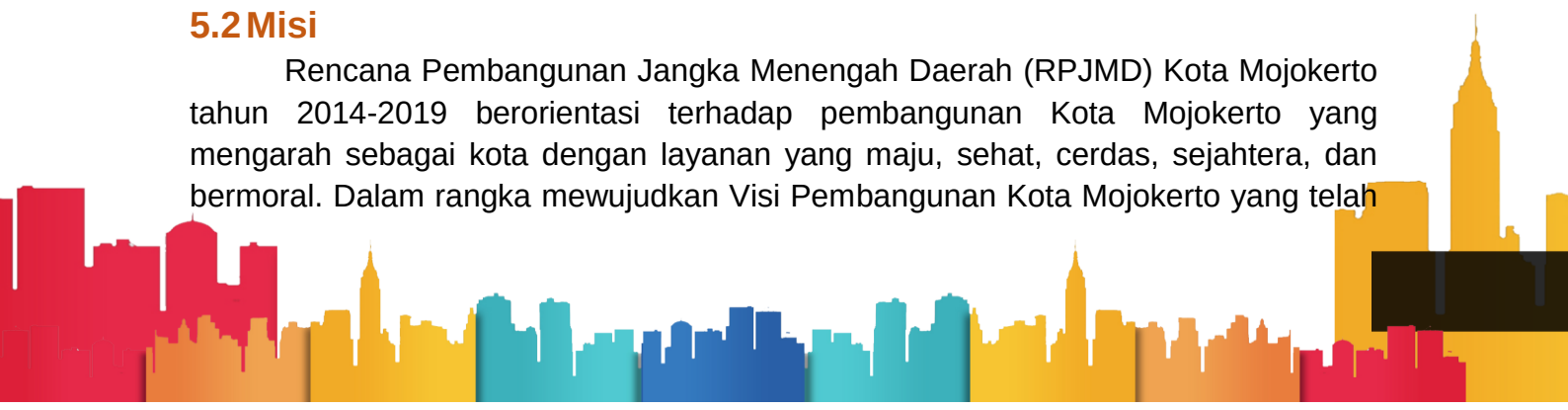
Tabel 5. 1 Penjabaran Pokok-Pokok Visi Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i> yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”	
Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i>	Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi:
	1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
	2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai
Kota Mojokerto sebagai	Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh:

Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
Service city yang maju	1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya 2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien 3. iklim usaha yang kondusif dan mandiri 4. Memiliki daya saing tinggi 5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
Kota Mojokerto sebagai Service city yang sehat	Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang: 1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri 2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi 3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus 4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi 5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.
Kota Mojokerto sebagai Service city yang cerdas	Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai <i>Service City</i> yang cerdas antara lain ditandai oleh: 1. sumber daya manusia yang berkualitas 2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi 3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi 4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi
Kota Mojokerto sebagai Service city yang sejahtera	Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat
Kota Mojokerto sebagai Service city yang bermoral	Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial 2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman 4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014-2019 berorientasi terhadap pembangunan Kota Mojokerto yang mengarah sebagai kota dengan layanan yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan bermoral. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah



ditetapkan diatas maka ditetapkan lima Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2014-2019 sebagai berikut:

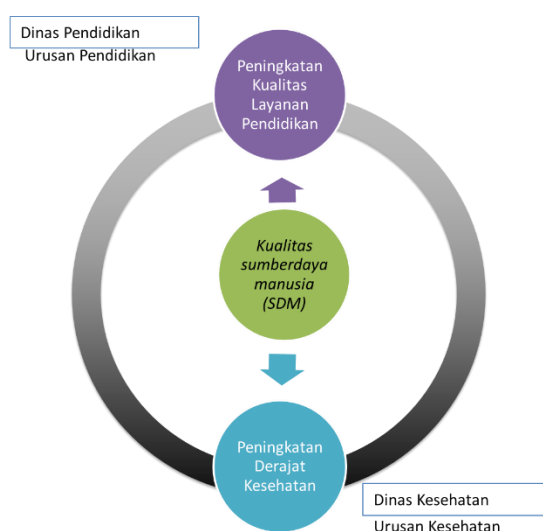
- a. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
- b. **Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi**
- c. **Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai**
- d. **Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram**
- e. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) dan Bersih (*Clean Government*)**

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat diperjelas sebagai berikut.

5.2.1 Misi I “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Salah satu tolok ukur pembangunan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah *Human Development Indeks* (HDI) / Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk melalui 3 indeks pembentuknya yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP). Misi I Kota Mojokerto adalah terfokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang difokuskan terhadap 2 sektor yang ditetapkan sebagai sasaran yakni meliputi meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-1 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-1** sebagai berikut:

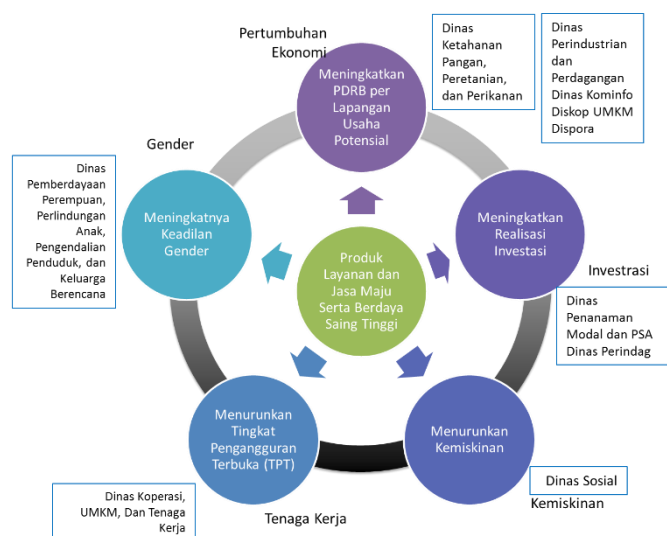


Gambar 5. 1 Logical Framework Perencanaan terintegrasi Misi I

5.2.2 Misi II “Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan berdaya Saing Tinggi”

Misi II Kota Mojokerto adalah terfokus terhadap peningkatan daya saing daerah yang terfokus terhadap penyediaan produk, jasa, dan layanan. Dalam Misi II Kota Mojokerto memiliki 5 sasaran yang meliputi 1) Peningkatan Kontribusi PDRB Per Lapangan Usaha Potensial; 2) Meningkatnya Realisasi Investasi; 3) Menurunnya Kemiskinan; 4) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; dan 5) Meningkatnya Keadilan Gender.

Dalam upaya pencapaian **Misi Ke-2** maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-2** sebagai berikut:



Gambar 5. 2 Logical Framework Perencanaan Terintegratif Misi II

5.2.3 Misi 3 “Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai”

Pembangunan infrastruktur dalam menciptakan Kota Mojokerto sebagai *service city* memiliki peran yang sangat penting. Meratanya pembangunan infratsruktur baik dari segi kuantitas maupun kualitas disemua sektor dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut. Selain itu dengan tersedianya infrastruktur yang lengkap juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian **Misi ke-3** maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam langkah pencapaian **Misi ke-3** sebagai berikut:

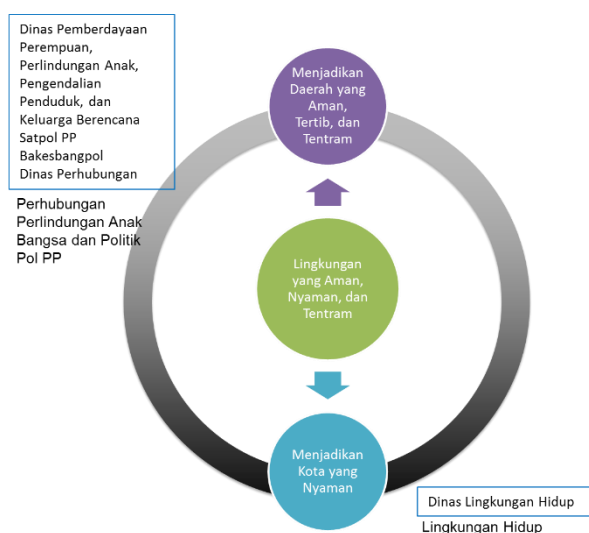


Gambar 5. 3 Logical Framework Perencanaan Terintegratif Misi III

5.2.4 Misi 4 “Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram”

Seringkali sebagai sebuah kota yang hanya terfokus terhadap pertumbuhan ekonomi semu mengabaikan atau mengesampingkan kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam mencapai Kota Mojokerto sebagai *service city* tentunya tidak dapat mengesampingkan terkait aman, nyaman, dan tentramnya Kota Mojokerto, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya juga merupakan sebuah pelayanan wajib yang disediakan oleh Kota Mojokerto.

Dalam upaya pencapaian **Misi ke-4** maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam langkah pencapaian **Misi ke-4** sebagai berikut:

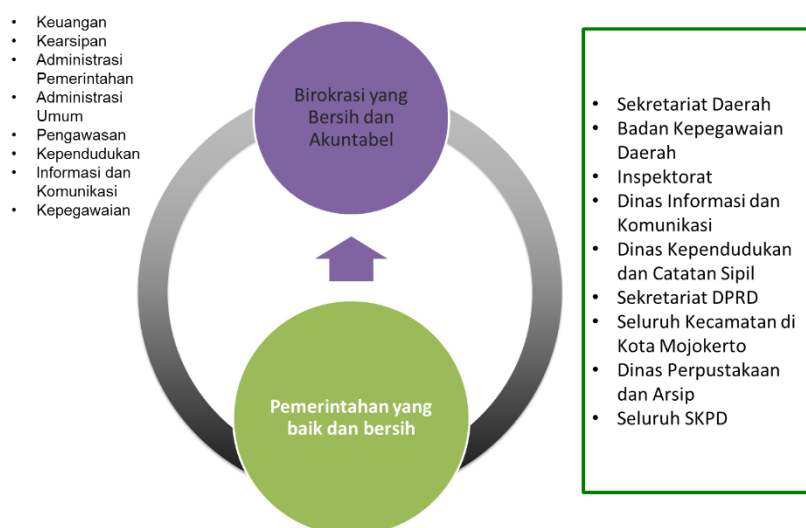


Gambar 5. 4 Logical Framework Perencanaan Terintegratif Misi IV

5.2.5 Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Bersih (*Clean Government*)

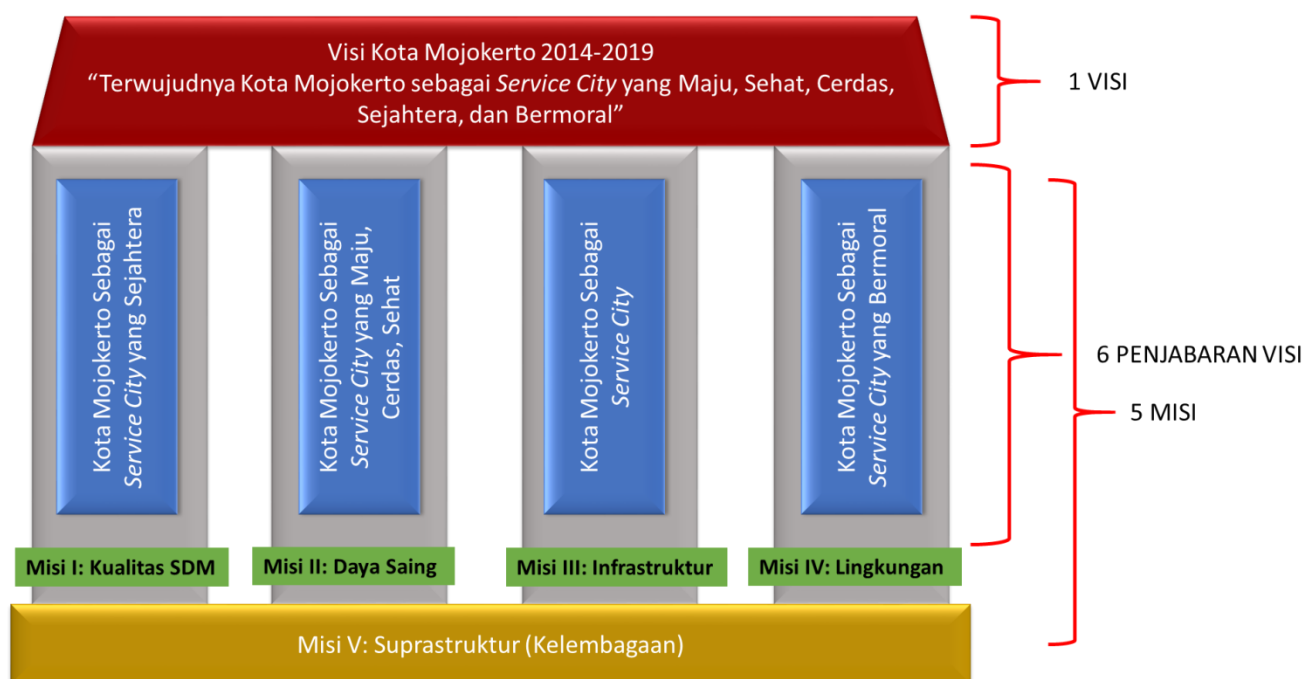
Mewujudkan 4 misi sebelumnya tampaknya mustahil tanpa adanya komitmen kongkrit dari pemerintah. Pemerintah yang Baik dengan berpegangan terhadap asas *Good Governance* dan pemerintah yang bersih, tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai Visi Kota Mojokerto.

Dalam upaya pencapaian **Misi ke-5** maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam langkah pencapaian **Misi ke-5** sebagai berikut:



Gambar 5. 5 Logical Framework Perencanaan Terintegrasi Misi V

Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kota Mojokerto yang mendukung tercapainya Visi Kota Mojokerto 2014-2019, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kota Mojokerto 2014-2019 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5. 6 Pondasi dan Pilar Misi dalam Pencapaian Visi Kota Mojokerto 2014-2019

5.3 Tujuan dan Sasaran

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kota Mojokerto yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak, dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-I** Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 7 Logical Framework Pencapaian Misi I Kota Mojokerto

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya mencapai Misi II yakni Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Produk Unggulan yang Berdaya Saing Tinggi dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Kontribusi PDRB Per Lapangan Usaha Potensial
- b. Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Realisasi Investasi
 - 2) Menurunnya Kemiskinan
 - 3) Menurunnya Tingkat Pengangguran
 - 4) Meningkatnya Keadilan Gender

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-II** Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut



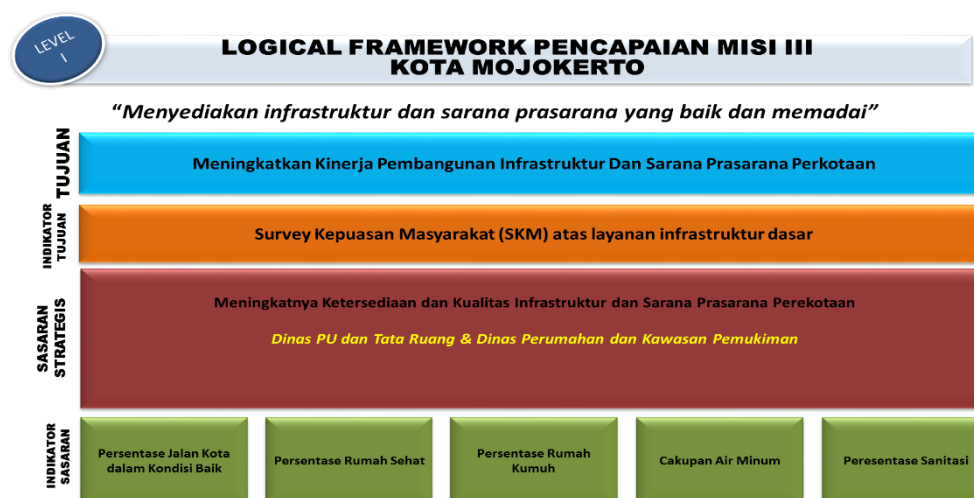
Gambar 5. 8 Logical Framework Pencapaian Misi II Kota Mojokerto

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya mencapai Misi III Kota Mojokerto yakni Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai, dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkotaan dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkotaan

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-III** Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut



Gambar 5. 9 Logical Framework Pencapaian Misi III Kota Mojokerto

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya mencapai Misi IV Kota Mojokerto yakni Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tentram dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Aman, Tertib, dan Tentram dengan Sasaran Pembangunan meliputi:
 - 1) Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas
 - 2) Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - 3) Menurunnya Angka Gangguan Kantribmas dan Penegakan Perda
- b. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Nyaman dengan Sasaran Pembangunan meliputi:
 - 1) Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-IV** Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 10 Logical Framework Pencapaian Misi IV Kota Mojokerto

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Misi V

Sebagai upaya mencapai Misi V Kota Mojokerto yakni Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Bersih (*Clean Government*), dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Bersih (*Clean Governance*) dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

- 1) Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-V** Kota Mojokerto yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 11 Logical Framework Pencapaian Misi V Kota Mojokerto

5.3.6 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 5. 2 Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

VISI 2014-2019 Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Bermoral					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)	T 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pendidikan	S 1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata nilai UN SD/MI, SMP/MTs.	
				Angka rata-rata lama sekolah	
				Angka Harapan Lama Sekolah	
		Angka Harapan Hidup	S 2 Meningkatnya derajat kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	
				Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	
				Prevalensi balita gizi buruk	
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi	T 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	S 3 Meningkatnya PDRB per lapangan usaha potensial	Kontribusi PDRB Pertanian dan perikanan	
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	
				Kontribusi PDRB Penyediaan akomodasi dan makan	
				Kontribusi PDRB Informasi & komunikasi	
				Kontribusi PDRB Jasa keuangan dan asuransi	
				Kontribusi PDRB Jasa perusahaan	
			S 4 Meningkatnya investasi PMA & PMDN	Realisasi Investasi PMA & PMDN	
	T 3 Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan	Indeks Gini	S 5 Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	
			S 6 Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
			S 7 Meningkatnya keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai	T 4 Meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur dan prasarana perkotaan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan infrastruktur dasar	S 8 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	
				Persentase rumah sehat	
				cakupan air minum	

VISI 2014-2019 Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Bermoral				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram	T 5 Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang aman, tertib, dan tentram	Angka gangguan KAMTIBMAS	S 9 Menurunnya angka gangguan KAMTIBMAS dan pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase rumah kumuh
				Persentase sanitasi
				Persentase menurunnya pelanggaran KAMTIBMAS
			S 10 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase menurunnya pelanggaran PERDA
				Kota Layak Anak
				Angka Kecelakaan Lalulintas
	T 6 Menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah yang nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S 12 Meningkatnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Air
				ADIPURA
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (clean government)	T 7 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	S 13 Birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Daerah
				Nilai SAKIP
				Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan masyarakat meningkat



BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

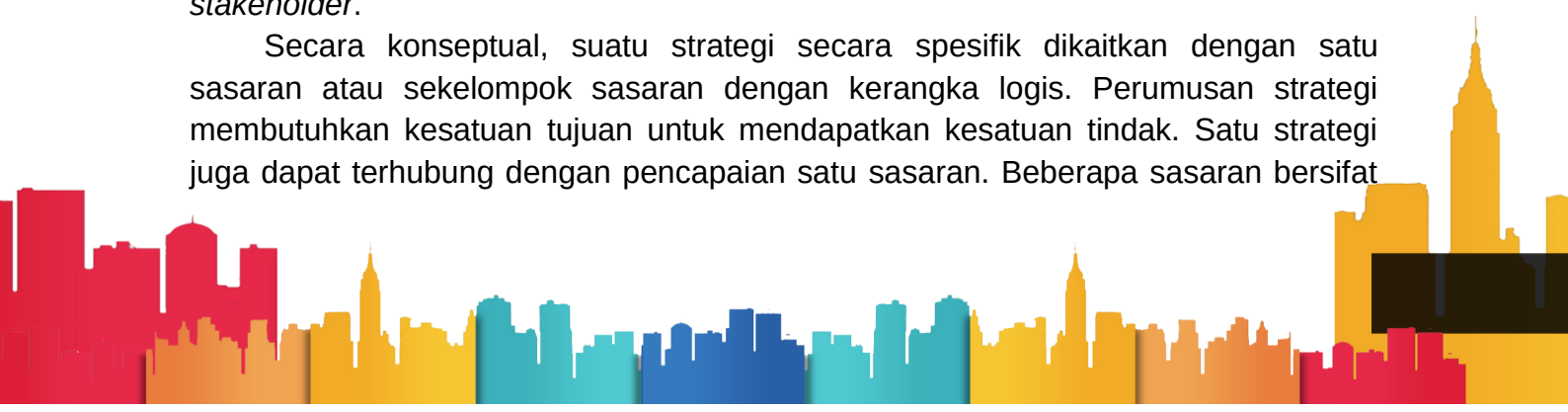
Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kota Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat



inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:



INTERNAL	Strength (Kekuatan) - Eksisting pengelolaan Sektor Jasa Baik secara umum - Meningkatnya peran perempuan dalam organisasi - Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Meningkat - Penurunan Jumlah Pengangguran - Penurunan Inflasi - Peningkatan APK - Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah - Penurunan Penderita TBC - Penurunan Penderita HIV - Peningkatan Persentase Koperasi Aktif - Peningkatan Jumlah UKM Aktif - Penurunan KDRT - Peningkatan Produksi Sektor Perikanan Darat - Peningkatan Industri Sektor Pengolahan - Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan - Penurunan Angka Kriminalitas - Peningkatan IPM	Weakness (Kelemahan) - Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang - Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masih rendah - Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana pendidikan - Tidak adanya tenaga tata usaha di sekolah SD/MI - Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan untuk siswa dalam kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa - Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang program – Program Pendidikan Non Formal - Belum semua guru/pendidik memiliki kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan - Masih sulit terkumpulnya data pendidikan yang diperlukan penyusunan profil pendidikan - Tidak semua lembaga sekolah sudah mempunyai tower untuk antenna sehingga perlu diseleksi lagi sekolah – sekolah yang sudah mempunyai tower - Rendahnya minat baca pada aparatur Pemerintah Kota Mojokerto - Belum terlaksananya otomatisasi katalog perpustakaan sehingga pencarian bahan pustaka masih memerlukan informasi bahan pustaka dari petuigas perpustakaan serta kebutuhan sarana otomatisasi yang belum terpenuhi dengan baik - Rendahnya minat dan budaya baca siswa dan pemberdayaan Perpustakaan Sekolah - Terbatasnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, serta bantuan ke Perpustakaan Masjid - Jumlah dan jenis perbekalan kesehatan bagi kepentingan pasien yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan - Belum difahaminya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PPK BLU - Peralatan medis di RSU, belum maksimal - Kurang optimalnya pembersihan saluran drainase secara rutin sehingga menyebabkan penumpukan sampah/waled yang menghambat aliran air - Kurangnya kelayakan kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang pembangunan perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah - Kurang adanya keseimbangan dan keserasian lingkungan dalam satu bagian wilayah kota - Belum maksimalnya penataan kawasan perumahan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan perumahan - Belum sinkron dan tersedianya data untuk perencanaan - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan - Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan - Kurangnya pegawai yang terampil di bidang tertentu yang disebabkan tidak adanya diklat untuk menunjang pekerjaannya - Masih banyaknya lampu PJU ilegal yang mengambil saluran dari jaringan lampu PJU sehingga mengakibatkan kerusakan pada komponen dan jaringan lampu PJU yang ada - Kurangnya jumlah sarana dan prasarana persampahan - Belum adanya kurikulum yang khusus untuk mendukung kegiatan ADIWYATA - Belanja modal pengadaan tanah belum memenuhi target - Masih dijumpai ketimpangan –ketimpangan yang terjadi pada perlakuan terhadap perempuan dan anak yaitu perlakuan yang mengakibatkan kesengsaraan / penelantaran - Belum optimalnya peran Lembaga-lembaga yang secara khusus menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih banyak masyarakat yang belum tahu / mengalami kesulitan dalam mencari penyelesaian - Banyak Tenaga Medis / Bidan yang belum pernah mengikuti pelatihan CTU
EKSTERNAL	Opportunity (Peluang) - Besarnya afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi - Banyaknya program prioritas pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daerah potensial yang berorientasi hasil - Secara geografis merupakan bagian dari kawasan metropolitan GERBANGKERTOSUSILA - Pergerakan positif Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur - Peningkatan luas wilayah industri	Threat (Ancaman) - Keikutsertaan dalam lomba – lomba PNF minim memperoleh kejuaraan - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga menyebabkan saluran / gorong-gorong tersumbat - kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan di atas tonase yang di ijin. Disamping itu juga kerusakan yang disebabkan oleh akibat cuaca - Keterbatasan lahan untuk membuat WC dirumah masing-masing penduduk - Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum sepenuhnya mengacu pada RTRW, dan masih berorientasi pada pengembangan yang bersifat horizontal - Adanya konflik penggunaan lahan, khususnya antara penggunaan lahan permukiman dengan penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Lindung - Peralihan fungsi penggunaan lahan berkembang secara sporadis dan cenderung tidak teratur - Masih tersendatnya pertumbuhan ekonomi lokal (konstruksi, kesempatan kerja dll.) dan percepatan pembangunan rumah dalam jumlah yang besar - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada - Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup - Kurangnya kooperatif pihak swasta atau pelaku industri sehingga tidak memenuhi baku mutu dengan standart yang ditetapkan - Belum dioperasikannya laboratorium lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup karena belum adanya dukungan SDM yang memadai - Sulitnya menambah lahan untuk RTH dan Taman – taman kota karena terbatasnya lahan yang ada - Banyaknya masyarakat yang belum memahami program Keluarga Berencana - Masih lemahnya tingkat koordinasi antar stakeholder dan instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan - Sulitnya membuka wawasan bagi PSK dan orang yang mengalami penyakit sosial untuk peningkatan potensi diri untuk bekal masa tua. - Rendahnya minat investor - Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah - Aktivitas orang/LSM belum semua melapor - Terbatasnya lahan relokasi PKL - Lemahnya sinergi kebijakan penelitian sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil - Banyaknya keluhan atau pengaduan konsumen - Minimnya pengetahuan manajemen usaha dan belum semua PKL yang mengikuti pembinaan - Kesadaran para pengusaha industri kecil dalam mengelola usaha secara profesional masih rendah - ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan ekonomi global

Tabel 6. 1 Distribusi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

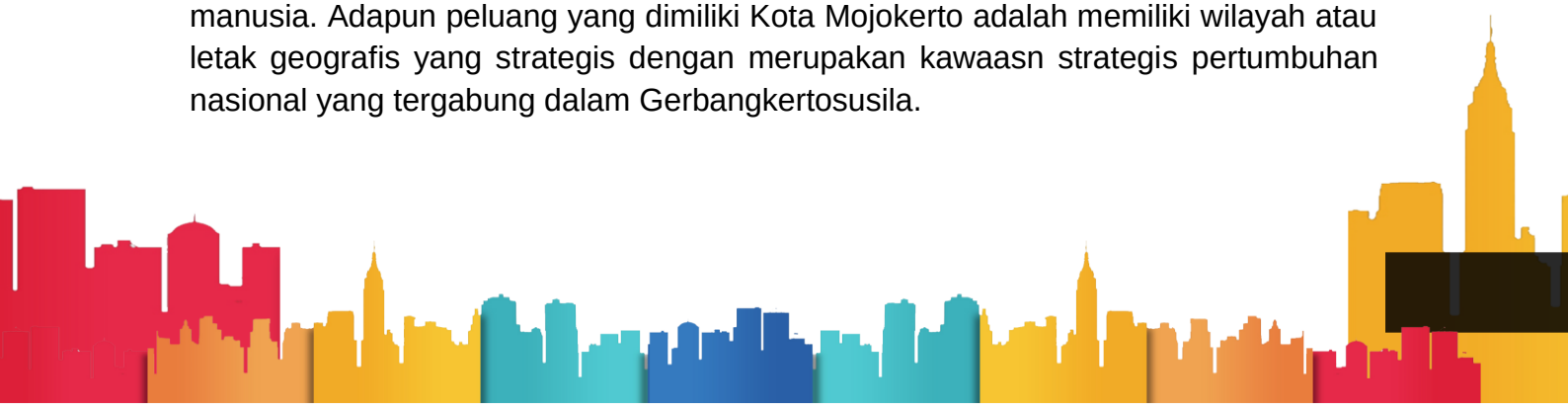
Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kota Mojokerto. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

S - O	W - O
<i>Pembangunan Sumberdaya Manusia Kompetitif di Dunia Kerja</i>	<i>Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Administratif Di Semua Level Pemerintahan Pengarusutamaan Gender (Pro-Gender).</i>
S - T	W - T
<i>Pertumbuhan Ekonomi Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin (Pro-Poor Growth), Pro-Job, Pro-Growth, Dan Pro-Environment.</i>	<i>Peningkatan Infrastruktur Fisik Penunjang Ekonomi Dan Sosial Melalui Mekanisme Zoning Wilayah Yang Bijak Pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas (Pro-Environment);</i>

Tabel 6. 2 Inisiasi Strategi

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Tidak dapat dielakkan bahwa memang kekuatan terbesar Kota Mojokerto adalah progresivitas pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penguatan kualitas sumberdaya manusia. Adapun peluang yang dimiliki Kota Mojokerto adalah memiliki wilayah atau letak geografis yang strategis dengan merupakan kawaasn strategis pertumbuhan nasional yang tergabung dalam Gerbangkertosusila.



Oleh sebab itu strategi yang di tetapkan adalah mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui **Pembangunan Berkelanjutan Berpusat Pada Rakyat (*People Centered Development*) Yang Inklusif**.

Pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah (*affirmative*) kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

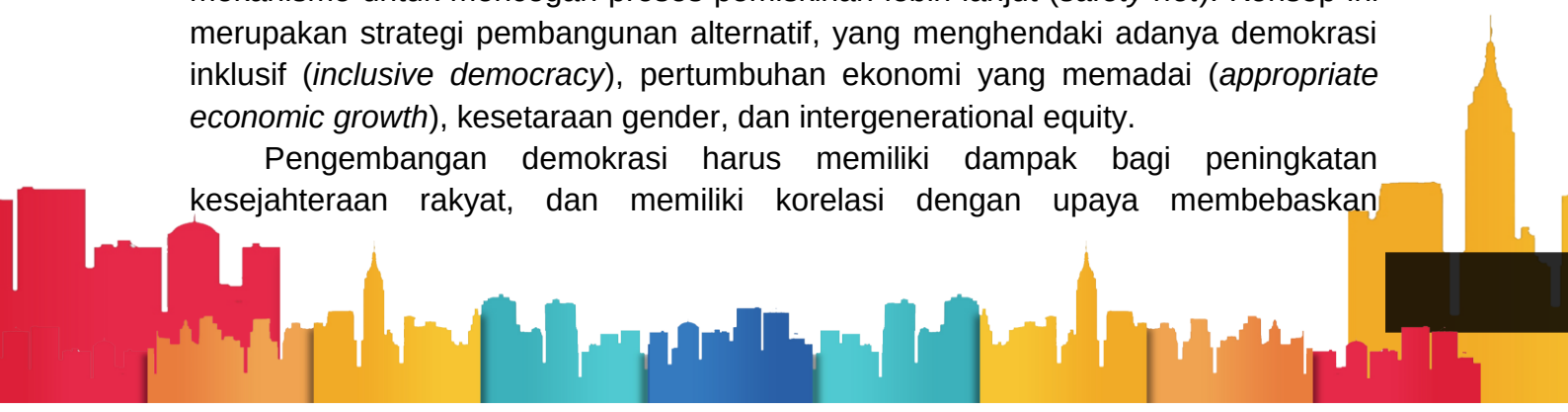
Pembangunan inklusif yang berpusat pada rakyat mengedepankan pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Kemampuan elemen masyarakat yang tertinggal ditingkatkan melalui pengembangan dan dinamisasi potensi yang mereka miliki, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Kemampuan penduduk miskin atau mereka yang berada pada posisi belum memanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya lokal.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung, dan berdaya saing.

Strategi *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* tersebut lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini merupakan strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya demokrasi inklusif (*inclusive democracy*), pertumbuhan ekonomi yang memadai (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender, dan intergenerational equity.

Pengembangan demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memiliki korelasi dengan upaya membebaskan



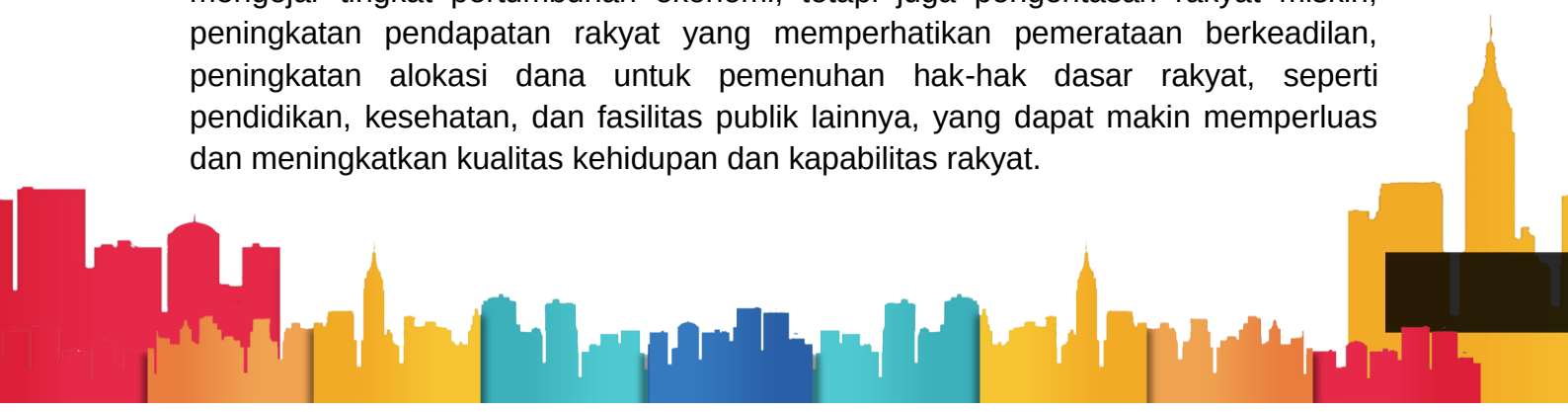
kemiskinan. Penalaran publik dapat diartikan sebagai “alasan seluruh warganegara di dalam masyarakat yang majemuk”, yang dapat memfasilitasi perbedaan pendapat dalam berbagai masalah dengan alasan yang dapat diterima oleh bermacam orang dan/atau berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Penalaran publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan yang senantiasa membuka diskusi publik, yang berlangsung sebagai perluasan kebebasan sipil, kebebasan politik, dan partisipasi, ditunjang oleh berfungsinya perangkat rule of law yang menyangga seluruh instrumen pemerintahan yang demokratis.

Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat berdemokrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, dan memajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang berpihak kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan lembaga-lembaga berbasis komunitas lokal, meminjam konsep pemikiran Jurgen Habermas, sebagai “ruang publik deliberatif”, yang sekaligus merupakan sebuah inovasi sosio-kultural yang berbasis pada ruang komunitas lokal untuk memprakarsai perubahan kontekstual.

Inti dari demokrasi deliberatif adalah partisipasi warga secara langsung, dan tidak mengenal keterwakilan (representation), maupun istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar-pihak. Demokrasi deliberatif, atau demokrasi musyawarah, lebih menonjolkan argumentasi, dialog saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Proses demokrasi deliberatif mendorong kompetensi komunikatif warga, yang memungkinkan setiap individu, tanpa kecuali, termasuk kaum marjinal, menyuarakan kebutuhannya.

“Rembug warga” merupakan pengejawantahan demokrasi deliberatif di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan dialog antar-warga yang mengedepankan penalaran publik. Pranata “rembug warga” merupakan pengorganisasian swadaya di tingkat komunitas yang menumbuhkan proses penyadaran kolektif, karena peserta “rembug warga” adalah warga aktif yang hadir bukan semata memenuhi undangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri.

Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekadar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri, dan kebebasan yang dapat mereka nikmati, sebagai sesuatu yang esensial dari ide mengenai pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang dapat makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.



Demokrasi juga harus ditekankan pada makna keadilan sosial, terutama konsep keadilan pada gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan imbalan bagi tindakan yang memberikan sumbangan untuk keuntungan bersama. Prinsip kebebasan harus mengacu pada kebebasan yang setara, di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi tersebut adalah **Pertumbuhan Ekonomi Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin (Pro-Poor Growth), Pro-Job, Pro-Growth, Pembangunan lingkungan hidup yang nyaman, aman dan berkualitas (Pro-Environment) dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Kompetitif di Dunia Kerja.**

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan trickle-down, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi haruslah yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan serempak dengan pemerataan merupakan pertumbuhan yang ramah bagi penduduk miskin, disebut *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan kapabilitas penduduk miskin untuk lebih berpartisipasi, dan memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi (Kimenyi, 2006). Sebuah pertumbuhan ekonomi belum cukup dikategorikan sebagai *pro-poor growth* jika hanya menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan mengabaikan ketimpangan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi disebut *pro-poor growth* jika proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin.

Strategi *pro-poor growth* secara konseptual memiliki definisi berbeda dengan strategi *pro-poor* dan *pro-growth* yang masing-masing berdiri terpisah, meski di dalam strategi *pro-poor growth* secara implisit juga mengandung unsur *pro-poor, pro-growth, pro-job*, dan *pro-environment*. Namun ketika keempat unsur tersebut tergabung di bawah konsep strategi *pro-poor growth*, maka melahirkan definisi baru yang berbeda dengan definisi masing-masing unsurnya. Strategi *pro-poor growth* juga bukan sekadar hasil penjumlahan dari keempat unsur tersebut.

Meski demikian, upaya mencapai *pro-poor growth*, tidak dapat dilepaskan dari kandungan unsur strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor*, dan *pro-environment*, yang masing-masing memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar



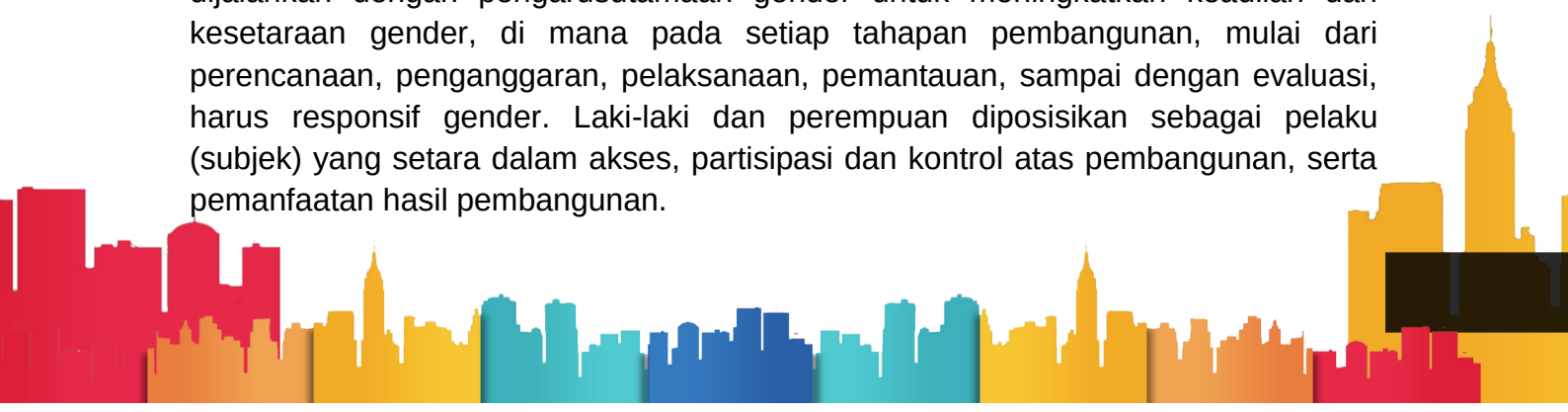
daripadaproporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*). Penguatan keamanan dan kenyamanan lingkungan juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting, sebab dengan pendekatan ini secara tidak langsung akan menggairahkan tendensi investasi karena unsur kondusifitas yang baik. Sehingga lingkungan yang dibangun tidak hanya aspek fisik lingkungan saja, melainkan sisi sosial lingkungan itu sendiri.

Melalui strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan mampu berjalan serempak, sehingga pertumbuhan ekonomi melibatkan, menyentuh, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, termasuk penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama disertai penurunan jumlah penduduk miskin, dan juga penurunan ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, pembentukan sumberdaya manusia yang siap pakai merupakan tantangan yang perlu untuk diperhatikan. Mengingat perkembangan IPM yang cukup progresif dan arah pengembangan daerah yang dikonsentrasikan pada sektor jasa maka kesiapan sumberdaya manusia didunia kerja menjadi strategis. Hal ini diupayakan dalam rangka terus menekan pertumbuhan pengangguran. Karena upaya *pro-job* saja tidak akan mampu menyerap tenaga kerja jika kualifikasi sumberdaya manusia yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan investor.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kota Mojokerto mampu melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Pengarusutamaan Gender (Pro-Gender)** dan **Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Administratif Di Semua Level Pemerintahan.**

Melihat sumberdaya manusia di Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang relatif atraktif melalui peningkatan IPM, maka penyetaraan peran tiap gender kemudian menjadi isu yang harus diperhatikan. Pembangunan Kota Mojokerto dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.



Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

Selain itu, pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pariwisata. Pariwisata didesain menjadi “*Umbrella*” Investasi pemerintah dan swasta di Mojokerto, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Kota Mojokerto. Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya **Peningkatan Infrastruktur Fisik Penunjang Ekonomi Dan Sosial Melalui Mekanisme Zoning Wilayah Yang Bijak.**



Tantangan yang cukup berat dihadapi pemerintah Kota Mojokerto adalah keterbatasan lahan administrative untuk memberikan pelayanan ruang yang baik. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya keterbatasan sumberdaya pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pengelolaan ruang di Kota Mojokerto. Sehingga mekanisme *zoning* yang bijak mampu menjadi jalan keluar tata guna lahan yang lebih efektif termasuk di dalamnya mempertegas definisi operasional dan status zona wilayah.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”):

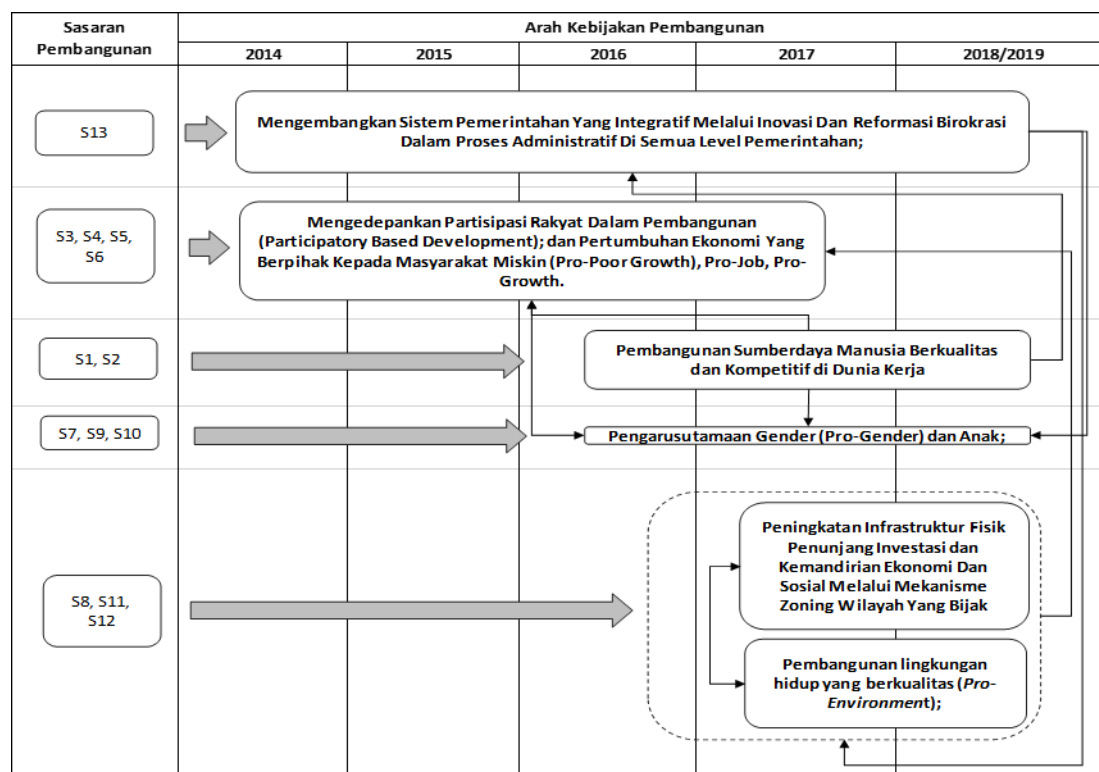
- St.1. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kompetitif di Dunia Kerja;**
- St.2. Mengedepankan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan (*Participatory Based Development*); dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin (*Pro-Poor Growth*), *Pro-Job*, *Pro-Growth*.**
- St.3. Pembangunan lingkungan hidup yang nyaman, aman dan berkualitas (*Pro-Environment*);**
- St.4. Pengarusutamaan Gender (*Pro-Gender*);**
- St.5. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Administratif Di Semua Level Pemerintahan;**
- St.6. Peningkatan Infrastruktur Fisik Penunjang Ekonomi Dan Sosial Melalui Mekanisme Zoning Wilayah Yang Bijak**

6.2 Arah Kebijakan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan:



Tabel 6. 3 Arsitektur Arah Kebijakan Kota Mojokerto



Dengan memperhatikan arsitektur tersebut, maka tematik pembangunan di tiap tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

2. Tahun 2015

Peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

3. Tahun 2016

Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

4. Tahun 2017

Peningkatan infrastruktur dan daya saing daerah dalam rangka mendorong investasi.

5. Tahun 2018

Meningkatkan investasi melalui efisiensi pelayanan & perijinan dan kemandirian ekonomi daerah melalui sumberdaya manusia berkualitas.

6. Tahun 2019

Finalisasi agenda lima tahun sebelum serta memberikan transisi kepada Tahapan Pembangunan Lima Tahun ke depan dan memberikan landasan bagi keberlangsungan pelaksanaan program pembangunan sebelumnya.



BAB 7

Kebijakan Umum dan Program Prioritas

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

No.	Perspektif	Strategi 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kompetitif di Dunia Kerja;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Mewujudkan SDM Terdidik serta memiliki keahlian dan integritas	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

No.	Perspektif	Strategi 1: Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kompetitif di Dunia Kerja;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
			4. Program Kesehatan Ibu dan Anak 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 8. Program Pendidikan Luar Biasa
2	Perspektif Proses Internal	Meningkatkan proses administrative pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana	1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
4	Perspektif Keuangan		

No.	Perspektif	Strategi 2: Mengedepankan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan (<i>Participatory Based Development</i>); dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin (<i>Pro-Poor Growth</i>), <i>Pro-Job</i> , <i>Pro-Growth</i> .	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Menguatkan kualitas wirausahawan serta akses terhadap pasar	1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3. Program pengembangan budidaya perikanan 4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 5. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

No.	Perspektif	Strategi 2: Mengedepankan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan (<i>Participatory Based Development</i>); dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin (<i>Pro-Poor Growth</i>), <i>Pro-Job</i> , <i>Pro-Growth</i> .	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
			12. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2	Perspektif Proses Internal	Mewujudkan efisiensi dan efektivitas aktivitas perekonomian melalui kemutakhiran teknologi	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3	Perspektif Kelembagaan	Mewujudkan mekanisme perijinan yang mudah dan cepat	1. Program penataan struktur industry 2. Program Pengembangan Kemitraan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi
4	Perspektif Keuangan		

No.	Perspektif	Strategi 3: Pembangunan lingkungan hidup yang nyaman, aman berkualitas (<i>Pro-Environment</i>);	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Mewujudkan kondusifitas lingkungan sosial	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
2	Perspektif Proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan sanitasi berkualitas	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4	Perspektif Keuangan		

No.	Perspektif	Strategi 4: Pengarusutamaan Gender (<i>Pro-Gender</i>) dan Anak;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan jagnkauan keterlibatan perempuan dalam pembangunan	1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2	Perspektif Proses Internal		

No.	Perspektif	Strategi 4: Pengarusutamaan Gender (<i>Pro-Gender</i>) dan Anak;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
3	Perspektif Kelembagaan	Penguatan peran dan kualitas SDM Perempuan	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
4	Perspektif Keuangan		

No.	Perspektif	Strategi 5: Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Administratif Di Semua Level Pemerintahan;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif Proses Internal	Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan aparatur yang berkualitas	1. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5. Program Pencegahan Korupsi 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 8. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 9. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 11. Program Penataan Administrasi Kependudukan 12. Program Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
3	Perspektif Kelembagaan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik 6. Program peningkatan kapasitas lembaga

No.	Perspektif	Strategi 5: Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Administratif Di Semua Level Pemerintahan;	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
			perwakilan rakyat daerah - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Program peningkatan disiplin aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program perencanaan pembangunan daerah - Program Pendidikan Kedinasan
4	Perspektif Keuangan	Mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan	- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan

No.	Perspektif	Strategi 6: Peningkatan Infrastruktur Fisik Penunjang Ekonomi Dan Sosial Melalui Mekanisme Zoning Wilayah Yang Bijak	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan afirmasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis penunjang perekonomian dan layanan publik	- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pengembangan Perumahan - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Program lingkungan sehat perumahan
2	Perspektif Proses Internal	Mewujudkan tertib tata ruang	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kualitas produk perencanaan tata ruang	Program Pengelolaan RTH
4	Perspektif Keuangan		

7.2 Program Prioritas

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Walikota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Walikota terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permen 13 Tahun 2006, atau kedalam Kebijakan Umum maupun Strategi. Jika bunyi janji Walikota terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum maupun Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:

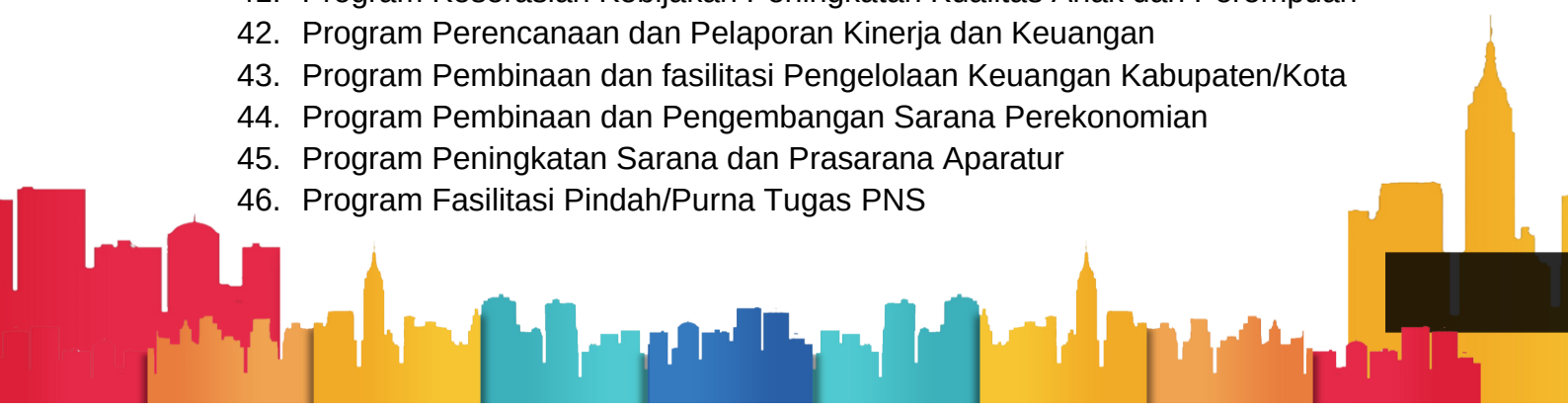


Gambar 7. 1 Ilustrasi Identifikasi Program Prioritas

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat diidentifikasi program-program prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Kesehatan Ibu dan Anak
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
8. Program Pendidikan Luar Biasa

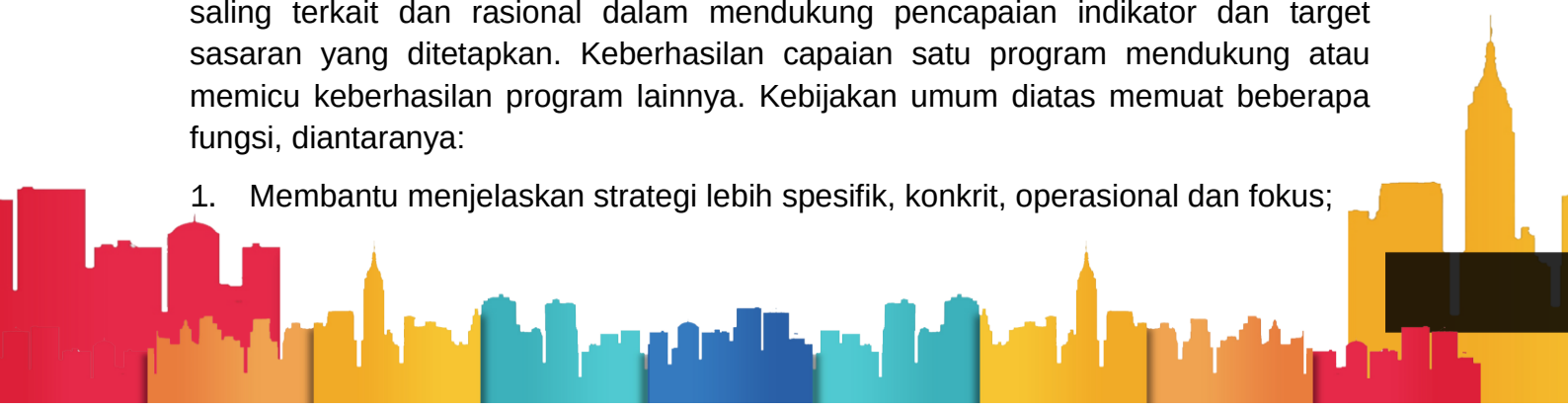
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
14. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
15. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
16. Program pengembangan budidaya perikanan
17. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
18. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
19. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
20. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
21. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
22. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
24. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
25. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
26. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
27. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
28. Program penataan struktur industri
29. Program Pengembangan Kemitraan
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi
31. Program pengembangan wawasan kebangsaan
32. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
33. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
34. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
35. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
36. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
37. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
38. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
39. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
40. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
41. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
42. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan
43. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
44. Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian
45. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS



47. Program Pencegahan Korupsi
48. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
49. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
50. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
51. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
52. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
53. Program Penataan Administrasi Kependudukan
54. Program Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
55. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
56. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
57. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan
58. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59. Program Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik
60. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
61. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
62. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
63. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
64. Program peningkatan disiplin aparatur
65. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
66. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
67. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
68. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
69. Program perencanaan pembangunan daerah
70. Program Pendidikan Kedinasan
71. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
72. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
73. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
74. Program Pengembangan Perumahan
75. rogram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
76. Program lingkungan sehat perumahan
77. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
78. Program Pengelolaan RTH

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kebijakan umum diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

1. Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;



2. Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

Setiap strategi mengandung berbagai program yang *inherent* dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata di tiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indikator dan leading indikator. Lagging indikator adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Penetapan program dalam setiap kebijakan umum disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu program juga harus meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD). Penetapan program harus mampu berperan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran strategis melalui strategi dan arah kebijakan..



BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 dalam proses berjalannya mengalami proses revisi pada tengah periode. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah adanya 1) Penyesuaian RPJMD dengan SOTK yang baru; 2) Adanya revisi atau usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Mojokerto; dan 3) RPJMD Kota Mojokerto dalam penyusunannya belum searah dengan arah pembangunan nasional dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menindak lanjuti hal tersebut, maka pada Bab VIII RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 disajikan dalam 3 tabel program yang meliputi **1) Program RPJMD tahun 2015-2016** yang dilampirkan (dengan asumsi program lama sebelum adanya SOTK baru, usulan revisi Kemenpan RB, dan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan nasional); **2) Program RPJMD tahun 2017** yang dilampirkan (dengan asumsi program sudah mulai menyesuaikan dengan SOTK baru, namun masih menggunakan *logical framework* lama); dan **3) Program RPJMD tahun 2018-2019** (dengan asumsi telah disesuaikan dengan arah pembangunan nasional, menindak lanjuti usulan revisi Kemenpan RB, dan telah disesuaikan dengan SOTK baru).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap



tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Mojokerto berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Berikut merupakan program prioritas I Kota Mojokerto tahun 2018-2019:

1. Program Pendidikan Non Formal	10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Pengembangan Seni dan Budaya	11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3. Program Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya	12. Program Kesehatan Ibu dan Anak
4. Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
5. Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda	14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pendidikan Menengah	15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Program Pendidikan Luar Biasa	16. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini	17. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
9. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	



- puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
18. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
 19. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 20. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 21. Program pengembangan budidaya perikanan
 22. Program penataan struktur industri
 23. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 24. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 26. Program Pengembangan Kemitraan
 27. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 28. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi
 29. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 30. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 31. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 32. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 33. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 34. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 35. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 36. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 37. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 38. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 39. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 40. Program Pengembangan Perumahan
 41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 42. Program Pengembangan Perumahan
 43. Program lingkungan sehat perumahan
 44. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 45. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 46. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 47. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 48. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



49. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	52. Program Pengelolaan RTH
50. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	53. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
51. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	54. Program peningkatan pengendalian polusi
	55. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Berikut merupakan Program Prioritas II Kota Mojokerto:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan	14. Program rehabilitasi hutan dan lahan
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	16. Program peningkatan produksi hasil peternakan
5. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	17. Program peningkatan produksi peternakan
6. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	18. Program Pengembangan Nilai Budaya
7. Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	20. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	21. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22. Program peningkatan peran serta kepemudaan
11. Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	23. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	24. Program pengembangan pemasaran pariwisata
	25. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah



26. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
27. Program kerjasama informasi dengan mas media
28. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
29. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
30. Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial
31. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
32. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
33. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
34. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
35. Program pengembangan wilayah transmigrasi
36. Program Transmigrasi lokal
37. Program transmigrasi regional
38. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
39. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
40. Program Keluarga Berencana
41. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
42. Program pelayanan kontrasepsi
43. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
44. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
45. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
46. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
47. Program pembangunan jalan dan jembatan
48. Program Pengendalian Banjir
49. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
50. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
51. Program Perencanaan Tata Ruang
52. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
53. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
54. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
55. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
56. Program peningkatan pelayanan angkutan
57. Program pendidikan politik masyarakat
58. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional
59. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
60. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
61. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
62. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
63. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



64. Program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan

Prioritas III merupakan program ditingkat SKPD yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III untuk memenuhi kebutuhan kinerja dari aparatur dalam meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Program prioritas III merupakan program-program yang bersifat rutinan seperti pemenuhan administrasi perkantoran.

1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
2. Program kerjasama informasi dengan mas media
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian
12. Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai
13. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
16. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
17. Program Pencegahan Korupsi
18. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
19. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
20. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
21. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
22. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
23. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
24. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan
25. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
26. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
27. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



28. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	33. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
29. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	34. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
30. Program Pendidikan Kedinasan	35. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	36. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
32. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	

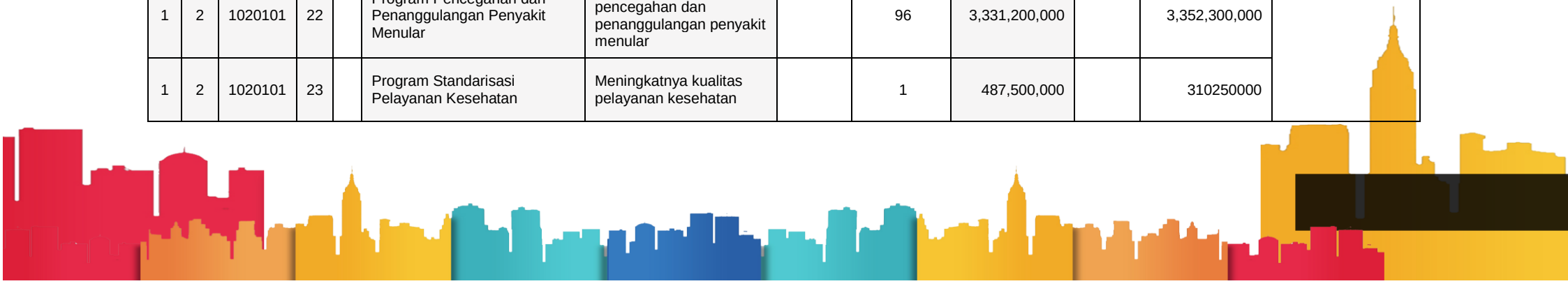
Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusanwajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel berikut:



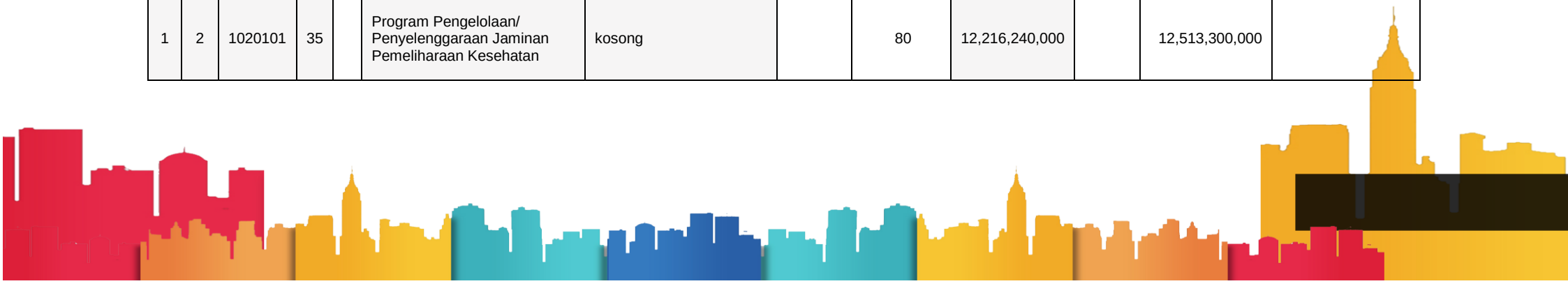
Tabel 8. 1 Program RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2015-2016

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Urusan Wajib												
Pendidikan												
1	1	1010101	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya sarana prasarana program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		100	30,757,207,699		40,192,347,000	Dinas Pendidikan
1	1	1010101	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang optimal		100	500,000,000		1,859,000,000	
1	1	1010101	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pendidikan anak usia dini		100	3,379,169,250		3,713,070,000	
1	1	1010101	17		Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas pendidikan Menengah		100	35,210,791,350		27,103,864,640	
1	1	1010101	18		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal		100	715,000,000		1,435,000,000	
1	1	1010101	19		Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya kualitas pendidikan luar biasa		100	115,000,000		250,000,000	
1	1	1010101	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya pelayanan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		100	1,807,000,000		1,859,000,000	
1	1	1010101	23		Program Pendidikan Tinggi	Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi		100	388,000,000		976,000,000	

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	1	1260101	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat		--	1,175,000,000		1,695,000,000	
Kesehatan												
1	2	1020101	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan		100	3,221,750,000			SKPD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
1	2	1020101	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat		100	1,376,719,000		4,660,000,000	
1	2	1020101	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kuantitas pengawasan obat dan makanan		75	81,900,000		88,000,000	
1	2	1020101	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		80	415,000,000		541,500,000	
1	2	1020101	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas gizi masyarakat		100	571,660,000		587,307,000	
1	2	1020101	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat		90	500,000,000		500,000,000	
1	2	1020101	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		96	3,331,200,000		3,352,300,000	
1	2	1020101	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		1	487,500,000		310250000	

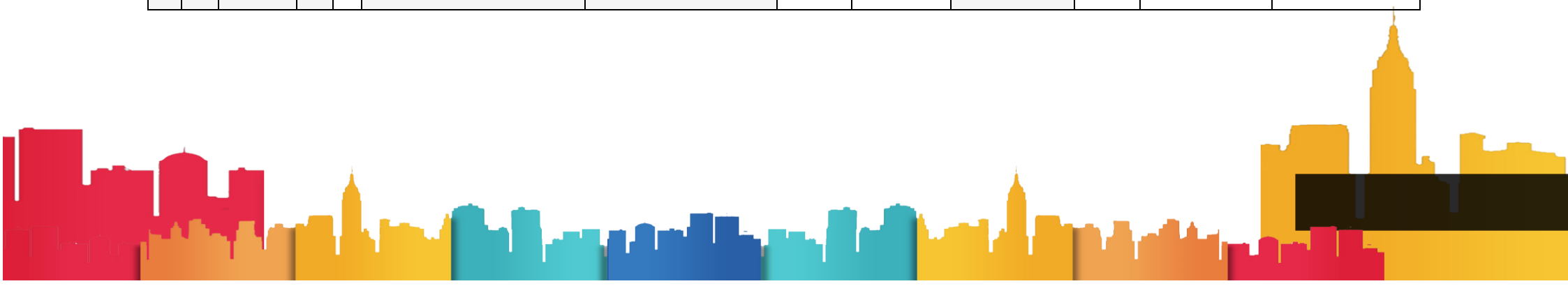


Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	2	1020101	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya kualitas peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya		5	1,432,000,000		4,354,200,000	
1	2	1020101	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan kesehatan		5	204,850,000			
1	2	1020101	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya kualitas Kemitraan pelayanan kesehatan lansia		76	157,800,000		158,000,000	
1	2	1020101	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		40	88,000,000		91,300,000	
1	2	1020101	33		Program Upaya Kesehatan Perorangan	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan		7	6,700,000,000		2,832,500,000	
1	2	1020101	34		Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas manajemen adan kebijakan pembangunan kesehatan		100	430,600,000		1,002,375,000	
1	2	1020101	35		Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	kosong		80	12,216,240,000		12,513,300,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
								(outcome)	2014	Target	Rp (JUTA)	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	2	1020101	36		Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	kosong		90	545,100,000		815,100,000	
1	2	1020201	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat		100			7,344,150,000	
1	2	1020201	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan		100	1,149,000,000		1,798,400,000	
1	2	1020201	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		70	570,820,000		350,000,000	
1	2	1020201	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya kualitas peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata		100	41,084,370,000		148,973,000	
1	2	1020201	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata		100	1,702,687,500			
1	2	1020201	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan kesehatan		100	265,000,000			

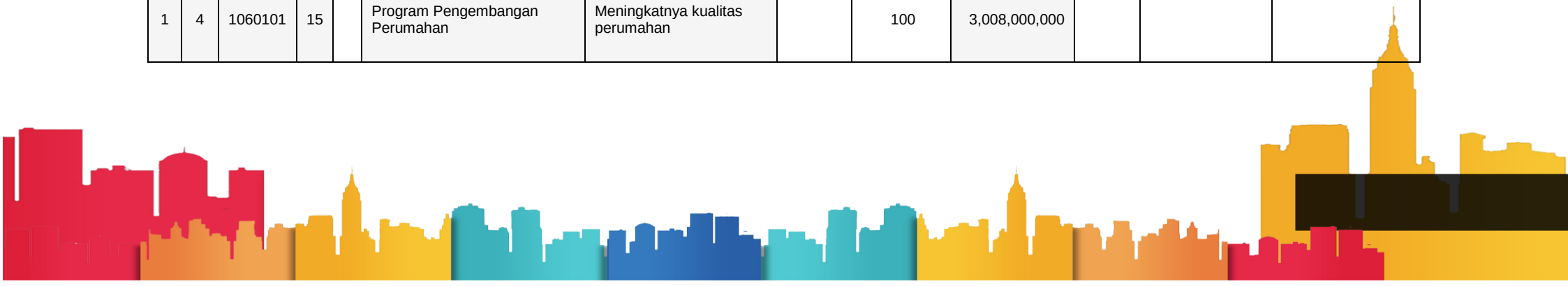
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	2	1020201	34		Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas manajemen adan kebijakan pembangunan kesehatan		100	400,000,000		110,000,000	
1	2	1020201	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk miskin		100	135,430,000		148,973,000	
1	2	1020201	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		100	44,700,000		59,247,000	
1	2	1020202	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan perbekalan kesehatan		100			3,536,500,000	
1	2	1020202	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSU BLUD)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		70			772,000,000	
1	2	1020202	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya kualitas peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata		100			24,420,204,164	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	2	1020202	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata		100			1,223,581,250	
1	2	1020202	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan kesehatan		100			350,000,000	
1	2	1020202	34		Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas manajemen adan kebijakan pembangunan kesehatan		100			240,000,000	
Pekerjaan Umum												
1	3	1030101	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		100	27,900,840,000		37,506,160,000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1030101	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya kualitas jalan dan jembatan		100	7,300,000,000		14,285,000,000	
1	3	1030101	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya kelancaran aliran air di saluran drainase/gorong-gorong		100	24,385,000,000		34,858,200,000	
1	3	1030101	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan		100	532,830,000		345,000,000	

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	3	1030101	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya		100	6,100,000,000		4,522,000,000	
1	3	1030101	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		100	2,376,565,650		3,451,425,000	
1	3	1030101	28		Program Pengendalian Banjir	Terkendalnya banjir /lamanya waktu genangan air		100	1,000,000,000		3,188,500,000	
1	3	1030101	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya kualitas wilayah strategis dan cepat tumbuh		1	16,392,496,000		20,735,700,000	
1	3	1030101	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan		100	40,944,000,000		31,395,500,000	
1	3	1030101	32		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi		100	100,000,000		150,000,000	
1	3	1060101	16		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		100			275,000,000	
1	3	1060101	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya kelancaran aliran air di saluran drainase/gorong-gorong		100			275,000,000	

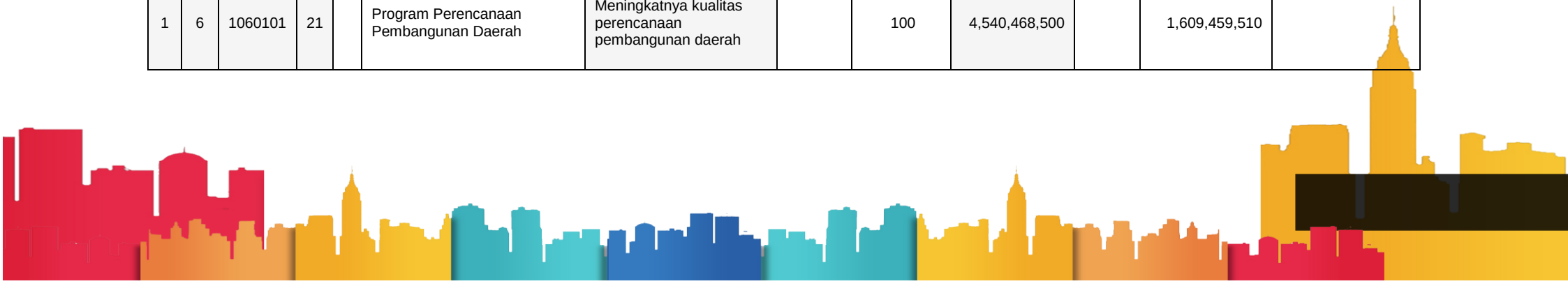
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
								(outcome)	2014	Target	Rp (JUTA)	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	3	1060101	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		100			150,000,000	
Perumahan												
1	4	1060101	15		Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas perumahan		100	3,008,000,000		100,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Perumahan
1	4	1060101	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas perumahan sehat		100	800,000,000		150,000,000	
1	4	1201001	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Meningkatnya kualitas komunitas perumahan		100	19,288,000		21,217,000	
1	4	1201101	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Meningkatnya kualitas komunitas perumahan		100	33,000,000		36,300,000	
1	4	1060101	15		Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas perumahan		100	3,008,000,000			



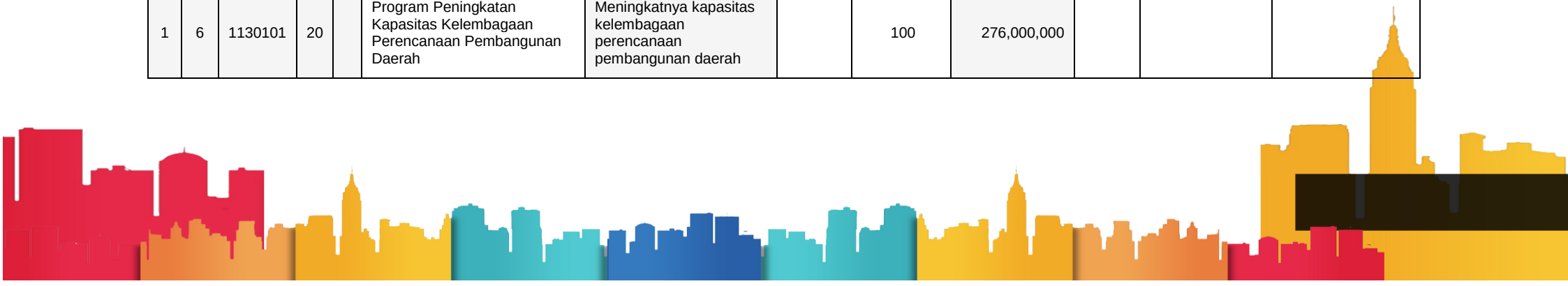
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	4	1060101	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas perumahan sehat		100	800,000,000			
1	4	1030101	19		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kualitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		100	180,000,000		1,006,500,000	
1	4	1060101	19		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kualitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		--			275,000,000	
1	4	1130101	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Meningkatnya kualitas pengelolaan areal pemakaman		20	276,000,000		100,000,000	
`1	4	1220101	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas perumahan sehat		--			150,000,000	
Penataan Ruang												
1	5	1060101	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang		100	3,008,000,000		825,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Tata Ruang
1	5	1030101	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	kosong		--	40,000,000		150,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	8	1060101	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1	400,000,000			
Perencanaan Pembangunan												
1	2	1060101	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat		100	983,000,000			SKPD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan Pembangunan
1	3	1060101	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		100	100,000,000			
1	6	1060101	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		100	250,000,000		250,000,000	
1	6	1060101	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		100	4,540,468,500		1,609,459,510	



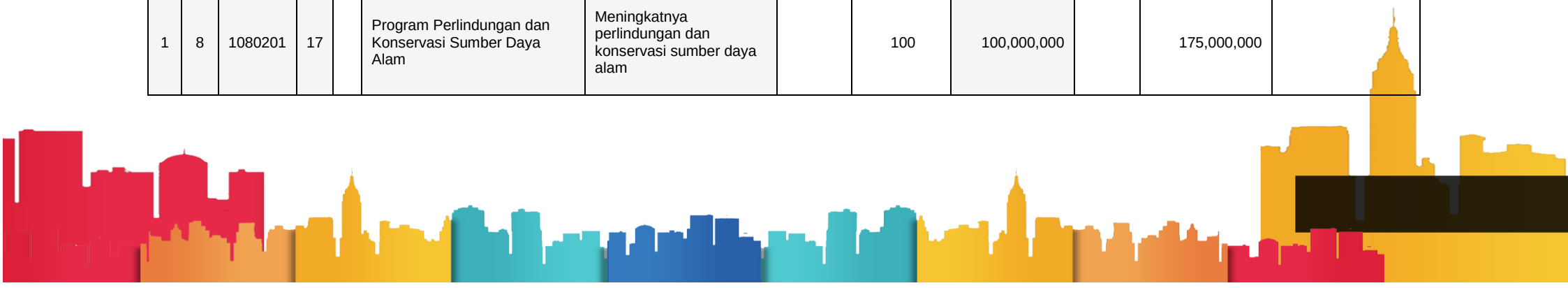
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	6	1060101	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi		100	715,000,000		565,000,000	
1	6	1060101	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kota Mojokerto		100	290,000,000		340,000,000	
1	6	1060101	16		Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kualitas kerjasama pembangunan		100	800,000,000		300,000,000	
1	6	1060101	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan		--	400,000,000			
1	6	1060101	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya		100	1,025,000,000		1,005,000,000	
1	##	1060101	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah		100	3,008,000,000		665,000,000	
1	6	1130101	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		100	276,000,000			



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	6	1200304	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi		100	75,000,000		70,000,000	
Perhubungan												
1	7	1070101	17		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan		85	2,949,682,400			SKPD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
1	7	1070101	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan		100	3,176,360,000		320,000,000	
1	7	1070101	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya tertib lalu lintas		90	1,071,000,000		1,055,000,000	
1	7	1070101	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj		90	1,018,903,000		1,475,000,000	
Lingkungan Hidup												
1	8	1080101	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan persampahan		100	23,055,000,000		5,009,600,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
								(outcome)	2014	Target	Rp (JUTA)	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	8	1020202	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan persampahan		100			240,000,000	
1	8	1080101	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		100	8,709,200,000		6,470,000,000	
1	8	1080101	25		Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Meningkatnya kualitas dan pengembangan lampu penerangan jalan		100	4,800,000,000		2,525,000,000	
1	8	1080201	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan persampahan		100	340,300,000		500,000,000	
1	8	1080201	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		100	1,499,669,000		1,612,084,000	
1	8	1080201	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		100	100,000,000		175,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	8	1080201	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		70	370,000,000		365,000,000	
1	8	1080201	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya tingkat polusi		70	124,000,000		148,000,000	
1	8	1080201	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		100	100,000,000		86,000,000	
1	8	1200304	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		100	1,720,000,000			
1	8	1200304	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		70			200,000,000	
Pertanahan												
1	9	1200302	17		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Menurunnya konflik konflik pertanahan		100	50,000,000		100,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Pertanahan



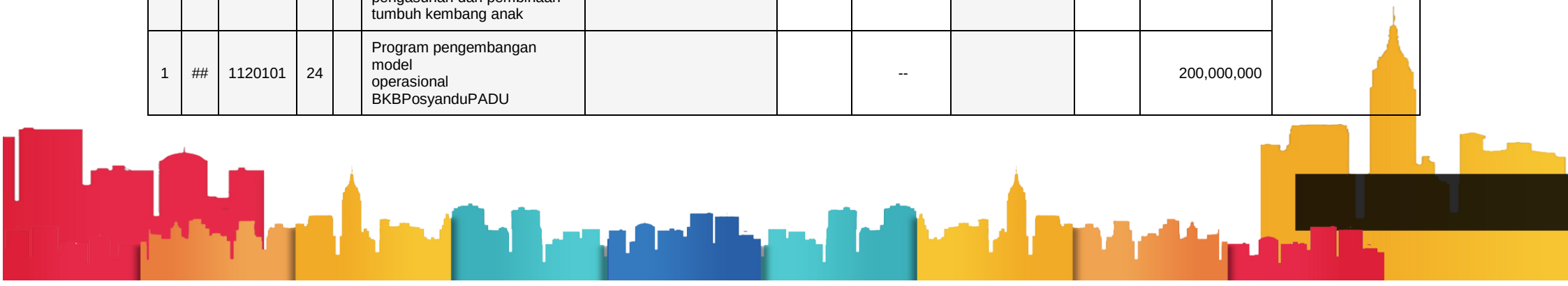
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	9	1201101	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya kualitas penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		100			20,000,000	
1	9	1201001	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya kualitas penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		100	14,920,000		16,500,000	
Kependudukan dan catatan sipil												
1	##	1100101	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas penataan administrasi kependudukan		100	1,980,000,000		2,317,593,680	SKPD Penanngung Jawab Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1	##	1201101	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas penataan administrasi kependudukan		100	97,276,000		41,745,000	
1	##	1201001	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas penataan administrasi kependudukan		100	91,450,000		70,000,000	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												



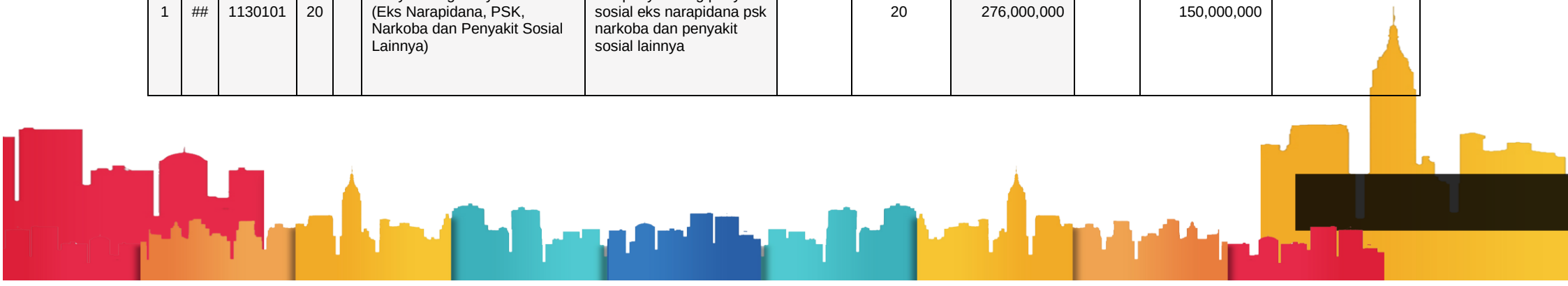
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1120101	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		100	1,340,216,700		300,000,000	
1	##	1120101	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak	Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan jender dan anak		100	309,530,000		240,000,000	
1	##	1120101	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kualitas peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		80	245,000,000		520,000,000	
1	##	1220101	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kualitas peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		80	100,000,000		300000000	
1	##	1201001	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kualitas peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		80	110,000,000		129000000	
1	##	1201101	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kualitas peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		80	55,000,000		145000000	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												



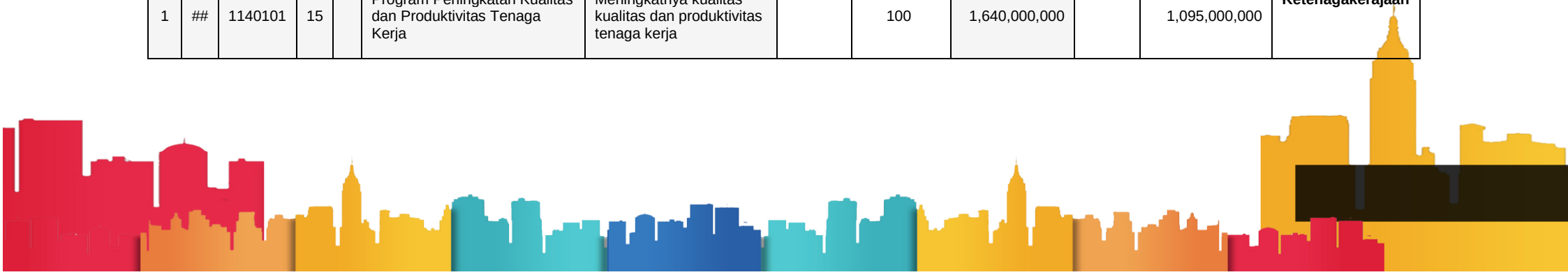
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1120101	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya kualitas pebinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri		80	245,000,000		200,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	##	1120101	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi		80	250,000,000		410,000,000	
1	##	1120101	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		75	65,000,000		350,000,000	
1	##	1120101	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi remaja		100	309,530,000		325,000,000	
1	##	1120101	15		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas keluarga berencana		100	1,340,216,700		1,529,500,000	
1	##	1120101	20		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			--			200,000,000	
1	##	1120101	24		Program pengembangan model operasional BKBPosyanduPADU			--			200,000,000	



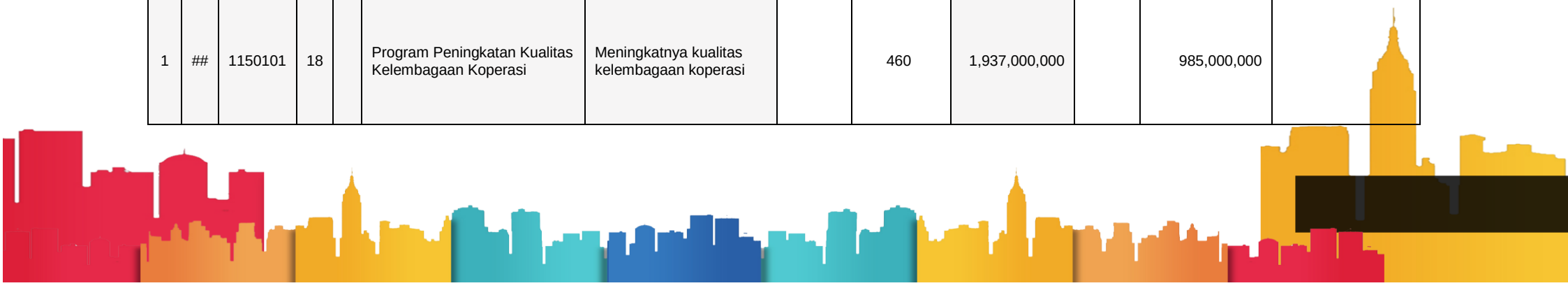
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1120101	23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya kesiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		80	112,000,000		175,000,000	
Sosial												
1	##	1130101	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya penanggulangan narkoba pms termasuk hiv aids		20	469,000,000		35,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Sosial
1	##	1130101	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		20	2,717,000,000		4,575,000,000	
1	##	1130101	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		20	996,000,000		1,740,000,000	
1	##	1130101	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan/ panti jompo		20	198,000,000		680,000,000	
1	##	1130101	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks narapidana psk narkoba dan penyakit sosial lainnya		20	276,000,000		150,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1130101	18		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Meningkatnya kualitas pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma		20	290,000,000		600,000,000	
1	##	1130101	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		20	469,000,000		360,000,000	
1	##	1220101	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		20	185,000,290			
1	##	1200309	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		20	193,000,000		202,500,000	
Ketenagakerjaan												
1	##	1140101	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja		100	5,675,000,000		8,665,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Ketenagakerajaan 
1	##	1140101	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas kualitas dan produktivitas tenaga kerja		100	1,640,000,000		1,095,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1140101	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		100	545,000,000		625,000,000	
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah												
1	##	1150101	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya kualitas penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif		250	466,000,000		310,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1	##	1150101	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah		377	1,055,000,000		335,000,000	
1	##	1150101	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah		189	1,243,000,000		750,000,000	
1	##	1150101	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi		460	1,937,000,000		985,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200304	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya kualitas penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif		100	433,500,000		160,000,000	
1	##	1200304	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah		100	1,720,000,000			
Penanaman Modal												
												SKPD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
1	##	1060101	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			--	200,000,000		55,000,000	
1	##	1220101	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		2			117,840,000	
1	##	1220101	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		2	1,089,739,000		276,500,000	
Kebudayaan												
1	##	1010101	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas pengembangan nilai budaya		94	3,379,169,250		427,500,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
1	##	1010101	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya		83	30,757,207,699		311,000,000	

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1010101	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya kualitas pengelolaankeragaman budaya		93	35,210,791,350		910,000,000	
1	##	1180101	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kualitas pengembangan nilai budaya		85			250,000,000	
1	##	1180101	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya		85			511,000,000	
1	##	1180101	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya kualitas pengelolaankeragaman budaya		85			795,000,000	
Kepemudaan dan Olahraga												
1	##	1010101	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda		100	3,379,169,250		130,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga 
1	##	1010101	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas peran serta kepemudaan		100	30,757,207,699		95,000,000	
1	##	1010101	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	kosong		--	35,210,791,350			



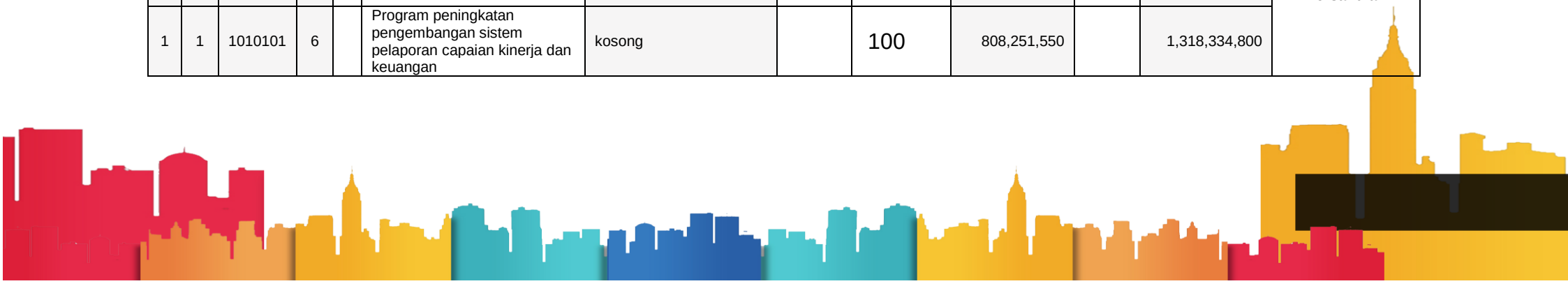
A stylized, colorful silhouette of a city skyline. The buildings are represented as flat shapes in various colors including red, orange, yellow, and blue. The skyline is set against a white background. On the right side, there is a black rectangular area that appears to be a redacted section of the document.

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1190101	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan		100	808,488,600		1,066,585,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	##	1190101	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100	460,559,000		500,746,900	
1	##	1190101	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat		100	345,000,000		291,367,000	
1	##	1190101	23		Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Terbinanya dan berkembangnya kewaspadaan nasional		1335	1,678,089,750		1,832,989,000	
1	##	1190201	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		12	363,000,000		400,000,000	
1	##	1190201	16		Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		12	484,013,000		577,250,000	
1	##	1190201	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		12	321,150,000		350,000,000	

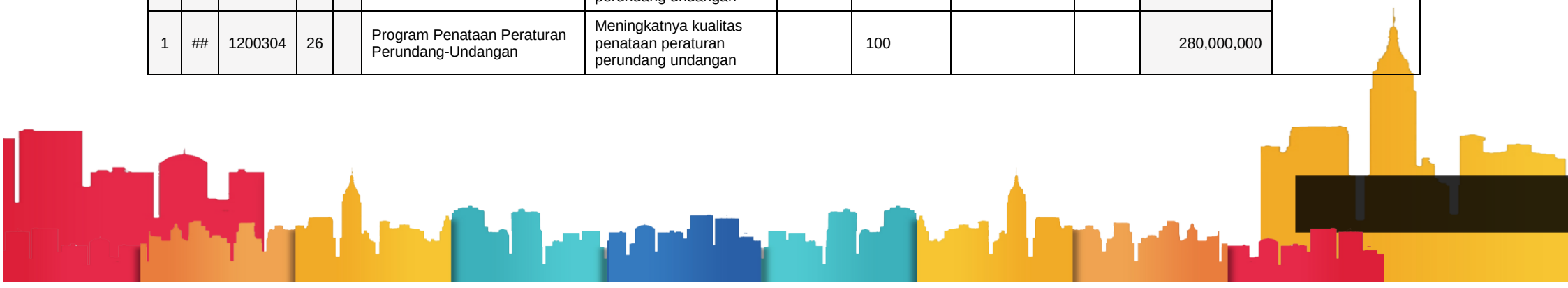


Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1190201	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		12	355,000,000		351,725,000	
1	##	1201101	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	97,276,000		110,776,000	
1	##	1201001	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	91,450,000		80,000,000	
1	##	1200309	29		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama		100	957,875,000		1,387,732,500	
1	##	1200309	30		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan		100	2,246,000,000		2,381,200,000	
1	##	1130101	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		20	325,000,000		200,000,000	
1	##	1130101	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan		100	127,000,000		180,000,000	

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200309	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100			455,000,000	
1	##	1200302	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan		--			70,000,000	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,dan Persandian												
1	1	1010101	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran		100	76,871,621,368		101,089,211,058	SKPD Penanggung Jawab Urusan Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kearsipan, dan Persandian
1	1	1010101	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kosong		100	27,054,445,933		33,918,546,748	
1	1	1010101	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100	2,027,635,307		3,980,747,500	
1	1	1010101	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100	1,092,830,000		2,503,049,500	
1	1	1010101	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	kosong		100	808,251,550		1,318,334,800	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
								(outcome)	2014	Target	Rp (JUTA)	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200302	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		100	122,000,000		125,000,000	
1	##	1200302	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	573,600,000		700,000,000	
1	##	1200302	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang undangan		80	66,000,000		113,000,000	
1	##	1200302	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya kualitas penataan daerah otonomi baru		100	400,000,000		1,070,000,000	
1	##	1200302	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kerjasama antar pemerintah daerah		100	1,172,000,000		1,250,000,000	
1	##	1200303	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang undangan		100	1,687,320,900		1,736,000,000	
1	##	1200304	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang undangan		100			280,000,000	



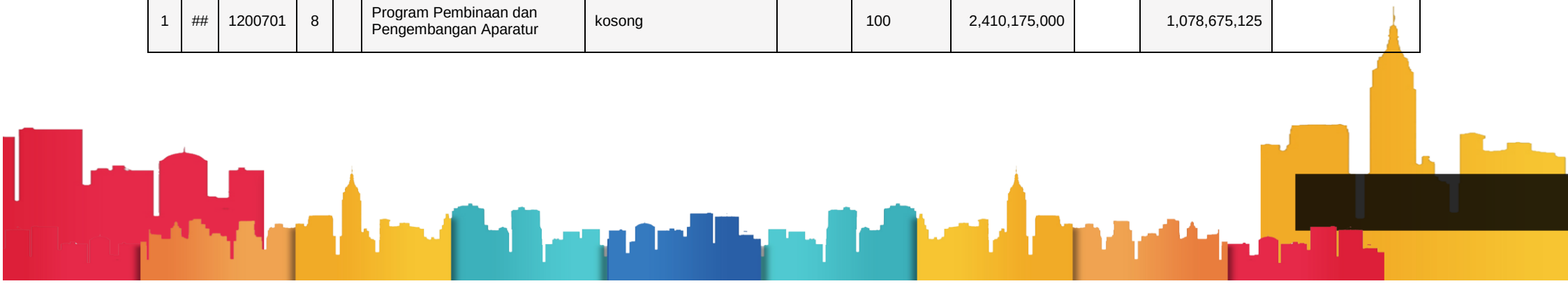
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200304	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	169,000,000		700,000,000	
1	##	1200305	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100	1,823,000,000		1,362,250,000	
1	##	1200305	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	121,000,000		120,400,000	
1	##	1200306	8		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kosong		100	814,000,000		675,000,000	
1	##	1200306	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		100	405,000,000			
1	##	1200306	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		100	265,000,000			



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200306	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100			100,000,000	
1	##	1200306	38		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Presentase SKPD yang diukur ketepatan fungsi dan ukurannya sesuai kondisi daerah					350,000,000	
1	##	1200306	39		Program Pencegahan Korupsi	Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)					555,000,000	
1	##	1200304	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		100	350,000,000			
1	##	1200309	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100	70,000,000		80,000,000	

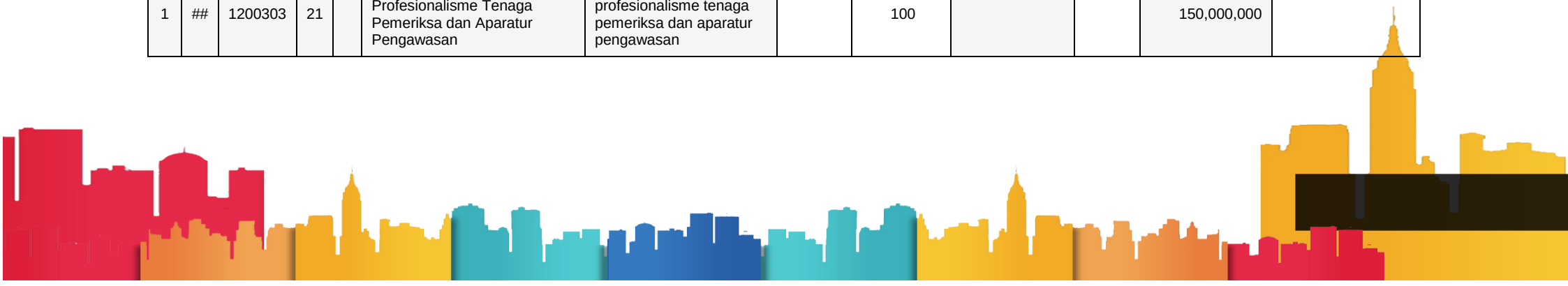


Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200401	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		100	14,264,117,975		10,395,283,600	
1	##	1200601	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kerjasama antar pemerintah daerah		100	161,000,000		200,000,000	
1	##	1200601	28		Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan		100	1,960,500,000		1,125,000,000	
1	##	1200701	4		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Terfasilitasi pindah/purna tugas PNS		100	298,215,000		884,634,800	
1	##	1200701	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100	3,534,775,000			
1	##	1200701	7		Program Pendidikan Kedinasan	Terselenggarakannya pendidikan kedinasan		100	3,127,766,100		1,361,124,300	
1	##	1200701	8		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kosong		100	2,410,175,000		1,078,675,125	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200801	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	1,230,000,000		1,238,367,075	
1	##	1200801	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		23	257,500,000		550,000,000	
1	##	1200801	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		100	76,000,000			
1	##	1070101	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		80	50,000,000		50,000,000	
1	##	1070101	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	kosong		80	100,000,000		110,000,000	
1	##	1200901	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang undangan		100	220,000,000		100,000,000	

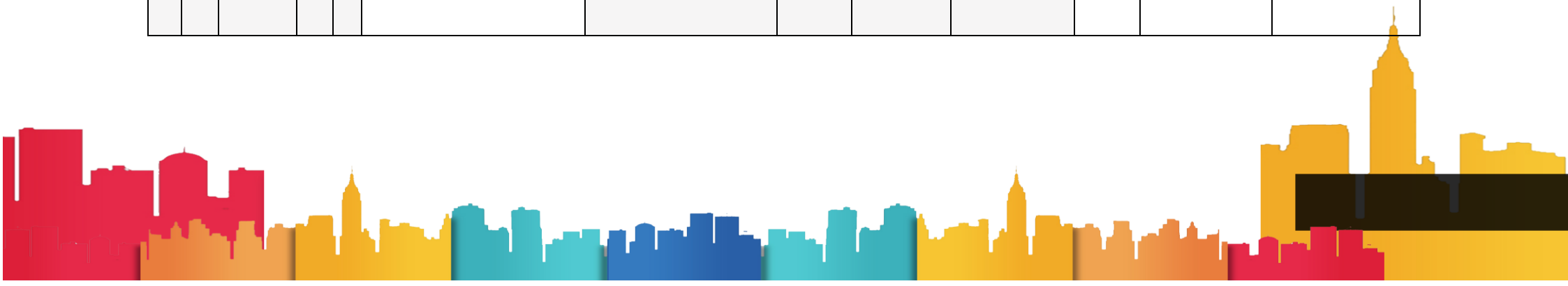
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200901	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		20	556,900,000		462,000,000	
1	##	1200401	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		--			247,000,000	
1	##	1200401	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	kosong		95			118,000,000	
1	##	1200901	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	281,810,000		315,587,000	
1	##	1200501	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100	450,000,000		895,181,400	
1	##	1200501	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang undangan		100	100,000,000			
1	##	1200303	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		100			150,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1200501	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100	6,981,000,000		8,174,640,650	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	##	1220101	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan		100	1,089,739,000		4,757,200,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	##	1220101	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		100	185,000,290		420,402,100	
1	##	1220101	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100	295,000,000		1,000,000,000	
1	##	1201101	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan		100	97,276,000		39,776,000	
1	##	1201001	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan		100	91,450,000		8,800,000	
Kearsipan												



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Komunikasi dan Informatika												
1	##	1200302	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan mass media		100	100,000,000		75,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informatika
1	##	1200308	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa		100	26,000,000			
1	##	1200308	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	kosong		100	200,000,000		300,000,000	
1	##	1200308	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan mass media		100	5,150,000,000		3,950,000,000	



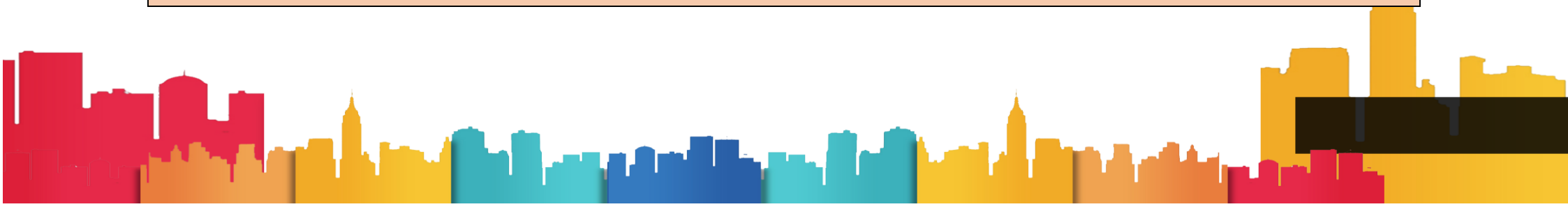
Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1070101	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan mass media		90	1,445,150,000		1,530,000,000	
1	##	1070101	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa		80	3,176,360,000		2,460,000,000	
				9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat			250,000,000			
1	##	1020201	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		100	570,820,000		1,200,000,000	
1	6	2010101	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya kualitas data informasi		100	41,701,602,700		1,688,600,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	##	1070101	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	kosong		50	2,949,682,400		250,000,000	
1	##	1200303	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa		--			250,000,000	
1	##	1200303	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa		--			40,000,000	
Urusan Pilihan												
Pertanian												
2	1	2010101	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh Lapangan pertanian /perkebunan		90	50,000,000		200,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
2	1	2010101	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		90	110,000,000		280,000,000	
2	1	2010101	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani		90	140,000,000		360,000,000	



Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2	1	2010101	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan (Pertanian/ perkebunan)		90	240,000,000		490,000,000	
1	##	1200304	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	kosong		100	1,720,000,000		584,445,950	
2	1	2010101	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan		90	30,000,000		30,000,000	
2	1	2010101	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	kosong		90	25,000,000		30,000,000	
2	1	2010101	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan		90	55,000,000		65,000,000	
2	1	2010101	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kualitas produksi pertanian perkebunan		90	105,000,000			
2	1	2010101	24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	kosong		90	25,000,000		25,000,000	
Kehutanan												





Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2	5	2010101	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan		90	1,545,000,000		2,260,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan
Perdagangan												
2	6	1150101	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan		100	0		865,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
2	6	1150101	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri		100	0		365,000,000	
2	6	1150101	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			--			30,000,000	
2	6	1150101	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlindunginya konsumen dan pengamanan perdagangan		100	0		165,000,000	
Perindustrian												
2	7	1150101	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Berkembangnya sentra- sentra industri potensial		60	0		852,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
2	7	1150101	18		Program penataan struktur industri	kosong		60	0		100,000,000	

Kode Rekening					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Peenanggung Jawab
						Kinerja Program		2015		2016		
						(outcome)		2014	Target	Rp (JUTA)	Target	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2	7	1150101	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kemampuan teknologi industri		50	0		570,000,000	
2	7	1150101	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah		60	0		735,000,000	
Ketransmigrasian												
1	##	1140101	20		Program Transmigrasi Regional	kosong		67.880.000	100,000,000		30,000,000	SKPD Penanggung Jawab Urusan Ketransmigrasian



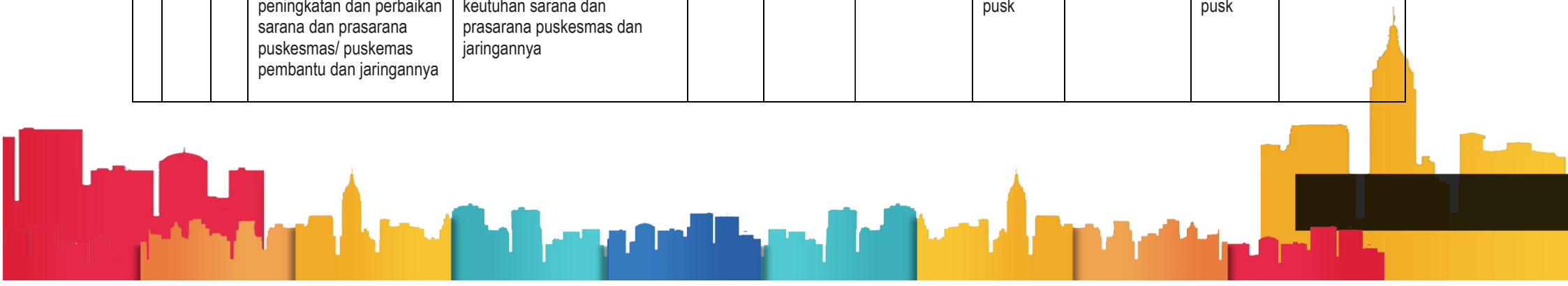
Tabel 8. 2 Program RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2017-2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				(Tahun 0)	2017		2018		2019	
				2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
0			URUSAN RUTIN							
0	0		Administrasi Umum							
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	0%	191,850,340	0%	211,035,374	0%	232,138,911
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	0%	266,200,000	0%	292,820,000	0%	322,102,000
0	0	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur	0%	12,000,000	40%	14,000,000	40%	16,000,000
0	0	4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Purna/Pindah Tugas PNS yang Terfasilitasi	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang dikembangkan Kapasitasnya	0%	40,000,000	0%	0	4%	80,000,000
0	0	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD	0%	0	0%	0	0%	0
0	0	7	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang Telah mengikuti Pendidikan Kedinasan	1%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang Dibina dan Dikembangkan	1%	0%	1,258,280,160	0%	1,323,343,376	0%	1,421,802,289
0	0	9	Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rata-rata skor kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	0%	100%	529,000,000	100%	529,000,000	0%	0
0	0	10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	101		PENDIDIKAN								
1	101	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	20%	30%	325,000,000	35%	350,000,000	40%	400,000,000
1	101	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase APM peserta wajib belajar 9 tahun	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	101	17	Program Pendidikan Menengah	Persentase APM tingkat SMP	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	101	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase terwujudnya pendidikan non formal yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan	100%	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000
1	101	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase APK pendidikan luar biasa	0%	0%	100,000,000	0%	100,000,000	0%	100,000,000
1	101	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standart kuailifikasi	0%	0%	180,000,000	0%	185,000,000	0%	190,000,000
1	101	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pelayanan dan meningkatnya masyarakat yg menunjungi perpustakaan	0%	4%	420,000,000	4%	430,000,000	4%	440,000,000

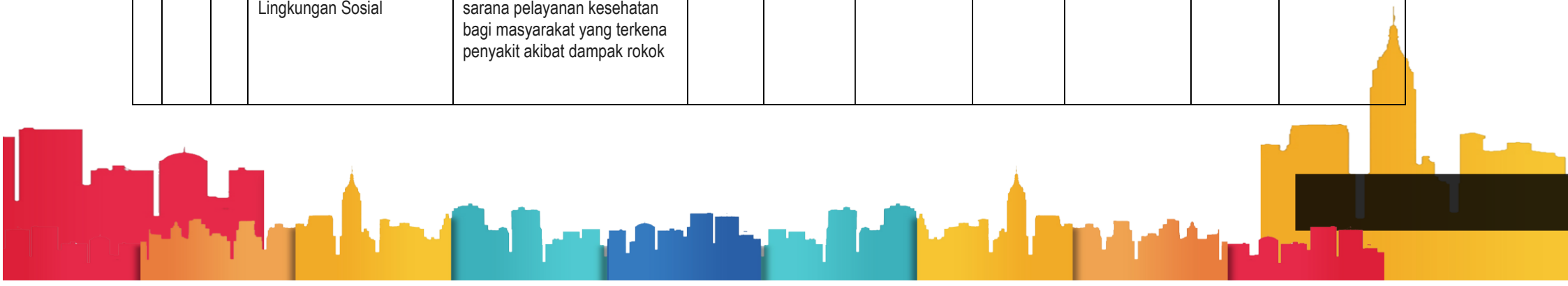
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menggunakan informasi manajemen pendidikan	0%	120%	295,000,000	120%	310,000,000	120%	310,000,000
1	101	23	Program Pendidikan Tinggi	Persentase APK Pendidikan Tinggi	0%	30%	2,147,483,647	0%	0	0%	0
1	101	26	Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	Tercapainya prestasi guru dan siswa di bidang seni	0	0	240,000,000	0	250,000,000	0	275,000,000
				Tercapainya kreatifitas guru dan siswa	0	0	125,000,000	0	135,000,000	0	150,000,000
				Terpilainya guru dan siswa berprestasi seni sebagai duta daerah	5 ?	5 ?	590,000,000	5 ?	605,000,000	5 ?	620,000,000
1	101	28	Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda	Tercapainya peningkatan peran serta pemuda	0	0	110,000,000	0	120,000,000	0	130,000,000
				Tercapainya peringatan hardiknas dan peningkatan SDM pelatih upacara	370	80	110,000,000	80	110,000,000	80	110,000,000
				Tercapainya pencegahan dan penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba	0	0	65,000,000	0	75,000,000	0	85,000,000
1	102		KESEHATAN								
1	102	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) puskesmas pada 20tem obat esensial	0%	#####	1,370,930,000	86% (20tem obat esensial)	4,270,000,000	90% (20tem obat esensial)	4,665,000,000
1	102	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dan jaringanya sesuai standar SPM	0%	0%	1,179,200,000	100%	1,331,609,450	100%	1,546,353,500
1	102	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan	0%	0%	99,999,999	80%	114,675,000	80%	126.112.500.

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	102	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)	1%	1%	495,950,000	95%	4,152,055,500	100%	4,558,336,600
1	102	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan gizi buruk mendapat perawatan	0%	0%	99,999,999	100%	1,332,332,000	100%	1,452,219,550
1	102	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase KK yang akses ODF (Open Defecation Free)	0%	0%	99,999,999	97%	750,000,000	98%	825,000,000
1	102	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	1%	1%	106,480,000	85%	1,691,440,950	90%	1,843,864,800
				Presentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar				75%		80%	
1	102	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar Akreditasi Paripurna berkelanjutan	0%	5%	0	5 puskesmas (MADYA/PARIPURNA)	507,114,700	5 PUSKESMAS (MADYA/PARIPURNA)	665,526,200
1	102	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	0%	#####	398,168,650	437,985,515 %	437,985,515	481,784,066 %	481,784,066
1	102	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah dokumen perencanaan keutuhan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	0%	0%	99,999,999	5 dok puskesmas	7,668,000,000	5 dok puskesmas	2,109,740,000



1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	102	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata tersedia	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	102	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana prasarana RS	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	102	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialisist dan dokter umum	1%	1%	247,800,000	5 puskesmas	513,390,500	5 puskesmas	574,729,500
1	102	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak	0%	0%	0	0%	0	0%	0
				Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	102	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan kunjungan lansia baru di posyandu lansia	1%	1%	190,900,000	79%	210,000,000	80%	231,100,000
				Cakupan kunjungan Pralansia baru di posyandu lansia				79%		80%	
1	102	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Presentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Laik Sehat	1%	1%	66,500,000	60%	117,100,000	65%	128,800,000
1	102	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	102	33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah UPT yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	1%	1%	2,147,483,647	I UPT	2,322,102,500	I UPT	2,554,352,750
						1%	1,533,300,000				
1	102	34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebijakan Bidang Kesehatan	0%	0%	99,999,999	100%	546,400,000	100%	594,400,000
				Presentase jaringan SIK yang berfungsi on line	0%	0%	0	100%	0	100%	
1	102	35	Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (Total Coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)	0%	0%	99,999,999	80.000iwa	29,441,996,500	80.000iwa	30,818,513,600
1	102	36	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan ibu hamil (K4))	0%	0%	99,999,999	98%	1,015,031,600	98%	1,116,534,760
				Cakupan kunjungan bayi	0%	0%	0	97%		97%	
1	102	37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehaan kepada masyarakat	0%	0%	99,999,999	5 puskesmas	9,790,950,000	6 puskesmas	10,944,045,000
1	102	38	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok	0	0	0	0aket	3,850,000,000	0aket	4,235,000,000

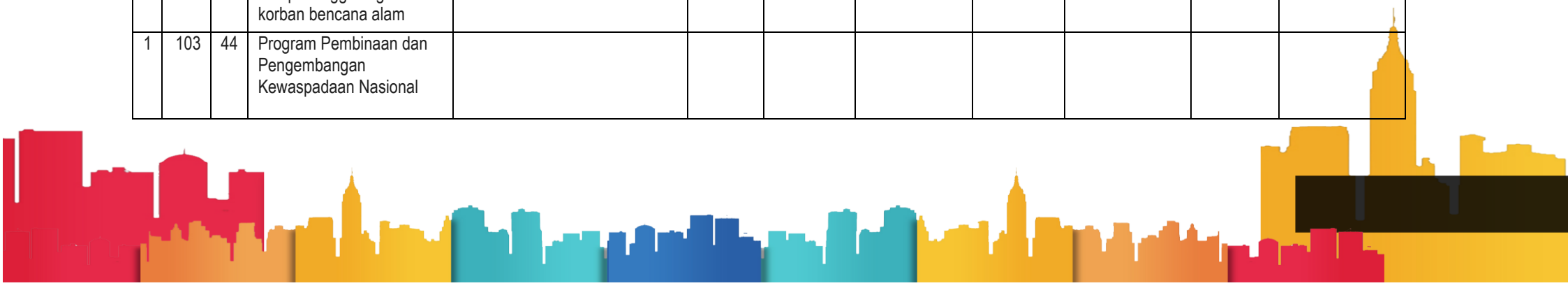


1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103		PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
1	103	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase rencana pembangunan jalan yang diimplementasikan	28%	7%	2,147,483,647	7%	2,147,483,647	7%	2,147,483,647
				Prosentase jalan kota dalam kondisi mantab (>40m/jam)	0%	1%	2,147,483,647	1%	2,147,483,647	1%	2,147,483,647
1	103	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase rencana pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Presentase Rasio area bebas genangan air (tidak lebih dari 0am)	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	103	17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	103	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang direhab/dipelihara	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Persentase jembatan yang direhab/dipelihara	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	103	19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	103	20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan yang dilakukan inspeksi kondisi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Persentase Jembatan yang dilakukan inspeksi	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	103	21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Rata-rata waktu respon darurat jalan dan jembatan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999



1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	-	0	0?	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	103	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi baik	1%	1%	130,000,000	1%	140,000,000	1%	150,000,000
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	0%	1%	30,000,000	1%	30,000,000	1%	50,000,000
1	103	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase luas area sawah yang terlayani jaringan irigasi yang sudah ada	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	103	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	103	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	103	28	Program Pengendalian Banjir	Presentase area bebas genangan air (tidak lebih dari 0am)	90%	90%	1,350,000,000	90%	1,250,000,000	90%	1,125,000,000
1	103	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun di kawasan strategis	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Jumlah fasilitas publik strategis yang dibangun berfungsi baik	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	103	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Prosentase jalan dan saluran lingkungan yang baik	0%	0%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647
1	103	31	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pelaksana yang Mampu dalam Hal Manajemen JasaKonstruksi	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
1	103	32	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103	33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	103	34	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan ruang yang termanfaatkan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	103	35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	103	36	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
1	103	37	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal								
1	103	38	Program pengembangan wawasan kebangsaan								
1	103	39	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
1	103	40	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								
1	103	41	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								
1	103	42	Program pendidikan politik masyarakat								
1	103	43	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								
1	103	44	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional								



1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	104		PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
1	104	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rencana pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan	0%	10%	1,500,000,000	10%	1,500,000,000	10%	1,500,000,000
1	104	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Kumuh	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	104	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rencana penyehatan lingkungan yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	104	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Lancarnya kegiatan organisasi Dharma wanita	0	0	0	0	0	0	0
1	104	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	104	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	1%	4%	29,000,000	4%	32,000,000	4%	36,000,000
1	104	20	Program pengelolaan areal pemakaman	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	104	26	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Prosesntase Ketersediaan Data Perumahan	100	0	0	0	0	0	0
1	106		SOSIAL								
1	106	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	0%	0%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647	0%	2,147,483,647

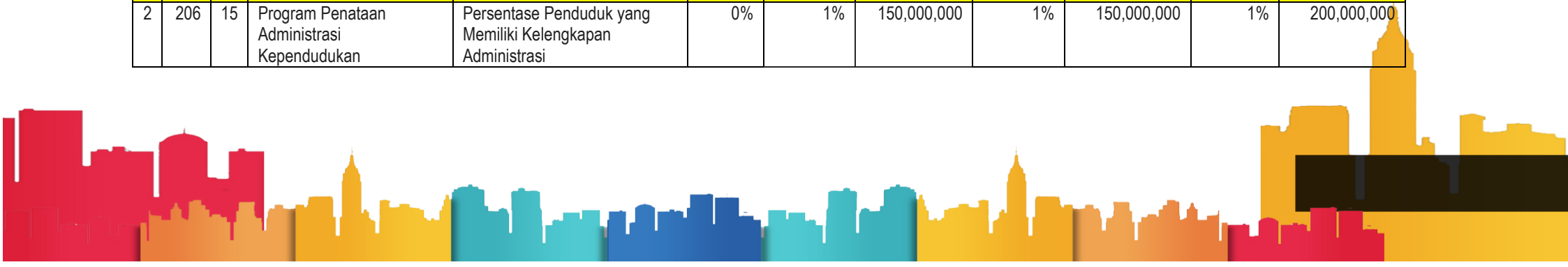
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	1%	1%	2,147,483,647	1%	2,147,483,647	1%	2,147,483,647
				Jumlah Fakir miskin yang dibantu sarana prasarana	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	106	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	0%	1%	100,000,000	1%	100,000,000	1%	100,000,000
				Persentase Tersedianya KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	0%	0%	65,000,000	0%	70,000,000	0%	75,000,000
1	106	17	Program pembinaan anak terlantar	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
1	106	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Prosentase Terlaksananya bantuan sarpras bagi disabilitas, monev bantuan, peringatan hari disabilitas dan penyelenggaraan pameran hasil karya disabilitas	0%	0%	0	0%	0	0%	0
1	106	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Prosentase Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAY dan Rumah Jompo	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	106	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	106	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	5%	20%	40,000,000	25%	45,000,000	30%	50,000,000

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prosentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	60%	60%	130,000,000	60%	130,000,000	60%	130,000,000
				Prosentase Meningkatnya pelayanan administrasi pemberian hibah dan bantuan kesejahteraan	0%	1%	180,000,000	1%	180,000,000	1%	200,000,000
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0%	1%	75,000,000	1%	75,000,000	1%	80,000,000
1	106	22	Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial	Prosentase meningkatnya rasa solidaritas masyarakat dalam pelayanan masalah sosial	0%	60%	250,000,000	70%	300,000,000	80%	350,000,000
1	105		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	105	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah	16%	16%	36,160,000	16%	36,160,000	16%	36,160,000
1	105	16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	105	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Peningkatan Peserta yang Mendapatkan / Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	105	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Terjalinnya Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan ORMAS/LSM	0%	1%	161,913,000	1%	165,700,000	1%	175,200,000
1	105	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	105	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Kasus Pekat yang Ditangani	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	105	21	Program pendidikan politik masyarakat	Presentase Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	0%	375%	404,844,500	375%	445,328,900	375%	489,861,800
1	105	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Penanganan Bencana	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
1	105	23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Presentase Meningkatnya Peserta Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	0%	74%	468,328,850	74%	515,161,735	74%	566,677,900
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	209		PERHUBUNGAN								
2	209	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase hasil perencanaan lalu lintas yang menjadi bahan acuan dalam mengambil kebijakan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	209	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan sarana dan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	1%	0%	441,000,000	0%	463,050,000	0%	486,202,500
2	209	17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase anak sekolah yang setuju dan menggunakan angkutan gratis	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	209	18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

2	209	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase kebutuhan perlengkapan jalan yang terpenuhi	0%	24%	358,312,500	24%	376,228,125	24%	395,039,531
2	209	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	205		LINGKUNGAN HIDUP								
2	205	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah yang dikelola	0%	60%	130,000,000	63%	3,718,550,000	64%	4,090,405,000
2	205	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup	0%	60%	1,702,000,000	20%	1,863,144,000	10%	1,964,458,400
2	205	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Sumber daya alam yang berkualitas	0%	60%	130,000,000	80%	130,000,000	100%	130,000,000
2	205	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	205	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran lingkungan hidup	0%	60%	385,000,000	25%	657,250,000	20%	722,975,000
2	205	20	Program peningkatan pengendalian polusi	Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup	0%	8%	100,000,000	44%	230,000,000	42%	275,000,000
2	205	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	205	22	Program pengendalian kebakaran hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

2	205	23	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	205	24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Upaya Peningkatan Ketercukupan RTH Publik	0%	60%	125,000,000	7.07%	6,685,250,000	7.36%	7.53.775.000
2	205	25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	204		PERTANAHAN								
2	204	15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	204	16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase meningkatnya kualitas penatausahaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (IKM)	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	204	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Prosentase meningkatnya tertib administrasi dan cakupan penyelesaian kasus tanah milik Pemerintah Kota Mojokerto	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	204	18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	206		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	206	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang Memiliki Kelengkapan Administrasi	0%	1%	150,000,000	1%	150,000,000	1%	200,000,000



2	202		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	202	15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1%	1%	90,000,000	1%	95,000,000	1%	102,000,000
2	202	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	5%	5%	40,500,000	5%	45,000,000	5%	50,000,000
2	202	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya pelatihan TOT utk pendampingan korban KDRT	0	0	75,000,000	0	80,000,000	0	87,000,000
2	202	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	0%	20%	266,200,000	20%	292,800,000	20%	322,000,000
2	202	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tersedianya pelayanan terpadu korban KDRT dan perlindungan anak	5 ?	5 ?	40,500,000	5 ?	45,000,000	5 ?	50,000,000
2	208		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	208	15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Pelayanan KB pada Masyarakat	0%	0%	120,000,000	0%	125,000,000	0%	130,000,000
				jumlah KIE pada masyarakat pentingnya ber KB	0%	0%	72,000,000	0%	80,000,000	0%	87,000,000
				Jumlah Yoman bagi akseptor KB yang gagal	0%	0%	35,000,000	0%	40,000,000	0%	45,000,000
				jumlah kegiatan yang mendukung program KB MKJP maupun non MKJP	0%	0%	1,269,750,000	0%	1,361,100,000	0%	1,463,500,000

				Prosentase rasio profil dan grand desain kependudukan	0%	0%	250,000,000	0%	275,000,000	0%	290,000,000
				Jumlah saran Mobilitas Tim keluarga Berencana keliling	0%	0%	0	0%	0	0%	0
2	208	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)	0%	9%	0	8%	0	8%	0
				Jumlah sarana media luar ruang	0%	0%	169,000,000	0%	182,000,000	0%	195,000,000
2	208	17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Refreshing Medis Teknis bagi Provider	0%	0%	325	0%	350	0%	375
				Jumlah alat Kontasepsi dan obat side effect bagi calon peserta KB	0%	0%	45,000,000	0%	52,500,000	0%	60,000,000
				Jumlah pelayanan MOP dan MOW meningkat	0%	0%	145,000,000	0%	155,000,000	0%	165,000,000
2	208	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah masyarakat peduli KB	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	208	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	208	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Wadah Konseling KRR terpenuhi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Jumlah kegiatan PIK KRR	0%	0%	0	0%	0	0%	0
2	208	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	208	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita di Lingkungan masyarakat tentang tumbuh kembang anak	0%	0%	227,500,000	0%	245,000,000	0%	262,500,000

2	208	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan posyandu dan PADU (Holistik Integratif)	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	208	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan posyandu dan PADU (Holistik Integratif)	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	201		TENAGA KERJA								
2	201	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	201	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	0%	1%	175,000,000	1%	175,000,000	1%	175,000,000
2	201	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besarnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif.	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	211		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2	211	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Persentase UMKM yang mandiri dan berdaya saing	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	211	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	211	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase meningkatnya sistem sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	0%	100%	0	100%	0	100%	0

				Prosentase meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0%	13%	0	13%	0	13%	0
2	211	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Terwujudnya Profesionalisme dan Pertumbuhan Koperasi yang Didukung Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Serta Partisipasi Anggota yang Berkualitas	1.00%	200%	475,000,000	200%	475,000,000	200%	475,000,000
2	212		PENANAMAN MODAL								
2	212	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	0%	5%	135,000,000	5%	150,000,000	5%	175,000,000
2	212	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase ketersediaan program dan kegiatan penanaman modal	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	212	17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Persentase Kesiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	212	34	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	Cakupan Peningkatan Pelayanan Investasi	0%	0%	0	0%	0	0%	0
2	212	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	212	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi								
2	212	26	Program Penataan Peraturan Perundang-								

			undangan								
2	216		KEBUDAYAAN								
2	216	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase meningkatnya kualitas pengembangan nilai budaya	2%	2%	160,000,000	2%	165,000,000	2%	170,000,000
2	216	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya	100%	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000
2	216	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Prosentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya	4%	4%	230,000,000	4%	250,000,000	4%	275,000,000
2	216	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	213		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2	213	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	213	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase meningkatnya kualitas peningkatan peran serta kepemudaan	1%	1%	110,000,000	1%	120,000,000	1%	130,000,000
2	213	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	213	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	213	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

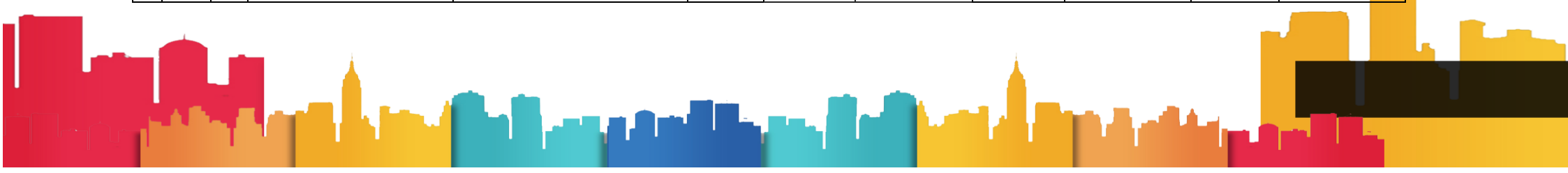
2	213	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prosentase meningkatnya kualitas pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	213	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Prosentase Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olah raga	0%	0%	0	0%	0	0%	0
2	207		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
2	207	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat perdesaan	10%	10%	0	10%	0	10%	0
				Persentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi	0%	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	0%	0
2	207	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	0%	25%	135,000,000	25%	150,000,000	25%	150,000,000
2	207	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	0%	9%	115,000,000	9%	125,000,000	9%	150,000,000
2	207	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	207	19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase keterlibatan perempuan di pedesaan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	214		STATISTIK								



2	214	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	0%	0%	1,210,000	0%	1,331,000	0%	1,464,100
				Persentase meningkatnya data/informasi/statistik daerah dibidang ketahanan pangan	0%	1%	12,500,000	1%	15,000,000	1%	17,500,000
2	218		KEARSIPAN								
2	218	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintahan Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	218	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Meningkatnya Dokumen dan Arsip Daerah yang Diselamatkan dan Dilestarikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
2	218	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Dalam Kondisi Baik	0%	212%	125,000,000	212%	125,000,000	212%	125,000,000
2	218	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi berbasis teknologi informasi di lembaga pemerintah	0%	0%	10,000,000	0%	10,000,000	0%	10,000,000
2	210		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	210	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Meningkatnya income sektor komunikasi, informasi, dan media massa	0%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	45,000,000
2	210	16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999

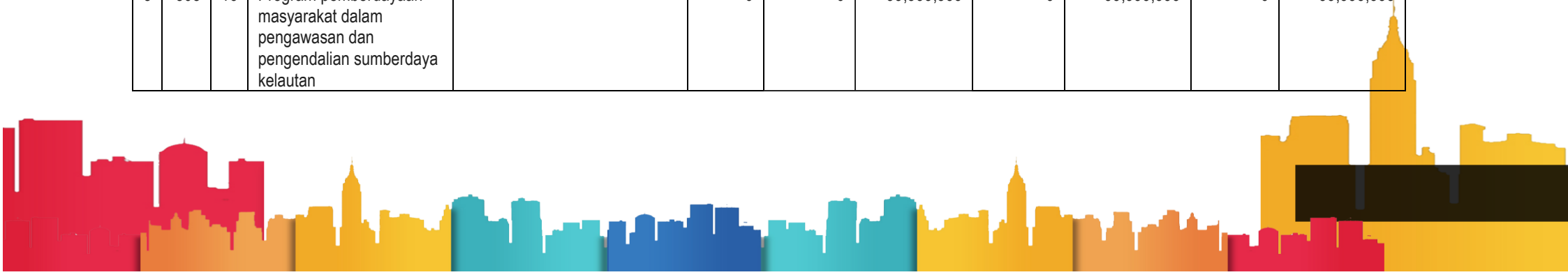
2	210	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase PNS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
2	210	18	Program kerjasama informasi dengan mas media	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
2	217		PERPUSTAKAAN								
2	217	21	Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase meningkatnya cakupan pelayanan dan meningkatnya masyarakat yg menunjungi perpustakaan	0%	1%	1	1%	1	1%	1
2	203		PANGAN								
2	203	15	Program Pengembangan dan Pengendalian Ketahanan Pangan	Adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0
2	203	16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)								
2	203	17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur								
2	203	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan								
2	203	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	0%	0%	0	0%	0	0%	0
2	203	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan								
2	203	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak								

2	203	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan								
2	203	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan								
2	203	24	Program peningkatan produksi peternakan								
2	215		PERSANDIAN								
3			URUSAN PILIHAN								
3	305		PERTANIAN								
3	305	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Usaha Penangkar Benih padi unggul	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
				Prosentase Kelompok Tani dari kelas pemula ke lanjut	0%	0%	0	0%	0	0%	0
				Prosentase Kelompok Tani dari kelas lanjut ke madya	0%	0%	0	0%	0	0%	0
3	305	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Adanya pengawasan dan pemantauan mutu dan keamanan pangan di tingkat penjual jajanan yang beredar di masyarakat	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	305	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Hasil produksi pertanian/perkebunan yang di pasarkan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	305	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	305	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Prosentase Produksi padi	2%	2%	100,000,000	2%	100,000,000	2%	100,000,000
				Prosentase Produktivitas padi	2%	2%	150,000,000	2%	150,000,000	2%	150,000,000



3	305	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	305	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	305	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Usaha Peternakan	2%	2%	0	0%	0	2%	75,000,000
3	305	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	305	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	302		KEHUTANAN								
3	302	15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	302	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Prosentase produksi padi	2%	2%	100,000,000	2%	100,000,000	2%	100,000,000
3	302	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	302	18	Program pemanfaatan kawasan hutan industri	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	302	19	Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	302	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	301		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								

3	301	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	301	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	301	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketenaga listrikan	0	0	64,320,539	0	67,536,566	0	70,913,394
3	301	18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Adanya laporan terhadap penggunaan listrik dan air, BBM bersubsidi dan distribusi gas LPG	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	304		PARIWISATA								
3	304	15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0%	9%	834,900,000	9%	918,390,000	9%	1,010,229,000
3	304	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	304	17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kemitraan Baru	0%	500%	102,850,000	500%	113,135,000	500%	124,448,500
3	303		KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	303	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999



3	303	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase Hasil Produksi sektor perikanan budidaya	2%	2%	130,000,000	2%	140,000,000	2%	150,000,000
3	303	21	Program pengembangan perikanan tangkap	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	303	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	306		PERDAGANGAN								
3	306	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	306	16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	306	17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan jumlah produk ekspor dan Impor	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999

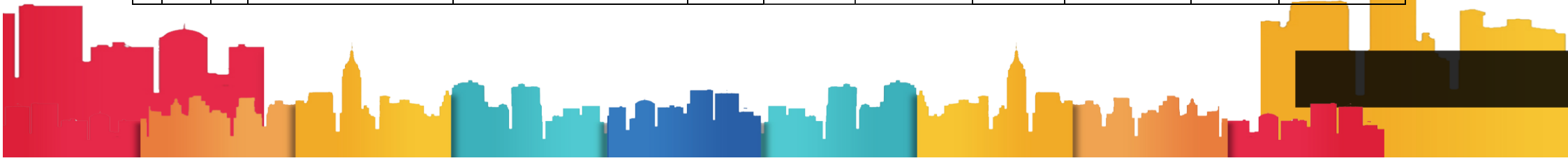
3	306	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan efisiensi mekanisme perdagangan daerah	0%	5%	500,000,000	4%	250,000,000	4%	250,000,000
3	306	19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Prosentase Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Dapat Terlaksana	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	307		PERINDUSTRIAN								
3	307	15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
3	307	16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin	560%	1%	150,000,000	1%	150,000,000	1%	150,000,000
3	307	17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase Meningkatkan Kemampuan Pengusaha Dalam Mengelola Usahanya, Meningkatkan Standar Produk dan Daya Saing Produk IKM	0%	1%	290,000,000	1%	290,000,000	1%	300,000,000
3	307	18	Program penataan struktur industri	Cakupan Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
3	307	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase Sentra Industri Potensial Difasilitasi	0%	0%	75,000,000	1%	75,000,000	1%	75,000,000
3	308		TRANSMIGRASI								
3	308	15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Presentase Transmigran yang sukses	0%	1%	100,000,000	1%	100,000,000	1%	100,000,000
3	308	16	Program Transmigrasi lokal	Prosentase kualitas kepesertaan, ketrampilan dan produktivitas transmigrasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999



3	308	17	Program transmigrasi regional	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan lain propinsi sebanyak 10ali.	0	0	50,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
4			URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG								
4	403		PERENCANAAN								
4	403	15	Program pengembangan data/informasi	Persentase antara ketersediaan data terhadap kebutuhan data	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	403	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase rencana kerjasama pembangunan yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	403	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
4	403	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	403	19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
4	403	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase SDM perencana pembangunan yang mampu menyusun dokumen rencana pembangunan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	403	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program SKPD yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan	0%	0%	13,310,000	0%	14,641,000	0%	16,105,100
4	403	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan	0%	1%	50,000,000	1%	50,000,000	1%	50,000,000
4	403	23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rencana sosial dan budaya yang diimplementasikan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999

4	403	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	403	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	-	0	0	99,999,999	0	99,999,999	0	99,999,999
4	403	27	Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang diimplementasikan	0%	0%	0	0%	0	0%	0
4	401		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4	401	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	0%	0%	0	0%	0	0%	0
4	401	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	401	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	173%	10%	240,000,000	10%	260,000,000	10%	280,000,000
4	401	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	401	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase peningkatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah	0%	0%	285,000,000	1%	310,000,000	1%	335,000,000
4	401	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase antar Pemerintah Daerah yang Mencapai Sasaran	0%	20%	681,580,000	20%	681,580,000	20%	681,580,000
4	401	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang ditetapkan	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999

4	401	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Meningkatnya percepatan pencapaian pemekaran wilayah	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	401	29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Prosentase Meningkatnya kualitas pengamalan ajaran agama	0%	1%	365,500,000	1%	370,300,000	1%	376,650,000
4	401	30	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan	Prosentase meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama	0%	1%	1,986,400,000	1%	1,986,400,000	1%	1,986,400,000
4	401	31	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Presentase Penataan Kelembagaan menurut urusan Pemerintahan di Kota Mojokerto	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	401	32	Program Pencegahan Korupsi	Menurunnya indeks Persepsi Korupsi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	401	33	Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian	Persentase Sarana Perekonomian yang dibina dan dikembangkan	0%	2%	84,000,000	2%	100,800,000	2%	120,960,000
4	401	35	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Persentase Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Kecamatan	0%	93%	99,999,999	96%	99,999,999	97%	99,999,999
4	401	36	Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi ketentuan di bidang cukai	0	0	0	0	0	0	0
4	401	37	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Menurunnya temuan barang kena cukai ilegal di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
4	401	38	Program Kelembagaan	Prosentase SKPD yang tepat ukuran	0%	0%	0	90%	835,893,000	100%	919,482,300
4	401	39	Program Ketatalaksanaan	Persentase SKPD pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan nilai baik	0%	0%	0	37%	1,183,002,350	37%	1,301,302,585
4	401	40	Program Akuntabilitas Kinerja	Persentase LKJIP yang tepat waktu dan sesuai aturan	0%	0%	0	90%	934,196,500	90%	1,027,616,150



4	401	41	Program optimalisasi kehumasan dan keprotokolan	-	0%	0%	0	0%	0	0%	0
4	402		PENGAWASAN								
4	402	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan yang Ditingkatkan dan Dikembangkan	0%	20%	200,000,000	20%	200,000,000	20%	200,000,000
4	402	22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Pengawasan yang Menggunakan SOP dan Sistem Pengawasan	0%	9%	175,000,000	9%	175,000,000	9%	200,000,000
4	402	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	404		KEUANGAN								
4	404	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	0%	100%	999,999	100%	999,999	100%	999,999
4	404	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi	1%	89%	999,999	100%	999,999	100%	999,999
4	405		KEPEGAWAIAN								
4	406		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
4	407		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								



4	407	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	0	30	350,000,000	0	99,999,999	0	99,999,999
				Persentase pengaduan masyarakat yang masuk dan sudah ditindaklanjuti	0			35 ?	355,000,000	40	360,000,000
4	407	28	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Prosentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintah yang Modern	0%	1%	26,620,000	1%	29,282,000	1%	32,210,200
4	407	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik yang diawasi	0%	0%	99,999,999	0%	99,999,999	0%	99,999,999
4	407	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi								



BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Bab VIII, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Mojokerto diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kota Mojokerto. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. 1 Indikator Kinerja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk Miskin	%	6,15	6,16	6,14	6,03	5,91	5,84
2	Indeks Gini	Indeks	0,24	0,36	0,33	0,21	0,26	0,18
3	PDRB Per Kapita	Rp	36.200.636	38.830.000	42.580.000	41.596.108	44.596.108	45.979.150
4	Angka Melek Huruf	%	79,35	98,00	98,50	99,00	99,00	100,00
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	97,86	5,74	5,77	6,04 - 6,12	5,49	5,68
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,99	4,88	3,48	3,35	1,71	0,94



Tabel 9. 2 Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (Impact) Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Misi I							
1,1	Rata-rata nilai UN SD/MI	83.6	85.9	82,50	79,10	75,90	72,30	72,30
	Rata-rata nilai UN SMP/MTs.	67,21	66,02	58,40	52,78	46,60	39,54	39,54
1,2	Angka rata-rata lama sekolah	9.56	9.76	9.96	10.16	10.36	10.56	10.56
1,3	Angka Harapan Lama Sekolah	12,37	13,33	13,80	14,27	14,74	15,21	15,21
1,4	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	92.67	92.67	90.72	87.46	74.02	72.74	72.74
1,5	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	12.00	12.00	11.79	11.56	11.34	11.21	11.21
1,6	Prevalensi balita gizi buruk	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,85	0,85
1,7	Angka Harapan Hidup	72,37	72,69	72,78	72,87	72,96	73,14	73,14
2	Misi II							
2,1	Kontribusi PDRB Pertanian dan perikanan	2.07	3.00	1.97	2.24	2.51	2.57	2.57
2,2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	6.08	6.06	6.41	6.88	7.56	7.83	7.83
2,3	Kontribusi PDRB Penyediaan akomodasi dan makan	6.28	6.88	6.48	6.72	6.96	7.20	7.20
2,4	Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	7.53	7.53	7.54	7.38	7.08	6.92	6.92
2,5	Laju Pertumbuhan Penduduk	18	18	18	22	25	32	32
2,6	Angka Kemiskinan	2,57	1,54	0,85	0,6	0,6	0,27	0,27
2,7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.78	6.28	6.16	6.03	5.91	5.78	5.78
2,8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	4.88	4.88	3.37	3.35	3.32	3.3	3.3
2,9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	93.49	93.49	93.71	93.93	94.15	94.37	94.37
3	Misi III							
3,1	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	64	41.63	43	45	60	64	64
3,2	Persentase rumah sehat	87.12	89.49	90.52	92.04	93.56	95.08	95.08
3,3	Cakupan air limbah	89,87	90,45	93,81	95,87	97,82	98,81	98,81
3,4	Cakupan persampahan	85,57	87	89,3	92,87	95,59	98,53	98,53
3,5	Cakupan drainase	70,47	74	78	82	83,33	85,37	85,37
4	Misi IV							
4,1	Persentase menurunnya pelanggaran KAMTIBMAS	9	8	8	7	7	6	6

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
4,2	Persentase menurunnya pelanggaran PERDA (%)	20,29	21,39	20,17	19,06	17,76	15,71	15,71
4,3	Kota Layak Anak	0	0	0	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
4,4	Angka Kecelakaan Lalulintas	120	120	120	120	95	90	90
4,5	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (%)	4.33	4.33	5.29	6.91	7.07	7.36	7.36
4,6	Indeks Kualitas Udara	45	50	48	46	44	42	42
4,7	Indeks Kualitas Air	47	50	40	30	20	10	10
4,8	ADIPURA	Kirana	Kirana	Kirana	Kirana	Kirana	Paripurna	Paripurna
5	Misi V							
5,1	Opini BPK atas laporan keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5,2	Nilai SAKIP	C	CC	B	BB	BB	A	A
5,3	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	76.57	78.32	79	79.68	80.36	81.04	81.04



BAB 10

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Timur, serta mengacu pada RPJPD Kota Mojokerto dan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. Dokumen RPJMD Kota Mojokerto ini setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD) yang kemudian setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) PD.

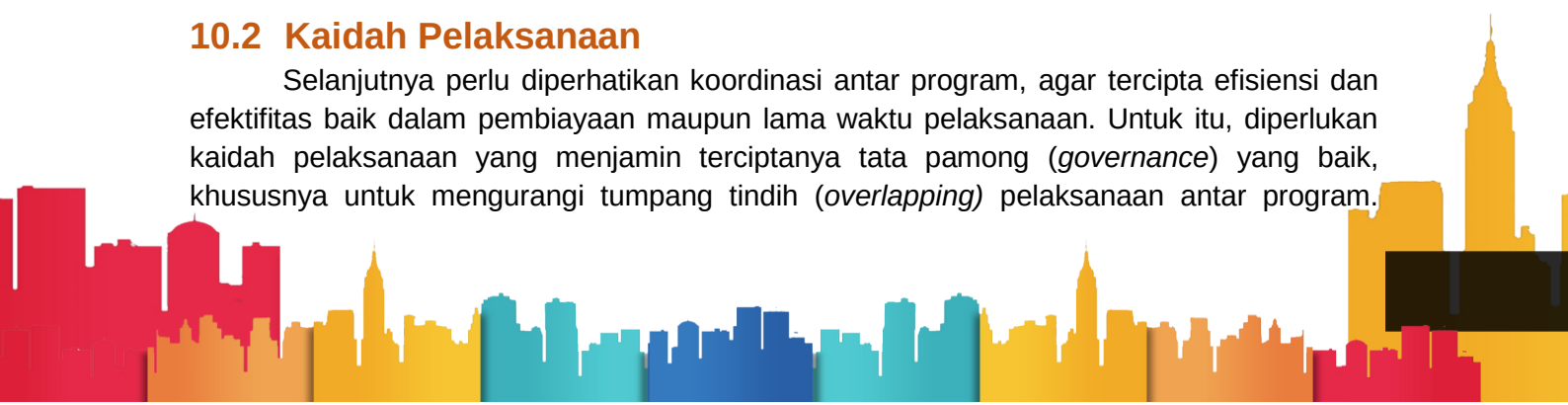
RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto dengan dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada stakeholders baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep. Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (*stakeholders*) dan masukan masyarakat diterjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan *stakeholders* tersebut. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (*safe guarding*) dari mereka. Dengan demikian, *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan

10.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih. Implementasi program transisi tersebut memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas mengingat program seperti itu memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program.



Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun selama periode Tahun 2014–2019 merupakan penerjemahan visi dan misi Walikota terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan Perdanya, maka Perangkat Daerah Kota Mojokerto berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2019. Satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJMD maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta. Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun dokumen Renstra PD. Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) dan mengacu pada RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Oleh karena itu PD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra PD.
2. RPJM Daerah Kota Mojokerto akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan implementasinya berdasarkan penjabaran visi dan misi, kemudian ditransformasikan ke dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang pada masing-masing PD sepanjang ada kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur.
3. Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.
4. Perangkat Daerah (PD), masyarakat dan Dunia Usaha wajib turut serta dalam melaksanakan program – program dalam RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dengan sebaik – baiknya.
5. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi program dan wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas
6. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (outcomes) program pembangunan.
7. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan kepemimpinan daerah, Walikota Terpilih Tahun 2019 melaksanakan program-program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Walikota pada periode sebelumnya.



Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

10.3 Penutup

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator–indikator sasaran yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan–pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber–sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS



RPJMD Kota Mojokerto

Tahun 2014-2019